

Kabupaten
Kutai Kartanegara

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. P. Diponegoro No. 34 Telp (0541) 661036 Fax (0541) 661787 Kode Pos 75514
email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini.

Tenggarong, 31 Maret 2026
PI. Inspektur Daerah,

DR. H. Sanggono, M.M
NIP. 1967100401987011001



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengemban amanat penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dinamika pasca pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2025 menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ, ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta mendukung *Asta Cita* Presiden dan Wakil Presiden terpilih sekaligus menjadi dasar perubahan APBD tahun anggaran 2025.

LPPD ini memuat capaian kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada arah pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dengan mengusung tema ***“Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”***.

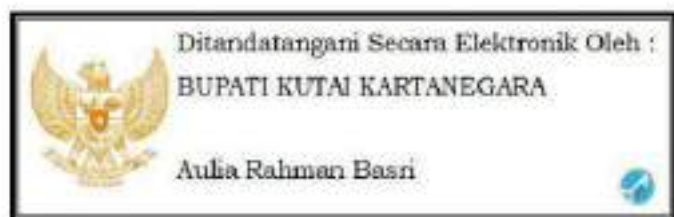
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 12 Februari 2026 Nomor: 100.2.7/989/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. latar belakang	I-1
1.1. Penjelasan Umum	I-1
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-15
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-46
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-9
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	II-9
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-21
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-23
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-1
BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV-1
4.1. Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2. Target Pencapaian	IV-1
4.1.3. Realisasi.....	IV-3
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV-5
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV-13
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV-14
4.2. Urusan Kesehatan	IV-15
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-15
4.2.2. Target Pencapaian	IV-16
4.2.3. Realisasi.....	IV-26
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV-43
4.2.5. Dukungan Personil	IV-44
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV-46
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-47
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-47

4.3.2	Target Pencapaian	IV-47
4.3.3	Realisasi.....	IV-50
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-53
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-54
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-55
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-55
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-55
4.4.2	Target Pencapaian	IV-56
4.4.3	Realisasi.....	IV-58
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-62
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-64
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-64
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-65
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-65
4.5.2	Target Pencapaian	IV-66
4.5.3	Realisasi.....	IV-80
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-90
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-94
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-96
4.6	Urusan Sosial.....	IV-96
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-96
4.6.2	Target Pencapaian	IV-97
4.6.3	Realisasi.....	IV-107
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-119
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-120
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-121
4.7	Program Kegiatan dan Kegiatan.....	IV-123

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN	I-3
Tabel I-2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I-4
Tabel I-3 Jumlah Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	I-5
Tabel I-4 Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I-6
Tabel I-5 Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I-9
Tabel I-6 Jumlah PPPK - PW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	I-12
Tabel I-7 Realiasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	I-13
Tabel I-8 Realiasi Belanja Daerah tahun 2025	I-14
Tabel I-9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	I-15
Tabel I-10 Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.....	I-19
Tabel I-11 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.....	I-21
Tabel I-12 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I-42
Tabel I-13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Visi, Misi dan Program KDH Terpilih	I-45
Tabel I-14 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara.....	I-47
Tabel I-15 Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penerapan Standar Pelayanan MinimalI-47	
Tabel I-16 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025	I-50
Tabel I-17 Alokasi Anggaran Penunjang Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	I-86
Tabel II-1 Capaian Indikator Kinerja Makro	II-1
Tabel II-2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025	II-2
Tabel II-3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025.....	II-2
Tabel II-4 Capaian Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025	II-3
Tabel II-5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025	II-4
Tabel II-6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara	II-4
Tabel II-7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (Persen) 2024-2025.....	II-4
Tabel II-8 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) 2024-2025.....	II-6
Tabel II-9 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) 2024-2025	II-6
Tabel II-10 Capaian ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025.....	II-8
Tabel II-11 Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2025.....	II-8
Tabel II-12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	II-9
Tabel II-13 Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-21
Tabel II-14 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	II-24
Tabel II-15 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-26
Tabel II-16 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	II-26
Tabel II-17 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	II-28
Tabel II-18 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-30
Tabel II-19 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-30
Tabel II-20 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.....	II-31
Tabel II-21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	II-34
Tabel II-22 Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 RPJMD 2021-2026.....	II-38
Tabel II-23 Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029	II-40

Tabel II-24 Gambaran Awal Capaian Indikator RPJMD 2025-2029	II-42
Tabel II-25 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	II-49
Tabel II-26 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-51
Tabel II-27 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025	II-54
Tabel II-28 Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-54
Tabel II-29 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD	II-55
Tabel II-30 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025	II-55
Tabel II-31 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025	II-58
Tabel II-32 Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025	II-63
Tabel II-33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD	II-64
Tabel II-34 Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025	II-64
Tabel II-35 Capaian Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-67
Tabel II-36 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2025	II-69
Tabel II-37 Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	II-71
Tabel II-38 Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2025	II-72
Tabel II-39 Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-73
Tabel II-40 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	II-73
Tabel II-41 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2025	II-73
Tabel II-42 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2025	II-76
Tabel II-43 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	II-94
Tabel II-44 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025	II-94
Tabel II-45 Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2025	II-97
Tabel II-46 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2025	II-97
Tabel II-47 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	II-99
Tabel II-48 Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2025	II-99
Tabel II-49 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024	II-101
Tabel II-50 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD	II-103
Tabel II-51 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025	II-103
Tabel II-52 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-109
Tabel II-53 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD	II-112
Tabel II-54 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025	II-112
Tabel II-55 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2025	II-114
Tabel II-56 Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025	II-116
Tabel II-57 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD	II-120
Tabel II-58 Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2025	II-120
Tabel II-59 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2025	II-122
Tabel II-60 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD	II-124
Tabel II-61 Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2025	II-124
Tabel II-62 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024	II-126
Tabel II-63 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD	II-129
Tabel II-64 Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2025	II-130
Tabel II-65 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024	II-131
Tabel II-66 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD	II-133
Tabel II-67 Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2025	II-134
Tabel II-68 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD	II-137
Tabel II-69 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025	II-137
Tabel II-70 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2025	II-139

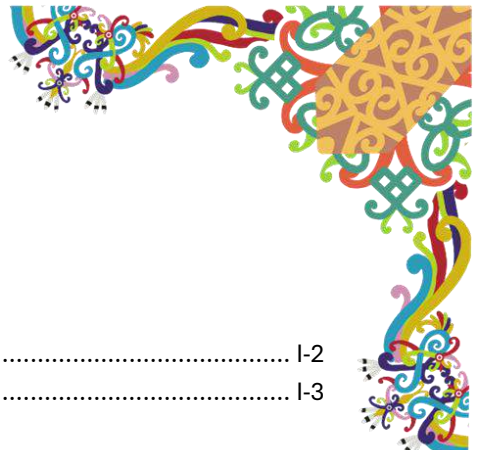
Tabel II-71 Jumlah Pelanggan Terpasang Perumda Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara per bulan September 2025.....	II-140
Tabel II-72 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non RBPK Tahun 2025	II-149
Tabel II-73 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	II-149
Tabel II-74 Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2025	II-150
Tabel II-75 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2025	II-151
Tabel II-76 Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat	II-152
Tabel II-77 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	II-155
Tabel II-78 Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2025	II-156
Tabel II-79 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2025	II-157
Tabel II-80 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD	II-161
Tabel II-81 Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2025	II-161
Tabel II-82 Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu	II-164
Tabel II-83 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2025	II-165
Tabel II-84 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD	II-167
Tabel II-85 Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2025	II-167
Tabel IV-1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-2
Tabel IV-2 Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	IV-3
Tabel IV-3 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini	IV-4
Tabel IV-4 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini	IV-4
Tabel IV-5 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar	IV-4
Tabel IV-6 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar	IV-4
Tabel IV-7 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan	IV-5
Tabel IV-8 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan	IV-5
Tabel IV-9 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-6
Tabel IV-10 Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-13
Tabel IV-11 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	IV-16
Tabel IV-12 Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	IV-26
Tabel IV-13 Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	IV-27
Tabel IV-14 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	IV-28
Tabel IV-15 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	IV-29
Tabel IV-16 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	IV-29
Tabel IV-17 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	IV-30
Tabel IV-18 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	IV-30
Tabel IV-19 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita	IV-31
Tabel IV-20 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita	IV-31
Tabel IV-21 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan.....	IV-32
Tabel IV-22 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	IV-33
Tabel IV-23 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.....	IV-34
Tabel IV-24 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	IV-35
Tabel IV-25 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	IV-36
Tabel IV-26 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.....	IV-36
Tabel IV-27 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita	IV-37
Tabel IV-28 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	IV-37
Tabel IV-29Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	IV-38
Tabel IV-30 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	IV-38
Tabel IV-31 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	IV-39
Tabel IV-32 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	IV-40
Tabel IV-33 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	IV-41
Tabel IV-34 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis.....	IV-41

Tabel IV-35 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	IV-42
Tabel IV-36 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	IV-42
Tabel IV-37 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	IV-43
Tabel IV-38 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-48
Tabel IV-39 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-50
Tabel IV-40 Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air	IV-51
Tabel IV-41 Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok.....	IV-51
Tabel IV-42 Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	IV-52
Tabel IV-43 Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	IV-52
Tabel IV-44 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-53
Tabel IV-45 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-56
Tabel IV-46 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-58
Tabel IV-47 Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-59
Tabel IV-48 Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-60
Tabel IV-49 Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IV-61
Tabel IV-50 Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IV-61
Tabel IV-51 Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-62
Tabel IV-52 Dukungan Personil Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-64
Tabel IV-53 Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .	IV-67
Tabel IV-54 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-80
Tabel IV-55 Capaian Penerima Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	IV-81
Tabel IV-56 Capaian Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	IV-81
Tabel IV-57 Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana	IV-82
Tabel IV-58 Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	IV-82
Tabel IV-59 Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	IV-84
Tabel IV-60 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	IV-84
Tabel IV-61 Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	IV-88
Tabel IV-62 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	IV-88
Tabel IV-63 Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	IV-90
Tabel IV-64 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	IV-90
Tabel IV-65 Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-91
Tabel IV-66 Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	IV-95
Tabel IV-67 Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah	IV-95
Tabel IV-68 Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Kebencanaan	IV-95
Tabel IV-69 Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran	IV-96
Tabel IV-70 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial	IV-98
Tabel IV-71 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial	IV-108
Tabel IV-72 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	IV-108
Tabel IV-73 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	IV-109
Tabel IV-74 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	IV-111

Tabel IV-75 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	IV-111
Tabel IV-76 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	IV-113
Tabel IV-77 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	IV-113
Tabel IV-78 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	IV-115
Tabel IV-79 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.....	IV-115
Tabel IV-80 Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	IV-117
Tabel IV-81 Capaian Mutu Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	IV-118
Tabel IV-82 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Sosial.....	IV-119
Tabel IV-83 Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial	IV-121

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025	II-2
Grafik II-2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025.....	II-5
Grafik II-3 PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2025	II-7
Grafik II-4 Predikat SAKIP	II-54
Grafik II-5 IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025	II-60
Grafik II-6 Detil Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025	II-62
Grafik II-7 Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025	II-63
Grafik II-8 Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023	II-66
Grafik II-9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025	II-77
Grafik II-10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025.....	II-78
Grafik II-11 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025 .	II-79
Grafik II-12 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025	II-82
Grafik II-13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025	II-83
Grafik II-14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025	II-84
Grafik II-15 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025	II-85
Grafik II-16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025	II-86
Grafik II-17 Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	II-92
Grafik II-18 IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025	II-93
Grafik II-19 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara 2010-2025.....	II-98
Grafik II-20 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025.....	II-99
Grafik II-21 Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartaengara Tahun 2010-2024	II-102
Grafik II-22 Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024	II-106
Grafik II-23 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	II-106
Grafik II-24 Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025	II-110
Grafik II-25 Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2005-2025	II-117
Grafik II-26 Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025	II-118
Grafik II-27 PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2025	II-119
Grafik II-28 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025.....	II-123
Grafik II-29 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024.....	II-127
Grafik II-30 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024.....	II-128
Grafik II-31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024.....	II-129
Grafik II-32 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	II-132
Grafik II-33 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025.....	II-135
Grafik II-34 Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024	II-148
Grafik II-35 Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025	II-153
Grafik II-36 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025	II-155
Grafik II-37 Panjang dan Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025	II-155
Grafik II-38 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2025	II-160
Grafik II-39 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2025	II-166



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara.....	I-2
Gambar I-2 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN.....	I-3



BAB I

PENDAHULUAN

1. latar belakang

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115° 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117° 41'4" Bujur Timur dan 1° 31'52" Lintang Utara sampai dengan 1° 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km².

Gambar I-1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

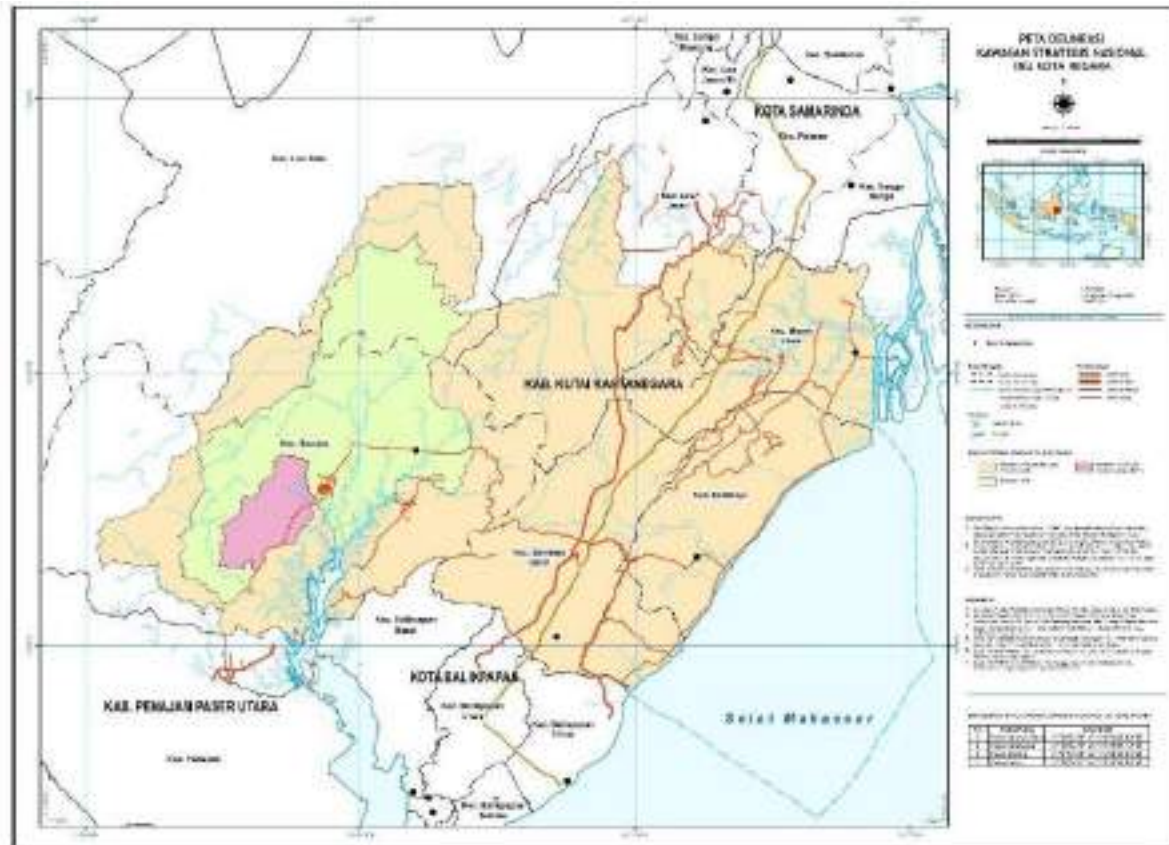


Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Nusantara memiliki wilayah daratan seluas ± 252.660 ha dan wilayah lautan ± 69.769 ha yang dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

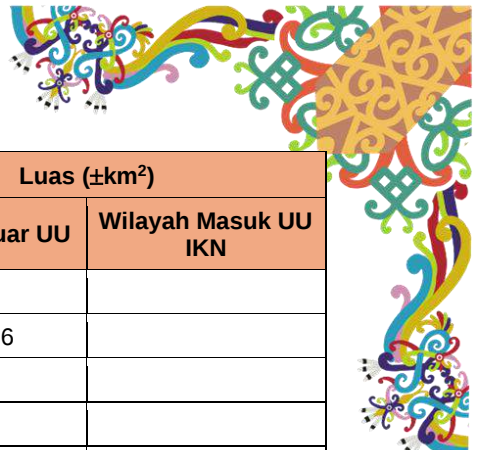
Gambar I-2 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN



Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai berikut:

Tabel I-1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN

No	Kecamatan	Kawasan	Luas ($\pm km^2$)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
1	Tabang	Daratan	8.107	
2	Kembang Janggut	Daratan	2.195	
3	Kenohan	Daratan	1.309	



No	Kecamatan	Kawasan	Luas (±km ²)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
4	Muara Muntai	Daratan	947	
5	Muara Wis	Daratan	1.305,16	
6	Kota Bangun	Daratan	440	
7	Kota Bangun Darat	Daratan	460	
8	Muara Kaman	Daratan	4.235	
9	Sebulu	Daratan	600	
10	Tenggarong Seberang	Daratan	657	
11	Tenggarong	Daratan	358	
12	Marang Kayu	Daratan	864	
13	Muara Badak	Daratan	739	
14	Anggana	Daratan	1.017,39	
15	Loa Kulu	Daratan	1.365	250
16	Loa Janan	Daratan	321	378
17	Sanga-Sanga	Daratan	101,28	1
18	Muara Jawa	Daratan	222,80	297
19	Samboja	Daratan	-	281,66
20	Samboja Darat	Daratan	-	416,61
			25.290	1.625

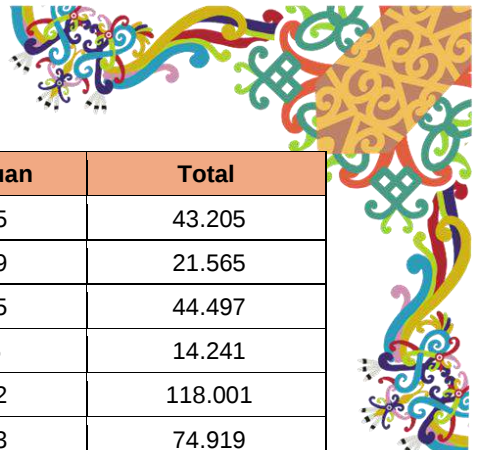
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2025

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2025 sebesar 817.340 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel I-2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Total
1	ANGGANA	21.092	19.295	40.387
2	KEMBANG JANGGUT	15.366	13.723	29.089
3	KENOHAN	6.782	5.966	12.748
4	KOTA BANGUN	12.606	12.036	24.642
5	LOA JANAN	41.473	37.376	78.849
6	LOA KULU	30.261	27.950	58.211
7	MARANGKAYU	15.757	14.645	30.402
8	MUARA BADAK	27.495	25.398	52.893
9	MUARA JAWA	23.698	21.926	45.624
10	MUARA KAMAN	25.652	22.632	48.284
11	MUARA MUNTAI	11.303	10.389	21.692
12	MUARA WIS	5.386	4.704	10.090



No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Total
13	SAMBOJA	22.450	20.755	43.205
14	SANGA-SANGA	11.096	10.469	21.565
15	SEBULU	23.442	21.055	44.497
16	TABANG	7.676	6.565	14.241
17	TENGGARONG	60.389	57.612	118.001
18	TENGGARONG SEBERANG	38.806	36.113	74.919
19	KOTA BANGUN DARAT	7.791	7.211	15.002
20	SAMBOJA BARAT	17.407	15.592	32.999
Jumlah Penduduk		425.928	391.412	817.340

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan, berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan, luas wilayah daratan dan luas wilayah laut.

Tabel I-3 Jumlah Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Muara Muntai	947,29	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-
3	Loa Janan	698,99	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63
5	Muara Badak	739,18	279,35
6	Tenggarong	358,19	-
7	Sebulu	599,71	-
8	Kota Bangun	440,40	-
9	Kenohan	1.308,67	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-
11	Muara Kaman	4.235,38	-
12	Tabang	8.105,59	-
13	Samboja	281,66	216,31
14	Muara Jawa	519,80	166,59
15	Sanga – Sanga	102,28	3,15
16	Tenggarong Seberang	656,76	-
17	Marang Kayu	864,19	145,50
18	Muara Wis	1.305,16	7
19	Kota Bangun Darat	459,89	10
20	Samboja Darat	416,61	1
Jumlah Penduduk		26.867,51	1.868,36

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar 2025

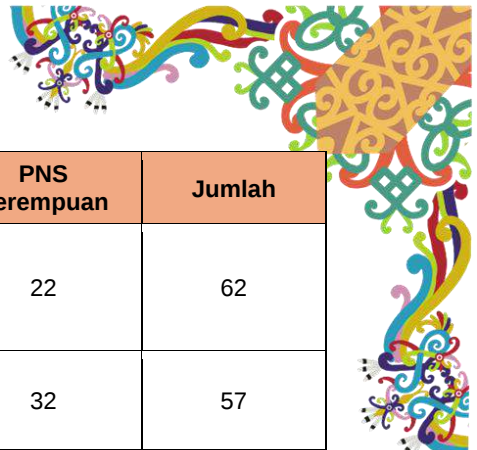
e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berjumlah sebanyak 56 OPD dan 3 Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan.

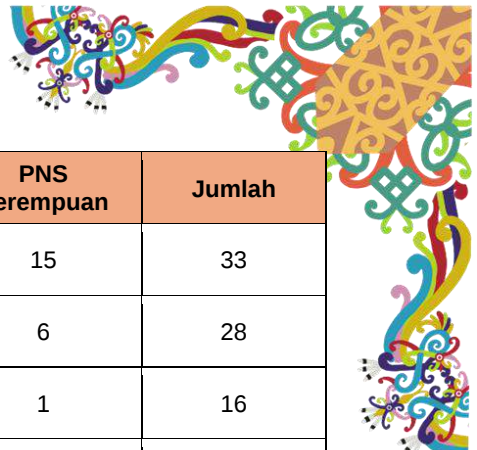
Jumlah pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 terdiri PNS sebanyak 10.403 orang, PPPK sebanyak 8.281 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 480 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-4 Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

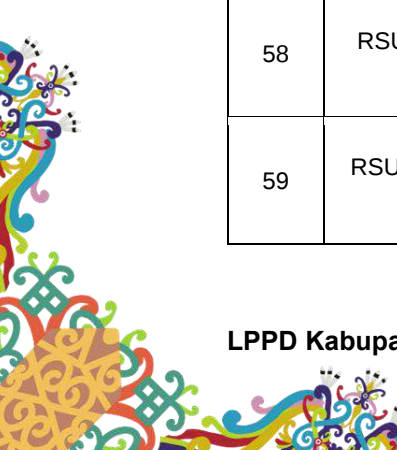
No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki – Laki	PNS Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	305	189	494
2	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	89	67	156
3	Inspektorat	Penunjang	56	37	93
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	52	22	74
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	31	27	58
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	38	13	51
7	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	147	104	251
8	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	93	57	150
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	59	49	108
10	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	49	22	71
11	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	40	40	80
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	60	33	93
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	44	28	72
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	29	61
15	Dinas Kesehatan	Kesehatan	221	537	758
16	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	21	27	48

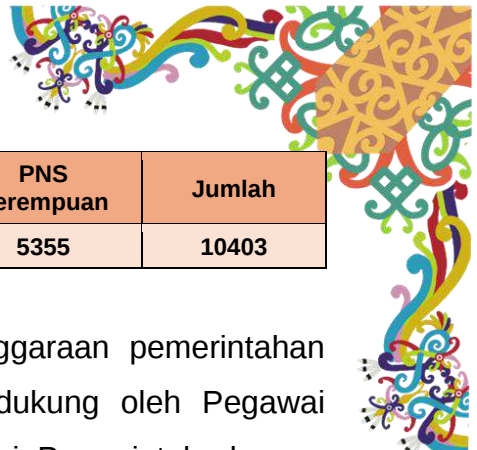


No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki – Laki	PNS Perempuan	Jumlah
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	40	22	62
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	25	32	57
19	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79	30	109
20	Dinas Pariwisata	Pariwisata	84	43	127
21	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	210	107	317
22	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	59	11	70
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	49	45	94
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	24	35
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29	38	67
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1627	2709	4336
27	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	22	22	44
28	Dinas Perhubungan	Perhubungan	83	31	114
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	57	40	97
30	Dinas Perkebunan	Perkebunan	62	45	107
31	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	34	26	60
32	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	162	96	258
33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	71	80	151
34	Dinas Sosial	Sosial	46	17	63
35	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	31	23	54
36	Satuan Polisi pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	119	9	128



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki – Laki	PNS Perempuan	Jumlah
37	Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	18	15	33
38	Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	22	6	28
39	Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	15	1	16
40	Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	18	4	22
41	Kecamatan Kotabangun Darat	Urusan Kewilayahan	16	-	16
42	Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	14	12	26
43	Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	34	17	51
44	Kecamatan Marang Kayu	Urusan Kewilayahan	8	10	18
45	Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	13	11	24
46	Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	31	39	70
47	Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	49	11	60
48	Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	25	12	37
49	Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	20	8	28
50	Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	42	31	73
51	Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	43	21	64
52	Kecamatan Sanga - Sanga	Urusan Kewilayahan	27	17	44
53	Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	24	8	32
54	Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	29	8	37
55	Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	170	152	322
56	Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	35	13	48
57	RSUD A.M. Parikesit	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	116	163	279
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	32	53	85
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	10	12	22





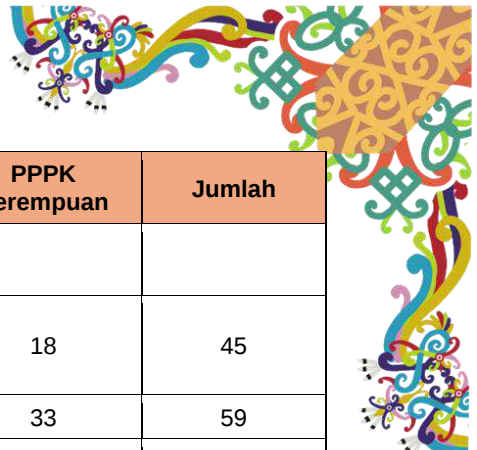
No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki – Laki	PNS Perempuan	Jumlah
Jumlah			5048	5355	10403

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

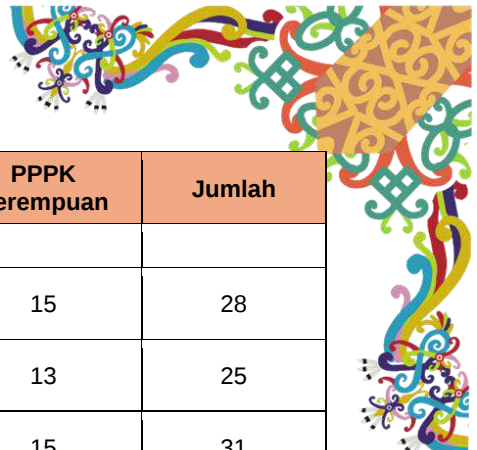
Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja – Paruh Waktu (PPPK - PW) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-5 Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PPPK Laki – Laki	PPPK Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	86	100	186
2	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	48	46	94
3	Inspektorat	Penunjang	16	15	31
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	12	16	28
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	10	12	22
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	15	39	54
7	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	18	33	51
8	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	3	12	15
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	13	16	29
10	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	19	13	32
11	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	20	19	39
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	21	32	53
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	14	43	57
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	17	35
15	Dinas Kesehatan	Kesehatan	839	227	1066
16	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	11	6	17
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	8	13	21
18	Dinas Koperasi Dan Usaha	Koperasi Dan	12	16	28



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PPPK Laki – Laki	PPPK Perempuan	Jumlah
	Kecil Menengah	Usaha Kecil Menengah			
19	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27	18	45
20	Dinas Pariwisata	Pariwisata	26	33	59
21	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	33	45	78
22	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	40	151	191
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26	25	51
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	15	20
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	23	38
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	2123	1072	3195
27	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5	16	21
28	Dinas Perhubungan	Perhubungan	78	119	197
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	17	9	26
30	Dinas Perkebunan	Perkebunan	29	37	66
31	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	17	24	41
32	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	91	106	197
33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	18	22	40
34	Dinas Sosial	Sosial	26	20	46
35	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	11	16	27
36	Satuan Polisi pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	43	172	215
37	Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	13	10	23
38	Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	5	10	15
39	Kecamatan Kenohan	Urusan	6	14	20

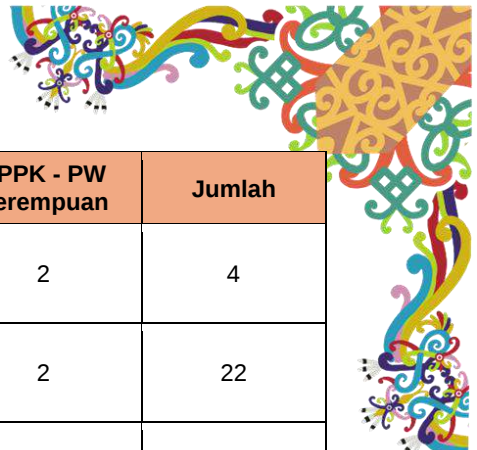


No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PPPK Laki – Laki	PPPK Perempuan	Jumlah
		Kewilayahan			
40	Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	13	15	28
41	Kecamatan Kotabangun Darat	Urusan Kewilayahan	12	13	25
42	Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	16	15	31
43	Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	12	17	29
44	Kecamatan Marang Kayu	Urusan Kewilayahan	15	12	27
45	Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	8	6	14
46	Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	55	30	85
47	Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	9	20	29
48	Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	6	13	19
49	Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	8	14	22
50	Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	74	65	139
51	Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	19	28	47
52	Kecamatan Sanga - Sanga	Urusan Kewilayahan	28	20	48
53	Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	6	7	13
54	Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	10	4	14
55	Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	54	64	118
56	Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	9	2	11
57	RSUD A.M. Parikesit	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	140	80	220
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	339	209	548
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	197	148	345
Jumlah			4867	3414	8281

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Tabel I-6 Jumlah PPPK - PW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PPPK - PW Laki – Laki	PPPK - PW Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	2	2	4
2	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	1	-	1
3	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	2	-	2
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	-	1	1
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	3		3
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	3	1	4
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	2	-	2
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	1
9	Dinas Kesehatan	Kesehatan	25	76	101
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3	-	3
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1	1
12	Dinas Pariwisata	Pariwisata	1	1	2
13	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	6	2	8
14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	66	68	134
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	4	-	4
16	Dinas Perhubungan	Perhubungan	15	7	22
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	1	2	3
18	Dinas Perkebunan	Perkebunan	3		3
19	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	1		1
20	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	8	6	14
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	1	1	2
22	Dinas Sosial	Sosial	3		3



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PPPK - PW Laki – Laki	PPPK - PW Perempuan	Jumlah
23	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	2	4
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	20	2	22
25	Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	1	-	1
26	Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	4	1	5
27	Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	-	1	1
28	Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	1	1	2
29	Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	-	1	1
30	Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	-	1	1
31	Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	1	-	1
32	Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	12	1	13
33	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	7	27	34
34	RSUD Aji Muhammad Parikesit	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	18	40	58
35	RSUD Dayaku Raja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	5	13	18
Jumlah			221	259	480

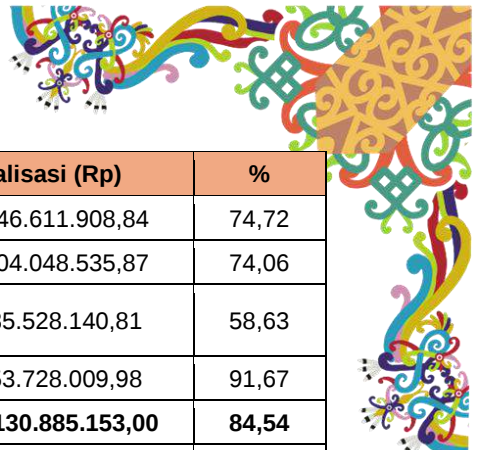
Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 9.215.708.404.382,50 atau 82,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.185.094.966.627,53 secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel I-7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	953.088.447.204,00	711.489.916.595,50	74,65



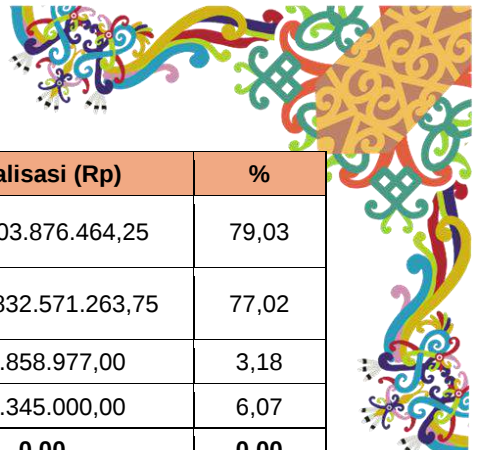
No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pajak Daerah	364.451.980.000,00	272.346.611.908,84	74,72
	Retribusi Daerah	487.820.481.700,00	361.304.048.535,87	74,06
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.145.888.234,00	25.885.528.140,81	58,63
	Lain-lain PAD yang Sah	56.670.097.270,00	51.953.728.009,98	91,67
2	Pendapatan Transfer	10.003.888.862.351,20	8.458.130.885.153,00	84,54
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.304.729.982.882,20	7.838.229.730.901,00	84,17
	Dana Perimbangan	0,00	522.877,00	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.024.264.718.882,20	6.985.019.353.999,00	87,04
	Dana Alokasi Umum (DAU)	617.572.724.000,00	616.617.480.715,00	99,84
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	446.637.360.000,00	54.084.543.696,00	12,10
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	9.088.474.802.882,20	7.655.721.901.287,00	84,23
	Dana Desa	200.570.888.000,00	160.823.537.614,00	80,18
	Intensif Fiskal	15.684.292.000,00	15.684.292.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	216.255.180.000,00	176.507.829.614,00	81,62
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	699.158.879.469,00	625.901.154.252,00	89,52
	Pendapatan Bagi Hasil	631.823.379.469,00	558.565.654.252,00	88,40
	Bantuan Keuangan	67.335.500.000,00	67.335.500.000,00	100,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.117.657.072,33	46.087.602.634,00	20,20
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	228.117.657.072,33	46.087.602.634,00	20,20
	Total	11.185.094.966.627,53	9.215.708.404.382,50	82,39

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2025 Unaudited

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 9.047.119.775.058,15 79,70% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.351.031.387.452,00 Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel I-8 Realiasi Belanja Daerah tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6.662.060.800.660,68	5.222.015.122.274,60	78,38
	Belanja Pegawai	2.517.314.397.869,16	1.983.493.811.461,80	78,79
	Belanja Barang dan Jasa	3.941.322.792.266,52	3.074.368.483.210,80	78,00
	Belanja Subsidi	110.704.000,00	97.812.000,00	88,35
	Belanja Hibah	200.121.806.525,00	160.975.315.602,00	80,43
	Belanja Bantuan Sosial	3.191.100.000,00	3.079.700.000,00	96,50
2	Belanja Modal	3.490.815.747.988,32	2.719.203.420.205,55	77,89
	Belanja Modal Tanah	75.029.397.381,54	43.990.583.745,55	58,63
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.277.998.940,56	504.223.184.755,00	83,44



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.189.696.598.446,44	940.303.876.464,25	79,03
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.596.705.248.215,78	1.229.832.571.263,75	77,02
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.241.035.250,00	739.858.977,00	3,18
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.865.469.754,00	113.345.000,00	6,07
3	Belanja Tidak Terduga	8.860.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	8.860.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	1.189.294.838.803,00	1.105.901.232.578,00	92,98
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab./Kota dan Desa	36.445.198.000,00	36.445.198.000,00	100,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	483.765.600,00	483.765.600,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab./Kota	46.798.282.270,00	3.000.000.000,00	6,41
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab./Kota Kepada Desa	1.105.567.592.933,00	1.065.972.268.978,00	96,41
	Total	11.351.031.387.452,00	9.047.119.775.058,15	79,70

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2025 Unaudited

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebesar Rp. 165.936.420.824,47 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 165.936.420.824,47 Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel I-9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

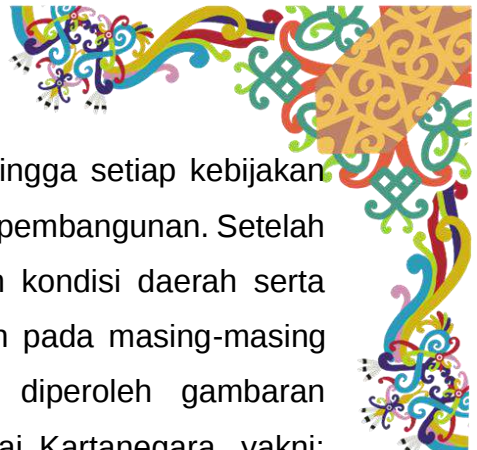
No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2025 Unaudited

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

g. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu



menggambarkan setiap detail kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: “Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
- 4) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
- 5) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 6) Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

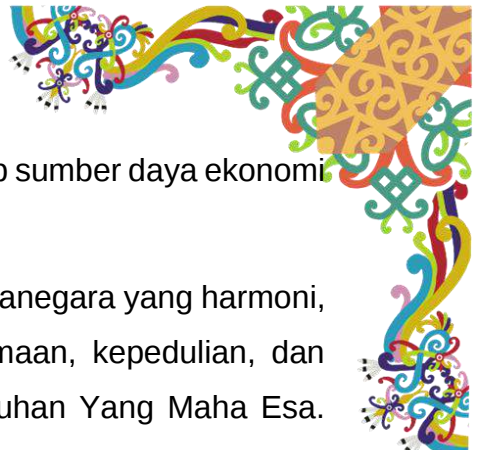
h. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia. Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas ada sebagai berikut:

Masyarakat yang Sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan



mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi, maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

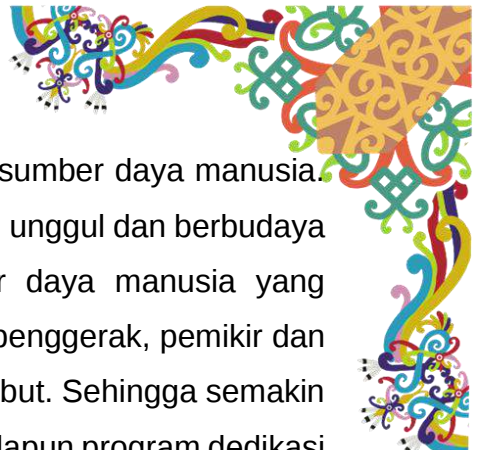
1. Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.



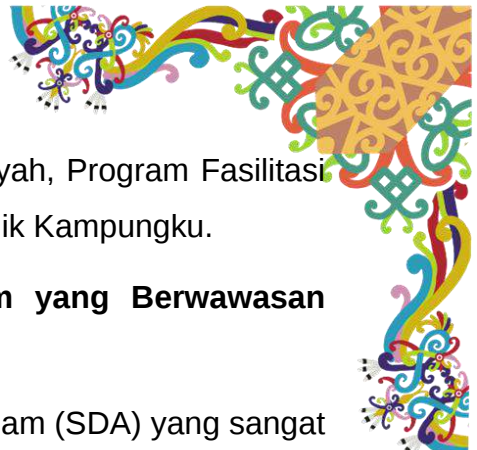
Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi perangkat daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Sehingga semakin berkualitas SDM maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun program dedikasi KUKARIDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial.

Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi



keempat antara lain: Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitas Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku.

Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. serta semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis) Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I-10 Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

Indikator	Kondisi Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,34	75,85	76	76,2	76,59
Angka Kemiskinan	7,35	6,90	6,50	6,45	6,4	6,35
Angka Pengangguran	5,2	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1
Pertumbuhan Ekonomi	1,5	1,06	1,38	1,89	2,4	3
Pendapatan Per kapita	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69
Ketimpangan Pendapatan	0,29	0,290	0,290	0,290	0,290	0,80

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

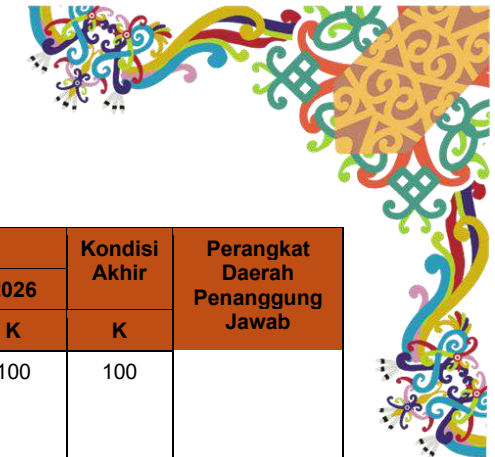
i. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

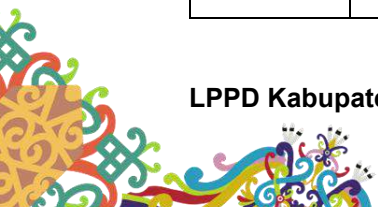
Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan tahun 2025, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

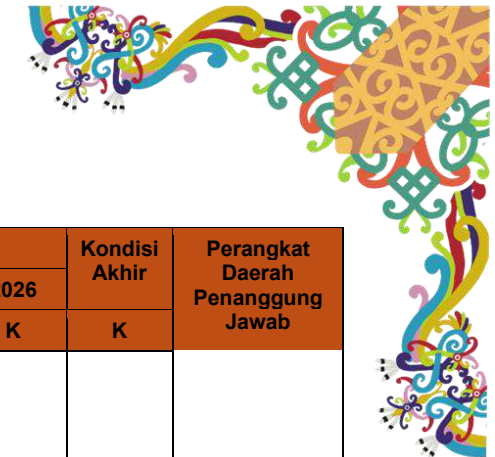
Tabel I-11 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”													
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani													
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien , inovatif, akuntabel, bersih dan melayani				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (60,95)	BB (62,00)	BB (63,00)	BB (64,00)	BB (65,00)	BB (70,02)	BB (70,02)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai Sakip	Nilai	B (65,89)	B (66,89)	BB (70)	BB (73)	BB (77)	A (80,01)	A (80,01)	
Penataan dan Pengembangan n Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	76	77	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87	92	96	98	100	100	
				Persentase nilai Sakip perangkat daerah predikat BB dan A	Persen	50	60	70	80	90	100	100	
		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	

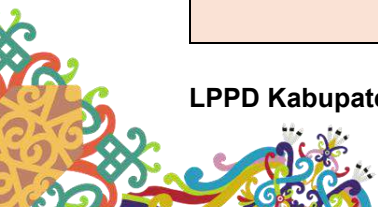


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang Sarana dan Prasarana pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kab.	Persen	91.5	92	93	94	95	96	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	5.93	6,25	6,50	6.75	6.80	7.00	7.00	
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Panganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
			Program Pengelolaan	Tingkat pemenuhan	Persen	75	100	100	100	100	100	100	



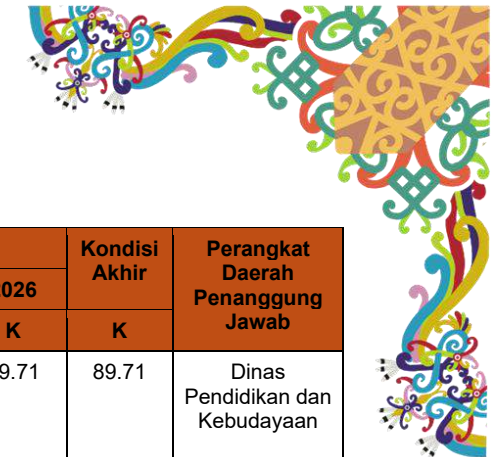


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Barang Milik Daerah	peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016									
				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	96	96	97	97	97	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	65	75	85	100	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8.5	8.85	8.90	8.95	9.00	9.05	9.05	

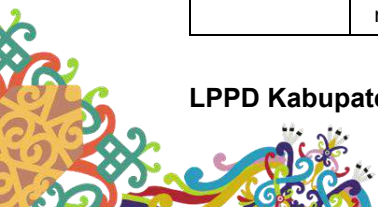


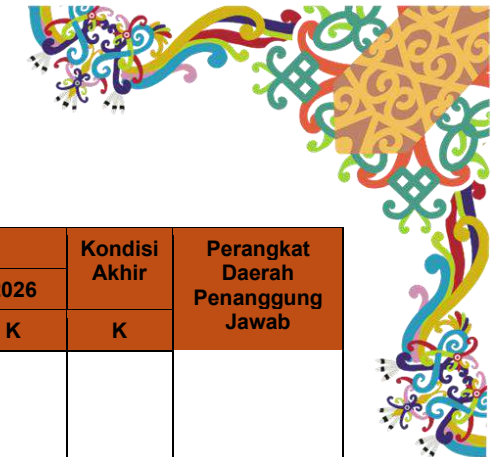


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL	Persen	97.97	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Kepemilikan KIA	Persen	20	50	70	90	99	99	99	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Adminduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi: 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya													
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing				Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	7.59	75.34	75.85	76.00	76.20	76.59	76.59	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan				Indeks Pendidikan	Nilai	0.085	0.693	0.697	0.700	0.704	0.706	0.706	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	50.00	50.00	51.00	51.50	53.00	53.00	

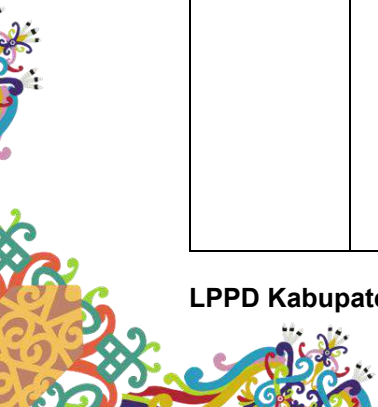


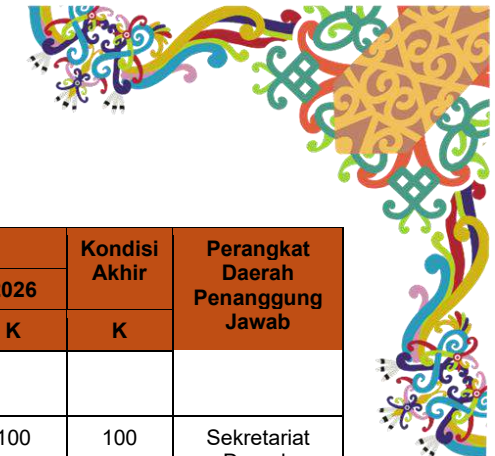
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	72.92	78.72	80.6	82.02	83.02	83.92	83.92	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62.28	64.08	65.98	65.98	68.38	68.38	68.38	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
	Penguatan modal sosial	Urusan Pemerintahan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
				Jumlah Pelaksanaan	Event	2	2	2	2	2	2	2	



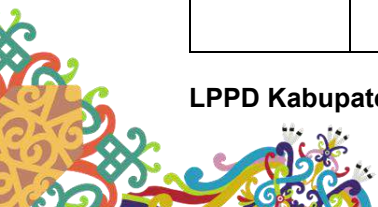


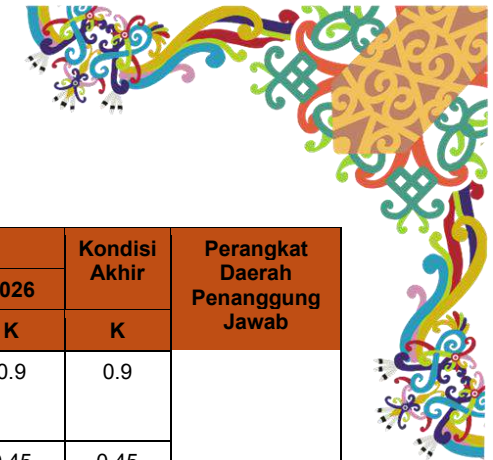
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
	budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara									
				Persentase Desa Budaya Yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Berperan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Penyandang Distabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator Spm)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pmks Yang Memperoleh Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	100	
				Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	



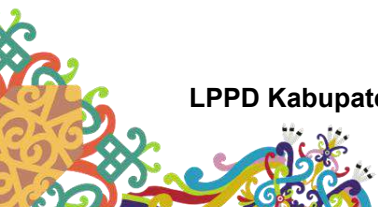


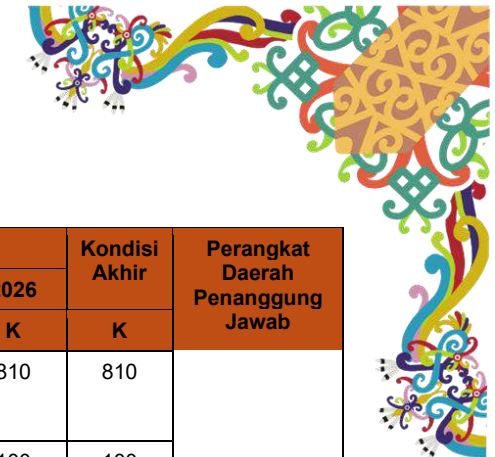
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Miskin Non Potensial									Sekretariat Daerah
		Urusan Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100		
				Persentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100	100	100	100	100		
				Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	100	100	100	100		
				Persentase Kerja sama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80	85	90	90	90	90	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat				Indeks Kesehatan	Nilai	0.805	0,811	0,814	0,817	0.821	0.824	0.824	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentasi Balita Sunting	Persen	16.19	15.6	15.1	14.6	14.1	13.8	13.8	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0.21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	
				Indeks Pelayanan Penyakit Menular	Persen	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.65	
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	0.54	



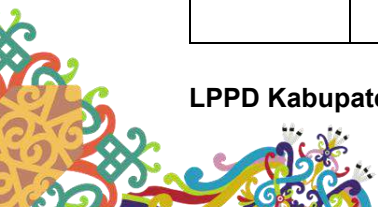


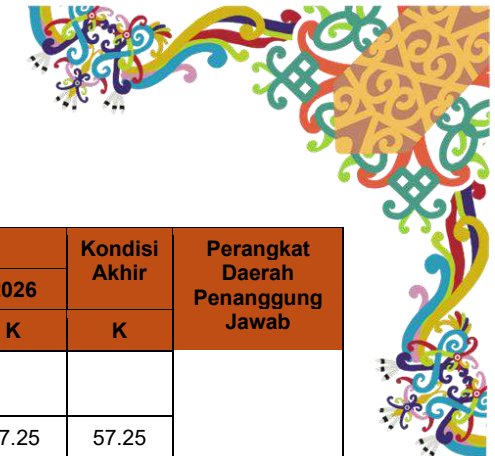
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.34	0.36	0.38	0.4	0.43	0.45	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25	28,13	31,25	34,38	34,38	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	70	75	80	85	85	
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian RTPHBS	Persen	26	30	32	34	36	40	40	
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	78.9	79	79,05	79,1	79,15	79,2	79,2	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	8.48	12.18	15.74	19.31	22.92	26.49	26.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



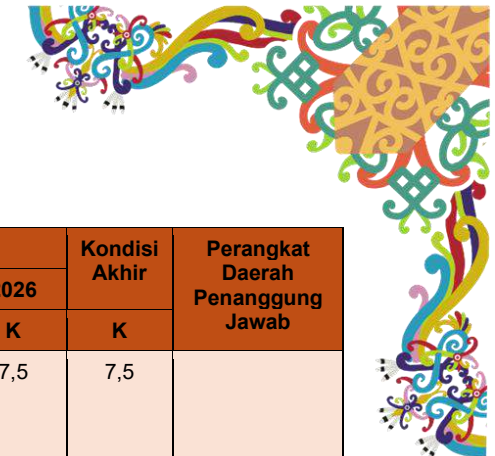


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810	810	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97.78	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat				Tingkat Kebahagiaan	Nilai	n/a	71	72	73	74	75	75	
				Tingkat Kemiskinan	Persen	7.35	6,9	6,5	6,45	6,4	6,35	6,35	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat				Indeks Gini	Nilai	0.290	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	
				Indeks Desa Membangun	Nilai	0.685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785	
Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45.22	51.51	57.79	64.07	70.35	70.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	70	80	90	95	95	
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10	10	10	10	10	50	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Kecukupan Konsumsi Energi	Persen	1971	2050	2150	2175	2200	2225	2225	

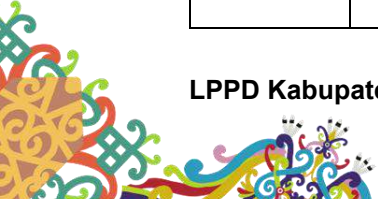


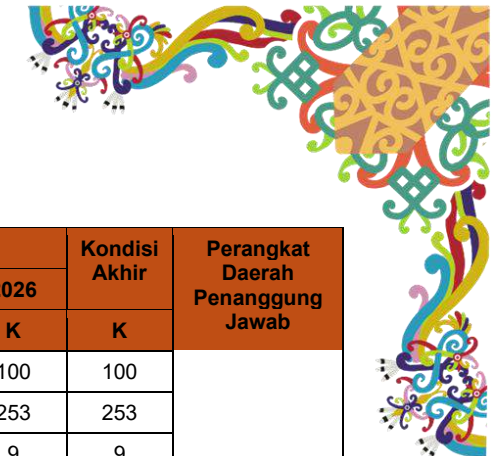


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Pangan Masyarakat										
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Kecukupan Konsumsi Protein	Persen	54.7	55.5	57	57.1	57.2	57.25	57.25	
	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah		Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1.55	5.18	10.36	25.91	38.86	38.86	
				Persentase Realisasi Kesepakatan Kerja sama Desa	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
Menurunnya Pangangguran di masyarakat				Tingkat Pangangguran Terbuka	Persen	5.20	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1	4,1	
				PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	188.64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36.47	71.95	74.39	76.83	79.27	81.71	81.71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8.98	12.82	16.66	20.5	24.34	28.19	28.19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1	2	3	3	3	3	
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	0.62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89	



Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0.21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38,706.00	39,867.18	40,254.24	40,641.30	41,802.48	42,576.60	42,576.60	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000	7500	13000	20000	30000	30000	
				Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25	35	45	55	65	65	
				Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23,449.03	26,197.87	26,987.26	27,781.65	29,278.24	30,200.81	30,200.81	
				Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416	35275	36157	37061	37988	37988	
				Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551	17990	18441	18900	19375	19375	
				Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000	16480000	16975000	17483000	18009000	18009000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	28645	28720	28795	28880	28880	Dinas Perkebunan
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116	237435	268526	307390	346255	346255	
				Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898	17928	17958	17988	18033	18033	
				Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402	3412	3427	3442	3452	3452	
				Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286	7291	7301	7306	7311	7311	
				Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78	89	110	115	125	125	





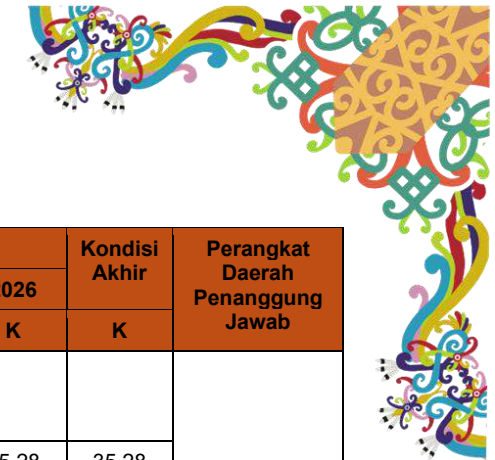
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80	85	95	95	100	100	
				Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237	243	248	248	253	253	
				Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5	7	9	9	9	9	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	33000	20000	12500	10500	104267	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14	23	23	21	19	100	
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664	20000	17000	10000	7500	69164	
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4	5	6	4	3	22	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3600	4000	4000	4800	20000	Dinas Perkebunan
				Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3	4	4	5	4	20	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	90	92	94	95	96	97	97	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5	5	5	5	5	5	
			Program Pengendalian Dan	Persentase Pengendalian dan	Persen	75	80	85	90	95	100	100	



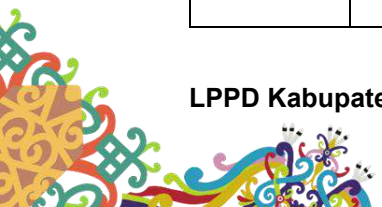
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian									Dinas Perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1	2	3	3	4	5	17	
				Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1.91	4.8	9.8	14.6	19.6	24.6	24.60	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	86520	95172	104689	115158	115158	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150,656	165,721	185,608	207,881	232,827	232,827	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Suberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	20	20	20	20	20	
				Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92	93	95	98	100	100	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	23900	25095	26350	27668	27668	
				Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530	1607	1687	1771	1860	1860	
			Urusan Pemerintahan	Program Penggunaan Dan	Persentase Produk dalam	Persen	n/a	95	97	98	98	99	Dinas Perindustrian

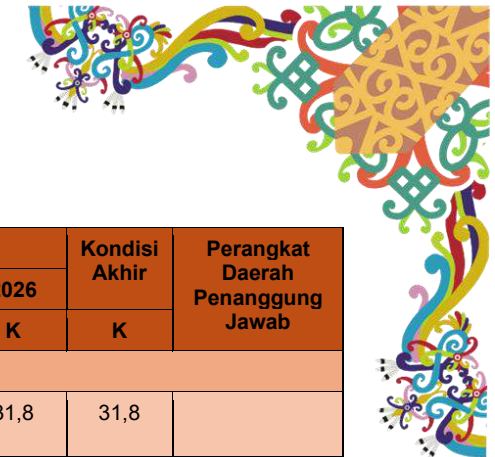


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
		Bidang Perdagangan	Pemasaran Produk Dalam Negeri	negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern									dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	54	65	75	86	86	
				Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2.48	3.33	3.35	3.62	4.22	4.22	4.22	
				Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48	53	58	62	67	67	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	2	2	1	1	8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1.81	1.99	1.99	1.99	1.99	9.77	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0.3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.4	
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	-0.99	2,34	2,51	3,42	4	4,23	4,23	
Penguatan daya saing	Peningkatan Produktivitas	Urusan Pemerintahan	Program Peningkatan	Persentase DTW yang Memenuhi	Persen	28	59.14	64	82	100	100	100	Dinas Pariwisata



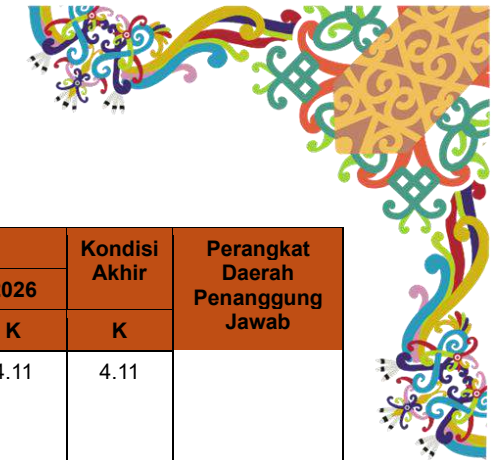
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	Bidang Pariwisata	Daya tarik Destinasi Pariwisata	Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi									
			Program Pemasaran Pariwisata	Okupansi	Persen	20	23.28	26.28	29.28	32.28	35.28	35.28	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	7	7	7	7	7	
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif				Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	4.44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitas	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7	Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya saing investasi daerah				Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1.69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	640	652	665	685	3267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	260	310	340	350	350	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	850	950	1050	1150	4750	



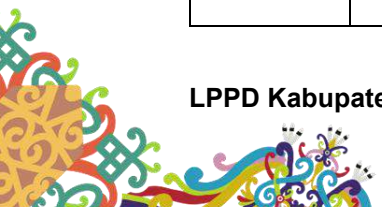


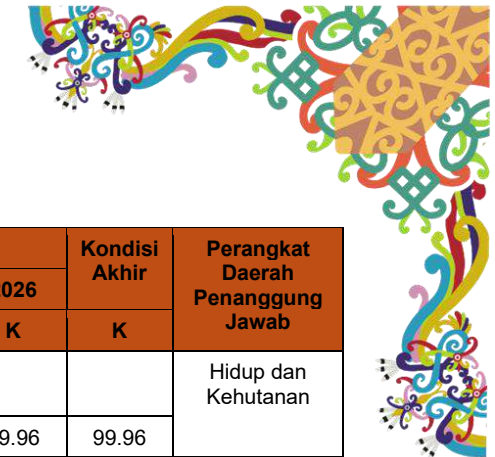
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah													
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah				Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37.80	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	31,8	
				Persentase penurunan kawasan kumuh	Persen	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054	
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih				Cakupan layanan air bersih	Persen	87.60	89,32	90,74	92,16	93,58	95	95	
				Persentase rumah layak huni	Persen	89.80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44	
Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26.30	31.77	37.25	42.72	48.19	53.67	53.67	
				Program Perumahan Di Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7.4	7.2	7	6.7	6.4	6.1	
			Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN		Unit	25	517	517	517	517	517	2585	





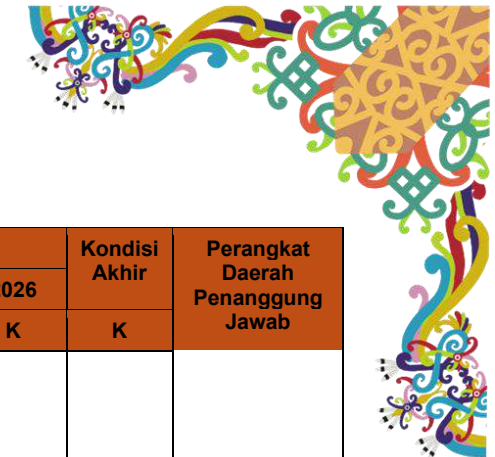
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4.92	4.69	4.48	4.29	4.11	4.11	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87.9	89.32	90.74	92.16	93.58	95	95	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0.54	0.7	1.03	1.26	1.48	1.48	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81.7	83.4	85	86.7	88.3	90	90	
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62.12	65.28	65.75	66.22	66.67	67.11	67.11	Dinas Pekerjaan Umum
		Urusan Pemerintahan		Jumlah Tempat Pembuangan	Lokasi	1	1	2	1	1	1	6	Dinas Lingkungan





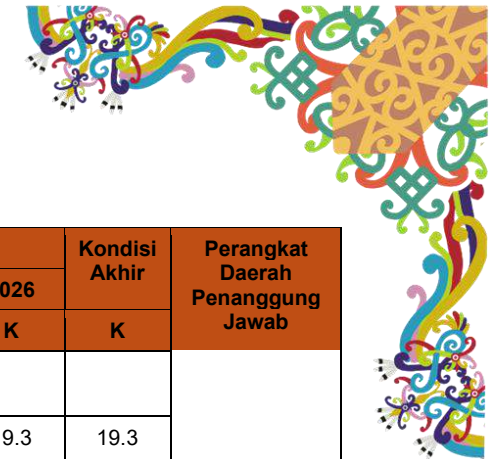
Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
		Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Akhir (TPA) Yang Dibangun									Hidup dan Kehutanan
				Timbulan sampah	Persen	78.5	88.18	94.84	97.6	99.52	99.96	99.96	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah				Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	83.17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18	88,18	
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan Pembangunan kawasan di lokasi IKN	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65	70	75	80	85	85	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan antar wilayah)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.75	0.76	0.78	0.8	0.82	0.85	0.85	Dinas Pekerjaan Umum
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	Rasio	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	



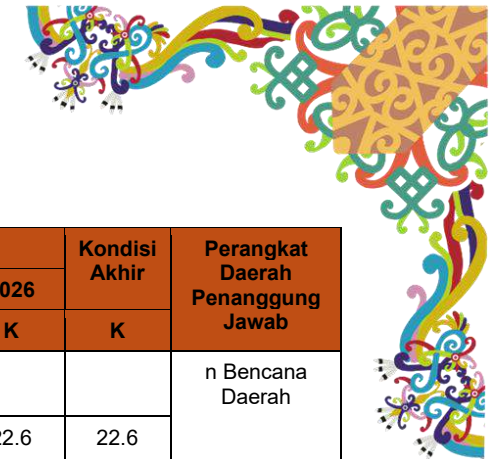


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten									
			Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63.4	63.6	64.2	64.7	65	65.1	65.1	
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan													
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	5	5	5	5	5	5	25	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72.82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51	
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	100	60	100	100	66.7	94.4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan berbahaya Dan	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di	Dokumen	0	4	4	4	3	3	18	



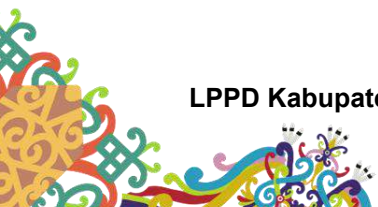


Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Beracun (Limbah B3)	kabupaten Kutai Kartanegara									
			Program Pembinaan Dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan izin Perlindungan Dan Pengelola lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19.32	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	101	124	126	128	129	119	626	
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa / Kelurahan	0	0	5	5	5	6	21	
			Meningkatnya ketahanan bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	Nilai	110.00	108,55	106,42	104,28	102,14	100.00	100.00
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Urusan Pemerintahan		Persentase Layanan	Persen	5.11	8.1	12.1	15.1	18.1	21.1	21.1	Badan Penanggulangan



Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
		Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Informasi Rawan Bencana									n Bencana Daerah
				Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8.55	10.6	13.6	16.6	19.6	22.6	22.6	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	10.86	12.2	15.8	17.6	19.3	20.1	20.1	
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	10	15	20	25	30	100	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Perda No 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029



j. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD periode 2021-2026 dengan memperhatikan kondisi aktual capaian kinerja pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat (nasional) dalam dokumen RKP 2025 dan juga harus selaras dengan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum RKPD 2025 Provinsi Kalimantan Timur dan juga diarahkan untuk mendukung dan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pilkada 2025.

Pada pembangunan tahun 2025 ini merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026 dengan menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ terkait penyesuaian arah kebijakan/prioritas pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 dalam rangka percepatan pembangunan.

Dengan mengacu pada RPJMD, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah berdasarkan arah pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahap pembangunan ke- IV di tahun 2025, dengan ini tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah

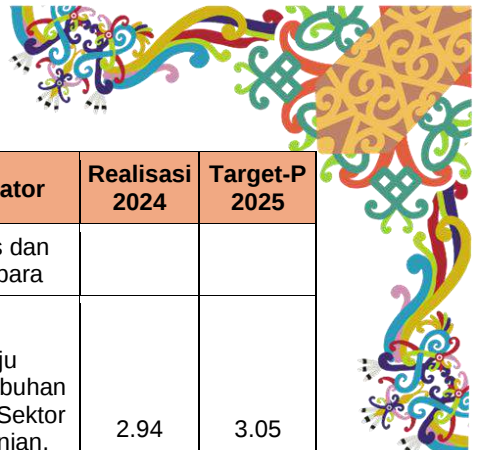
“Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”

Berdasarkan tema tersebut. pembangunan diarahkan pada pembangunan Daerah yaitu terkait meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan mampu merangsang performa penguatan perekonomian kerakyatan. Sehingga dengan fondasi ekonomi masyarakat yang kuat akan terjadi akselerasi pembangunan antara bidang sehingga dapat mendukung transformasi di segala aspek pembangunan Daerah.

Tabel I-12 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Fokus Pembangunan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target-P 2025
		Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	71.51	73.34

Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Fokus Pembangunan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target-P 2025
		dan melayani			
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Mengikatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	65.93	68.28
	Penataan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah	Indeks Anti Korupsi	8.40	8.50
	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang Lebih Cepat, Mudah, Murah dan Bermutu berbasis IT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9.85	9.86
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	76.57	76.86
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat Produktif Terampil	Penguatan Modal Sosial Budaya, Solidaritas Sosial dan Ketahanan Sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0.688	0.689
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.42	58.00
		Meningkatnya Peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	81.20	81.50
	Peningkatan Jangkauan dan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0.836	0.846
		Meningkatnya Kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	79.57	80.90
			Tingkat Kemiskinan	7.28	6.50-6.95
Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Penguatan Kecamatan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Gini	0.307	0.285-0.301
			Indeks Desa Membangun	0.797	0.800
Peningkatan kapasitas dan Kompetensi angkatan kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4.11	3.85-4.00
			PDRB per Kapita	259.19	271.53-271.71
		Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis	Laju Pertumbuhan PDRB Non	7.88	8.07-8.14



Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Fokus Pembangunan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target-P 2025
		pada Sektor Terbarukan	Migas dan Batubara		
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian yang memadai	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.94	3.05
	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya dan olahraga berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	7.85	4.10
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	10.85	11.07
	Peningkatan Produktivitas Industri Kreatif	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7.70	7.48
		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	16.18	15.00
			Persentase Kawasan Kumuh	0.0049	0.0045
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas (Keterkaitan) Wilayah	Meningkatnya aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76.49	80.00
		Meningkatnya Kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	8.20	82.36
			Persentase Rumah Layak Huni	98.64	98.75
		Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Persentase Intensitas Emisi GRK	30.82	17.59
Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal serta Pengembangan Resiliensi Kebencanaan	Pengelolaan Lingkungan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan alam	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	73.59	78.82
	Peningkatan Kapasitas Tanggap Bencana Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	118.80	108.53

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD - P Tahun 2025

Penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2025 dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara pasangan dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes. dan H. Rendi Solihin menjadi langkah penting dalam memastikan arah

pembangunan daerah sejalan dengan mandat politik, kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ bahwa dalam upaya akselerasi pembangunan maka perlu penyelarasan prioritas pembangunan 2025 dengan visi, misi dan program Kepala Daerah. Penyelarasan prioritas pembangunan 2025 dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan menyinergikan prioritas pembangunan 2025 dengan program kerja Kepala Daerah yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel I-13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Visi, Misi dan Program KDH Terpilih

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Visi/Misi/Program Kepala Daerah (Program Dedikasi)
	Visi: KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan”
	Misi 1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Produktif dan Terampil	1. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia
	2. Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
	3. Program Bantuan Sekolah Swasta/ Pondok Pesantren Idaman Terbaik
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja	4. Program Etam Sejahtera
	Misi 2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non ekstraktif
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	5. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul Bernilai Tambah dan Berkelanjutan	6. Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh
	7. Program Kredit Kukar Idaman Terbaik
	8. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah
	9. Program Stimulus Komunitas Kreatif
	Misi 3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10. Program Pelayanan Publik Cerdas
	11. Program ASN Kukar Terbaik
	Misi 4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Lestari dan Berkelanjutan	12. Program RT ku-Terbaik
	13. Program Terima Kaseh Guru Ngajiku
	14. Program Jaga Lingkungan Lestari



Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Visi/Misi/Program Kepala Daerah (Program Dedikasi)
	Misi 5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan
Percepatan Pemabangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	15. Program 100 Miliar bagi kawasan perdesaan Idaman Terbaik
	16. Program Internet Desa Gratis
	17. Program Permukiman Idaman Terbaik

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD - P Tahun 2025

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi diantaranya: Menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan menetapkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 169/SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023- 2026.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, penitikberatan

kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Tabel I-14 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi/Misi Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan SPM
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya			
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Produktif dan terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Sosial
		Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Kesehatan
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah			
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah			
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Trantibum

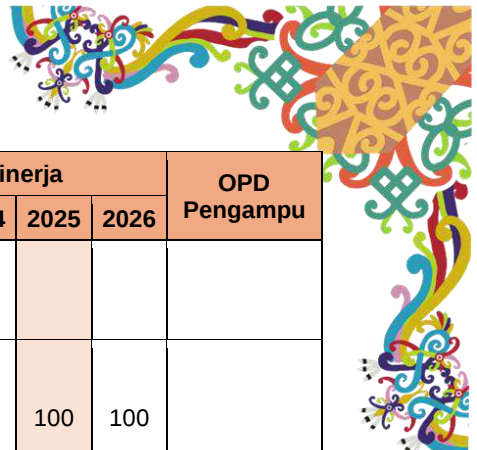
Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel I-15 Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Persen	84,43	85.86	87	88.43	89.71	90.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Persen	84.43	84.86	86	87.43	88.71	89.71	
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Persen	76.92	78.72	80.6	82.02	83.02	83.92	

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Persen	62.28	64.08	65.98	67.38	68.38	69.28	
	Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar Idaman Pendidikan Dasa	Orang	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	88	90	92	94	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	
	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	
Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Presentasi Balita Stunting	Persen	16.19	15.6	15.1	14.6	14.1	13.8	Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga sehat	Persen	0.21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	
	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	
	Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	
	Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	
	Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	
	Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	
	Indeks Pelayanan Kesehatan Prime	Persen	0.34	0.36	0.38	0.4	0.43	0.45	

Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Perilaku Kesehatan	Persen	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	
	Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18075	21.88	25.00	28.13	31.25	34.38	
Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupate	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87.9	89.32	90.47	92.16	93.58	95	
	Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0.54	0.7	1.03	1.26	1.48	
	Persentase Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81.7	83.4	85	86.7	88.3	90	
Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5.11	8.1	12.1	15.1	18.1	21.1	BPBD
	Cakupan	Persen	8.55	10.6	13.6	16.6	19.6	22.6	



Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap bencana								
	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Persen	10.86	12.2	15.8	17.6	19.3	20.1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah pembentukan balakarcarna	Kelompok	74	10	15	20	25	30	
	Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.4/2851/ST telah menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Layanan Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal.

Perubahan Target capaian standar pelayanan minimal menjadi target prioritas yang harus dipenuhi layanan SPM mencapai 100% Penerima Layanan Warga Negara dan Mutu Layanan Minimal oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel I-16 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025

N o	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	29.601	29.601	29.601

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	53,22	53,22	53,22
		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	78,6	78,6	78,6
2	Pendidikan Dasar		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	141.697	141.697	141.697
			SD				
		1	Kemampuan literasi	Nilai	72,98	72,98	72,98
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	65,42	65,42	65,42
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	72,15	72,15	72,15
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,59	70,59	70,59
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,09	57,09	57,09
			SMP				
		1	Kemampuan literasi	Nilai	83,45	83,45	83,45
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	77,82	77,82	77,82
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	72,37	72,37	72,37
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,79	72,79	72,79
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,32	59,32	59,32
3	Pendidikan Kesenjangan		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	3.329	3.329	3.329
		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	45,81	45,81	45,81
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	13.684	13.684	13.684
		1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10.947	10.947	10.947
		2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2.463.120	2.463.120	2.463.120
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	13.684	13.684	13.684
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	13.684	13.684	13.684
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	13.684	13.684	13.684
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	2.053	2.053	2.053
		7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	13.684	13.684	13.684
		8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.684	13.684	13.684

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	13.684	13.684	13.684
		10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	160	160	160
		11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	912	912	912
		12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	<i>Orang</i>	373	373	373
		13	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	807	807	807
		14	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	912	912	912
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	291	291	291
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	113	113	113
		17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>	82.104	82.104	82.104
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	13.062	13.062	13.062
		1	Formulir partograf	<i>Formulir</i>	13.062	13.062	13.062
		2	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	13.684	13.684	13.684
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	<i>Buku</i>	13.684	13.684	13.684
		4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	160	160	160
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	<i>Orang</i>	373	373	373
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	807	807	807
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	912	912	912
		8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	291	291	291
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	113	113	113
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	12.440	12.440	12.440
		1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	<i>Vaksin</i>	12.440	12.440	12.440

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		2	Vitamin K1 Injeksi	<i>Ampul</i>	12.440	12.440	12.440
		3	Salep/tetes mata antibiotik	<i>Orang</i>	12.440	12.440	12.440
		4	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	12.440	12.440	12.440
		5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	<i>Formulir</i>	37.320	37.320	37.320
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	12.440	12.440	12.440
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	160	160	160
		8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	323	323	323
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	807	807	807
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	912	912	912
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	36	36	36
		13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	113	113	113
		14	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	4.080	4.080	4.080
4	Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50.777	50.777	50.777
		1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Formulir</i>	50.777	50.777	50.777
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	<i>Formulir</i>	50.777	50.777	50.777
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	50.777	50.777	50.777
		4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	<i>Kapsul</i>	6.177	6.177	6.177
		5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Kapsul</i>	50.777	50.777	50.777
		6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	3.519	3.519	3.519
		7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	<i>Vaksin</i>	7.012	7.012	7.012
		8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>	5.245	5.245	5.245
		9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	<i>Vaksin</i>	8.896	8.896	8.896
		1	Vaksin imunisasi dasar:	<i>Vaksin</i>	5.306	5.306	5.306

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		0	Campak - Rubella				
		1 1	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	2.639	2.639	2.639
		1 2	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1.300	1.300	1.300
		1 3	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	219.865	219.865	219.865
		1 4	Peralatan Anafilaktik	Paket	32	32	32
		1 5	Formula terapi gizi buruk	Paket	32	32	32
		1 6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		1 7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		1 8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		1 9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		2 0	Guru PAUD	Orang	n/a	n/a	n/a
		2 1	Kader kesehatan	Orang	4.080	4.080	4.080
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	141.013	141.013	141.013
		1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	141.013	141.013	141.013
		2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	141.013	141.013	141.013
		3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	141.013	141.013	141.013
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	1	1	1

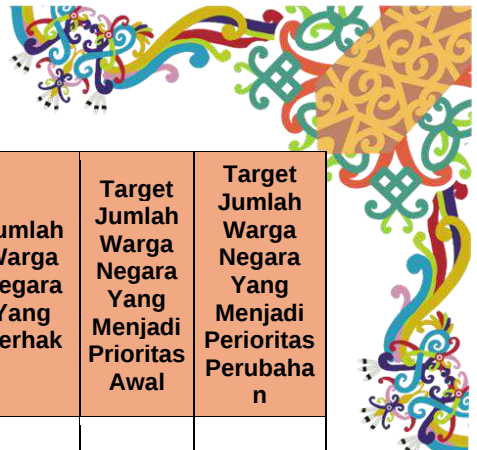
N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	1
		6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/KABUPATEN)	Tablet	7.332.676	7.332.676	7.332.676
		7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	64	64	64
		8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	8.027	8.027	8.027
		9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	160	160	160
		10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	45.693	45.693	45.693
		11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	323	323	323
		12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		1 7	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1	1	1
		1 8	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	4080	4080	4080
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	529.200	529.200	529.200
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	64	64	64
		3	Alat : Tensimeter	Unit	64	64	64
		4	Alat : Glukometer	Unit	64	64	64
		5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	64	64	64
		6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	64	64	64
		7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	64	64	64
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	64	64	64
		9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	64	64	64
		1 0	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	1	1	1
		1 1	Alat Pelayanan KB	Unit	288	288	288
			Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	96	96	96
			Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	96	96	96
			Vasektomi set	Unit	96	96	96
		1 2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	1
		1 3	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	25.215	25.215	25.215
		1 4	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		1	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		5					
		1 6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		1 7	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		1 8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		1 9	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4.080	4.080	4.080
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	59.512	59.512	59.512
		1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	64	64	64
		2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	64	64	64
		3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	64	64	64
		4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	64	64	64
		5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	59.512	59.512	59.512
		6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	59.512	59.512	59.512
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		8	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		1 0	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		1 1	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		1 2	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		1 3	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4.080	4.080	4.080
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	59.695	59.695	59.695
		1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media	Paket	64	64	64

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)				
		2	Obat Hipertensi	Paket	32	32	32
		3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	64	64	64
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	160	160	160
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36	36	36
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	17.132	17.132	17.132
		1	Obat Diabetes Melitus	Paket	32	32	32
		2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	64	64	64
		3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	32	32	32
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	3	3	3
		5	Media Promosi Komunikasi	Pedoman	160	160	160

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)				
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	286	286	286
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	887	887	887
		1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	32	32	32
		2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	32	32	32
		3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1	1	1
		4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	160	160	160
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di	Orang	32	32	32



N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)				
		8	Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	1
		9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	32	32	32
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	24.272	24.272	24.272
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		2	Reagen Zn TB	Kit	24.272	24.272	24.272
		3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	169.904	169.904	169.904
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	145.632	145.632	145.632
		5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	24.272	24.272	24.272
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1	1	1
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	1
		8	Tuberkulin	Vial	2.427	2.427	2.427
		9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	323	323	323
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	286	286	286
		14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	145	145	145
		15	Kader Kesehatan	Orang	4.080	4.080	4.080
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	25.814	25.814	25.814

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	160	160	160
		2	Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDT) pertama	<i>Tes</i>	27.949	27.949	27.949
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>	154.884	154.884	154.884
		4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>	25.814	25.814	25.814
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>	323	323	323
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	807	807	807
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	912	912	912
		8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>	286	286	286
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>	36	36	36
		10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	<i>Orang</i>	4.080	4.080	4.080
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	4.080	4.080	4.080
			<i>Jaringan Perpipaaan</i>				
			<i>Kuantitas SPAM</i>				
		1	<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)</i>	<i>Rumah Tangga</i>	595	595	595
			<i>Kualitas SPAM</i>				
		2	<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)</i>	<i>Rumah Tangga</i>	595	595	595

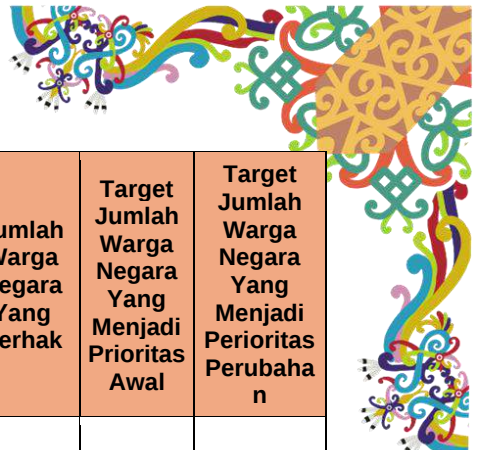
N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			<i>Bukan Jaringan Perpipaan</i>				
			<i>Kuantitas SPAM</i>				
		1	<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)</i>	<i>Rumah Tangga</i>	425	425	425
			<i>Kualitas SPAM</i>				
		2	<i>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau, dst.</i>	<i>Rumah Tangga</i>	425	425	425
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	1.208	1.208	1.124
		1	SPALD Kabupaten/KABUPATEN				
			KUANTITAS SPALD				
			<i>Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik</i>	<i>Rumah Tangga</i>	281	281	281
			KUALITAS SPALD				
			<i>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)</i>				
			<i>Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN</i>	<i>Rumah Tangga</i>	24	24	24
			<i>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)</i>				
			<i>Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATEN dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic</i>	<i>Rumah Tangga</i>	50	50	50

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN</i>				
			<i>Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar</i>	<i>Rumah Tangga</i>	257	257	257
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/KABUPATEN		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	n/a	n/a	n/a
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat				
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)				
		1	<i>Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)</i>	<i>form tahapan</i>	n/a	n/a	n/a
		2	<i>Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	48	48	57

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
	Program Pemerintah Daerah Kabupaten/KABUPATEN						
			Ada Relokasi Program Pemerintah				
		1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan				
			a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
			b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah	12	12	12
			c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
			Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah				
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	n/a	n/a	n/a
	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA (TRANTIBUM)						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	58	58	58
		1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	184	184	458

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	7	7	9
		3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i>	orang	100	100	100
		4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material <i>(berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman)</i> dan pelayanan pengobatan <i>(berkoordinasi dengan kesehatan)</i> dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	1
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil <i>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)</i>	orang	5	5	5

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan <i>(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)</i>	orang	2	2	2
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah) (KEBENCANAAN)						
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	100.283	100.283	100.283
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana <i>(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)</i>				
			Tidak ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
			a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	-	-
			b.Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	-	-
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025				
			a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1
			b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen	2	2	2
			c.Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	3	3	3
			d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan	orang	3	3	3



N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			kebutuhan)				
			<i>e.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	13	13	13
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
			1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
			<i>a.Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)</i>	eksemplar	4	4	4
			<i>b.Terlaksananya sosialisasi tatap muka</i>	desa	4	4	4
			<i>c.Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	4	4	4
			<i>d.Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	3	3	3
			2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
			<i>a.Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	media	2	2	2
			<i>b.Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	buah	4	4	4
			<i>c.Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	2	2	2
			<i>d.Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	1	1	1
			<i>e.Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	4	4	4
			3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
			<i>a.Tersedianya Rambu</i>	buah	n/a	n/a	n/a

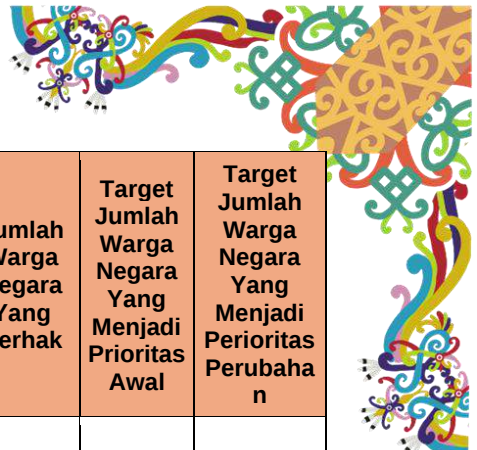
N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>				
			<i>b.Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	1	1	1
			<i>c.Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	2	2	2
			<i>d.Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>e.Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	2	2	2
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	600	600	600
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
			Tidak Ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
			<i>a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b.Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025				
			<i>a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>c.Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>e.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
		2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)				
			<i>a.Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			dengan kebutuhan)				
			b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			c.Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
			d.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
		3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi				
			1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
			a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4
			b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4
			c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	n/a	n/a	n/a
			d.Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	n/a	n/a	n/a
			e.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3
			f.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3
			2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
			a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4
			b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	4
			c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	n/a	n/a	n/a
			d.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3

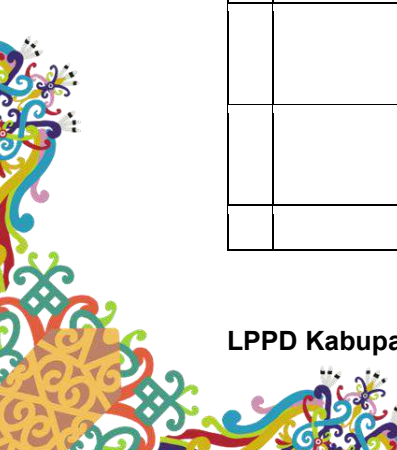
N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			<i>e.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	3	3	3
		4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)				
			<i>a.Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	n/a	n/a	n/a
			<i>b.Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	n/a	n/a	n/a
			<i>c.Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	n/a	n/a	n/a
			2) Gladi Lapangan				
			<i>a.Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	1	1	1
			<i>b.Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	1	1	1
			<i>c.Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	13	13	13
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a.Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/ 7 (minimal jumlah hari dalam setahun)</i>	hari	12	12	12
			<i>b.Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	pertemuan	4	4	4
			<i>c.Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)</i>	orang	n/a	n/a	n/a

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	1	1	1
			<i>e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang	2	2	2
			2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
			<i>a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	n/a	n/a	n/a
			<i>b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	n/a	n/a	n/a
			<i>c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	n/a	n/a	n/a
			<i>d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	n/a	n/a	n/a
			3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
			<i>a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	1	1	1
			<i>b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	1	1	1
			4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
			<i>a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	2	2	2
			<i>b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	2	2	2
		6	Penyediaan Peralatan				

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	25	25	25
			<i>b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	200	200	200
			<i>c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	200	200	200
			<i>d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	200	200	200
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	4.500	4.500	4.500
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
			Kejadian Bencana				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana				
			<i>a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
		2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
			<i>a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a



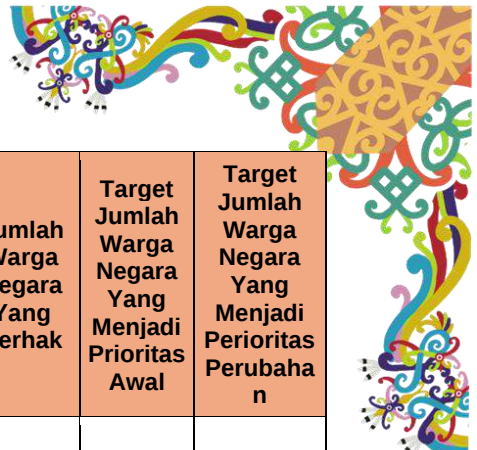
N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			<i>bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>				
			<i>e.Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>f.Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>g.Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>h.Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			Status Tanggap Darurat				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana				
			<i>a.Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	1	1	1
			<i>b.Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1
			<i>c.Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>orang</i>	26	26	26
		2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
			<i>a.Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	2
			<i>b.Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1
			<i>c.Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1
			<i>d.Tersusunnya Laporan</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1



N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>				
			<i>e.Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1</i>
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
			<i>a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
			<i>b.Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	<i>193</i>	<i>193</i>	<i>193</i>
			<i>c.Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
			<i>d.Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
			<i>e.Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
			<i>f.Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
			<i>g.Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
			<i>h.Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>Orang</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
			Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM				
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
	(DAMKAR)						
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	480	480	480
		1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/ atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i>)	<i>layanan</i>	60	60	60
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (<i>seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.</i>)	<i>dokumen</i>	4	4	4
			<i>Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)</i>	<i>unit</i>			
		3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (<i>pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.</i>), penyelamatan dan evakuasi (<i>helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.</i>)	<i>unit</i>	442	442	442
		4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (<i>jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I</i>)	<i>orang</i>	70	70	70
		5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan	<i>layanan</i>	480	480	480

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)				
		6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	480	480	480
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	185	185	185
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	185	185	185
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	20	20	20
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	185	185	185
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi,	Orang	100	100	n/a



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>				
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	25
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30	30	n/a
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	185	185	185
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain,	Orang	185	185	185

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			<i>dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</i>				
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	185	185	185
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (<i>fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit</i>)	Orang	185	185	185
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (<i>pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi</i>)	Orang	185	185	185
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (<i>pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi</i>)	Orang	n/a	n/a	n/a
		13	Layanan rujukan (<i>layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya</i>)	Orang	n/a	n/a	n/a
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50	50	50
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	50	50	50
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera	Orang	10	10	10

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar				
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	50	50
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	15	15	n/a
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	n/a
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	50	50	50
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	50	50	50

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	50	50	50
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	50	50	50
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	50	50	n/a
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	n/a	n/a	n/a
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	n/a	n/a	n/a
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	300	300	300
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	300	300	300
		2	Penyediaan layanan	Orang	20	20	20

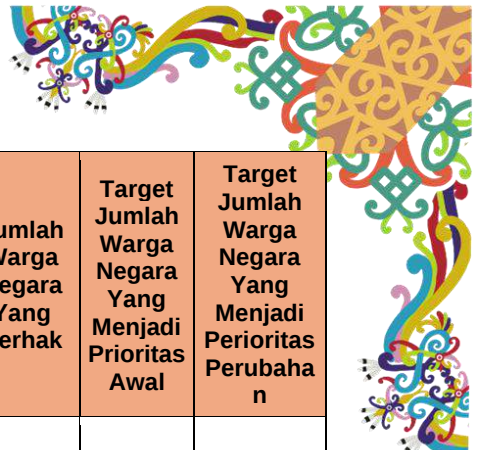
No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanjar				
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	300	300	300
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50	50	n/a
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	25
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	50
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	Orang	300	300	300

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubaha n
			<i>pelayanan/olahraga/outbound/gy m, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>				
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	300	300	300
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	300	300	300
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (<i>fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit</i>)	Orang	300	300	300
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	300	300	300
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	n/a	n/a	n/a
		13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	n/a	n/a	n/a
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	30	30	30

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
	Pengemis di Luar Panti						
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	20	30
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	30	30	30
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	30	30	30
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	30	30	30
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30	30	30
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya)	Orang	30	30	30

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	30	30
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	30	30	30
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	30	30	30
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	30	30	30
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan	Orang	30	30	30

N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
		1 2	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	30	30	30
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/KABUPATEN		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	1.500	1.500	1.500
			<i>Ya Terjadi Bencana</i>				
		1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1.500	1.500	1.500
		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1.500	1.500	1.500
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	100	100	100
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	50	50	50



N o	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	50	50	50
			Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)				
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form			

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Tabel I-17 Alokasi Anggaran Penunjang Penerapan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Urusan	Sub Urusan	Alokasi Anggaran	OPD Pengampu
Pendidikan		479,652,332,441	Dinas Pendidikan
Kesehatan		31,224,398,500	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum		146,433,067,625	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Urusan	Sub Urusan	Alokasi Anggaran	OPD Pengampu
Perumahan		16,922,196,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Trantibum	Trantibum	5,209,143,075	Satuan Polisi Pamong Praja
	Bencana Daerah	3,019,394,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kebakaran	2,640,914,981	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sosial		6,068,500,000	Dinas Sosial

Sumber: Pelaporan penerapan SPM pada aplikasi e-SPM-2025

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II-1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,57	77,25	0,89
2	Presentase Penduduk Miskin	7,28	6,72	-7,69
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	4,40	7,06
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,17	4,53	-26,58
5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)	259,19	249,11	-3,89
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,307	0,285	-7,17

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Target Capaian Kinerja Makro pada Dokumen RPJMD 2021-2026, penetapan target indikator pembangunan diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 adalah 77,25 meningkat 0,68 poin dari tahun sebelumnya yaitu 76,57

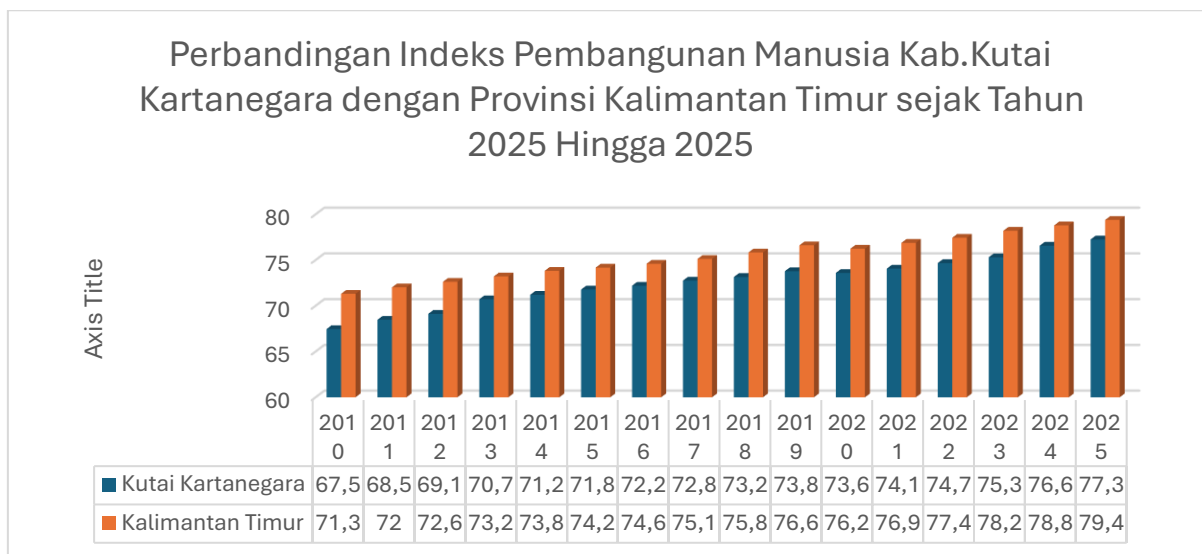
Tabel II-2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,57	77,25	0,89

Sumber : BPS

Adapun perkembangan capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 s.d 2024 sebagai berikut:

Grafik II-1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025



Sumber: BPS

Berdasarkan klasifikasi status pembangunan manusia yang ditetapkan Badan Pusat Statistik capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sudah berstatus “tinggi”, jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Paser	75,13	75,85
2	Kutai Barat	74,76	75,38
3	Kutai Kartanegara	76,57	77,25
4	Kutai Timur	75,9	76,48
5	Berau	77,17	77,72
6	Penajam Paser Utara	74,94	75,82
7	Mahakam Ulu	70,79	71,53
8	Balikpapan	82,62	83,23
9	Samarinda	83,11	83,53
10	Bontang	82,49	83,04

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
11	Kalimantan Timur	78,79	79,39

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

b. Presentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

Penjabaran Presentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menggunakan data jumlah penduduk miskin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2025 angka kemiskinan 6,72 % mengalami penurunan 0,56 % dari angka kemiskinan Tahun 2024 yaitu 7,28 %.

Tabel II-4 Capaian Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
2	Presentase Penduduk Miskin	7,28	6,72	-7,69

Sumber : BPS

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 tercatat 4,40 mengalami peningkatan 0,29 poin dari Tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,05. Menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang belum termanfaatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
3	Tingkat Pangangguran Terbuka	4,11	4,40	7,06

Sumber : BPS

Tabel II-6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	5,66	4,14	4,05	4,11	4,40
2	Provinsi Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	5,14	5,18
3	Kabupaten Paser	5,70	4,88	6,61	4,53	4,62
4	Kabupaten Kutai Barat	5,14	4,62	6,16	5,58	5,21
5	Kabupaten Kutai Timur	5,35	6,48	5,93	5,76	6,20
6	Kabupaten Berau	5,82	5,02	4,95	5,15	4,40
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	2,95	2,12	2,07	2,05	4,26
8	Kabupaten Mahakam Ulu	3,14	2,44	2,09	2,51	2,84
9	Balikpapan	8,94	6,90	6,09	6,22	5,84
10	Samarinda	8,16	6,78	5,92	5,75	5,31
11	Kota Bontang	9,92	7,81	7,74	7,06	6,36

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

d. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :

1. Atas dasar harga berlaku Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
2. Atas dasar harga konstan Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

Tabel II-7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (Persen) 2024-2025

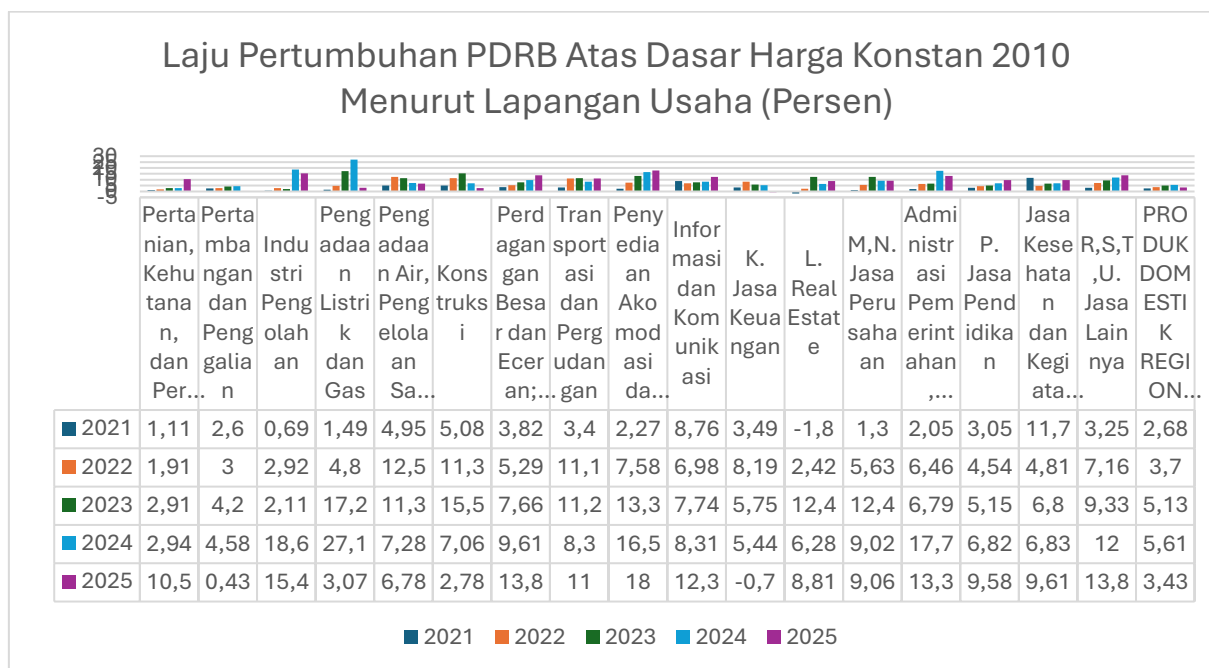
No	Lapangan Usaha	2024	2025
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,94	10,47
2	Pertambangan dan penggalian	4,58	0,43
3	Industri pengolahan	18,56	15,37

No	Lapangan Usaha	2024	2025
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	27,13	3,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,28	6,78
6	Konstruksi	7,06	2,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,61	13,79
8	Transportasi dan Pergudangan	8,30	10,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,53	17,97
10	Informasi dan Komunikasi	8,31	12,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,44	-0,73
12	Real Estat	6,28	8,81
13	Jasa Perusahaan	9,02	9,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,68	13,33
15	Jasa Pendidikan	6,82	9,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,83	9,61
17	Jasa lainnya	11,97	13,83
	Produk Domestik Regional Bruto ADHK	5,61	3,43

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 meningkat sampai dengan 3%. Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2025 ini tidak terlepas dari adanya program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana grafik berikut.

Grafik II-2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025



Sumber data: BPS 2025

e. PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku (ADHB)

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :

1. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;

Tabel II-8 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) 2024-2025

No	Lapangan Usaha	2024	2025
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	29.645,16	34.898,23
2	Pertambangan dan penggalian	118.180,96	111.867,25
3	Industri pengolahan	10.311,81	126.76,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	162,03	165,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	89,79	99,17
6	Konstruksi	20.521,62	21.322,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.252,35	10.751,93
8	Transportasi dan Pergudangan	2.844,07	3.266,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	766,90	915,84
10	Informasi dan Komunikasi	1.772,45	2.013,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	775,23	792,93
12	Real Estat	999,03	1.106,46
13	Jasa Perusahaan	72,94	82,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.739,63	4.355,62
15	Jasa Pendidikan	2.697,85	3.055,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.208,91	2.507,50
17	Jasa lainnya	659,41	775,93
	Produk Domestik Regional Bruto ADHB	204.698,39	210.653,44

Sumber : BPS

2. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

Tabel II-9 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) 2024-2025

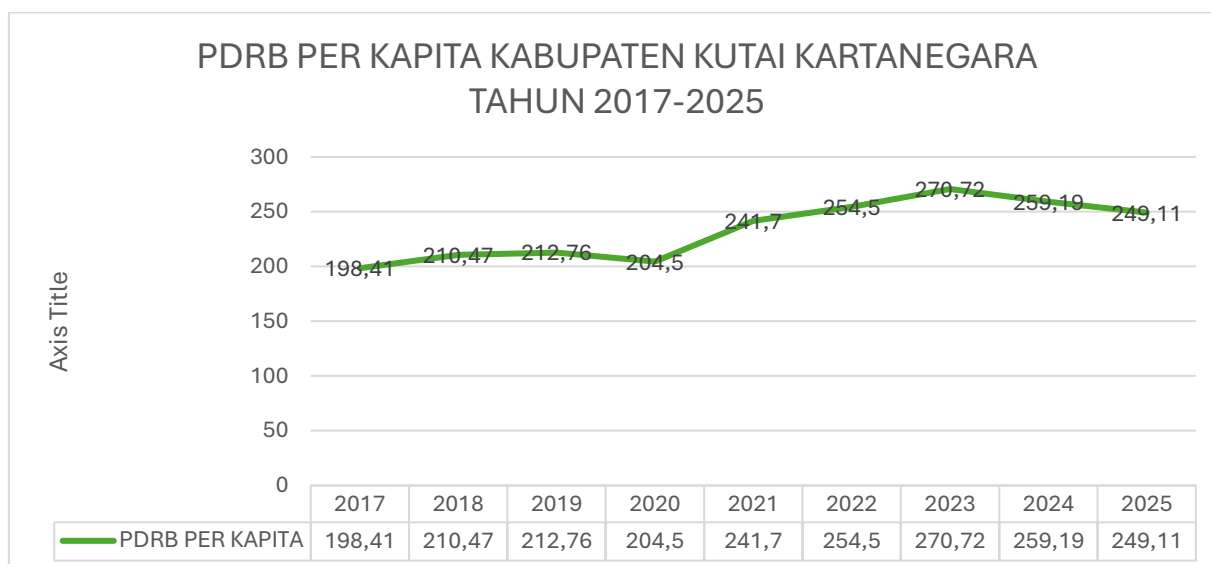
No	Lapangan Usaha	2024	2025
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	14.443,34	15.955,70
2	Pertambangan dan penggalian	97.001,60	97.416,70
3	Industri pengolahan	5.310,26	6.126,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	125,42	128,32

No	Lapangan Usaha	2024	2025
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,58	65,76
6	Konstruksi	10.596,37	10.891,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.443,16	6.193,59
8	Transportasi dan Pergudangan	1.604,02	1.780,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	427,78	504,65
10	Informasi dan Komunikasi	1.528,19	1.715,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	455,58	452,23
12	Real Estat	697,53	758,98
13	Jasa Perusahaan	42,47	46,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.169,78	2.459,10
15	Jasa Pendidikan	1.482,31	1.624,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.280,00	1.404,10
17	Jasa lainnya	339,37	386,29
	Produk Domestik Regional Bruto ADHK	143.008,83	147.909,34

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB ADHK yang dihasilkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencapai 147.909,34 miliar rupiah, nilai ini naik 4.900,51 miliar rupiah dari Tahun 2024.

Grafik II-3 PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2025



Sumber: BPS

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 2019-2022 terus mengalami tren positif, hal ini memberikan gambaran bahwa pertumbuhan rata-rata Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan.

Namun demikian pada Tahun 2023 dan Tahun 2025 terjadi penurunan akibat gejala perekonomian global, serta harga komoditas dari sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan yang berdampak signifikan pada PDRB per-kapita Kabupaten Kutai Kartanegara.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Jika Ketimpangan Pendapatan mengalami penurunan mengindikasikan bahwa kualitas distribusi pendapatan penduduk mengalami perbaikan, sekaligus menandakan berkurangnya kesenjangan sosial. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tercatat 0,285 mengalami penurunan 0,022 poin jika dibandingkan dengan gini rasio Tahun 2024 yaitu sebesar 0,307.

Tabel II-10 Capaian ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,307	0,285	-7,17

Sumber : BPS

Tabel II-11 Angka Ketimpangan Pendapatan Tahun 2025

No	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Kutai Kartanegara	0.283	0.269	0.284	0.307	0.285
2	Kabupaten Paser	0.288	0.282	0.292	0.271	0.273
3	Kabupaten Kutai Barat	0.317	0.300	0.277	0.266	0.261
4	Kabupaten Kutai Timur	0.328	0.304	0.336	0.283	0.305
5	Kabupaten Berau	0.377	0.352	0.327	0.317	0.294
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.263	0.274	0.299	0.258	0.319
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0.270	0.288	0.330	0.285	0.296
8	Balikpapan	0.325	0.334	0.323	0.324	0.325
9	Samarinda	0.322	0.346	0.323	0.330	0.308

No	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
10	Kota Bontang	0.340	0.324	0.299	0.330	0.349

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

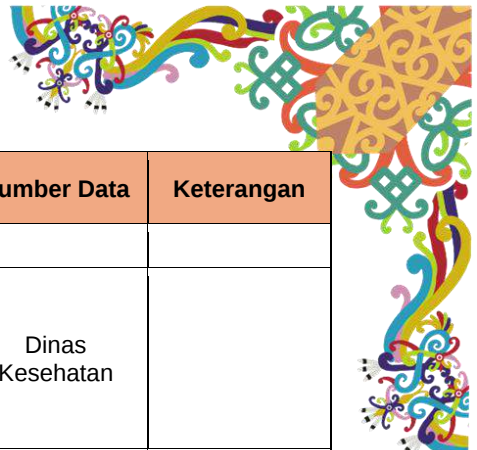
Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

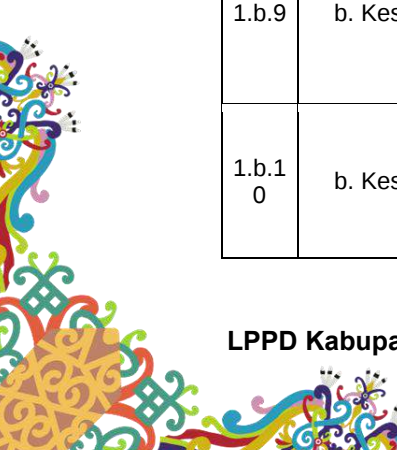
Pada Indikator Kinerja Kunci yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Bidang Urusan Pilihan. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci Hasil pada tabel berikut :

Tabel II-12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	a. Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$= \frac{25177}{33868} \times 100\%$ = 74.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	a. Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$= \frac{176544}{177220} \times 100\%$ = 99.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.3	a. Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$= \frac{1748}{6847} \times 100\%$ = 25.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	a. Pendidikan	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$= \frac{1748}{3377} \times 100\%$ = 51.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.5	a. Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$= \frac{2923}{5025} \times 100\%$ = 58.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.1	b. Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	$= \frac{3}{11214} \times 100\%$ $= 0.03$	Dinas Kesehatan	
1.b.2	b. Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	$= \frac{6089}{38215} \times 100\%$ $= 15.93$	Dinas Kesehatan	
1.b.3	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	$= \frac{10755}{13684} \times 100\%$ $= 78.60$	Dinas Kesehatan	
1.b.4	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	$= \frac{11291}{13062} \times 100\%$ $= 86.44$	Dinas Kesehatan	
1.b.5	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	$= \frac{10792}{12440} \times 100\%$ $= 86.75$	Dinas Kesehatan	
1.b.6	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	$= \frac{42318}{50777} \times 100\%$ $= 83.34$	Dinas Kesehatan	
1.b.7	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	$= \frac{135488}{140566} \times 100\%$ $= 96.39$	Dinas Kesehatan	
1.b.8	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	$= \frac{343613}{541796} \times 100\%$ $= 63.42$	Dinas Kesehatan	
1.b.9	b. Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$= \frac{53373}{63841} \times 100\%$ $= 83.60$	Dinas Kesehatan	
1.b.10	b. Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$= \frac{54055}{59695} \times 100\%$ $= 90.55$	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.1 1	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	$= \frac{16117}{17132} \times 100\%$ = 94.08	Dinas Kesehatan	
1.b.1 2	b. Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	$= \frac{887}{887} \times 100\%$ = 100	Dinas Kesehatan	
1.b.1 3	b. Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	$= \frac{24272}{24272} \times 100\%$ = 100	Dinas Kesehatan	
1.b.1 4	b. Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	$= \frac{25815}{25815} \times 100\%$ = 100	Dinas Kesehatan	
1.c.1	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	$= \frac{10061.53}{13429.43} \times 100\%$ = 74.92	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.2	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$= \frac{1436.12}{2196.94} \times 100\%$ = 65.37	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.3	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	$= \frac{627696}{817340} \times 100\%$ = 76.80	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.4	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	$= \frac{7231}{175181} \times 100\%$ = 4.13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.c.5	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Luas Kawasan Permukiman	$= \frac{0}{1} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak memiliki kewenangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Ruang	Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	= 0	Umum	terhadap Wilayah Sungai (WS) di wilayah Kab. Kukar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
1.c.6	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak memiliki kewenangan terhadap Wilayah Sungai (WS) di wilayah Kab. Kukar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
1.c.7	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	$= \frac{102}{102} \times 100\%$ = 100	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.8	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	$= \frac{44}{44} \times 100\%$ = 100	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.9	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$= \frac{77300}{585200} \times 100\%$ = 13.21	Dinas Pekerjaan Umum	
1.c.10	c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	$= \frac{138}{138} \times 100\%$ = 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
1.d.1	d. Perumahan Rakyat	Persentase Warga Negara Korban Bencana	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Perumahan	tidak adanya penetapan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni		dan Kawasan Pemukiman	status bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis SPM bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
1.d.2	d. Perumahan Rakyat	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	$= \frac{2.30}{2.30} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.3	d. Perumahan Rakyat	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$= \frac{94}{2298} \times 100\%$ $= 4.09$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1.d.4	d. Perumahan Rakyat	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	$= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	masih berprosesnya serah terima Prasanana, Sarana, dan Utilitas Umum dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.e.1	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	$= \frac{1}{3} \times 100\%$ $= 33.33$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.2	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh	$= \frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100$	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Satuan Polisi Pamong Praja			
1.e.3	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	$= \frac{44}{44} \times 100\%$ $= 100$	Satpol PP	
1.e.4	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	$= \frac{225}{225} \times 100\%$ $= 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$= \frac{4202}{4202} \times 100\%$ $= 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	e. TRANTIBUMLINM AS	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$= \frac{77}{102} \times 100\%$ $= 75.49$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.f.1	f. Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$= \frac{322}{322} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.2	f. Sosial	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$= \frac{147}{147} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.3	f. Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$= \frac{888}{888} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.4	f. Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$= \frac{82}{82} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.5	f. Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	$= \frac{7034}{7034} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Sosial	
1.f.6	f. Sosial	Persentase Penerima		Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	$= \frac{1439}{1439} \times 100\%$ $= 100$		
2.a.1	a. Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	$= \frac{9}{10} \times 100\%$ $= 90$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.2	a. Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	$= \frac{47}{471} \times 100\%$ $= 9.98$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.a.3	a. Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	$= \frac{40839}{40839} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.b.1	b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$= \frac{151}{151} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.b.2	b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$= \frac{52}{52} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.c.	c. Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$= \frac{293.67}{150} \times 100\%$ $= 195.78$	Dinas Ketahanan Pangan	
2.d.1	d. Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$= \frac{4149011}{50183008.05} \times 100\%$ $= 8.27$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.d.2	d. Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	$= \frac{25292240000}{25292240000} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	

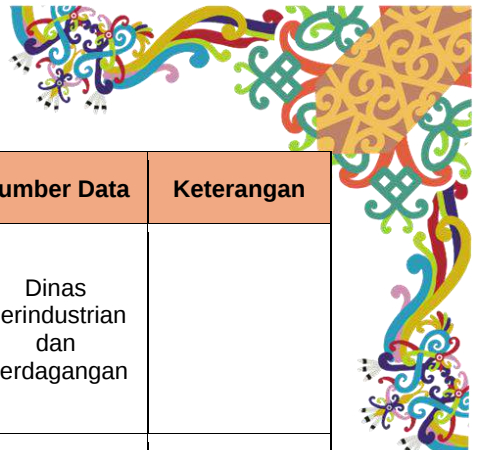
No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.d.3	d. Pertanahan	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	$= \frac{9}{18} \times 100\%$ $= 50$	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
2.e.1	e. Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$= \frac{42}{44} \times 100\%$ $= 95.45$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.e.2	e. Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$= \frac{105547.16}{144326} \times 100\%$ $= 73.13$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.f.1	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	$= \frac{251105}{255380} \times 100\%$ $= 98.33$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.f.2	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$= \frac{206365}{252691} \times 100\%$ $= 81.67$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.f.3	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	$= \frac{1}{2} \times 100\%$ $= 50$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.f.4	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	$= \frac{572388}{573722} \times 100\%$ $= 99.77$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.f.5	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$= \frac{42065}{42065} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.f.6	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$= \frac{270852}{270852} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.f.7	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$= \frac{9412}{9412} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.g.1	g. Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$= \frac{100}{100} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sejak tahun 2022, Status Desa Tertinggal di Kab. Kukar suda tidak ada
2.g.2	g. Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	$= \frac{6}{23} \times 100\%$ $= 26.09$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.g.3	g. Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	$= \frac{10}{16} \times 100\%$ $= 62.50$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.h.1	h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	$= \frac{2.16}{2.14} \times 100\%$ $= 100.93$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.h.2	h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	$= \frac{76684}{110131} \times 100\%$ $= 69.63$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.h.3	h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	$= \frac{4.98}{10.5} \times 100\%$ $= 47.43$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.i.1	i. Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio = 0.64	Dinas Perhubungan	
2.i.2	i. Perhubungan	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio = 0,33	Dinas Perhubungan	
2.i.3	i. Perhubungan	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Perhubungan	
2.j.1	j. Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet	$= \frac{56}{56} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.j.2	j. Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$= \frac{8}{8} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.j.3	j. Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$= \frac{548390}{552476} \times 100\%$ $= 99.26$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.k.1	k. Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	$= \frac{23945089339}{442013284038} \times 100$ $= -94.58$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.k.2	k. Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	$= \frac{44907}{59788} \times 100\%$ $= 75.11$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.l.1	l. Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$= \frac{3599363167806}{1641588215433} \times 100$ $= -78.07$	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.l.2	l. Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	$= \frac{12816525047627}{16000000000000} \times 100$ $= 80.10$	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	
2.m.1	m. Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$= \frac{2614}{327} \times 100\%$ $= 799.39$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.m.2	m. Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$= \frac{1303}{209941} \times 100\%$ $= 0.62$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.m.3	m. Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	$= \frac{0}{238} \times 100\%$ $= 0$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Pada tahun 2025 tidak ada event olahraga tingkat Nasional maupun internasional

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					yang diikuti, sehingga tidak dilaksanakan pemusatan pelatihan daerah (PELATDA) prov. Kal-tim
2.m.4	m. Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase jumlah atlet berprestasi	$= \frac{65}{167} \times 100\%$ $= 38.92$	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2.n	n. Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	$= \frac{7917}{7917} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o	o. Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	$= \frac{546}{918} \times 100\%$ $= 59.48$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.p.1	p. Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	$= \frac{15}{15} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.p.2	p. Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	$= \frac{123250}{293216} \times 100\%$ $= 57.97$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.q.1	q. Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	Nilai = 57.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.q.2	q. Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$= 0.03 + 0.10 \times 100\%$ $= 12.81$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.r	r. Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$= 100 + 100 + 100 + 100/4$ $= 100$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.a.1	a. Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	$= \frac{334755}{311670} \times 100\%$ $= 107.41$	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.a.2	a. Kelautan dan	Angka konsumsi ikan		Dinas Kelautan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perikanan	(Kg/Kap/Th)	$= 38.16 + 0 + 0$ $= 38.16$	dan Perikanan	
3.b.1	b. Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	$= \frac{41191543372}{41191543372} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pariwisata	
3.b.2	b. Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	$= \frac{197}{3803} \times 100\%$ $= -94.82$	Dinas Pariwisata	
3.b.3	b. Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$= \frac{72783}{1215549} \times 100\%$ $= -94.01$	Dinas Pariwisata	
3.c.1	c. Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	$= \frac{2759}{130776} \times 100\%$ $= -97.89$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.c.2	c. Pertanian	Peningkatan produksi hortikultura	$= \frac{11687.36}{113391.45} \times 100\%$ $= -86.69$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.c.3	c. Pertanian	Peningkatan produksi komoditas peternakan	$= \frac{2809011}{32914316} \times 100\%$ $= -91.47$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.c.4	c. Pertanian	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	$= \frac{1298042}{1298042} \times 100\%$ $= 100$	Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan	
3.f	d. Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$= \frac{2067}{7212} \times 100\%$ $= 28.66$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	e. Perindustrian	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	Nilai = 31.13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.g.2	e. Perindustrian	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$= \frac{32}{4416} \times 100\%$ $= 0.72$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	e. Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$= \frac{1593}{2823} \times 100\%$ $= -43.57$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.4	e. Perindustrian	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$= \frac{3638226808779}{12816525047627} \times 1$ $= 28.39$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Sumber : <https://silppd.kemendagri.go.id/>

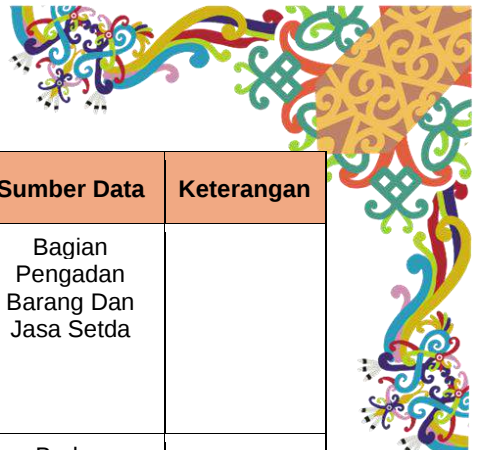
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Indikator Kinerja Kunci yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 8 Bidang Urusan Penunjang. Adapun rincian Capaian Indikator Kunci pada tabel berikut :

Tabel II-13 Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.a	a. Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$= \frac{16}{17} \times 100\%$ $= 94.12$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.b.1	b. Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	$= \frac{2281548064923.16}{11351031387452} \times 100\%$ $= 20.10$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.b.2	b. Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	$= \frac{76419350186673}{938400591230673} \times 100\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		daerah	= 8.14		
4.b.3	b. Keuangan	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	$= \frac{5181885526442.17}{9391632140720.31} \times 100\%$ = 55.18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.b.4	b. Keuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	$= \frac{6462360041208}{10161736548649} \times 100\%$ = 63.60	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.c	c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$= \frac{4842}{10101} \times 100\%$ = 47.94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4.d	d. Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	$= \frac{44}{49} \times 100\%$ = 89.80	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
4.e.1	e. Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) = 4	Inspektorat Daerah	
4.e.2	e. Pengawasan	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) = 5	Inspektorat Daerah	
4.e.3	e. Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	Nilai Manajemen risiko Indeks = 4	Inspektorat Daerah	
4.e.4	e. Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	$= \frac{1614}{1793} \times 100\%$ = 90.02	Inspektorat Daerah	
4.f.1	f. Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa = 40	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.f.2	f. Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan = 27.34	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	



No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.f.3	f. Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa = 13.67	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	
4.g.1	g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4.g.2	g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	$= \frac{4}{29} \times 100\%$ = 13.79	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
4.h	h. Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik = 94.46	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	

Sumber : <https://silppd.kemendagri.go.id/>

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Berikut disajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 :

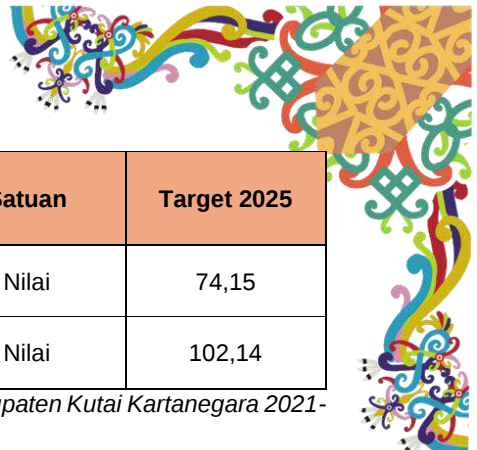
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2025, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang ditandatangani Bupati Kutai

Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-14 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	BB (77,00)
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,704
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,270
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4,00
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14

Sumber : Perjanjian Kinerja Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

a) Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(1 + \left(\frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right) \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK), Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel II-15 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel II-16 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	77,00	66,71	87%
Rata-rata Capaian							87%
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
Rata-rata Capaian							131%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108%
Rata-rata Capaian							108%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114%
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50	57,91	112%
Rata-rata Capaian							113%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102%
Rata-rata Capaian							102%
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	81,200	103%
Rata-rata Capaian							103%
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,27	*0,307	88%
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102%
Rata-rata Capaian							95%
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105%
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123%
Rata-rata Capaian							114%
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%
Rata-rata Capaian							149%
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor	Persen	4,00	*7,85	196%

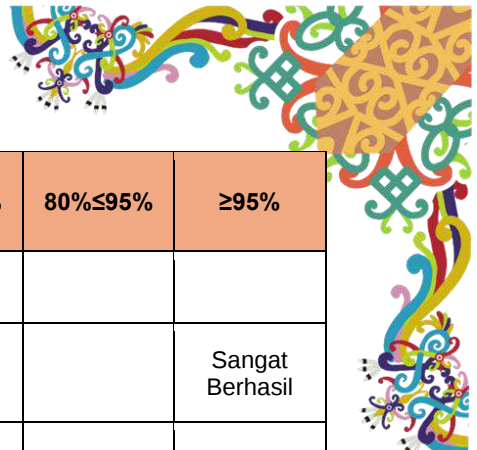
No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
			Pariwisata				
Rata-rata Capaian							196%
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48	*7,70	103%
Rata-rata Capaian							103%
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%
Rata-rata Capaian							-1239%
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81%
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	98,69	108%
Rata-rata Capaian							95%
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	89%
Rata-rata Capaian							89%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99%
Rata-rata Capaian							99%
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96%
Rata-rata Capaian							96%

*Capaian Tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum tersedia

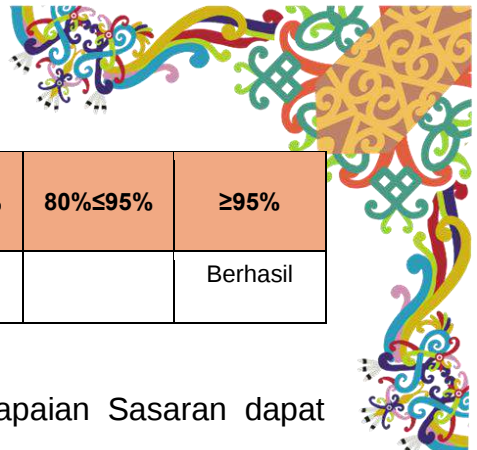
Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel II-17 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	87%			Berhasil	
2	Meningkatnya akuntabilitas	1	131%				Sangat Berhasil



No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
	pengelolaan keuangan daerah						
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	108%				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	113%				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	102%				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	103%				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	95%				Sangat Berhasil
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	114%				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	149%				Sangat Berhasil
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	196%				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	103%				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	-1239%	Kurang Berhasil			
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	95%			Berhasil	
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	89%			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	99%				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya	1	96%				Sangat



No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
	ketahanan bencana daerah						Berhasil

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d $< 50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

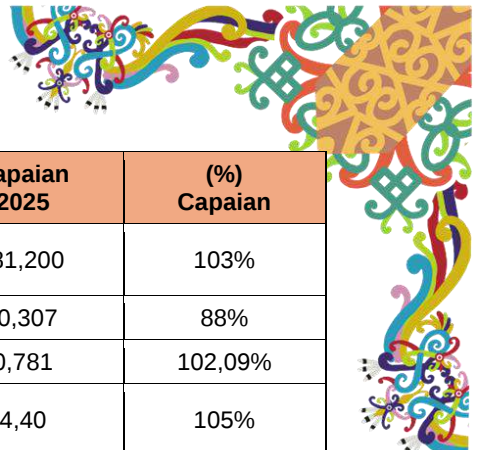
Tabel II-18 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	(%)
1	Sangat Berhasil	12	75,00%
2	Berhasil	3	18,75%
3	Cukup Berhasil	0	0,00%
4	Kurang Berhasil	1	6,25%
	Jumlah	16	100,00%

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II-19 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Capaian 2025	(%) Capaian
1	NILAI SAKIP	Nilai	77,00	66,71	87%
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131,18%
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108%
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	81%	114,45%
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,50	57,91	112,45%
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102,44%



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Capaian 2025	(%) Capaian
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	*81,200	103%
8	Indeks Gini	Nilai	0,27	*0,307	88%
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102,09%
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105%
11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123%
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4,00	*7,85	196%
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48	*7,70	103%
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81%
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	98,69	108%
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	88,68%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99,24%
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96%

*Capaian Tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum tersedia

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II-20 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	65,92	66,71	Meningkat 0,79
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,96	8,92	Menurun-0,04
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,74	9,69	Meningkat 0,95
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,71	0,81	Meningkat 0,1



NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
	dan Pelestarian Kebudayaan						
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	57,42	57,91	Meningkat 0,49
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,84	Meningkat 0,03
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,600	81,200	Meningkat 1,6
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,307	0,307	Sama
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7969	0,781	Menurun -0,02
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,11	4,40	Menurun -0,29
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	240,87	249,11	Meningkat 8,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	2,94	10,47	Meningkat 7,53
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	7,85	7,85	Sama
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,70	7,70	Sama
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	10,85	-21,93	Menurun -32,78
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	80,20	75,89	Menurun -4,31
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	98,64	98,69	Meningkat 0,05
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	76,045	77,310	Meningkat 1,27
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,59	73,59	Sama
16	Meningkatnya ketahanan bencana	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	118,80	106,40	Meningkat 12,4

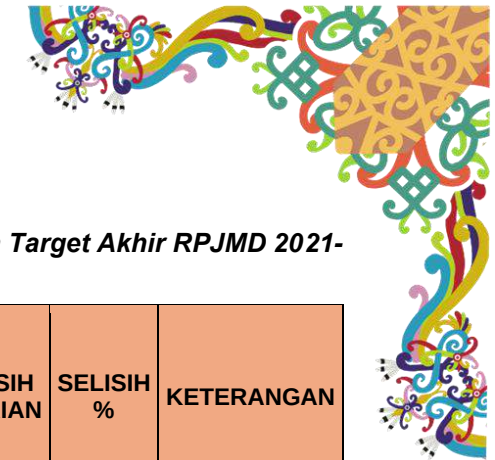


NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2024	2025	
	daerah						

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2025 menunjukkan angka penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang menunjukkan angka penurunan, dan ada 11 (sebelas) yang capaian kinerjanya meningkat, dan 4 diantaranya masih menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan sumber data belum dirilis.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

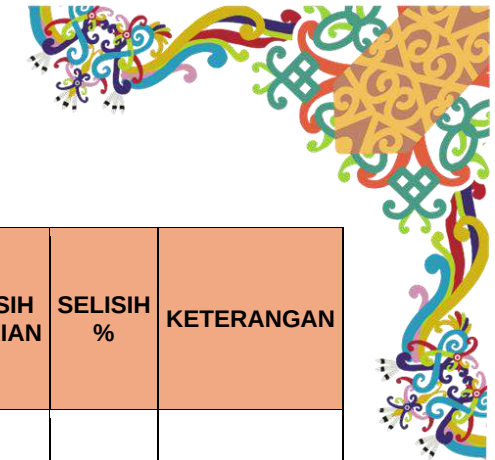
Jika membandingkan antara capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada **Tabel II-20**. dan Tahun 2025 adalah tahun ke-5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap capaian Tujuan Pemerintah Daerah, adapun hasil capaian tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



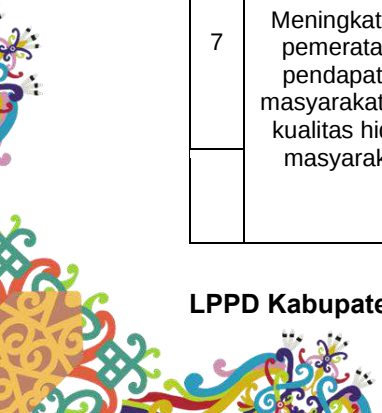
Tabel II-21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

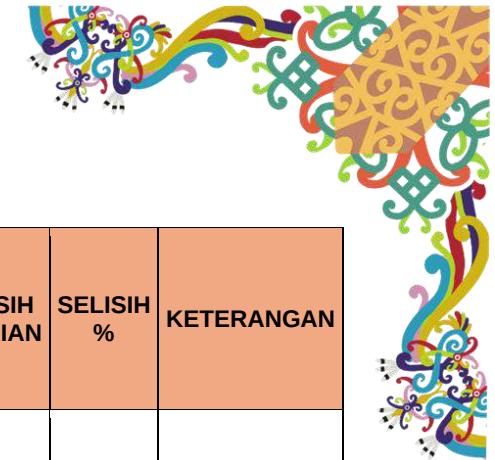
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	66,71	80,01	83%	0,79	-17%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,166	8,38	8,66	8,96	8,92	7	127%	-0,04	27%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9,69	9,05	107%	0,95	7%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,81	0,71	113%	0,10	13%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD



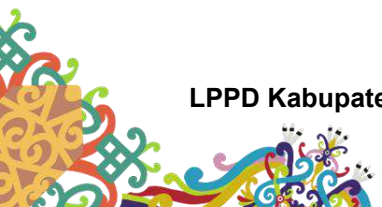


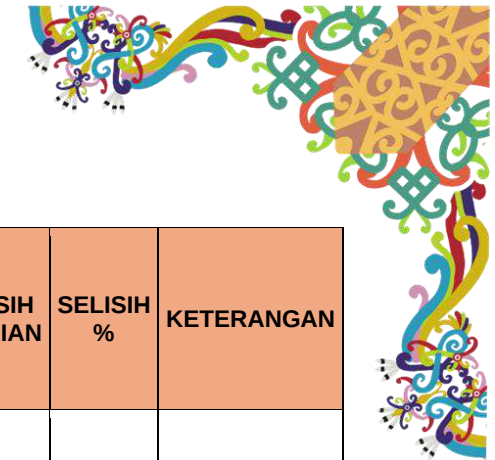
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n.a	47,42	53,23	57,42	57,91	53	109%	0,49	9%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,81	0,84	0,82	103%	0,03	3%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,8	79,8	79,600	81,200	79,2	103%	1,60	3%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,307	0,27	88%	0,00	-12%	
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,781	0,79	99%	-0,02	-1%	



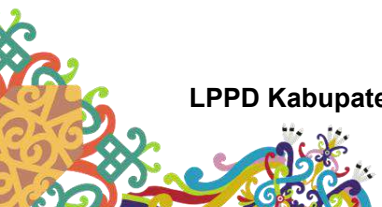


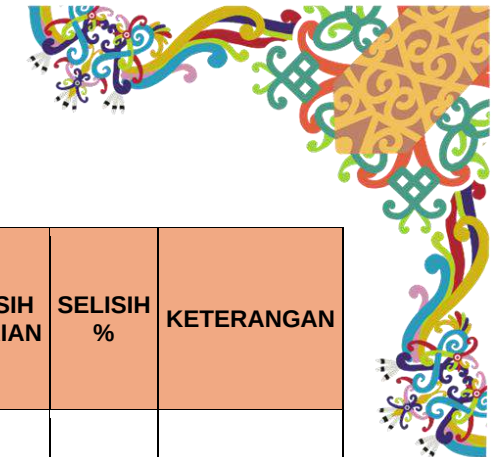
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,40	4,1	93%	0,29	-7%	
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	240,87	249,11	204,69	122%	8,24	22%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	1,02	1,91	2,91	2,94	10,47	7,5	140%	7,53	40%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74	7,85	7,85	4,23	186%	0,00	86%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96	7,70	7,70	7,56	102%	0,00	2%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	-21,93	30,9	-71%	-32,78	-171%	
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,18	80,20	75,89	95	80%	-4,31	-20%	
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	98,69	91,44	108%	0,05	8%	Capaian 2025 telah melebihi targetakhir RPJMD
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	77,310	88,18	88%	1,27	-12%	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	73,59	74,51	99%	0,00	-1%	

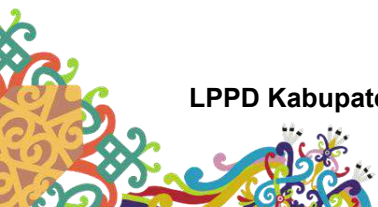


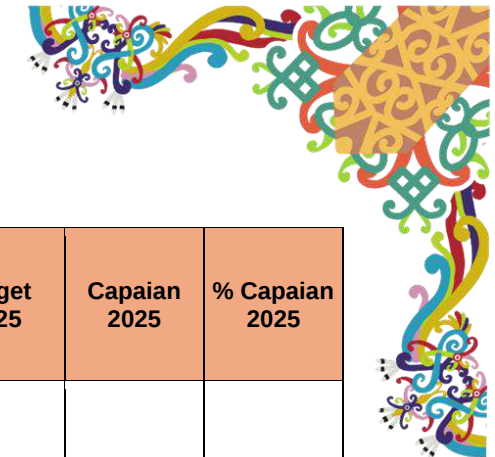


NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2025 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	106,40	100	94%	-12,40	-6%	

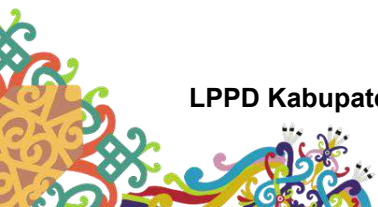
Tabel II-22 Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

NO	MISI / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian				Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025
				2021	2022	2023	2024			
	<i>Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani</i>									
1	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	62,74	60,12	71,33	65	79,82	123%
	<i>Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya</i>									
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	2 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	74,67	75,3	76,57	76,20	77,25	101%
3	Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	3 Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	78,83	73,02	79,60	74,00		0%
		4 Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	7,96	7,61	7,28	6,40	4,40	69%





NO	MISI / TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian				Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025
				2021	2022	2023	2024			
	<i>Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>									
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbaru	5 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	2,94	5,35	7,69	7,88	5,72	9,75	170%
	<i>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah</i>									
5	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	6 Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,8	35,8	16,183	16,183	32,8	16,183	49%
		7 Persentase penurunan kawasan kumuh / Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	48.00 (50.44 ha)	51,73 (86,97 ha)	45,87 (7,11 Ha) Data Revisi : 0,0046	0,0046	0,0055	92,26 (14,3 Ha)	1677455%
	<i>Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan</i>									
6	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	8 Persentase penurunan Emisi GRK	Persen	5,79	9,16	6,01	6,16	5,00	17,59	352%



e. Keterkaitan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Indikator RPJMD 2025–2029

1. Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029

Tabel II-23 Pemetaan Indikator RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029

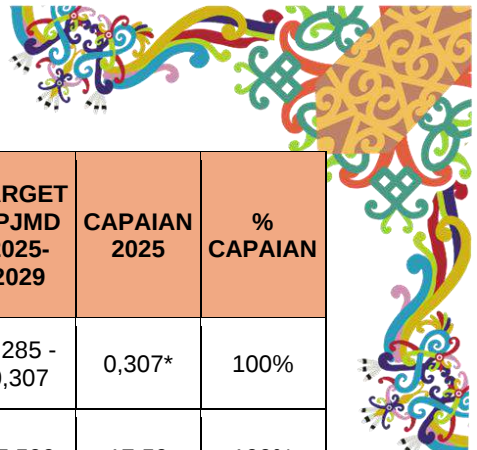
No	Indikator RPJMD 2021-2026	TARGET 2025 (RPJMD 2021-2026)	Indikator RPJMD 2025-2029	TARGET 2025 (RPJMD 2025-2029)	Keterangan
1	PDRB per Kapita	202,16	PDRB per Kapita	271,53 - 271,71	Beririsan/Masih berlaku
2	Nilai SAKIP	77,00	Nilai SAKIP	68,28	Beririsan/Masih berlaku
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85-4,00	Beririsan/Masih berlaku
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,82	Beririsan/Masih berlaku
5	Indeks Resiko Bencana	102,14	Indeks Resiko Bencana	115,80	Beririsan/Masih berlaku
6	Indeks Gini/Rasio Gini	0,27	Indeks Gini/Rasio Gini	0,285 - 0,307	Beririsan/Masih berlaku
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	6,8	Tidak Dilanjutkan		
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9	Tidak Dilanjutkan		
9	Indeks Pendidikan	0,704	Tidak Dilanjutkan		
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	Indeks Pembangunan Manusia	76,86	Perubahan Definisi
11	Indeks Kesehatan	0,821	Tidak Dilanjutkan		
12	Indeks Pembangunan Gender	79,15	Tidak Dilanjutkan		
13	Indeks Gini	0,27	Tidak Dilanjutkan		
14	Indeks Desa Membangun	0,765	Tidak Dilanjutkan		



No	Indikator RPJMD 2021-2026	TARGET 2025 (RPJMD 2021-2026)	Indikator RPJMD 2025-2029	TARGET 2025 (RPJMD 2025-2029)	Keterangan
15	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,05	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	8,14	Perubahan Definisi
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,7	Perubahan Definisi
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7,48			
18	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,77	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	0	Perubahan Definisi
19	Cakupan Layanan Air Bersih	93,58	Tidak Dilanjutkan		
20	Presentase Rumah Layak Huni	91,16	Tidak Dilanjutkan		
21	Indeks Aksesibilitas Wilayah	87,18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,66	Perubahan Definisi
22	-		Indeks Reformasi Birokrasi	73,34	Baru Ditambahkan
23	-		Indeks Daya Saing Daerah	3,58	Baru Ditambahkan
24	-		Indeks Pelayanan Publik	4,39	Baru Ditambahkan
25	-		Angka Kriminalitas	100	Baru Ditambahkan
26	-		Tingkat kemiskinan	6,68–6,95	Baru Ditambahkan
27	-		Penurunan Intensitas Emisi GRK	17,59	Baru Ditambahkan

Tabel II-24 Gambaran Awal Capaian Indikator RPJMD 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2025-2029	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70	3,43	60%
2			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	271,53 - 271,71	249,11	92%
3		Meningkatnya Pembangunan Ekonomi sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8,14	9,75	120%
4		Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0,00	-21,93	#DIV/0!
5		Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,66	76,24*	97%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,34	79,82	109%
7			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,58	100%
8		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,39	3,89	89%
9			Nilai SAKIP	Nilai	68,28	66,71	98%
10		Meningkatnya Stabilitas Kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	100	106*	94%
11	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat kemiskinan	%	6,68–6,95	6,72	100%
12		Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,86	77,25	101%
13		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85-4,00	4,40	110%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2025-2029	CAPAIAN 2025	% CAPAIAN
14			Rasio Gini	Indeks	0,285 - 0,307	0,307*	100%
15	Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,590	17,59	100%
16		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,82	73,59	93%
17		Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,80	106,40	109%

*Menggunakan Angka Baseline 2024 pada RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029

2. Catatan Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan ketentuan perencanaan pembangunan daerah, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 masih mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021–2026 yang masih berlaku pada saat penyusunan target kinerja. Namun demikian, dalam proses evaluasi dan pelaporan kinerja, beberapa indikator kinerja telah mulai diselaraskan dengan arah kebijakan dan indikator yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk transisi perencanaan agar kesinambungan antara periode pembangunan sebelumnya dengan periode pembangunan yang baru tetap terjaga. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan pencapaian terhadap target RPJMD 2021–2026, tetapi juga dapat menjadi baseline atau referensi awal dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 tetap dipaparkan sebagai capaian awal terhadap indikator dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai gambaran kondisi awal pembangunan daerah pada awal periode RPJMD baru. Adapun capaian dimaksud diuraikan sebagai berikut.

- 1) Gambaran Umum Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi sektor Unggulan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8,14	9,75	120

Sebelumnya, indikator yang digunakan berfokus pada laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, pada periode selanjutnya indikator tersebut diperluas menjadi PDRB sektor non-ekstraktif. Perubahan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di luar sektor ekstraktif.

Hal ini penting mengingat selama ini sektor ekstraktif masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pertumbuhan sektor non-ekstraktif diperlukan guna melihat potensi pengembangan sektor ekonomi lainnya serta mendorong diversifikasi struktur perekonomian daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penguatan sektor-sektor ekonomi di luar sektor ekstraktif.

2) Gambaran Umum Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0	-21,93	-1239

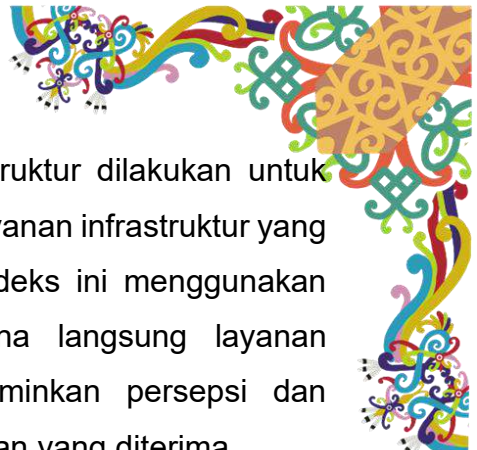
Indikator pertumbuhan investasi yang digunakan pada periode ini masih sama dengan yang digunakan pada RPJMD sebelumnya, yaitu menggunakan laju pertumbuhan nilai investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penggunaan indikator ini bertujuan untuk mengukur dinamika perkembangan investasi di daerah, baik yang bersumber dari investor asing maupun dari investor domestik, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian daerah.

3) Gambaran Umum Kinerja Sasaran 3. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,66	76,24*	97

*Capaian Tahun 2024

Perubahan metode dalam pengukuran dari sebelumnya yaitu aksesibilitas wilayah yang menghitung kondisi jalan serta keterhubungan antar-wilayah di kabupaten kutai



kartanegara. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah. Metode pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan survei kepada masyarakat sebagai pengguna langsung layanan infrastruktur, sehingga penilaian yang dihasilkan mencerminkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kondisi serta kualitas layanan yang diterima.

Dalam pelaksanaannya, responden yang dilibatkan merupakan masyarakat yang memanfaatkan layanan infrastruktur, seperti pengguna jalan, masyarakat penerima layanan air bersih, maupun masyarakat yang memanfaatkan fasilitas drainase dan sarana infrastruktur lainnya. Responden diminta memberikan penilaian terhadap beberapa aspek layanan infrastruktur, antara lain kondisi fisik infrastruktur, kemudahan akses terhadap layanan, keandalan layanan, kecepatan penanganan kerusakan, serta manfaat layanan bagi masyarakat.

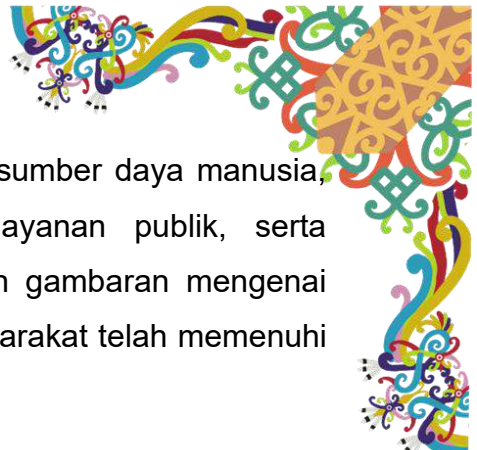
Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4, yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat dari kategori sangat tidak puas hingga sangat puas. Nilai dari setiap indikator kemudian dihitung rata-ratanya berdasarkan jawaban seluruh responden. Selanjutnya, nilai rata-rata tersebut dikonversi menjadi nilai indeks dengan skala 0 sampai dengan 100 melalui proses pengalihan dengan faktor konversi tertentu.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tersebut selanjutnya digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan perencanaan pembangunan infrastruktur pada periode berikutnya.

4) Analisis Kinerja Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Indeks	4,39	3,89
5	Nilai SAKIP	Indeks	Nilai	68,28	66,71

Indikator kinerja pada sasaran ini menggunakan Indeks Pelayanan Publik dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat ukur. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang mencakup



berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, indikator juga menggunakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Penilaian SAKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu merencanakan kinerja, mengukur pencapaian kinerja, serta melakukan evaluasi dan pelaporan secara efektif, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

5) Analisis Kinerja Sasaran 5. Meningkatnya Stabilitas Kondusivitas daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	100	106*	94%

*Capaian Tahun 2024

Indikator angka kriminalitas digunakan untuk menggambarkan tingkat kejadian tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini umumnya dihitung berdasarkan jumlah kasus tindak pidana yang tercatat oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Angka kriminalitas juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi sosial masyarakat, karena semakin rendah angka kriminalitas maka semakin baik tingkat keamanan dan stabilitas sosial di suatu daerah. Sebaliknya, peningkatan angka kriminalitas dapat menjadi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan kejahatan, peningkatan pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

6) Analisis Kinerja Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,86	77,25	101%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan daerah melalui peningkatan akses dan kualitas layanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

7) Analisis Kinerja Sasaran 7. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85-4,00	4,40	110%
9	Rasio Gini	Indeks	0,285 - 0,307	0,307*	100%

*Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk melihat kondisi pasar kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin rendah nilai Tingkat Pengangguran Terbuka, maka semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah karena menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, Rasio Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat

pemerataan pendapatan yang lebih baik, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

8) Analisis Kinerja Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,82	73,59	93%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup secara komprehensif di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan. Melalui pengukuran terhadap komponen tersebut, IKLH dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup serta tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah.

Nilai IKLH mencerminkan tingkat keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai IKLH, maka semakin baik pula kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKLH menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

9) Analisis Kinerja Sasaran 9. Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap bencana daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
11	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,80	106,40	109%

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat potensi risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu tingkat ancaman bencana (hazard), tingkat kerentanan masyarakat (vulnerability), serta kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana (capacity). Melalui pengukuran terhadap komponen-

komponen tersebut, Indeks Risiko Bencana dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana.

Nilai Indeks Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Semakin rendah nilai indeks risiko bencana, maka semakin baik tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam mengelola serta mengurangi dampak bencana. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

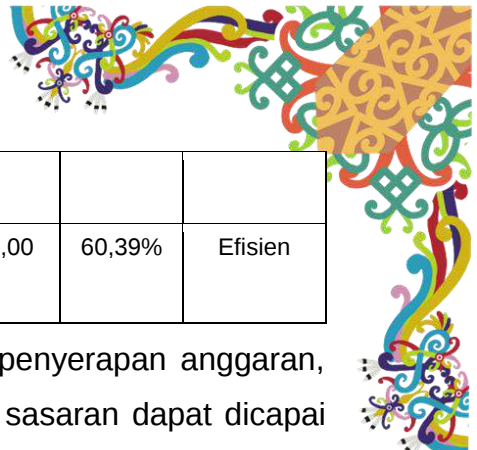
- 1) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- 2) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel II-25 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	91%	4.882.654.694.376,20	3.684.484.661.877,02	75,46%	Efisien
2	Meningkatnya	1	132%	41.832.701.646,00	30.949.204.152,00	73,98%	Efisien

	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah						
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	108%	249.620.318.780,00	206.155.597.695,00	82,59%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	114%	978.551.072.268,00	678.002.095.198,00	69,29%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	103%	856.077.506.762,00	688.894.577.416,00	80,47%	Efisien
6	Meningkatnya peran serta dalam pembangunan	1	103%	5.240.762.179,00	4.539.884.181,00	86,63%	Efisien
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	98%	294.452.558.434,00	262.783.253.298,00	89,24%	Efisien
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	113%	32.586.762.608,00	27.087.788.973,00	83,13%	Efisien
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	159%	628.915.220.112,00	536.455.880.753,59	85,30%	Efisien
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	230%	34.240.609.300,00	29.134.209.395,00	85,09%	Efisien
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	109%	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%	Efisien
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	-1253%	4.793.302.748,00	3.821.652.340,00	79,73%	Tidak Efisien
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	108%	849.605.509.598,00	629.928.274.320,00	74,14%	Efisien
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	88%	1.217.183.430.648,00	957.941.381.273,55	78,70%	Efisien
15	Meningkatnya kualitas	1	100%	58.735.396.699,00	46.016.406.945,00	78,35%	Efisien



	lingkungan hidup						
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	98%	7.236.131.670,80	4.369.612.678,00	60,39%	Efisien

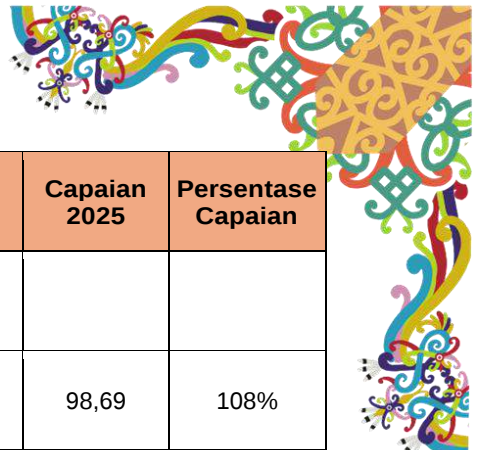
Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 15 (lima belas) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%. Dari 1 (satu) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 4 (lima belas) sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja, dan terdapat 4 (empat) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel II-26 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	77,00	66,71	87%
Rata-rata Capaian							87%
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,80	8,92	131%
Rata-rata Capaian							131%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108%
Rata-rata Capaian							108%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114%
		5	Indeks Pembangunan	Nilai	51,50	57,91	112%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
			Kebudayaan				
Rata-rata Capaian							113%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,821	0,84	102%
Rata-rata Capaian							102%
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,15	81,200	103%
Rata-rata Capaian							103%
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,27	*0,307	88%
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102%
Rata-rata Capaian							95%
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105%
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123%
Rata-rata Capaian							114%
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%
Rata-rata Capaian							149%
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	4,00	*7,85	196%
Rata-rata Capaian							196%
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,48	*7,70	103%
Rata-rata Capaian							103%
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%
Rata-rata Capaian							-1239%
13	Meningkatnya kualitas permukiman	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81%



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian
	masyarakat dan ketersediaan air bersih						
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	98,69	108%
Rata-rata Capaian							95%
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	89%
Rata-rata Capaian							89%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,15	73,59	99%
Rata-rata Capaian							99%
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96%
Rata-rata Capaian							96%

**Data Capaian Tahun 2024, dikarenakan Data 2025 belum rilis*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

g. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

- Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP mencapai **86,64** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-27 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025

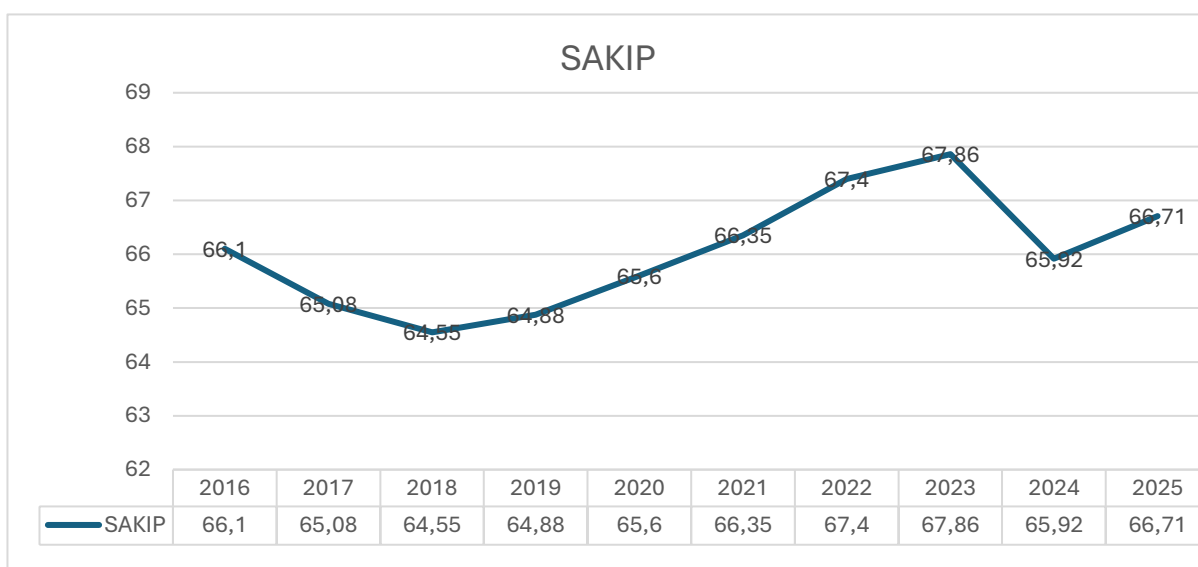
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode desk evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 66,71 Predikat B. Capaian ini meningkat 0,09 poin dari capaian Tahun 2024, namun capaian ini masih lebih rendah 10,29 dari target kinerja RPJMD 2025 yaitu sebesar 77,00. Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 10 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik II-4 Predikat SAKIP



Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2016-2025

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel II-28 Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,30	21,35
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,46	20,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,69

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,83	14,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,92	66,71
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-29 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

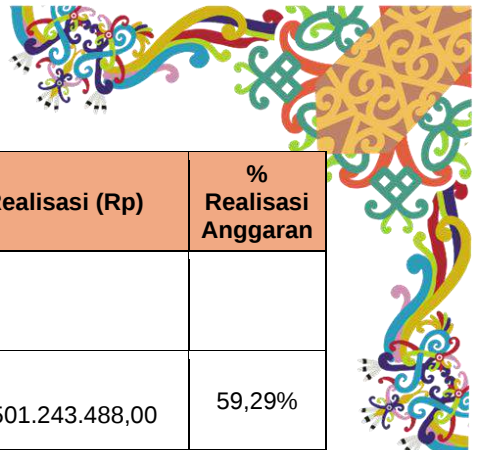
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	66,71	80,01

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-30 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.856.439.507.284,00	4.195.280.444.739,75	3.110.206.830.820,02	74,14%
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.075.000.000,00	509.376.070,00	459.237.809,00	90,16%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	695.000.000,00	442.513.700,00	350.441.600,00	79,19%
4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	75.000.000,00	34.110.800,00	28.741.102,00	84,26%
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.413.350.385,00	4.021.800.444,00	3.330.801.624,00	82,82%
6	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	74.129.898.000,00	59.684.274.909,00	54.426.573.829,00	91,19%
7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.380.000.000,00	4.398.376.564,00	2.734.552.316,00	62,17%
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	9.425.000.000,00	5.604.120.870,00	4.664.010.475,00	83,22%

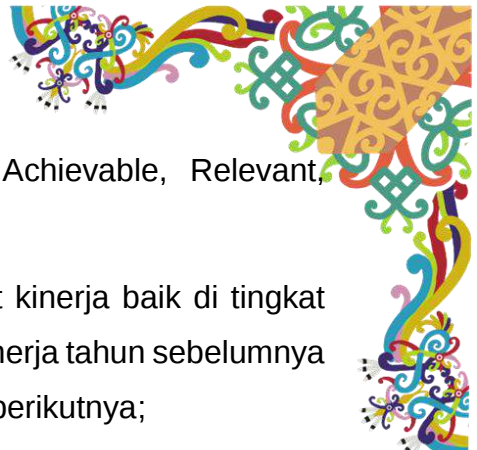


No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
9	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.290.000.000,00	5.905.643.556,00	3.501.243.488,00	59,29%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.820.000.000,00	4.767.316.920,00	3.390.841.334,00	71,13%
11	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.055.000.000,00	5.215.569.972,00	4.609.626.160,00	88,38%
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	596.073.174.800,00	587.054.061.886,45	489.613.879.206,00	83,40%
13	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.570.000.000,00	2.281.221.415,00	1.389.547.670,00	60,91%
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.162.701.502,00	7.098.112.830,00	5.574.976.194,00	78,54%
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	781.000.000,00	357.749.700,00	203.358.250,00	56,84%
	Total	4.588.384.631.971,00	4.882.654.694.376,20	3.684.484.661.877,02	75,46%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.3.684.484.661.877,02** dari total anggaran sebesar **Rp. 488.654.694.376,20** atau sebesar **75,46%**. Sementara itu, capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan mencapai **86,64%**. Meskipun penggunaan dana lebih rendah dari capaian kinerja, terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya, karena target sasaran belum sepenuhnya tercapai (100%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia, efektivitas dalam pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan.

Adapun rekomendasi dari evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk periode perencanaan selanjutnya sehingga berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasi dan diukur dengan



indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound);

2. Melakukan revidi dan perbaikan dalam menetapkan target kinerja baik di tingkat Pemda maupun PD dengan memanfaatkan data capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai landasan dalam penetapan target kinerja periode berikutnya;
3. Agar memperhatikan kepatuhan terkait pembaruan dan penyampaian dokumen perencanaan pada portal esr.menpan.go.id sebagai bentuk komitmen instansi dalam implementasi SAKIP yang lebih baik.
4. Memastikan IKU pada pemerintah daerah dan perangkat daerah yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, sumber data dan penanggungjawab;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam atas ketercapaian kinerja;
6. Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan target kinerja kedepan;
7. Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada di kondisi mana.
8. Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya pada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal selesai ditindaklanjuti oleh seluruh PD melalui mekanisme monitoring yang tepat secara berkala.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sudah mulai ditindak lanjuti, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan revidi dan perbaikan dalam penetapan target kinerja pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat

daerah dengan memanfaatkan data capaian kinerja tahun sebelumnya (*Baseline*) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja periode berikutnya, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.

2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam melakukan pembaruan serta penyampaian dokumen perencanaan melalui portal esr.menpan.go.id secara tepat waktu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi SAKIP yang lebih baik.
 3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah telah dilengkapi dengan komponen yang memadai, meliputi deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, sumber data, serta penanggung jawab indikator.
2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai **131,18%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-31 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,8	8,92	131,18

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun dalam LHE RB Tahun 2023 tidak mencantumkan nilai IPAK lagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 melaksanakan SPAK melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di 59 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 8550 layanan, dengan jumlah responden 77.112 orang.

Adapun hasil penarikan data IPAK melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar II-1 Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Gambar II-2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

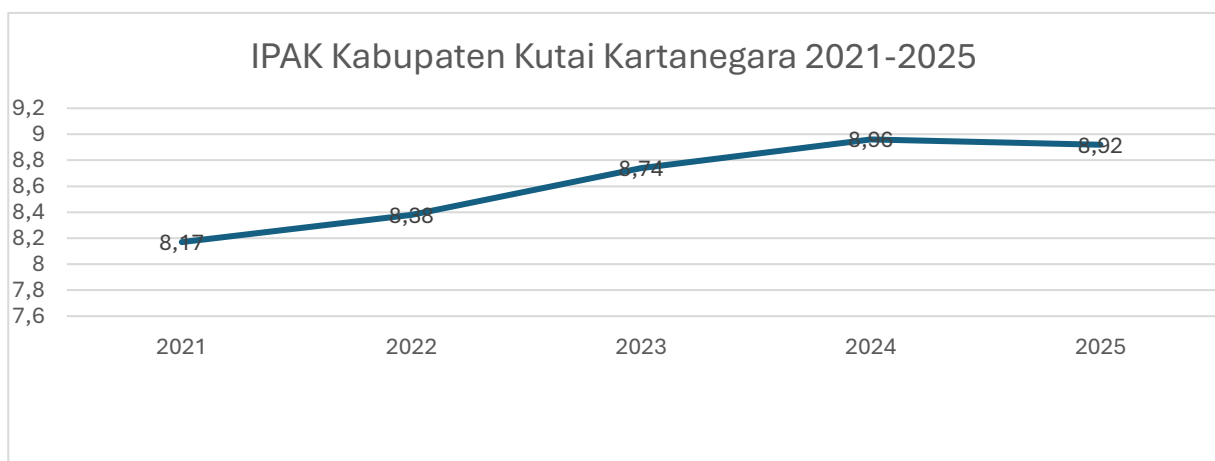
Gambar II-3 Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

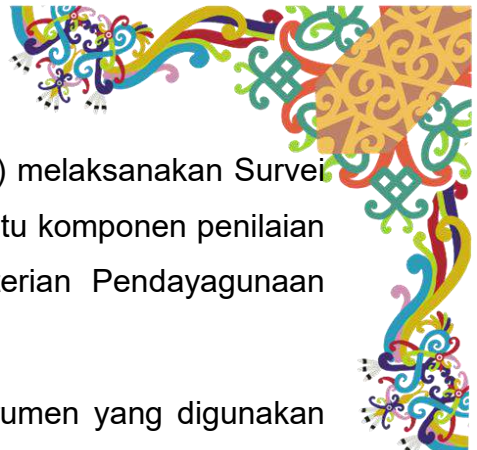
Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang dilakukan melalui survey mandiri, mengalami penurunan sebesar 0,04 dibandingkan dengan capai IPAK Tahun 2024 yang memperoleh nilai 8,96, setelah sebelumnya meningkat 0,22 di Tahun 2024 dibandingkan dengan IPAK Tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 8,74. Perkembangan IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Grafik II-5 IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2025

Karena SPAK dilaksanakan secara mandiri, sehingga tidak tersedia data IPAK Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK sejak Tahun 2021.



Sejak Tahun 2021 Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI), hasil survei ini juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam LHE Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga atau instansi, khususnya di sektor publik. SPI menjadi gambaran sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah diterapkan serta bagaimana persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko korupsi dalam suatu institusi.

SPI memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

- a. **Mengidentifikasi Risiko Korupsi.** SPI membantu menemukan titik rawan yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi dalam suatu instansi. Dengan memahami area yang berisiko, langkah-langkah mitigasi dapat segera diterapkan.
- b. **Mengukur Efektivitas Kebijakan Antikorupsi.** Hasil survei memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan pencegahan korupsi yang telah diterapkan oleh instansi berjalan dengan baik dan efektif.
- c. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.** Dengan adanya SPI, setiap instansi dapat lebih terbuka terhadap umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pegawai, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. **Mendorong Budaya Integritas.** SPI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan budaya kerja yang lebih transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

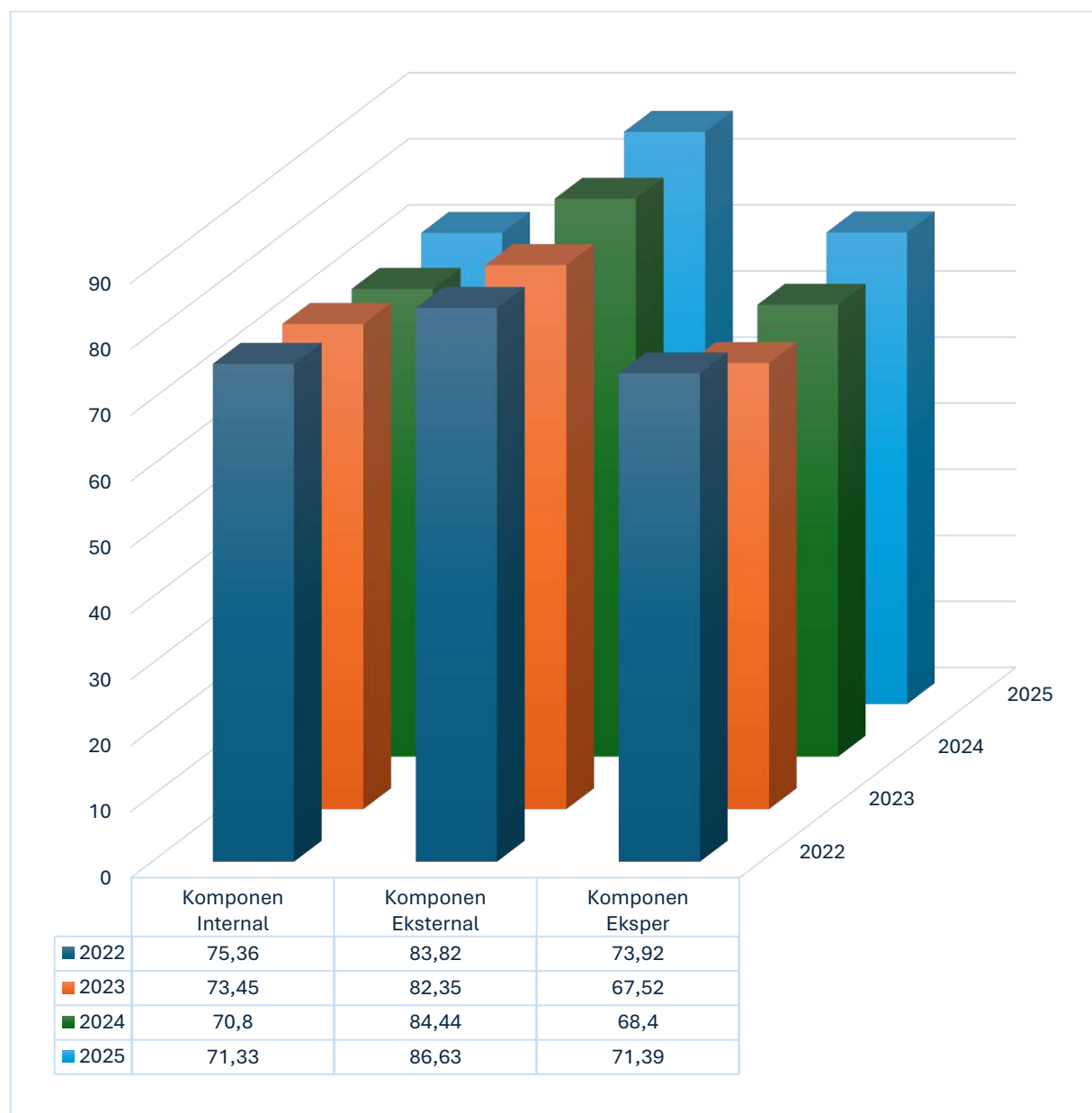
SPI dilakukan dengan metode survei yang melibatkan berbagai kelompok responden untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif. Responden yang biasanya dilibatkan antara lain:

- a. **Pegawai internal** di instansi yang bersangkutan.
- b. **Pengguna layanan atau mitra kerja** yang berinteraksi dengan instansi tersebut.
- c. **Eksper atau akademisi** yang memiliki wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti transparansi dalam pelayanan publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

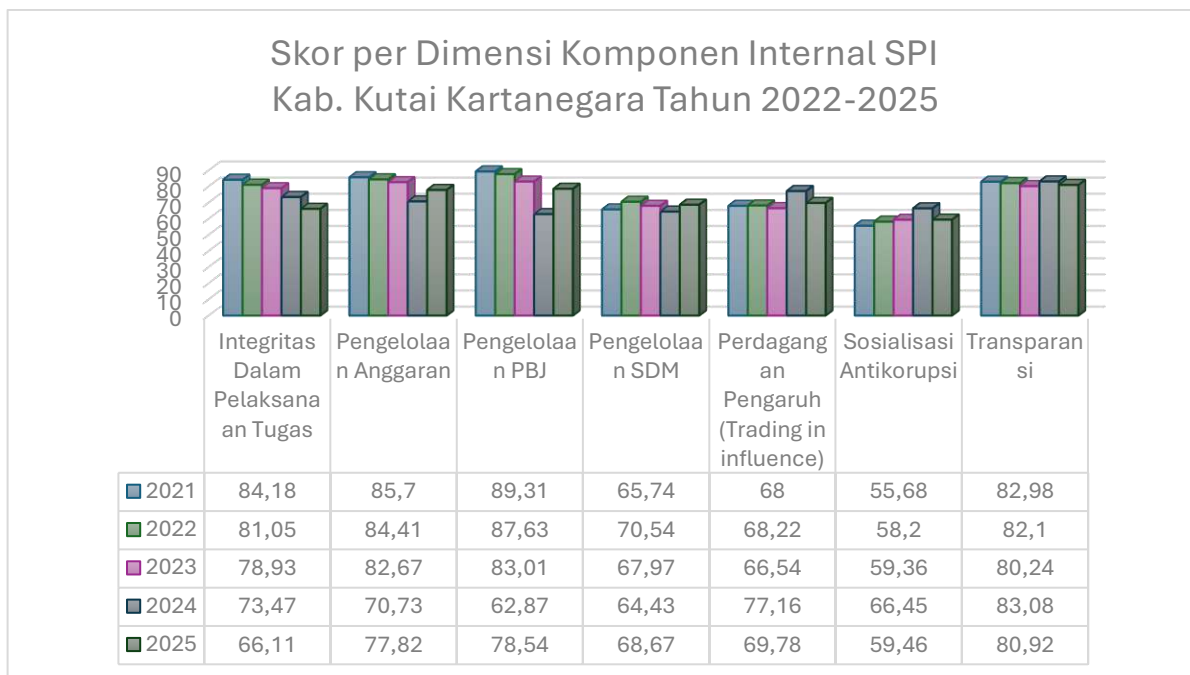
Berdasarkan hasil SPI yang dapat di akses pada laman <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=40829689>, Nilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 67,14, Skor turun sebanyak 0.55 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini berada dalam kategori Rentan. Berikut Detail Hasil Survei Penilaian Integritas Per Komponen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2025:

Grafik II-6 Detil Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Grafik II-7 Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel II-32 Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Rata-Rata SPI	2021	2022	2023	2024	2025	Kategori	Perbandingan Capaian SPI Tahun 2025 dengan 2024	Keterangan
Bontang	62,56	74,02	74,99	77,69	73,92	Waspada	-3,77	Menurun
Balikpapan	70,12	73,51	73,83	75,08	77,43	Waspada	2,35	Meningkat
Samarinda	62,8	70,03	72,32	71,55	75,90	Waspada	4,35	Meningkat
Paser	67,55	70,17	71,51	74,00	76,01	Waspada	2,01	Meningkat
Kutai Timur	59,94	65	70,99	59,16	66,36	Rentan	7,2	Meningkat
Berau	68,99	71,63	69,68	72,52	69,17	Rentan	-3,35	Menurun
Mahakam Hulu	71,25	66,98	69,14	71,08	70,08	Rentan	-1	Menurun
Kutai Kartanegara	72,06	67,22	67,69	67,14	71,59	Rentan	4,45	Meningkat
Kutai Barat	71,73	73,03	64,65	67,23	69,63	Rentan	2,4	Meningkat
Penajam Paser Utara	66,18	68,85	64,11	61,28	71,80	Rentan	10,52	Meningkat
Provinsi Kalimantan Timur	66,35	73,04	72,71	69,95	69,78	Rentan	-0,17	Menurun
Nasional	72,4	71,94	70,97	71,52	72,32	Rentan	0,8	Meningkat

Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi <https://jaga.id/>, ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dan ditahun 2023 hasil SPI Kabupaten

Kutai Kartanegara meningkat 0,47 point jika dibandingkan dengan hasil SPI Tahun 2022, Kemudian menurun kembali 0,55 poin di Tahun 2024 dibandingkan SPI Tahun 2023, dan Terjadi Peningkatan di Tahun 2025 sebesar 4,45 point dibandingkan SPI Tahun 2024.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	66,71	80,01

Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2025)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-34 Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.250.243.462.584,00	6.139.194.759,00	3.996.248.487,00	65,09%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.426.680.000,00	4.945.806.181,00	3.033.035.180,00	61,33%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	21.647.327.956,00	20.833.570.706,00	19.071.882.101,00	91,54%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.145.888.000,00	6.951.793.000,00	3.549.761.386,00	51,06%
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.150.000.000,00	2.962.337.000,00	1.298.276.998,00	43,83%
	Total	1.290.613.358.540,00	41.832.701.646,00	30.949.204.152,00	73,98%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.30,949,204,152.00** dari anggaran sebesar **Rp. 41,832,701,646.00** atau **73,98%**. Realisasi keuangan sebesar 73,98% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **131,18%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.



Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, catatan berisi Detil Hasil SPI Per Komponen Internal: 71,33; Eksternal: 86,63; Eksper: 71,39, dari data tersebut skor terendah terletak pada komponen internal, yang dimensinya meliputi Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading in influence), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi, sehingga ada rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025. Dalam SPI 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat skor SPI sebesar 71.59. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.

Langkah langkah dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

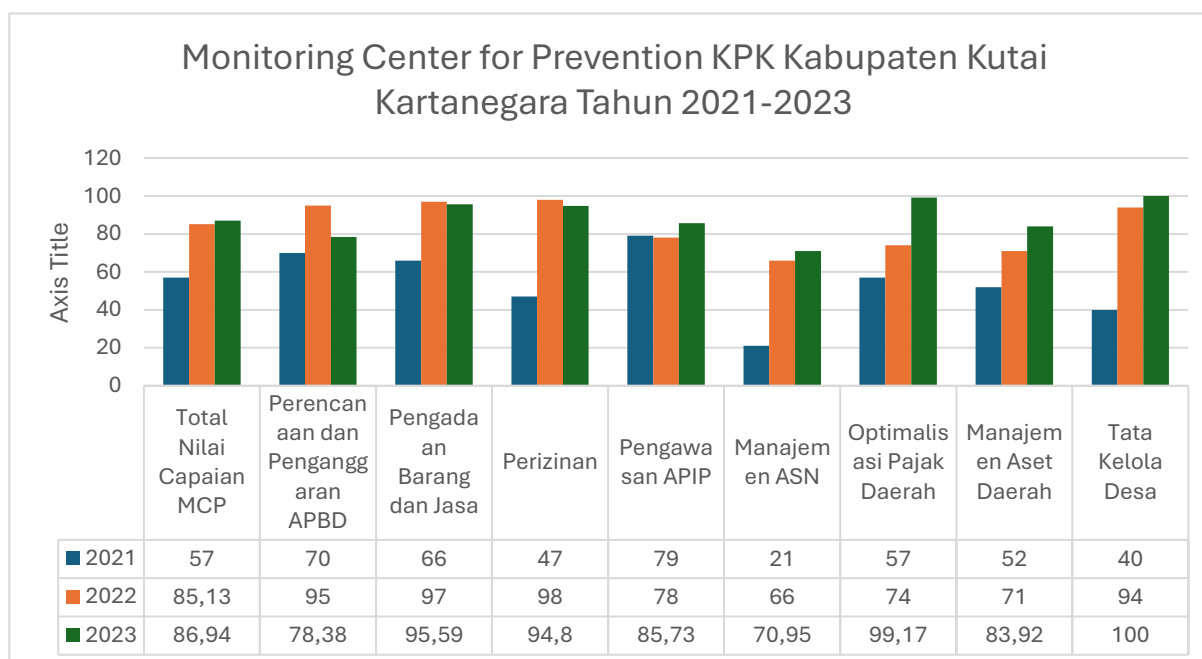
Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;

3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Grafik II-8 Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

*Terdapat perubahan komponen penilaian sejak 2024 sehingga Gambaran data perbandingan hanya sampai 2023

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi, secara keseluruhan Hasil MCP KPK Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dari Tahun 2022 sebesar 1,94%, namun dari 8 area intervensi, ada 3 area yang mengalami penurunan nilai, yaitu area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perizinan. Peningkatan signifikan pada area Tata Kelola Desa dari 94% di tahun 2022 menjadi 100% di Tahun 2023.

Untuk MCP KPK Tahun 2025 ada beberapa perubahan komponen penilaian, dan capaian MCP KPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengalami kenaikan

nilai 13,52 %, dari 69,85% di tahun 2024 turun menjadi 83,37% di tahun 2025, berikut disajikan data capaian sesuai komponen penilaian MCP KPK Kutai Kartanegara Tahun 2025:

Tabel II-35 Capaian Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

Uraian	Capaian		Uraian	Capaian
Perencanaan	72,58		Anggaran	82,91
Perencanaan Pembangunan Daerah	60		Pencegahan Terjadinya Penggelembungan (Mark Up) Anggaran	89
Pokok Pikiran	100		Benturan kepentingan pada Pengesahan APBD	77
Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan	58			
Pengadaan Barang dan Jasa	95,96		Pelayanan Publik	93,68
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	91		Sektor Perizinan	87
Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	99		Sektor Pendidikan	92
Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)	98		Sektor Kesehatan	96
			Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil	100
Pengawasan APIP	80,92		Manajemen ASN	85,29
Penguatan APIP	80,92		Tata Kelola Manajemen ASN	85,29
Pengelolaan BMD	68,36		Optimalisasi Pajak Daerah	73,83
Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah	68,36		Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	73,83
CAPAIAN 83,37				

Sumber data: JAGA - Platform Pencegahan Korupsi Tahun 2025

Secara umum, capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai agregat sebesar 83,37. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar area pencegahan korupsi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Pada area perencanaan pembangunan daerah, capaian yang diperoleh adalah 60. Nilai ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal penyusunan program dan anggaran.



Dalam aspek penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, capaian berada pada angka 58, yang merupakan salah satu nilai terendah dalam tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyaluran bantuan masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal transparansi, mekanisme verifikasi penerima, serta pengawasan terhadap penyaluran dana agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

Sebaliknya, pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, capaian menunjukkan nilai yang cukup tinggi yaitu 91. Hal ini menandakan bahwa proses pengadaan telah berjalan relatif baik, dengan penerapan sistem dan prosedur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.

Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa non-konstruksi melalui e-purchasing pada OPD tertentu (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU) bahkan memperoleh nilai 98, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap sistem pengadaan elektronik. Hal ini merupakan indikator positif bahwa digitalisasi pengadaan telah dimanfaatkan secara optimal untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Pada sektor pelayanan publik, sektor perizinan memperoleh nilai 87 dan sektor kesehatan memperoleh nilai 96. Nilai ini menunjukkan bahwa tata kelola layanan pada kedua sektor tersebut telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penerapan standar pelayanan, transparansi proses, serta pengendalian risiko korupsi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam aspek penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), capaian berada pada angka 80,92. Nilai ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dalam hal kapasitas SDM, kualitas audit, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, tata kelola manajemen ASN memperoleh nilai 85,29, yang mencerminkan bahwa sistem pengelolaan aparatur telah berjalan dengan relatif baik, termasuk dalam aspek transparansi, merit system, serta pengendalian terhadap potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan kepegawaian.

Pada aspek pengelolaan aset daerah, pencegahan penyalahgunaan barang milik daerah memperoleh nilai 68,36. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih

memerlukan perbaikan, terutama terkait penatausahaan aset, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah.

Terakhir, pada pencegahan kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah, capaian berada pada angka 73,83. Nilai ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam sistem pengawasan, digitalisasi penerimaan, serta integrasi data untuk meminimalkan potensi kebocoran.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” dengan indikator **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik** mencapai **108%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-36 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9,00	9,69	108

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

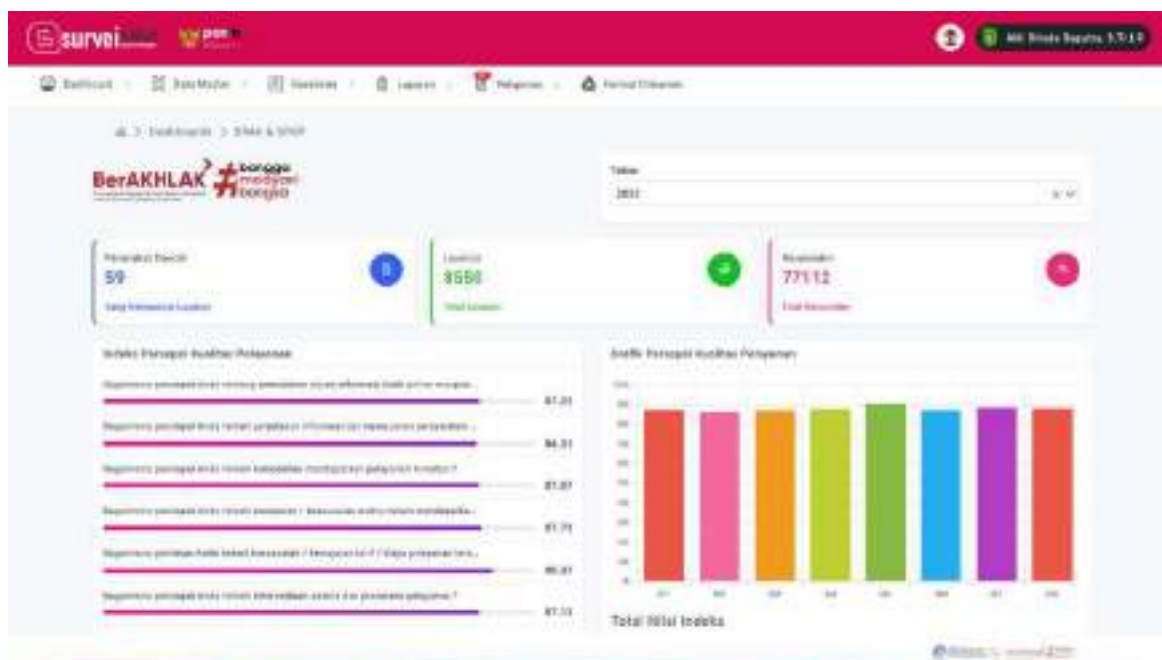
Rumus perhitungan atau Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini, melaksanakan SPKP melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di Tahun 2025 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 8550 layanan, dengan jumlah responden 77.112 orang.

Adapun hasil penarikan data IPKP melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar II-4 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2025 sebesar 9,69 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 9,69 capaian ini mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 0,95 dimana sebelumnya di Tahun 2024 IPKP sebesar 8,74.

Dalam dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi mulai Tahun 2023 sampai saat ini, juga tersedia Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Di Tahun 2025 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, terdapat sedikit perbedaan penetapan Unit Lokus Evaluasi (ULE) sebelumnya di Tahun 2024 dilakukan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Anggana,

Dinas Sosial dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Namun di Tahun 2025 yang menjadi ULE adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Kendati demikian, Unit Lokus Evaluasi yang secara spesifik dipilih terhadap 2 Perangkat Daerah tersebut tidak diberi nilai capaian per masing-masing Perangkat Daerah, Namun Nilai Indeks Pemerintah Daerah. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2025 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II-37 Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Instansi	Indeks	Kategori	No.
1	Provinsi Kalimantan Timur	4,35	A-	1
2	Bontang	4,53	A	2
3	Samarinda	4,67	A	3
4	Balikpapan	4,70	A	4
5	Kutai Timur	4,44	A-	5
6	Kutai Kartanegara	3,89	B	6
7	Kutai Barat	3,56	B	7
8	Paser	4,37	A-	8
9	Penajam Paser Utara	4,23	A-	9
10	Berau	4,30	A-	10
11	Mahakam Ulu	2,92	C	11

Sumber data: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang bersumber dari Kementerian PANRB, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 3,89 dengan kategori B.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan untuk dapat mencapai kategori A- atau A sebagaimana yang telah dicapai oleh beberapa daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, sebagian daerah telah memperoleh nilai dengan kategori A dan A-, seperti Kota Balikpapan (4,70), Kota Samarinda (4,67), Kota Bontang (4,53), serta beberapa kabupaten lainnya seperti Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, dan Berau. Sementara itu, capaian Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori yang sama dengan Kabupaten Kutai Barat (3,56) dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mahakam Ulu yang memperoleh nilai 2,92 dengan kategori C.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berada pada tingkat yang baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam penguatan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Tabel II-38 Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2025

No	Kab/Kota	Rata-Rata 2024	Kategori 2024	Rata-Rata 2025	Kategori 2025	Perbandingan Capaian 2025 dengan 2024	Keterangan
1.	Kutai Kartanegara	4,35	A-	3,89	B	-0,46	Menurun
2.	Samarinda	4,26	A-	4,67	A	0,41	Meningkat
3.	Balikpapan	4,19	A	4,70	A	0,51	Meningkat
4.	Bontang	4,28	A-	4,53	A	0,25	Meningkat
5.	Kutai Barat	4,11	A-	3,56	B	-0,55	Menurun
6.	Berau	3,71	B	4,30	A-	0,59	Meningkat
7.	Penajam Paser Utara	3,75	B	4,23	A-	0,48	Meningkat
8.	Kabupaten Kutai Timur	2,90	C	4,44	A-	1,54	Meningkat
9.	Kabupaten Paser	4,03	A-	4,37	A-	0,34	Meningkat
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	2,92	C	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024 dan 2025

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai Tahun 2023, melalui Aplikasi Survei Kukar, dan beberapa perangkat daerah masih melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak ke tiga. Berdasarkan Laporan Kompilasi Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pengolahan data SKM dari 56 (lima puluh enam) perangkat daerah, dan 3 RSUD, dengan total jumlah responden sebanyak **78.144** orang, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah **91,14 (Sangat Baik)**, caiapain ini lebih tinggi dari capaian IKM Tahun 2024 sebesar **88,85 (Sangat Baik)** atau meningkat 2,29 point. Adapun nilai IKM perunsur terdapat dalam tabel berikut:

Tabel II-39 Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,60
U2	Prosedur Pelayanan	3,58
U3	Kecepatan Pelayanan	3,54
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,84
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,58
U6	Kompetensi Petugas	3,60
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,63
U8	Penanganan Pengaduan	3,84
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,59

Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2025

Dari hasil survey diatas, diketahui 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang harus menjadi perhatian dan untuk segera dibenahi, yang pertama unsur kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,54, dapat diartikan pelayanan yang diberikan petugas masih dinilai lambat oleh masyarakat, unsur terendah ke dua adalah unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 3,58 dan unsur terendah ke tiga adalah unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,58. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyusun Langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-40 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

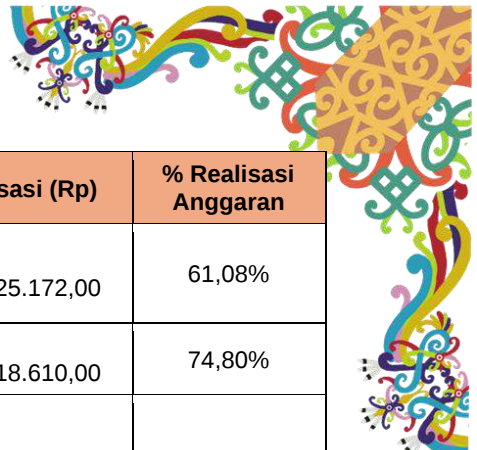
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9,69	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2021-2022 dan Survei Kukar 2023-2025

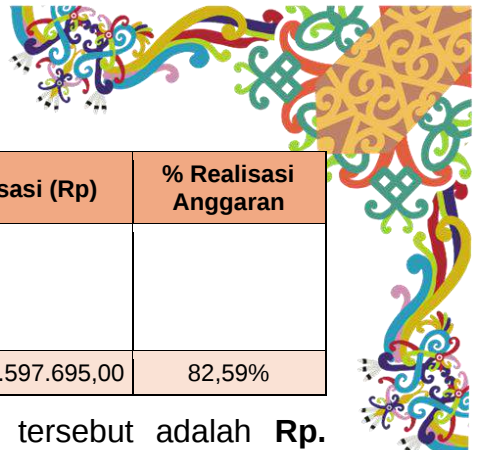
Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-41 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.498.240.000,00	5.219.143.075,00	4.591.123.556,00	87,97%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.225.000.000,00	364.964.400,00	222.925.172,00	61,08%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.410.893.206,00	344.020.700,00	257.318.610,00	74,80%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	475.000.000,00	117.125.400,00	86.711.388,00	74,03%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	160.000.000,00	31.515.000,00	25.470.000,00	80,82%
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	90.770.020.000,00	86.133.178.400,00	59.196.182.437,00	68,73%
7	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	173.630.787.670,00	84.935.867.135,00	75.854.328.179,00	89,31%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.250.000.000,00	2.628.642.980,00	1.731.203.324,00	65,86%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.050.000.000,00	1.154.067.484,00	1.115.070.660,00	96,62%
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.481.992.000,00	67.095.173.206,00	62.088.337.526,00	92,54%
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	700.000.000,00	228.070.000,00	113.280.959,00	49,67%
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.502.429.000,00	638.629.000,00	444.350.140,00	69,58%
13	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	2.200.000.000,00	729.922.000,00	429.295.744,00	58,81%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	Total	292.354.361.876,00	249.620.318.780,00	206.155.597.695,00	82,59%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp. 249.620.318.780,00** dari anggaran sebesar **Rp. 206.155.597.695,00** atau **82,59%**. Realisasi keuangan sebesar 82,59% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **108%**, maka terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil mencapai 100% dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik. Proses birokrasi yang panjang serta prosedur administrasi yang belum sepenuhnya sederhana menyebabkan masyarakat harus melalui berbagai tahapan pelayanan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan inkonsistensi dalam proses pelayanan. Selain itu, sebagian aparatur masih memiliki keterbatasan kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi pelayanan, serta pemahaman terhadap standar pelayanan.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), masih terdapat beberapa unit pelayanan yang memiliki keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, sistem antrean, perangkat komputer, serta jaringan internet yang belum sepenuhnya memadai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan juga belum optimal sehingga sebagian pelayanan masih dilakukan secara manual. Di samping itu, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik belum dilaksanakan secara maksimal, yang berpotensi menyebabkan proses pelayanan tidak berjalan secara konsisten.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyusunan dan penetapan kebijakan pelayanan pada setiap unit pelayanan, seperti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memastikan implementasinya berjalan secara optimal.



Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek pelayanan prima, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap standar pelayanan. Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan yang memadai pada seluruh unit pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu terus didorong melalui penggunaan berbagai aplikasi pelayanan publik yang telah tersedia, seperti Aplikasi DISAPA IDAMAN sebagai bentuk digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, serta Aplikasi Idaman Terbaik sebagai portal pelayanan publik yang menyediakan informasi terkait layanan pada seluruh unit pelayanan. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara konsisten dapat menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”** dengan indikator **Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan** mencapai **113,45%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-42 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114,45
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,91	112,45
Rata-rata Capaian					113,45

Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki

daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2025 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di Grafik 2.3.7. Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2025 IPM Kutai Kartanegara meningkat 0,68 poin menjadi 77,25. Selama periode 2010-2025 IPM Kutai Kartanegara selalu lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2025, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 9,8 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 8,08 persen.

Grafik II-9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2025



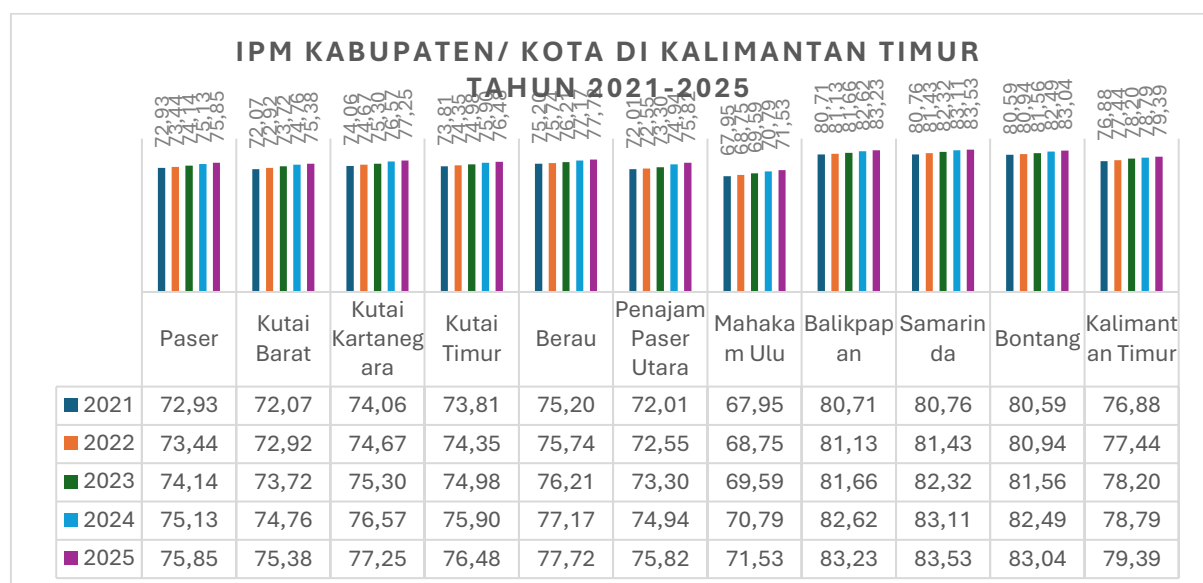
Sumber: BPS

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2025, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, 13,65 tahun pada 2024, dan mencapai 13,85 tahun pada 2025 yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik II-10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025

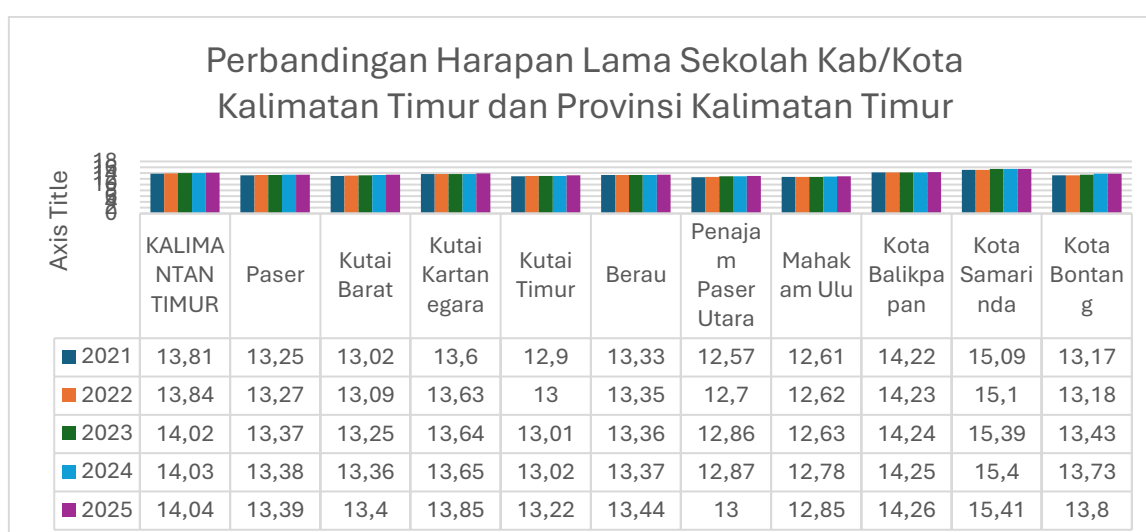


Sumber: BPS, 2025

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,85 tahun pada 2025, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025.

Grafik II-11 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2025

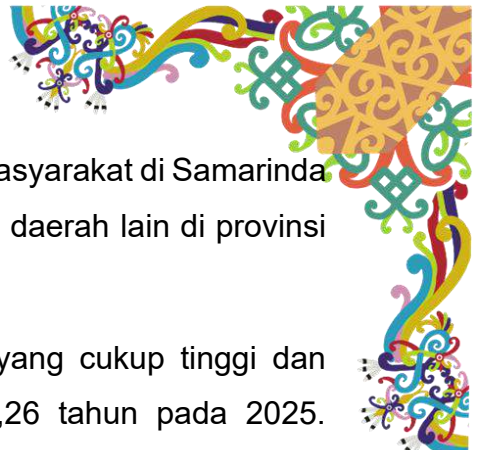


Sumber: BPS, 2025

Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa secara umum HLS mengalami peningkatan secara bertahap di hampir seluruh wilayah selama periode tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan akses dan peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lama.

Secara provinsi, Kalimantan Timur mengalami peningkatan HLS dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata anak usia sekolah di Kalimantan Timur memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga sekitar 14 tahun atau setara dengan pendidikan menengah atas.

Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, Kota Samarinda memiliki nilai HLS tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Nilainya meningkat dari 15,09 tahun pada 2021 menjadi



15,41 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat di Samarinda untuk mengenyam pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.

Selanjutnya, Kota Balikpapan juga menunjukkan nilai HLS yang cukup tinggi dan stabil, meningkat dari 14,22 tahun pada 2021 menjadi 14,26 tahun pada 2025. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser memiliki nilai HLS yang berada di kisaran 13–14 tahun, dengan tren peningkatan yang relatif kecil namun tetap konsisten.

Di sisi lain, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu merupakan daerah dengan nilai HLS relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2025, HLS di Penajam Paser Utara mencapai 13,0 tahun, sedangkan Mahakam Ulu sebesar 12,85 tahun. Meskipun demikian, kedua daerah tersebut tetap menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa ketimpangan HLS antar daerah masih terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan beberapa kabupaten yang lebih terpencil. Namun demikian, tren peningkatan yang terjadi di seluruh wilayah mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Timur.

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perubahan terjadi dalam pengukuran indeks pengetahuan, di mana indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat yang tinggi dan tidak lagi sensitif untuk mengukur kualitas pendidikan. Pada tahun 2010, dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pengetahuan mencatat angka terendah yaitu 57,79. Pada tahun 2022, indeks ini mengalami peningkatan sebesar 10,87 poin menjadi 68,66. Pada tahun 2024, Indeks Pengetahuan nasional meningkat lagi menjadi sekitar 65-66, seiring dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,85 tahun, menunjukkan bahwa pendidikan formal rata-rata di Indonesia telah mencapai tingkat SMP kelas 2. Meskipun Indeks Pengetahuan tetap menjadi komponen IPM dengan angka terendah, pertumbuhannya tetap yang tercepat dibandingkan indeks lain.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tren nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Timur telah mencapai lebih dari 13 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat mendekati 9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan setidaknya hingga tingkat SMP. Secara spesifik, di Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan indeks ini didukung oleh program pendidikan daerah, seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan bagi tenaga pendidik. Kebijakan pemerintah daerah yang terus memperluas akses pendidikan, baik melalui infrastruktur sekolah maupun program bantuan pendidikan, turut mempercepat kenaikan Indeks Pendidikan.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas di desa-desa terpencil, serta minimnya akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap perbedaan pencapaian pendidikan antarwilayah dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Dengan berbagai upaya peningkatan pendidikan yang terus dilakukan, diharapkan Indeks Pendidikan di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur dapat terus meningkat, mengejar rata-rata nasional, serta mendukung target peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

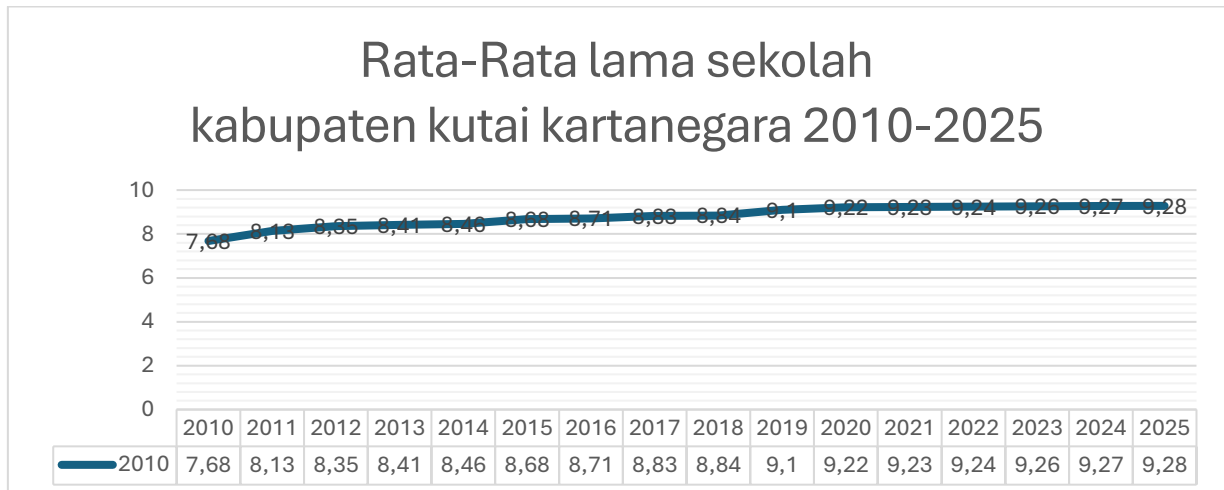
I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25

tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik II-12 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025



Sumber: BPS 2025

Grafik menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2025, yang mengalami peningkatan dari 7,68 tahun pada 2010 menjadi 9,28 tahun pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan formal, di mana rata-rata penduduk Kutai Kartanegara telah menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan SMP kelas 3. Meskipun mengalami pertumbuhan, angka ini masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2025 mencapai 10,30 tahun.

Grafik II-13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025



Sumber: BPS 2025

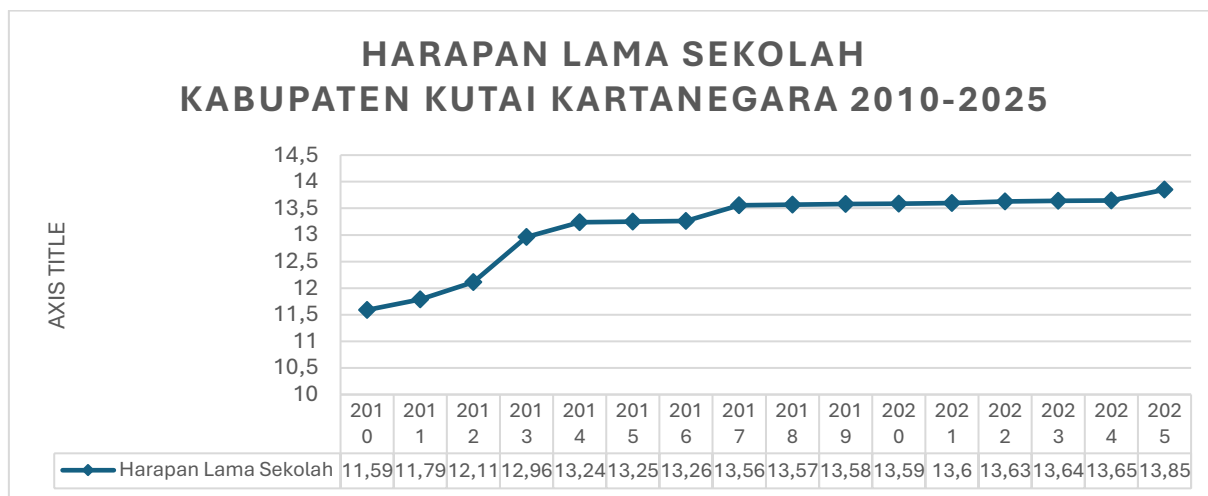
Sebagai perbandingan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki RLS yang lebih tinggi, masing-masing 11,04 tahun, 11,04 tahun, dan 11,03 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan lebih banyak yang telah menamatkan jenjang SMA atau setidaknya mencapai kelas 1 SMA dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Faktor seperti akses sekolah yang lebih mudah, ketersediaan tenaga pendidik yang lebih baik, serta infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap di daerah perkotaan dapat menjadi penyebab utama tingginya angka RLS di kota-kota tersebut.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara, yang pada tahun 2024 masing-masing hanya mencapai 8,71 tahun dan 8,72 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan tantangan geografis dan akses pendidikan yang masih terbatas, rata-rata pendidikan penduduknya masih lebih rendah, dengan banyak yang belum menyelesaikan jenjang SMP.

Meskipun RLS di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, kesenjangan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda masih cukup terasa. Faktor yang dapat mendorong peningkatan RLS lebih signifikan di Kutai Kartanegara antara lain perluasan akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih merata. Dengan program-

program ini, diharapkan rata-rata lama sekolah di Kutai Kartanegara dapat terus meningkat, mengejar angka provinsi, dan mendekati capaian daerah perkotaan di Kalimantan Timur.

Grafik II-14 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2025



Sumber: BPS 2025

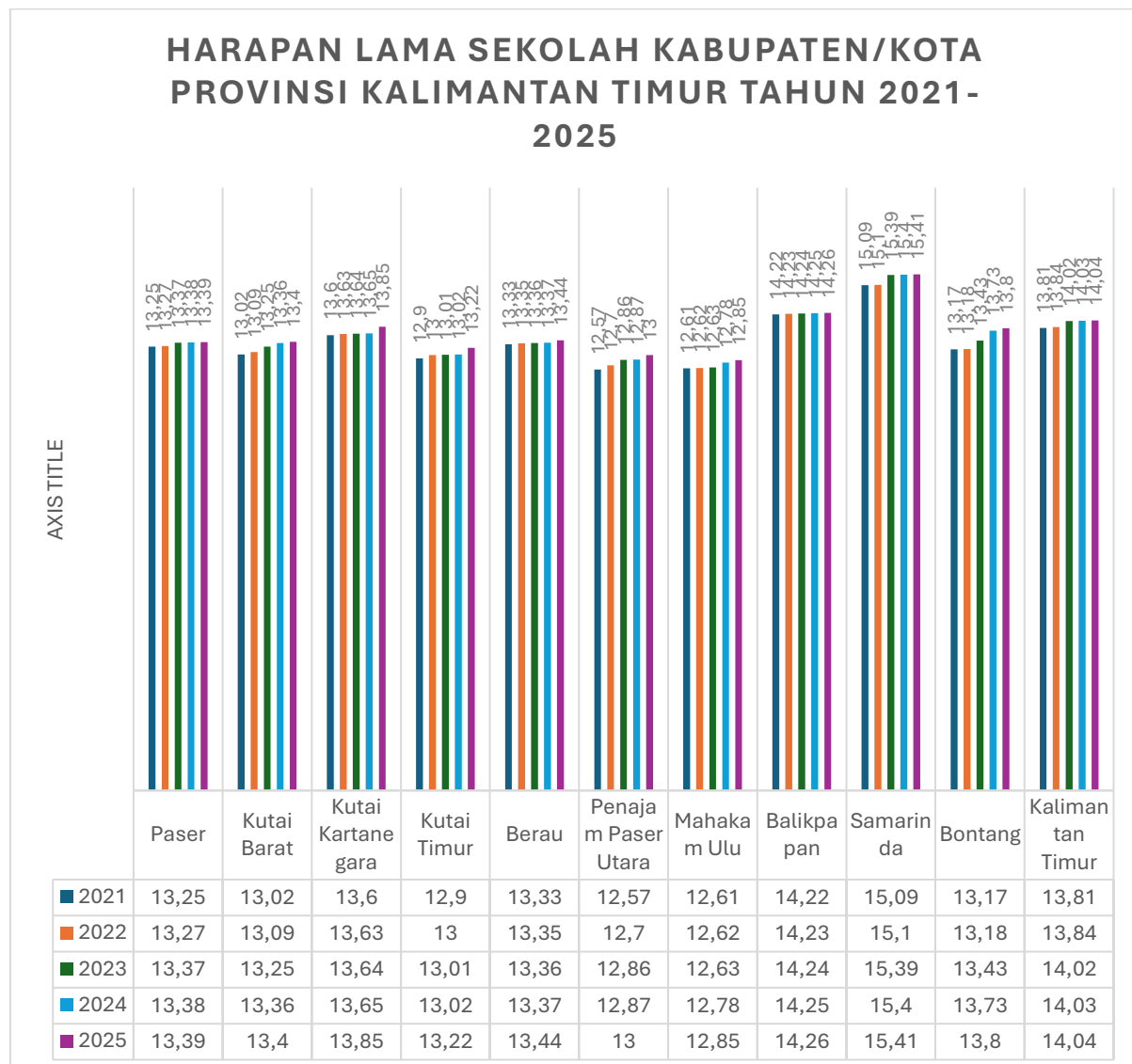
Grafik menunjukkan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2025, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, 13,65 tahun pada 2024, dan mencapai 13,85 pada tahun 2025 yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta

mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik II-15 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2025



Sumber: BPS 2025

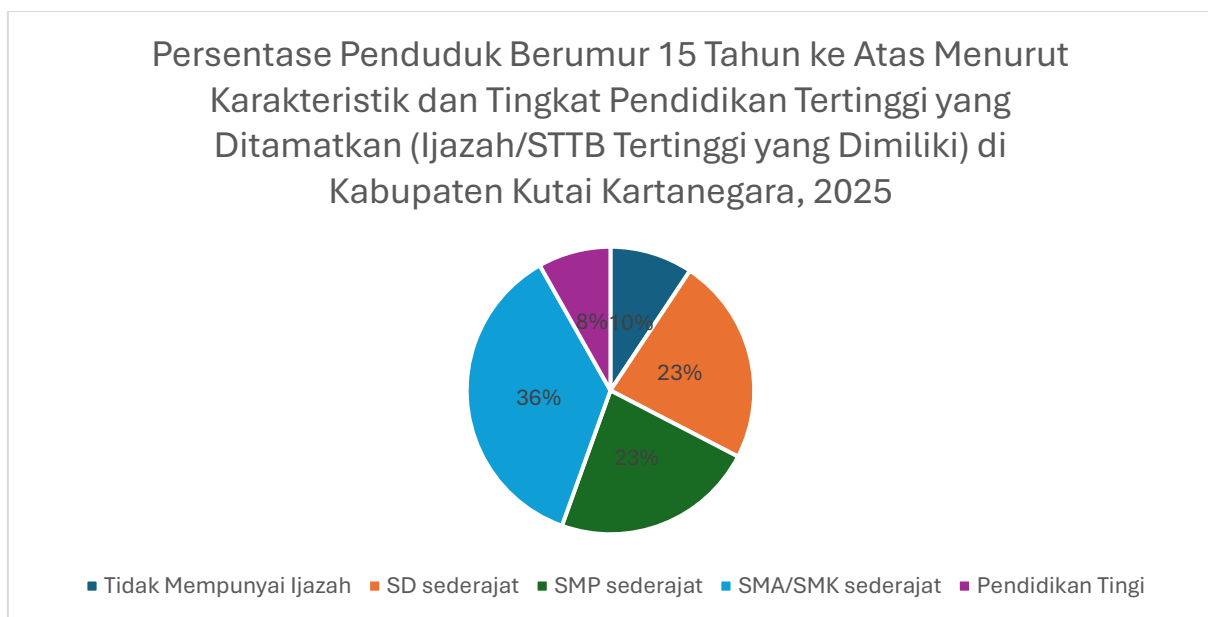
perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,85 tahun pada 2025, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,04 tahun pada 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,41 tahun dan 14,26 tahun pada 2025, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,85 tahun dan 13,00 tahun pada 2025, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah.

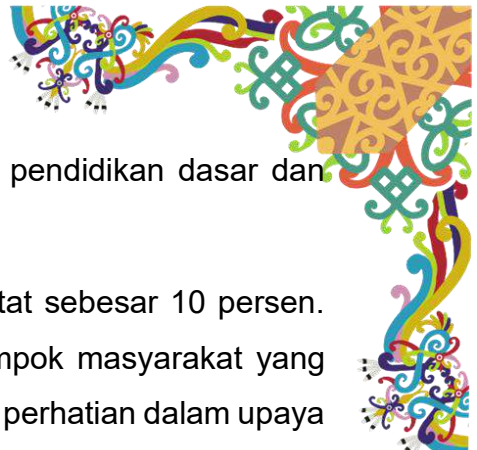
Grafik II-16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025



Sumber: BPS 2025, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) November

Struktur tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini tercermin dari persentase penduduk dengan pendidikan SMA/SMK sederajat yang mencapai 36 persen, yang merupakan proporsi terbesar dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Selanjutnya, penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat dan SD sederajat masing-masing memiliki proporsi yang sama, yaitu sebesar 23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat bagian yang cukup signifikan dari



penduduk yang tingkat pendidikannya berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Sementara itu, penduduk yang tidak mempunyai ijazah tercatat sebesar 10 persen. Persentase ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menamatkan pendidikan formal, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

Di sisi lain, proporsi penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi tercatat sebesar 8 persen, yang merupakan bagian paling kecil dalam komposisi tingkat pendidikan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah mencapai pendidikan menengah, namun peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta pengurangan jumlah penduduk yang belum memiliki ijazah pendidikan formal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = 0,71$$

2) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa

pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencapai 57,91, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 57,42. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dari sisi pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi budaya, hingga aspek kesetaraan gender. Setiap dimensi yang membentuk IPK memiliki peran yang signifikan dalam mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan di daerah ini.

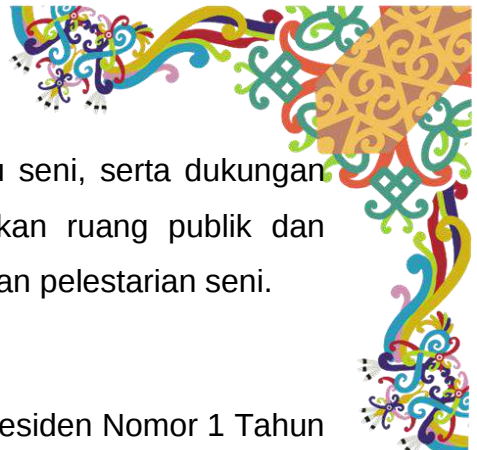
Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Dimensi Ekonomi Budaya pada Tahun 2025 mencapai 39.00, tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.



23 September 2025: Koordinasi dengan Pusdatin dan Bagian Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan permintaan data jumlah pengunjung event serta jumlah pengrajin dan UMKM yang menjual produk tradisional (Dimensi Warisan Budaya dan Ekonomi

- **Capaian indikator utama:** 39% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki sumber penghasilan dari keterlibatan dalam seni pertunjukan, tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.
- **Faktor pendukung:**
 - o Adanya program stimulan dari pemerintah kepada para pelaku seni pada tahun sebelumnya yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan aktivitas berkarya dan kesempatan tampil pada berbagai kegiatan di tahun berikutnya.

- 
- o Tingginya semangat dan konsistensi para pelaku seni, serta dukungan komunitas budaya yang tetap aktif memanfaatkan ruang publik dan berbagai event budaya sebagai sarana ekspresi dan pelestarian seni.

- **Tantangan:**

- o Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya jumlah event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- o Keterbatasan dukungan anggaran yang menyebabkan kesempatan tampil bagi pelaku seni menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan mengalami peningkatan dari **73,66** pada tahun 2024 menjadi **73,77** pada tahun 2025. Pendidikan yang lebih inklusif terlihat dari semakin tingginya angka partisipasi sekolah bagi kelompok ekonomi 40% terbawah yang mencapai **91,79%**. Rata-rata lama sekolah penduduk juga sedikit meningkat menjadi **9,28 tahun**, sementara harapan lama sekolah mencapai **13,65 tahun**. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan inklusif dan implementasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, termasuk pengajaran bahasa daerah dan seni budaya. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang hanya **48,35%**, serta kurangnya tenaga pendidik di bidang seni dan budaya.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mengalami penurunan dari **82,29** pada tahun 2024 menjadi **80,62** pada tahun 2025. Terdapat perubahan tingkat toleransi sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 mencapai **94,33%**, Menurun dibandingkan Tahun 2024 sebanyak **97,79%** rumah tangga menyatakan setuju jika salah satu anggota keluarga mereka bersahabat dengan orang dari suku yang berbeda. Meskipun mengalami penurunan, angka masih berada pada posisi tinggi dalam hal toleransi antar-masyarakat. Sebagian besar masyarakat juga menerima keberadaan kelompok dari suku lain dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Program penguatan toleransi sosial dan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya berperan dalam mempertahankan harmoni

sosial ini. Namun, meningkatnya pola hidup individualis serta pengaruh media digital menjadi tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.

d. Dimensi Warisan Budaya

Dimensi Warisan Budaya mengalami penurunan dari **69,74** pada tahun 2024 menjadi **66,51** pada tahun 2025, Lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu **67,43**. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk pelestarian budaya, termasuk penetapan **12 dari 100 Objek Diduga Cagar Budaya**



sebagai Cagar Budaya Kabupaten serta pengakuan **25 dari 60 Warisan Budaya Takbenda** sebagai bagian dari budaya nasional. Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya terus diperkuat melalui kegiatan berbasis budaya seperti festival seni dan budaya lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan penggunaan bahasa daerah yang masih rendah, dengan hanya **38,26%** penduduk yang menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perhatian terhadap cagar budaya yang belum terdaftar juga masih perlu ditingkatkan.

e. Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi Ekspresi Budaya mengalami pertumbuhan signifikan dari **45,08** pada tahun 2024 menjadi **45,88** pada tahun 2025. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budaya dan seni menunjukkan adanya ruang berekspresi yang



lebih terbuka. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai event budaya yang lebih inklusif, memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Dukungan berupa ruang-ruang kreatif bagi seniman juga semakin berkembang. Namun, masih diperlukan penguatan fasilitas bagi komunitas seni agar mereka dapat mengekspresikan budaya secara lebih optimal.

f. Dimensi Budaya Literasi

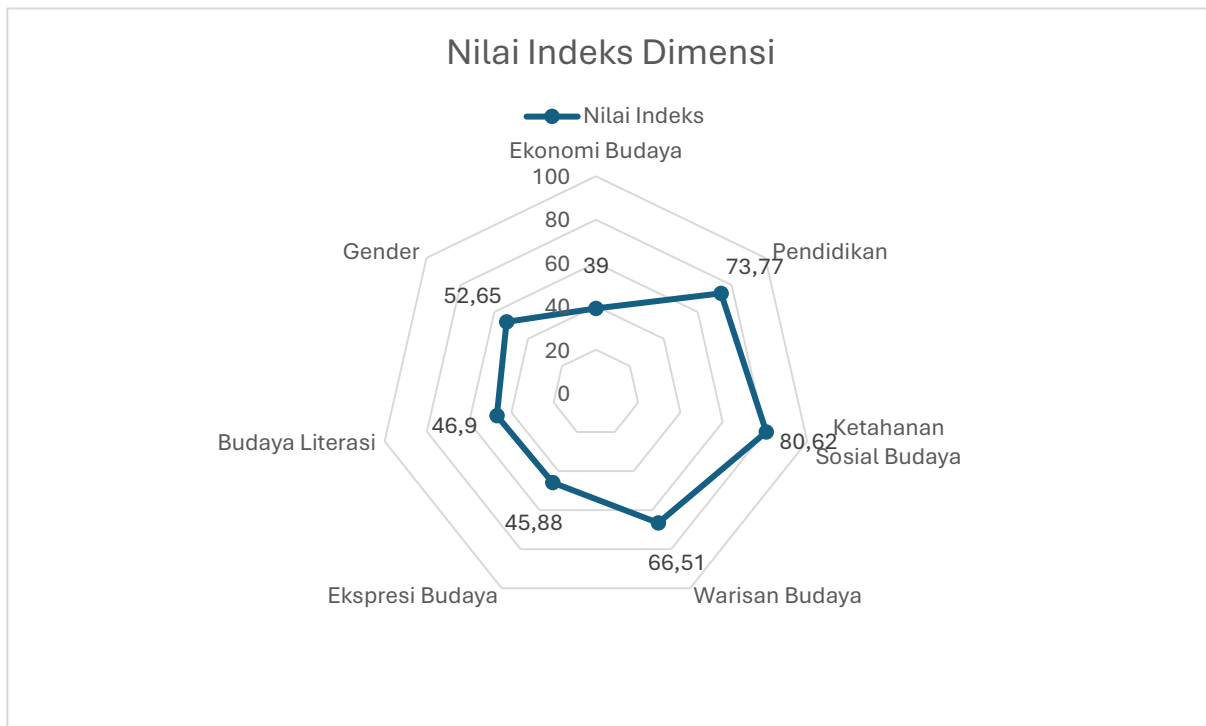
Dimensi Budaya Literasi mengalami Peningkatan yang signifikan dari **38,8** pada tahun 2024 menjadi **46,9** pada tahun 2025. Peningkatan nilai dialami oleh ketiga indikator yang menyusun dimensi ini. Hal ini dipengaruhi karena adanya fasilitas perpustakaan keliling, perpustakaan desa yang turut menyumbang capaian hasil, serta struktur administrasi yang tercatat dari setiap pengunjung yang datang.

g. Dimensi Gender

Dimensi Kesetaraan Gender mengalami penurunan dari 53,38 pada tahun 2024 menjadi 52,65 pada tahun 2025. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan menurun dibanding tahun sebelumnya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dari 100 orang laki-laki yang bekerja pada tahun 2025 ada sebanyak 54 orang perempuan yang juga bekerja. Angka ini menunjukkan tidak adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan agar meningkatkan rasio kesetaraan gender untuk pekerja wanita dengan laki-laki yang bekerja bisa mendapatkan jumlah yang sebanding.

Berdasarkan ulasan per-indikator, terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding tahun 2024, yaitu Pendidikan, Ekspresi budaya, dan Budaya Literasi. Sedangkan dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Gender berada di bawah angka tahun 2024. Sedangkan Nilai Indeks Ekonomi budaya sama dengan tahun sebelumnya. Nilai indeks Budaya Literasi mengalami peningkatan signifikan ketimbang tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

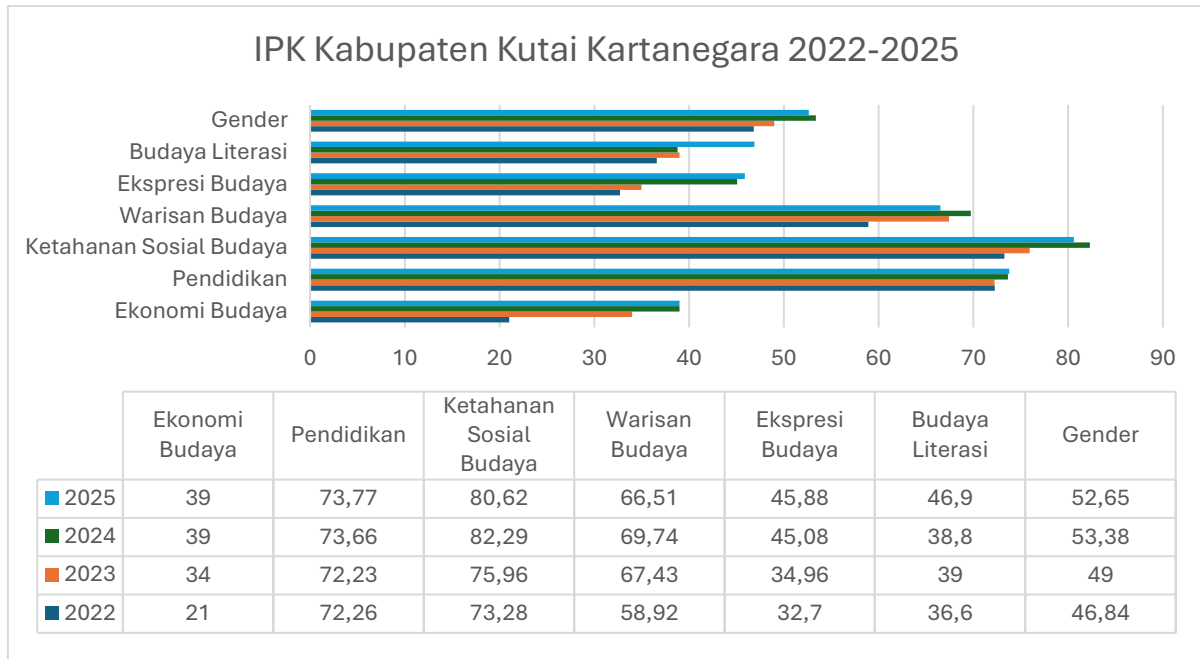
Grafik II-17 Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025



Sumber: Laporan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya (80,62) dan Pendidikan (73,77). Tingginya nilai Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kemajemukan masyarakat di Kutai Kartanegara dapat dikelola dengan baik, sehingga kohesi sosial antar masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras cukup kuat. Sedangkan, tingginya nilai indeks dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dan dimensi gender yang biasanya menjadi penyumbang nilai terbesar tahun ini harus mengalami penurunan, sedangkan dimensi ekonomi budaya masih stagnan di angka 39. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi baru yang mengadaptasi perubahan-perubahan kondisi daerah dan negara yang membawa dampak pada fluktuasi capaian IPK. Kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk bersinergi dalam Upaya melestarikan kebudayaan.

Grafik II-18 IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara

Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar dimensi mengalami peningkatan meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa indikator.

Dimensi ketahanan sosial budaya memiliki capaian tertinggi, meningkat dari 73,28 pada tahun 2022 menjadi 82,29 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 80,62 pada tahun 2025. Dimensi pendidikan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat hingga mencapai 73,77 pada tahun 2025.

Dimensi warisan budaya dan ekspresi budaya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022, meskipun warisan budaya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Dimensi budaya literasi juga mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 46,9 pada tahun 2025. Sementara itu, dimensi gender meningkat dari 46,84 pada tahun 2022 menjadi 52,65 pada tahun 2025.

Di sisi lain, dimensi ekonomi budaya mengalami peningkatan dari 21 pada tahun 2022 menjadi 39 pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2025, namun masih menjadi dimensi dengan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-43 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

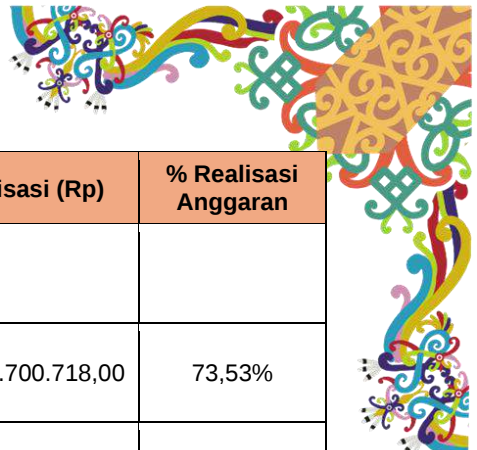
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,805	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	47,42	53,23	57,42	57,91	53

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-44 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	891.692.847.000,00	831.676.444.590,00	557.057.089.669,00	66,98%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	4.420.000.000,00	2.271.233.140,00	2.064.387.750,00	90,89%
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.640.000.000,00	3.772.852.400,00	3.710.677.000,00	98,35%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.950.000.000,00	965.422.460,00	734.337.800,00	76,06%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	4.860.000.000,00	1.825.907.344,00	1.022.773.978,00	56,01%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.170.000.000,00	5.149.768.480,00	5.073.216.655,00	98,51%
7	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50.000.000,00	24.809.200,00	15.930.000,00	64,21%
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.508.500.000,00	4.441.865.290,00	3.676.728.280,00	82,77%
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.033.800.000,00	5.085.831.650,00	4.376.732.176,00	86,06%
10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.900.000.000,00	1.774.204.000,00	1.601.242.182,00	90,25%
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	6.426.495.000,00	2.668.025.380,00	2.092.865.693,00	78,44%
12	PROGRAM	2.450.000.000,00	1.607.427.320,00	1.268.199.388,00	78,90%

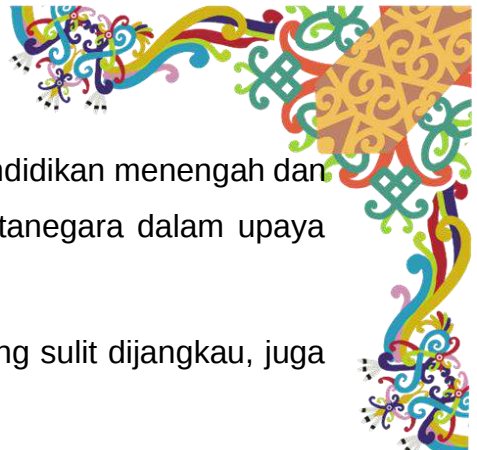


No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	16.325.000.000,00	14.926.362.200,00	10.974.700.718,00	73,53%
14	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	3.200.000.000,00	3.167.018.100,00	893.994.191,00	28,23%
15	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	318.832.640,00	280.401.251,00	87,95%
16	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.850.000.000,00	1.016.593.900,00	452.657.191,00	44,53%
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.600.000.000,00	1.359.650.320,00	195.141.579,00	14,35%
18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9.526.000.000,00	6.053.496.800,00	3.373.277.463,00	55,72%
19	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	535.511.117,00	287.191.059,00	203.316.960,00	70,80%
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	70.213.286.703,00	85.433.261.995,00	74.637.286.191,00	87,36%
21	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.050.000.000,00	4.724.874.000,00	4.297.139.083,00	90,95%
	Total	1.051.901.439.820,00	978.551.072.268,00	678.002.095.198,00	69,29%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.678.002.095.198,00** dari anggaran sebesar **Rp.978.551.072.268,00** atau **62,29%**. Realisasi keuangan sebesar 62,29% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **113,45%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa

- 
- 2) Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia
 - 3) Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
 - 4) Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
 - 5) Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
 - 6) Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
 - 7) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi.
 - 8) Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pasantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

Di Tahun 2023 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan beasiswa dengan rincian:

Tabel II-45 Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2025

NO.	KATEGORI BEASISWA	CAPAIAN				KETERANGAN
		2022	2023	2024	2025	
1	Beasiswa santri lanjut perguruan tinggi	7	22	48	144	
2	Beasiswa stimulan Mahasiswa	644	1094	3926	3447	
3	Beasiswa Non ASN skema tematik	21	75	139	61	
4	Beasiswa santri pondok pesantren	159	329	238	181	
5	Beasiswa tingkat SD/SMP/SMA SLB	15	0	0	0	
6	Beasiswa tingkat SMA/SMK/MA	95	347	855	149	
7	Beasiswa khusus (yatim piatu) korban covid 19	21	57	0	0	
	TOTAL	962	1924	5206	-	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

5. Analisis Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**” dengan indikator **Indeks Kesehatan** mencapai **99,14%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-46 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,82	0,841	102,44

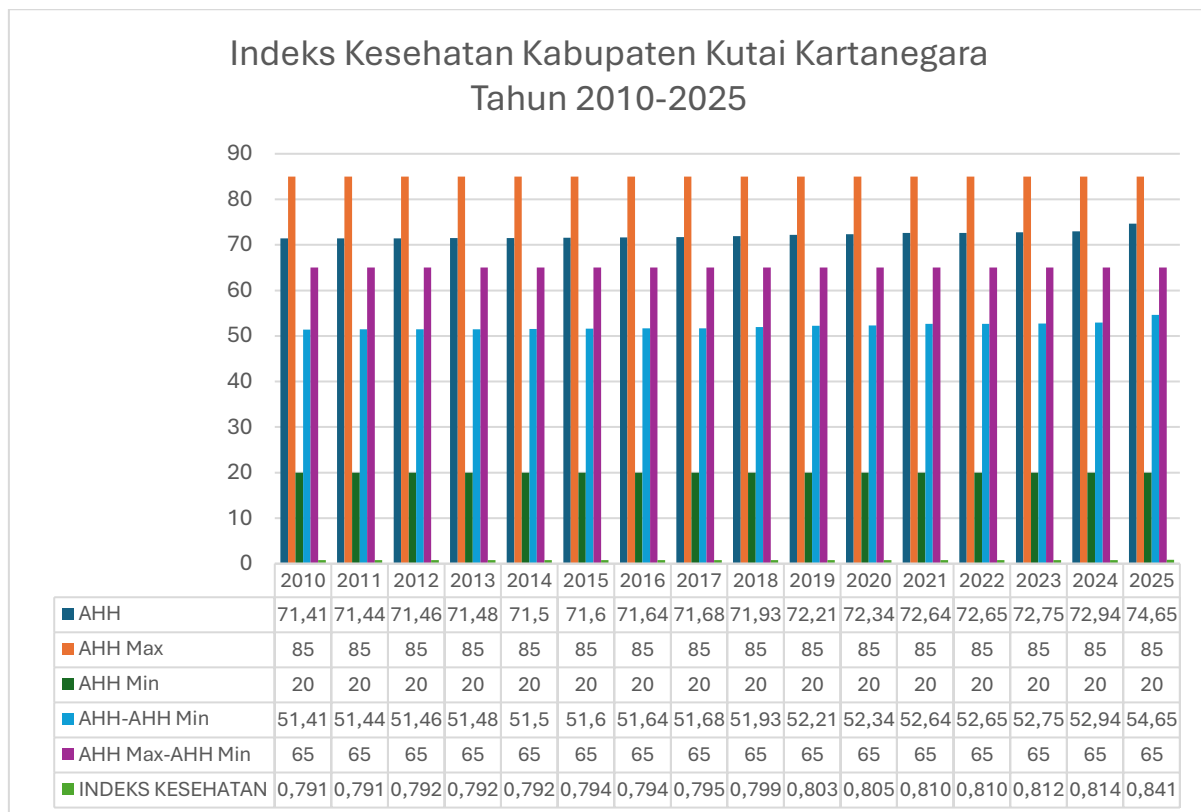
Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (expectancy of life at birth) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Pada Tahun 2025 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,841, capaian ini meningkat 0,027 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 angka indeks Kesehatan berada pada 0,814. Setiap tahunnya indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2025, ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik II-19 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara 2010-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Angka Harapan Hidup



Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas
Loa Iduh

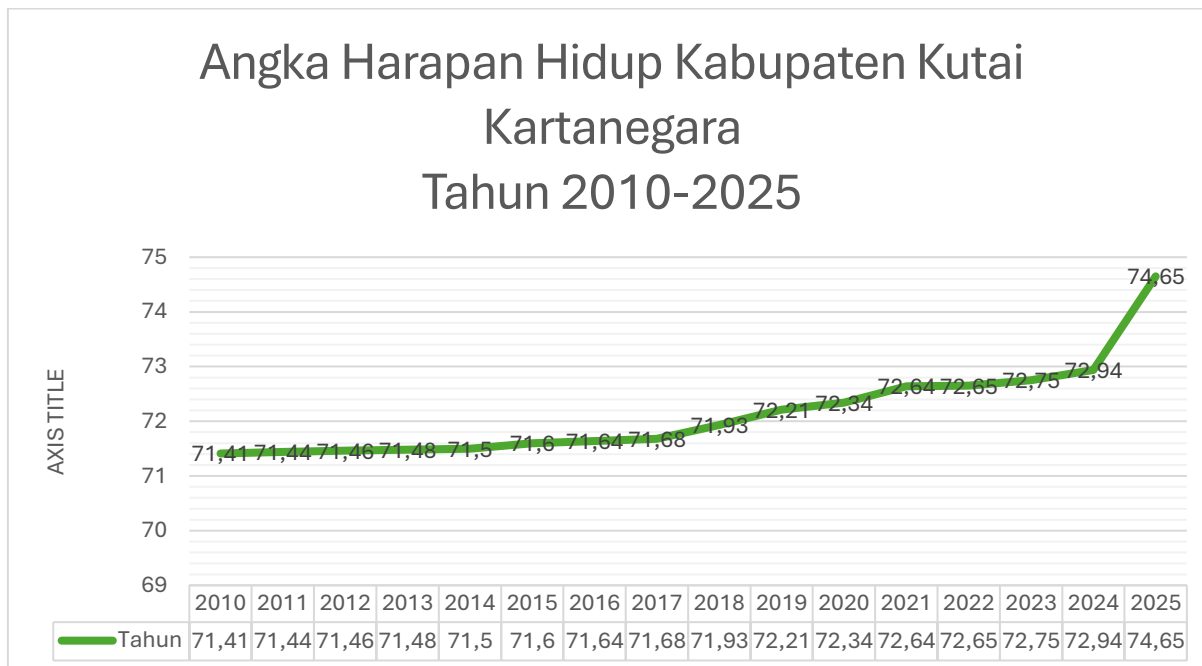
Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,94 tahun pada tahun 2023, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 mencapai 74,65.



Posbindu Desa Loa Duri Ulu

Grafik II-20 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025



Sumber: BPS, 2025

Tabel II-47 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

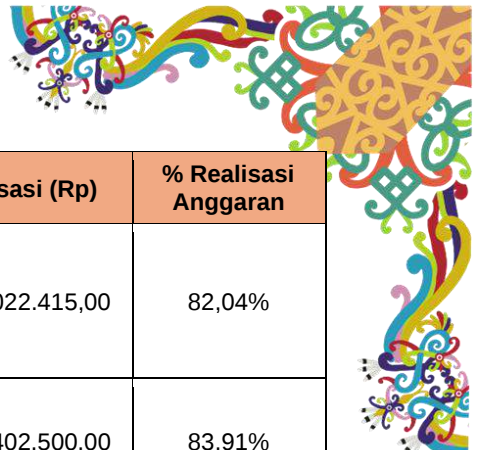
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,814	0,841	0,824

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-48 Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	911.801.898.909,00	793.194.009.927,00	639.602.491.842,00	80,64%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.500.896.000,00	4.562.285.190,00	3.743.022.415,00	82,04%
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	893.500.000,00	647.615.600,00	543.402.500,00	83,91%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.126.522.000,00	3.305.859.000,00	2.220.826.435,00	67,18%
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.152.260.000,00	5.254.307.189,00	4.934.905.341,00	93,92%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	45.046.840.000,00	49.113.429.856,00	37.849.928.883,00	77,07%
Total		975.521.916.909,00	856.077.506.762,00	688.894.577.416,00	80,47%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.688.894.577.416,00** dari anggaran sebesar **Rp.856.077.506.762,00** atau sebesar **80,47%**. Sementara itu, realisasi keuangan sebesar **80,47%** dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai **102,44%** menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif efisien dan sasaran telah mencapai **100%**, efektivitas pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran mencerminkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai hasil yang hampir sesuai dengan target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
- 2) Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:

- 1) Penyediaan fasilitas sarana prasarana Kesehatan sesuai standar yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun dan memperbaiki kondisi

Bangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 2) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui beasiswa daerah.
 - 3) Terus meningkatkan penyediaan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada masyarakat.
 - 4) Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Analisis Kinerja Sasaran 6: “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan**” dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender** mencapai **100,63%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-49 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,60	100,63

)* Data Capaian Tahun 2024

Sumber data: Badan Pusat Statistik

“Hasil analisis berikut masih menggunakan capaian tahun 2024, karena hingga saat penyusunan laporan ini Badan Pusat Statistik (BPS) belum menerbitkan data **Indeks Pembangunan Gender Kutai Kartanegara tahun 2025**”.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

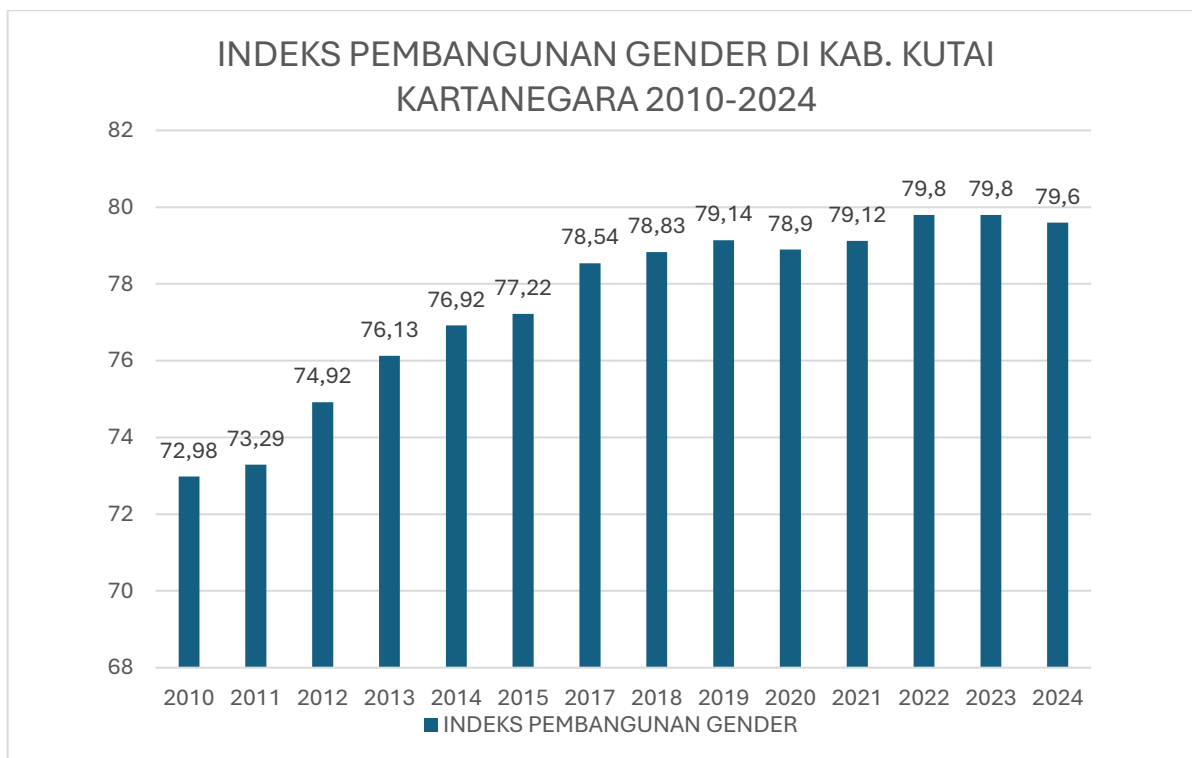
Rumusan: $IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Grafik II-21 Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartaengara Tahun 2010-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-50 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,80	79,80	79,60	*79,60	79,2

Sumber data: Badan Pusat Statistik

*Capaian Tahun 2024, Capaian Tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-51 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.100.000.000,00	874.299.660,00	818.445.871,00	93,61%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.100.000.000,00	734.344.020,00	646.217.720,00	88,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000,00	120.731.500,00	120.071.400,00	99,45%
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.541.000.000,00	1.821.120.820,00	1.466.815.925,00	80,54%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3.250.000.000,00	1.690.266.179,00	1.488.333.265,00	88,05%
Total		10.241.000.000,00	5.240.762.179,00	4.539.884.181,00	86,63%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.4.539.884.181,00** dari anggaran sebesar **Rp. 5.240.762.179,00** atau **86,63%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki landasan hukum yang lebih terbaru dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Bupati, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, guna mendukung implementasi yang lebih konkret, diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif gender. Dengan adanya regulasi yang lebih mutakhir ini, diharapkan kesetaraan dan keadilan gender dapat semakin terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat**” dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai **98,67%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Indeks Gini	Nilai	0,27	0,307*	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,765	0,781	102,09
Rata-rata Capaian					95

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemendes Tahun 2025

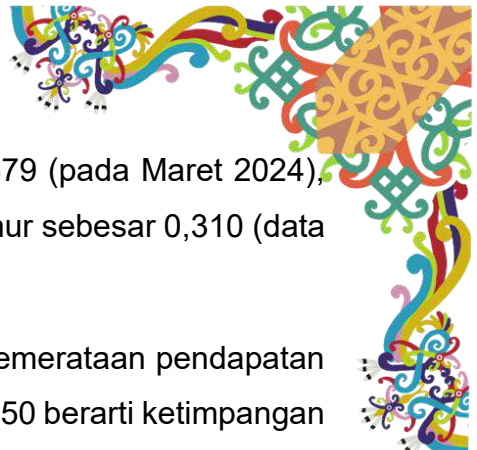
*Capaian tahun 2024, karena tahun 2025 belum terbit

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Gini

*“Hasil analisis berikut masih menggunakan capaian tahun 2024, karena hingga saat penyusunan laporan ini Badan Pusat Statistik (BPS) belum menerbitkan data **Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025**”.*

Angka realisasi 2024 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,307, angka ini menurun sebesar 0,023 poin dari Tahun 2023 sebesar 0,284. Target tahun 2024 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 90,36 %. Angka tersebut lebih kecil

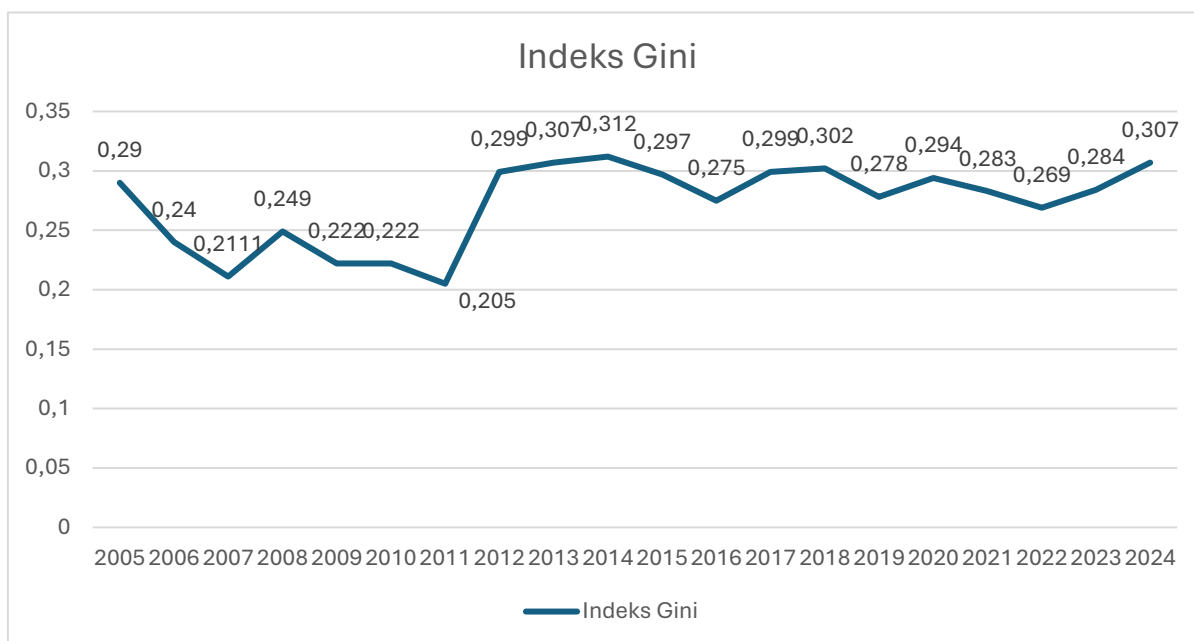


apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,379 (pada Maret 2024), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,310 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2024).

Indeks Gini merupakan tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011. Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020. Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun 2021, karena mengalami penurunan 0,014, namun meningkat Kembali di Tahun 2023 dengan angka 0,284 hingga pada Tahun 2024.

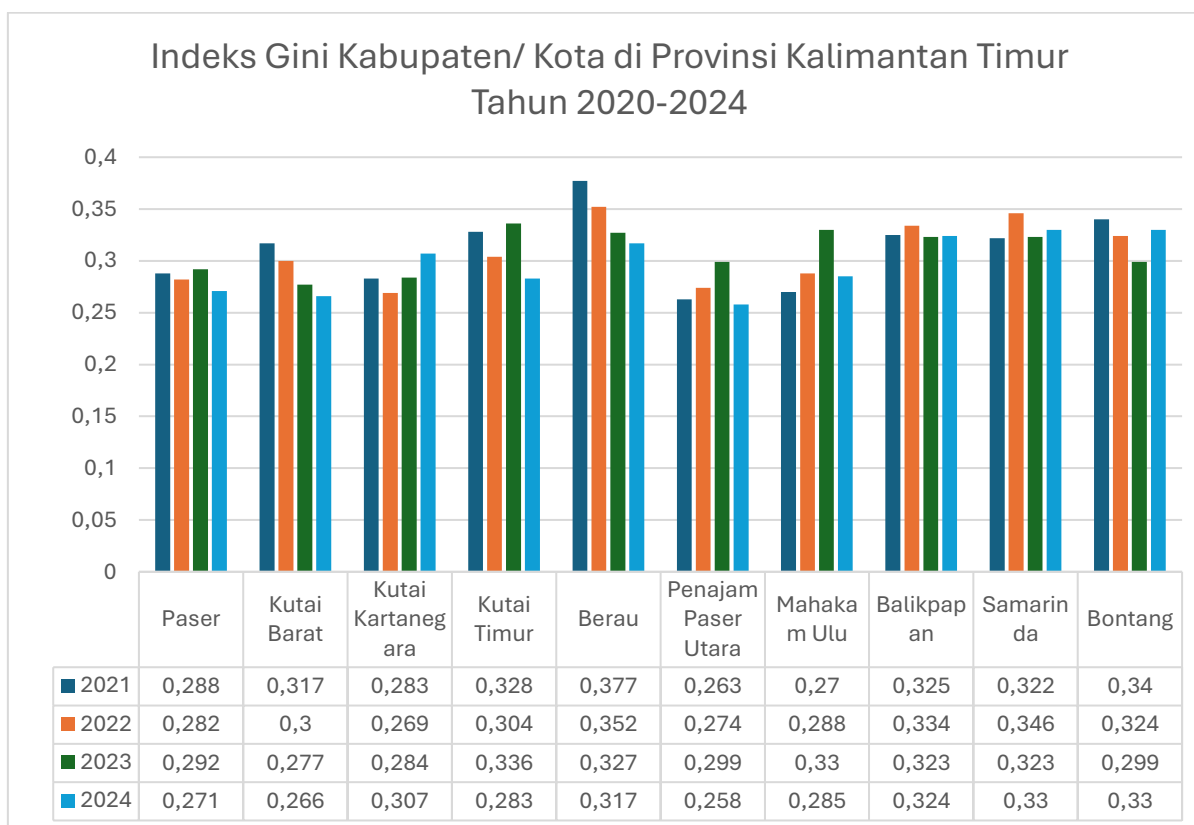
Grafik II-22 Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024



Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik II-23 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, bahkan dibawah standar sedangkan pekerja formal memiliki gaji yang terlalu melampaui standar seharusnya. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.



Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai

Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program Yok



Baiki Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat

Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.



Selain itu, program jaring pengaman sosial juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak **1.388 orang** atau tercapai **100%** dari yang

ditargetkan pada Tahun 2024. Bantuan ini mencakup **615 jiwa** penerima bantuan permakanan kemiskinan ekstrem serta **773 jiwa** penerima bantuan tunai bagi lansia, disabilitas, dan anak telantar. Selain itu, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian pangan, sandang, dan layanan kesehatan (Penerima Bantuan Iuran/BPJS) bagi masyarakat miskin non-potensial telah diberikan kepada **15.486 orang** atau **98,18%** dari target 2024 sebesar **96%** dari **15.786 orang** yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024. Di samping itu, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kutai Kartanegara mencapai **10.920 keluarga penerima manfaat (KPM)**, serta bantuan pangan dari Program Sembako yang menjangkau **15.486 KPM**.

Program ini tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga mendukung target **Universal Health Coverage (UHC)** di Kutai Kartanegara, yang kini telah mencapai **98,18%** dari total penduduk, memastikan hampir seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Pemkab Kutai Kartanegara juga terus memperbaiki akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui bantuan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan program *graduasi* KPM PKH, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dengan kombinasi bantuan sosial dan program pemberdayaan, diharapkan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan secara signifikan.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

- a) **Indeks Ketahanan Sosial**, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
- b) **Indeks Ketahanan Ekonomi**, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah



c) **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

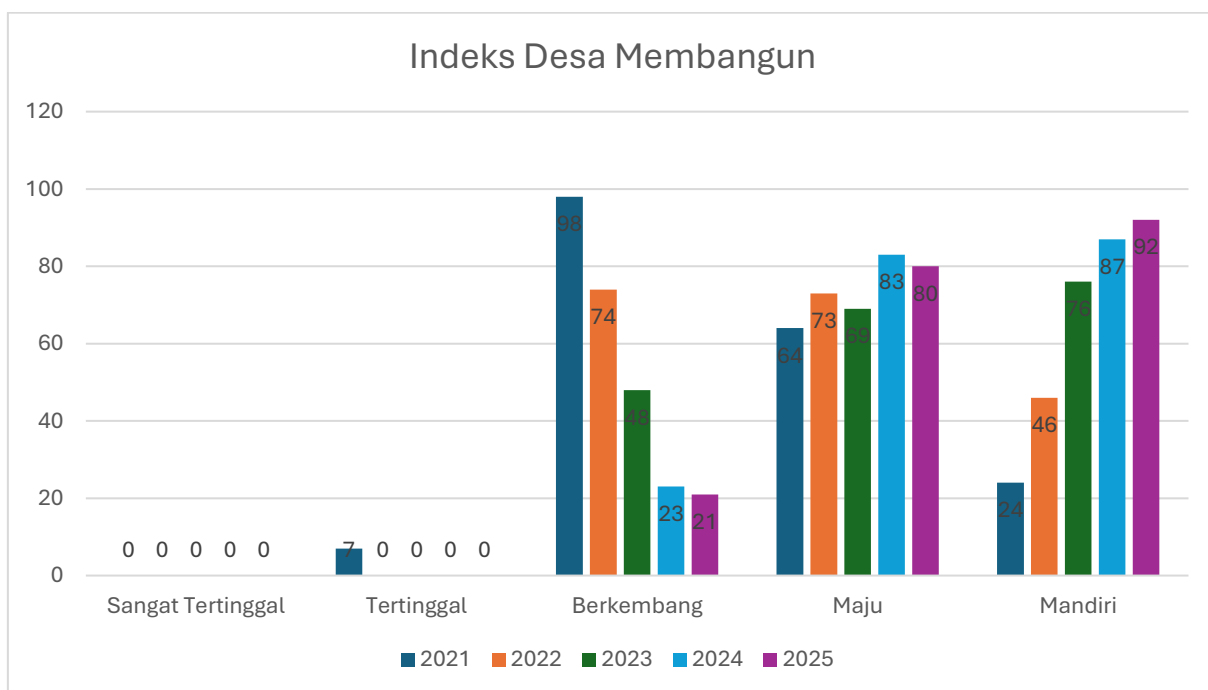
Tabel II-52 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kecamatan	Total	Jumlah Desa					
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tidak Teridentifikasi
1	Anggana	8	3	4	1	0	0	0
2	Kembang Janggut	11	6	4	1	0	0	0
3	Kenohan	9	1	5	3	0	0	0
4	Kota Bangun	11	3	6	2	0	0	0
5	Kota Bangun Darat	10	1	7	2	0	0	0
6	Loa Janan	8	7	1	0	0	0	0
7	Loa Kulu	15	11	4	0	0	0	0
8	Marang Kayu	11	3	6	2	0	0	0
9	Muara Badak	13	8	4	1	0	0	0

No	Kecamatan	Total	Jumlah Desa					
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tidak Teridentifikasi
10	Muara Kaman	20	9	9	2	0	0	0
11	Muara Muntai	13	12	1	0	0	0	0
12	Muara Wis	7	3	4	0	0	0	0
13	Samboja	3	0	3	0	0	0	0
14	Samboja Barat	1	0	1	0	0	0	0
15	Sebulu	14	8	3	3	0	0	0
16	Tabang	19	1	14	4	0	0	0
17	Tenggarong	2	0	2	0	0	0	0
18	Tenggarong Seberang	18	16	2	0	0	0	0
Total		193	92	80	21	0	0	0

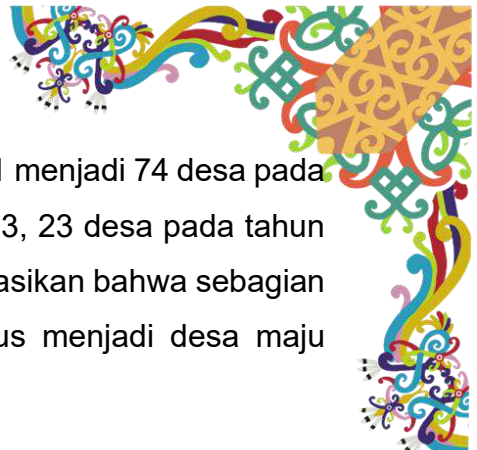
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Grafik II-24 Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Grafik Indeks Desa Membangun menunjukkan perkembangan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021 hingga 2025 yang secara umum mengalami peningkatan kualitas pembangunan desa. Pada periode tersebut tidak terdapat desa dengan status sangat tertinggal. Sementara itu, desa dengan status tertinggal yang pada tahun 2021 masih berjumlah 7 desa, sejak tahun 2022 hingga 2025 sudah tidak ada lagi. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan status desa ke kategori yang lebih tinggi. Desa dengan status berkembang juga mengalami



penurunan yang cukup signifikan dari 98 desa pada tahun 2021 menjadi 74 desa pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 48 desa pada tahun 2023, 23 desa pada tahun 2024, dan 21 desa pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar desa berkembang telah mengalami peningkatan status menjadi desa maju maupun desa mandiri.

Di sisi lain, jumlah desa dengan status maju menunjukkan kecenderungan meningkat dari 64 desa pada tahun 2021 menjadi 73 desa pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 69 desa pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 83 desa pada tahun 2024, dan berada pada angka 80 desa pada tahun 2025. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada desa dengan status mandiri yang terus bertambah setiap tahunnya, yaitu dari 24 desa pada tahun 2021 menjadi 46 desa pada tahun 2022, meningkat menjadi 76 desa pada tahun 2023, kemudian 87 desa pada tahun 2024, dan mencapai 92 desa pada tahun 2025. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kemajuan yang cukup baik, ditandai dengan berkurangnya desa pada kategori status rendah serta meningkatnya jumlah desa dengan status maju dan mandiri.

Capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Status Indeks Desa menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, memiliki total 193 desa dengan skor nilai Indeks Desa sebesar 0,781 atau 78,10 persen yang menempatkan Kabupaten Kutai Kartanegara pada status Indeks Desa “Maju”. Adapun rincian status desa pada tahun 2025 terdiri dari 92 desa berstatus mandiri, 80 desa berstatus maju, 21 desa berstatus berkembang, serta tidak terdapat desa dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal.

Penetapan status desa pada Tahun 2025 juga mengalami perubahan sistem penilaian. Jika sebelumnya penilaian menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tiga dimensi utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), maka pada Tahun 2025 penilaian status desa menggunakan Indeks Desa (ID) yang mencakup enam dimensi penilaian, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-53 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,307*	0,27
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,781	0,785

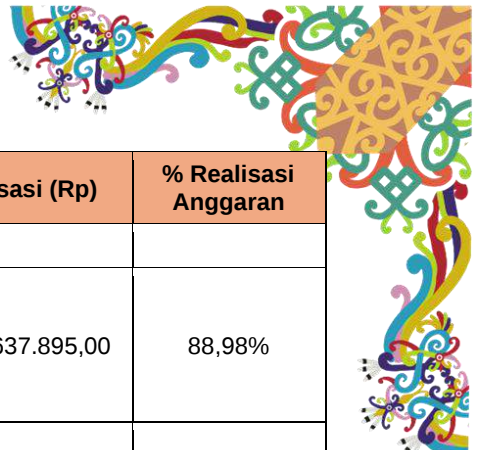
Sumber data: BPS dan Kemendes 2025

*Data tahun 2024, capaian 2025 belum terbit

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-54 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.300.000.000,00	353.909.340,00	295.344.095,00	83,45%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	46.100.000.000,00	34.334.168.300,00	24.112.309.280,00	70,23%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12.043.060.000,00	11.870.272.000,00	10.021.446.138,00	84,42%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.750.000.000,00	2.287.948.100,00	1.922.050.208,00	84,01%
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.150.000.000,00	843.615.000,00	634.656.863,00	75,23%
6	PROGRAM PENATAAN DESA	84.204.248.994,00	67.794.025.068,00	67.243.243.600,00	99,19%
7	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	500.000.000,00	247.808.800,00	130.291.400,00	52,58%
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23.926.693.870,00	19.521.740.892,00	18.575.651.032,00	95,15%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	19.096.924.500,00	4.604.672.998,00	3.605.402.103,00	78,30%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	HUKUM ADAT				
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.201.850.000,00	4.888.299.900,00	4.349.637.895,00	88,98%
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.150.000.000,00	3.184.681.946,00	1.983.526.435,00	62,28%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.180.000.000,00	3.381.990.877,00	3.142.575.299,00	92,92%
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.885.722.996,00	141.139.425.213,00	126.767.118.950,00	89,82%
	Total	355.488.500.360,00	294.452.558.434,00	262.783.253.298,00	89,24%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran peningkatan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah **Rp.262.783.253.298,00** dari total anggaran sebesar **Rp. 294.452.558.434,00**, atau sekitar **89,24%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- 1) **Tersedianya pendamping desa** baik dari Kementerian Desa maupun Kabupaten yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi aset lokal desa. Keberadaan pendamping ini berperan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong sinergi program pembangunan antar sektor.
- 2) **Kesadaran pemerintah desa terkait peningkatan status desa** semakin meningkat, didorong oleh adanya reward dari pemerintah pusat bagi desa yang berhasil mencapai status **Desa Mandiri**. Selain itu, ketersediaan anggaran

pembangunan yang memadai juga menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian target pembangunan desa.

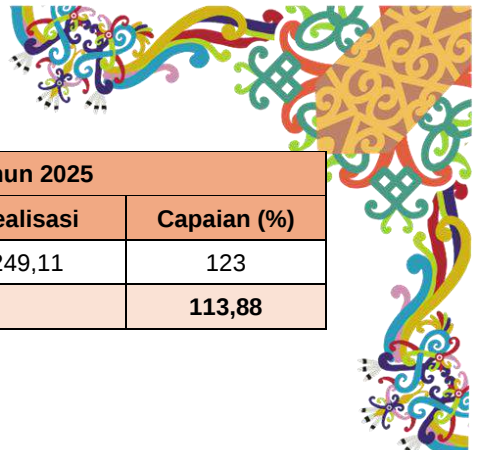
- 3) **Program jaring pengaman sosial yang efektif**, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan status desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara.
- 4) **Masih terdapat tantangan di tingkat desa**, seperti kekhawatiran sebagian kepala desa terhadap pengurangan alokasi anggaran jika status desa meningkat. Hal ini menyebabkan beberapa desa enggan meningkatkan statusnya meskipun sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk naik ke kategori **Maju atau Mandiri**.
- 5) **Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas** tetap menjadi tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap internet, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dapat menghambat percepatan pembangunan desa secara merata.
- 6) **Kurangnya pemahaman sebagian kepala desa dalam pengisian kuisisioner penilaian Indeks Desa Membangun (IDM)**, terutama dalam aspek pencatatan kondisi sarana dan prasarana desa, sehingga beberapa desa yang seharusnya dapat naik status tidak dapat memperoleh skor maksimal dalam penilaian.

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat” dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita** mencapai **113,88%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-55 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,60	4,40	105



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
11	PDRB Per Kapita	Nilai	202,16	249,11	123
Rata-rata Capaian					113,88

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Semakin tinggi angka TPT, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sementara pengangguran mencakup empat kriteria, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kedua hal tersebut akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika TPT semakin besar maka

kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

Tabel II-56 Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2025

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2010	33980	
2011	23530	-10450
2012	23977	447
2013	22215	-1762
2014	24381	2166
2015	31397	7016
2017	19473	-11924
2018	21361	1888
2019	22607	1246
2020	20497	-2110
2021	21544	1047
2022	15412	-6132
2023	14731	-681
2024	16125	1394
2025	17592	1467

Sumber: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

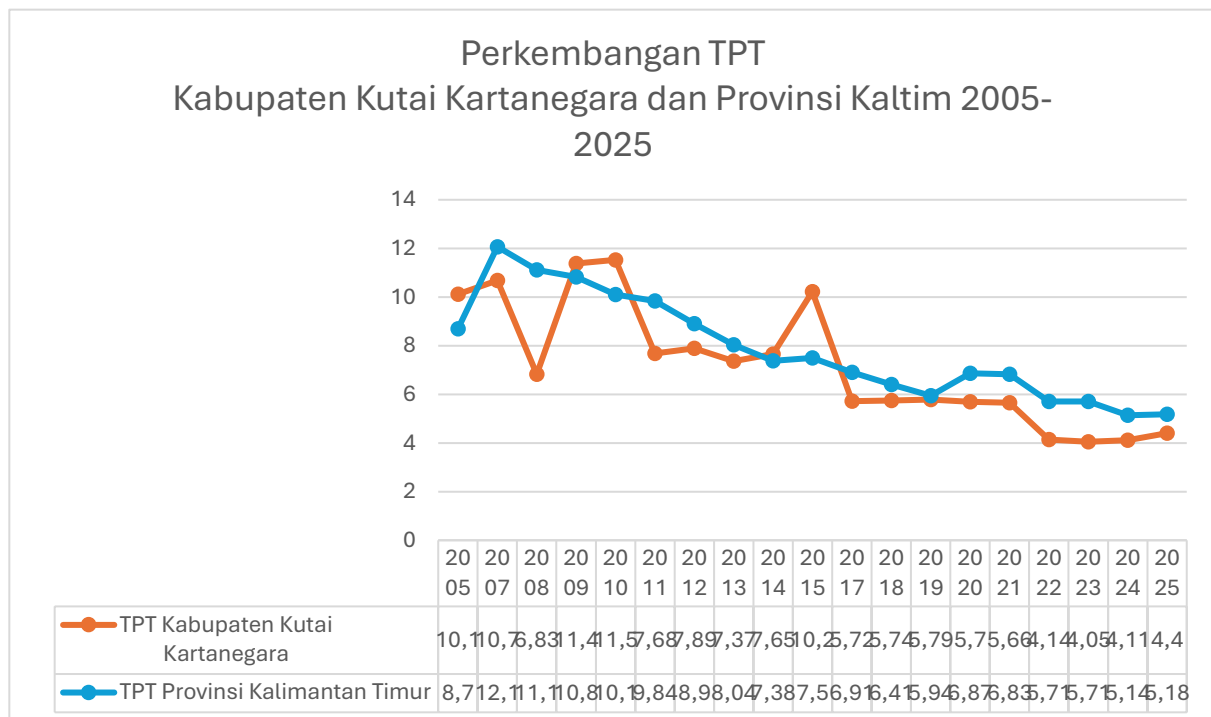
Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (lihat tabel 2.3.39). Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang, dan di Tahun 2024 merupakan capaian terendah tercatat pada sebanyak 16.125 orang. Namun jumlah pengangguran di Tahun 2025 kembali meningkat sebanyak 1.467 orang dibandingkan Tahun 2024, menjadi 17.592 orang. Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja



Gambar 1. Diagram Ketemagakerjaan

yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starters). Jumlah pengangguran yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang. Perubahan jumlah pengangguran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2.3.39. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1.762 orang, tahun 2017 berkurang sebanyak 11.924 orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 dan 2025. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.170 orang setiap tahunnya.

Grafik II-25 Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, 2005-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur data per Agustus 2025



Pelaksanaan Job Fair/ Bursa Kerja Tahun 2025

Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih

tinggi daripada TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen. Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2025, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 4,472 persen.

Grafik II-26 Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Jika melihat grafik diatas TPT Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke 3 (tiga) terendah di antara kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu, dan TPT tertinggi berada di Kota Bontang

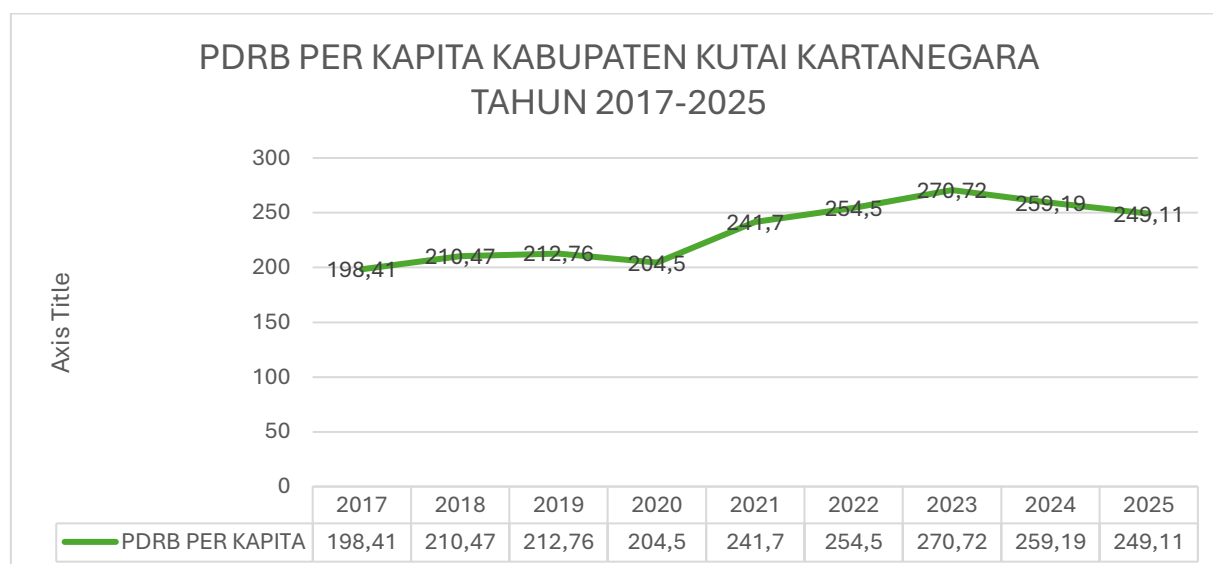
sebesar 6,36, kemudian Kabupaten Kutai Timur di angka 6,2 dan Kota Balikpapan di 5,84.

PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik II-27 PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2025



Sumber: BPS

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan pada Tahun 2025 jika dibandingkan Tahun 2024 dari 259,19 juta rupiah di tahun 2024 menjadi 249,11 juta di tahun 2025 atau menurun 10,08 dari Tahun 2024, setelah sebelumnya di Tahun 2024 menurun 11,53 dari Tahun 2023. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB perkapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 270,72 juta rupiah di

Tahun 2023. Kendati demikian, masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-57 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,4	4,1
11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	259,19	249,11	204,69

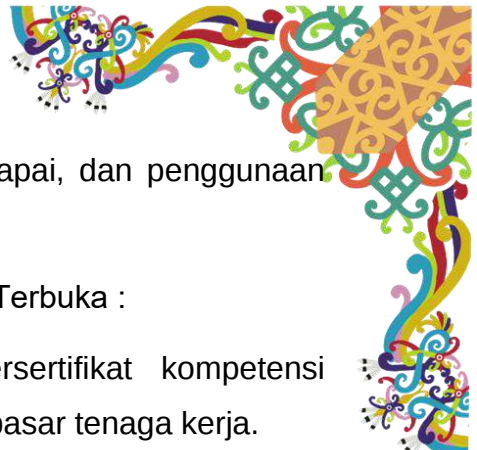
Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-58 Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	450.000.000,00	148.167.500,00	123.932.630,00	83,64%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.003.540.000,00	3.143.833.400,00	2.910.553.348,00	92,58%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	9.060.000.000,00	6.594.047.540,00	4.566.360.044,00	69,25%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.386.704.000,00	8.848.883.950,00	6.666.718.143,00	75,34%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	26.165.000.000,00	13.851.830.218,00	12.820.224.808,00	92,55%
	Total	55.065.244.000,00	32.586.762.608,00	27.087.788.973,00	83,13%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.27.087.788.973,00** dari anggaran sebesar **Rp. 32.586.762.608,00** atau **83,13%**. Realisasi keuangan sebesar 83,13% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **113,88%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai



sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

- 1) Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
- 2) Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
- 3) Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat tercapainya Target :

- 1) Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai.
- 2) Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.
- 3) Pertumbuhan Jumlah Lulusan Baru (Fresh Graduates). Setiap tahun, Kukar mengalami peningkatan jumlah lulusan dari SMA dan perguruan tinggi yang memasuki angkatan kerja. Banyak dari lulusan baru ini belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga menambah angka pengangguran. Fenomena ini terjadi karena proses pencarian pekerjaan oleh lulusan baru belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
- 4) Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Lebih Cepat dari Penyerapan Tenaga Kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Kukar meningkat lebih cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan TPT karena pasar kerja belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa variabel seperti rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah industri besar sedang

memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Meskipun penelitian ini mencakup wilayah Kalimantan secara umum, faktor-faktor tersebut kemungkinan juga mempengaruhi TPT di Kukar.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kutai Kartanegara.

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah**” dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai **149%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-59 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	7,05	10,47	149%

Sumber data: BPS: Data Diolah Tahun 2025

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan target RPJMD 2025 sebesar 7,05%. Dengan Realisasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2025 mencapai 10,47%, atau 149% dari target yang telah ditetapkan.

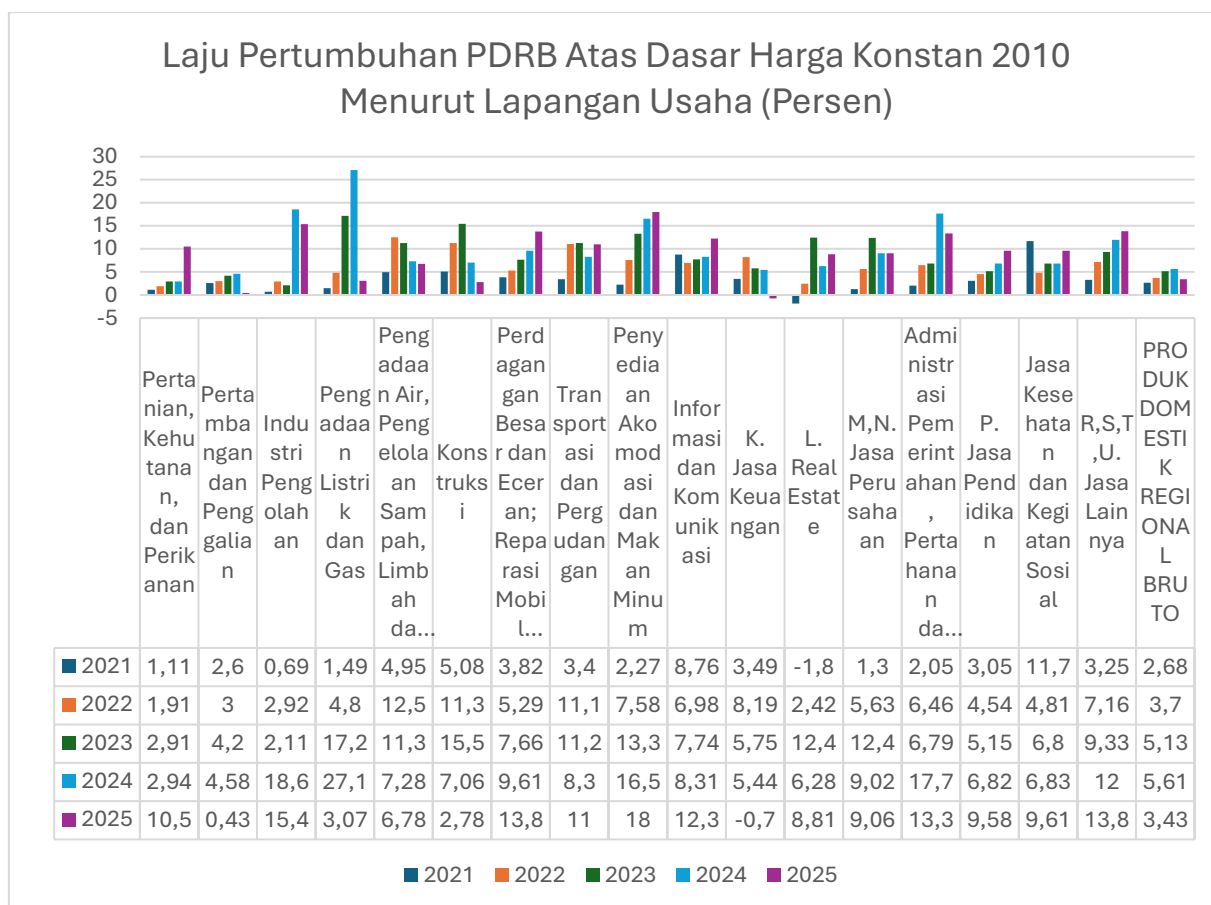
Pada tahun 2025, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 10,47%, mengalami peningkatan sebesar 256,12% dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 2,94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan sektor ini hanya meningkat 256,12% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pada tahun-tahun sebelumnya cenderung belum mencapai target yang ditetapkan sehingga memperoleh predikat “Kurang Berhasil”. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan, di mana sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa potensi sektor pertanian di Kutai Kartanegara mulai dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Walaupun struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor migas dan batubara sebagai sektor unggulan, namun pada tahun 2025, sektor pertanian mengungguli sektor migas dan batubara, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah kedepannya.

Grafik II-28 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2025



Sumber data: BPS 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-60 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

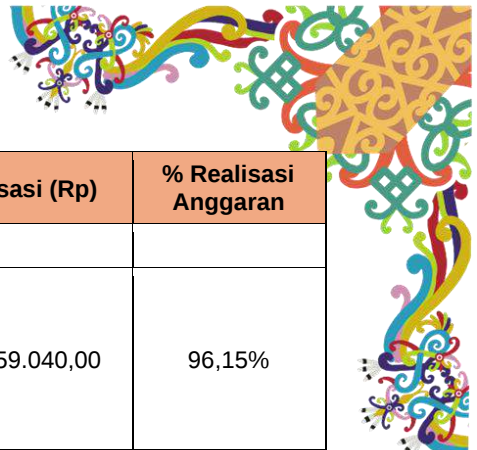
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	2,91	2,94	10,47	7,5

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-61 Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	690.000.000,00	605.974.921,00	507.501.164,00	83,75%
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.125.000.000,00	684.875.600,00	574.408.790,00	83,87%
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	300.000.000,00	76.577.169,00	29.573.900,00	38,62%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.300.000.000,00	720.122.937,00	482.908.054,00	67,06%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	126.083.260.000,00	99.066.555.727,00	79.627.172.998,00	80,38%
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	341.104.750.000,00	312.248.408.597,00	296.736.954.047,00	95,03%
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.925.000.000,00	8.799.487.110,00	3.974.514.812,00	45,17%
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.526.000.000,00	10.148.873.360,00	8.150.832.512,00	80,31%
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	111.624.685.000,00	89.836.922.830,00	64.844.378.736,00	72,18%
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	83.087.103.950,00	68.349.106.007,00	53.579.839.493,00	78,39%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PERTANIAN				
11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.075.000.000,00	755.793.620,00	726.659.040,00	96,15%
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.450.000.000,00	1.974.869.300,00	623.604.987,00	31,58%
13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.600.000.000,00	748.707.200,00	332.176.872,00	44,37%
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	17.319.400.000,00	12.523.192.483,00	9.635.964.125,00	76,94%
15	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	205.000.000,00	139.592.000,00	99.103.760,00	71,00%
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	21.155.000.000,00	13.390.289.600,00	11.159.949.686,59	83,34%
17	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.595.000.000,00	1.831.236.800,00	1.395.491.127,00	76,20%
18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.420.000.000,00	940.498.200,00	913.006.861,00	97,08%
19	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	985.000.000,00	551.900.600,00	323.396.800,00	58,60%
20	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	685.000.000,00	373.792.600,00	302.623.353,00	80,96%
21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	26.865.000.000,00	4.232.906.991,00	1.819.462.035,00	42,98%
22	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	790.000.000,00	433.998.800,00	337.606.026,00	77,79%
23	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	650.000.000,00	131.386.100,00	68.939.625,00	52,47%
24	PROGRAM	750.000.000,00	350.151.560,00	209.811.950,00	59,92%

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
	Total	803.310.198.950,00	628.915.220.112,00	536.455.880.753,59	85,30%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut mencapai **Rp.536.455.880.753,59** dari total anggaran sebesar **Rp.628.915.220.112,00** atau sekitar **85,30%**. Namun, capaian kinerja sasaran hanya mencapai **149%**, yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang Efisien. Hal ini disebabkan oleh tercapainya target sasaran secara penuh, sementara alokasi dana yang digunakan relatif rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah**” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai **229,53%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-62 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,5322

)* menggunakan data capaian Tahun sebelumnya (2024)

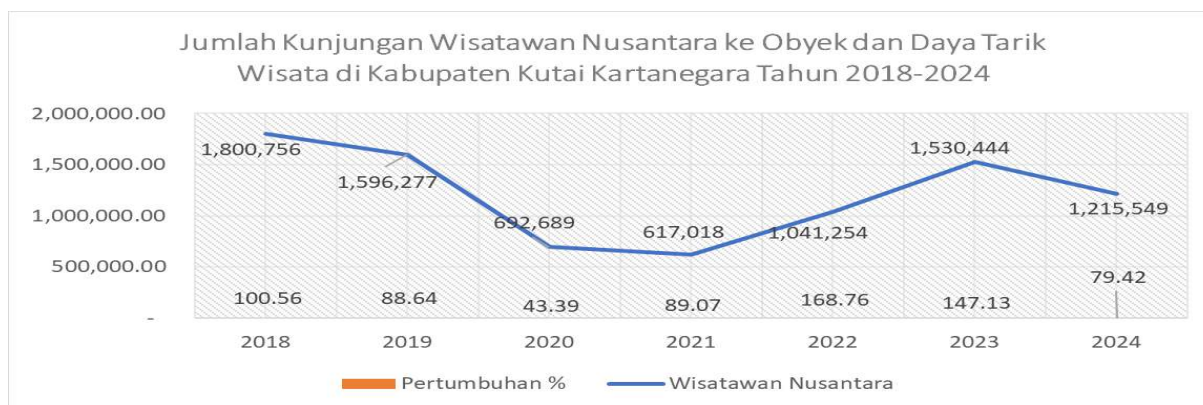
“Data kajian yang digunakan pada analisis ini merupakan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tahun 2025 data kajian belum tersedia. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kegiatan kajian yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan kajian sebagaimana direncanakan”

Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 1.041.886 kunjungan, yang kemudian meningkat menjadi 1.500.126 kunjungan pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebesar 458.240 wisatawan.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1.215 kunjungan.

Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong sektor pariwisata sebagai pemicu transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, diharapkan percepatan perekonomian daerah dapat tercapai.

Grafik II-29 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



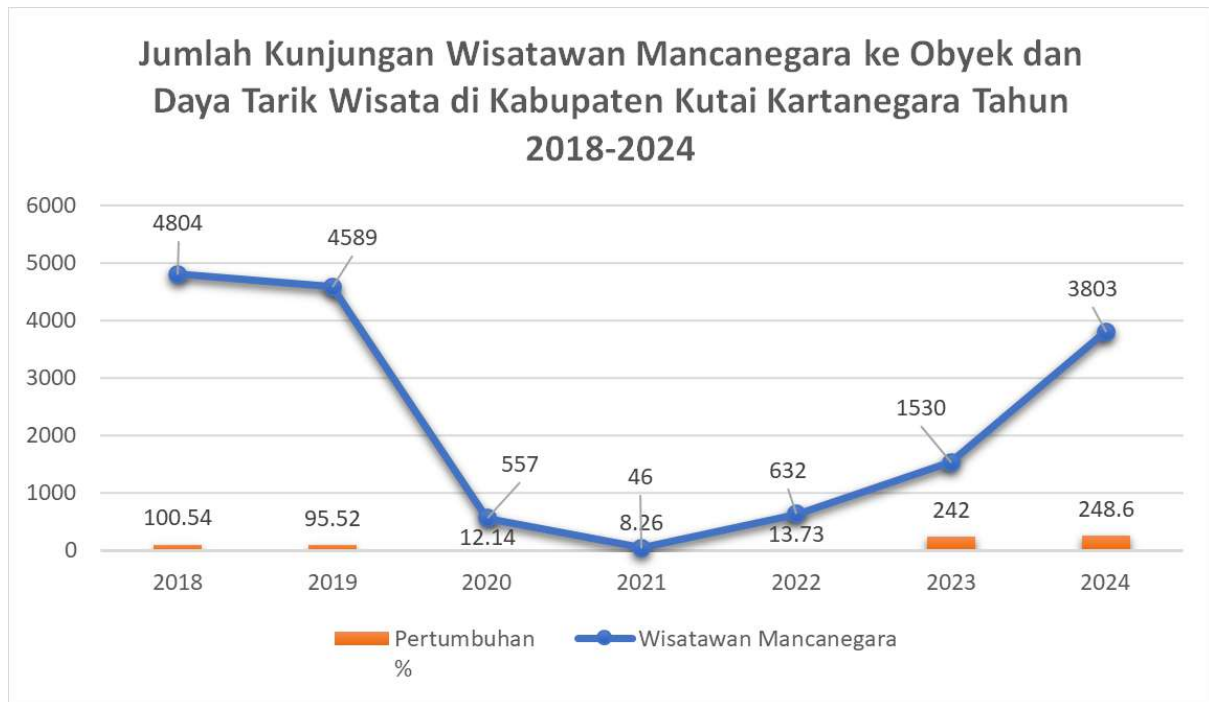
Sumber data: BPS Kutai Kartanegara 2018-2024

Grafik tersebut menampilkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.800.756 orang, namun mengalami penurunan menjadi 1.596.277 orang pada tahun 2019. Penurunan semakin tajam terjadi pada tahun 2020, di mana jumlah wisatawan anjlok hingga 692.689 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan masih rendah di angka 617.018 orang.

Namun, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan jumlah wisatawan meningkat menjadi 1.041.254 orang, lalu melonjak lebih tinggi lagi menjadi 1.530.444 orang pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 1.215.549 orang. Persentase pertumbuhan wisatawan juga mencerminkan tren ini, dengan angka tinggi pada 2018 (100,56%) dan 2019 (88,64%) yang turun drastis pada 2020 (43,39%). Namun, pemulihan signifikan terjadi pada 2022 (168,76%) dan 2023 (147,13%), sebelum kembali turun pada 2024 (79,42%).

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan selama pandemi, tetapi mampu bangkit dengan peningkatan kunjungan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih mengalami fluktuasi pada 2024.

Grafik II-30 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2024

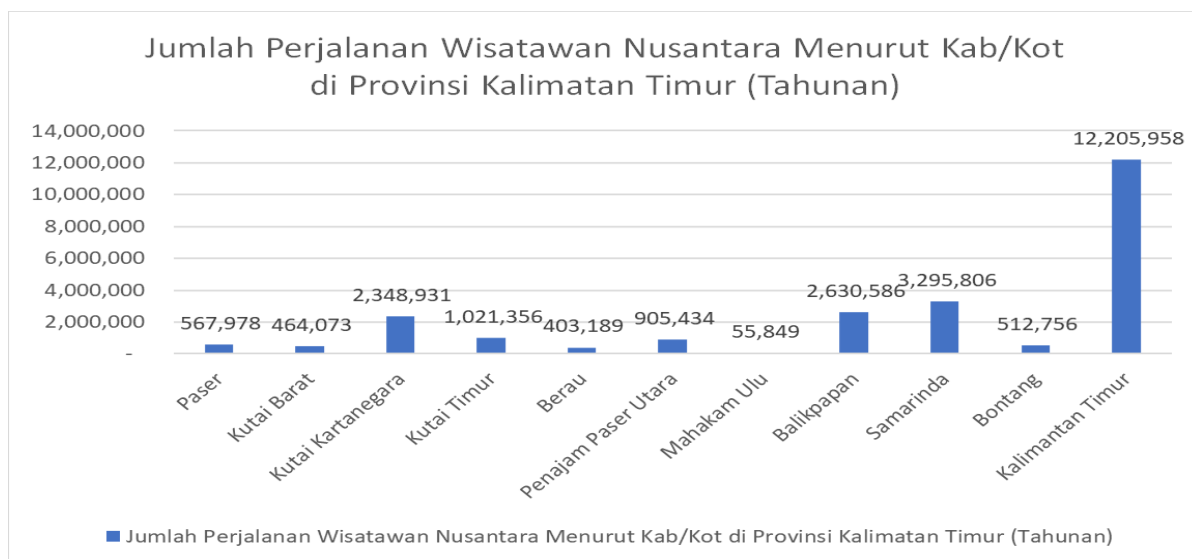
Grafik tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mencapai 4.804 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 4.589 orang pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dengan hanya 557 wisatawan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penurunan semakin tajam pada tahun 2021, di mana jumlah wisatawan hanya mencapai 46 orang.

Setelah itu, jumlah wisatawan mulai menunjukkan tanda pemulihan, naik menjadi 632 orang pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut menjadi 1.530 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah wisatawan mencapai 3.803 orang. Tren pertumbuhan tahunan juga mencerminkan fluktuasi ini, di mana angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2018 dan 2019 (100,54% dan 95,52%) mengalami penurunan drastis selama pandemi (12,14% pada 2020 dan 8,26% pada 2021). Namun, pertumbuhan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 (242%) dan 2024 (248,6%), mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami dampak besar akibat pandemi, tetapi mulai pulih dengan peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun sebagai Faktor Pembanding Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan sebagai Berikut:

Grafik II-31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2024

Berdasarkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tarik wisata yang cukup kuat dengan mencatatkan 2.348.931 perjalanan wisatawan dalam setahun. Angka ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah dengan jumlah wisatawan terbesar di provinsi tersebut, bersaing ketat dengan Kota Balikpapan yang mencatatkan 2.630.538 perjalanan dan Kota Samarinda dengan 3.295.806 perjalanan. Jumlah wisatawan di Kutai Kartanegara juga jauh melampaui beberapa daerah lainnya seperti Kutai Timur (1.021.356), Berau (403.189), dan Bontang (512.756). Data ini menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di Kalimantan Timur. Jika dikelola dengan baik, daerah ini berpotensi untuk terus meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata utama di provinsi ini.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-63 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	6,6	7,85	7,85	4,23

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-64 Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.776.894.000,00	12.246.293.472,00	9.414.996.423,00	76,88%
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	24.265.000.000,00	21.102.949.975,00	18.887.767.996,00	89,50%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.200.000.000,00	891.365.853,00	831.444.976,00	93,28%
Total		45.241.894.000,00	34.240.609.300,00	29.134.209.395,00	85,09%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar **Rp. 29.134.209.395,00** dari total anggaran **Rp. 34.240.609.300,00** atau setara dengan **85,09%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, yang berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Selain itu, pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap dalam mengelola sektor pariwisata serta menerima kunjungan wisatawan.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: "Berkembangnya Ekosistem Kreatif"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "**Berkembangnya Ekosistem Kreatif**" dengan indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif** mencapai **117,55%** dan termasuk predikat "**Sangat Berhasil**" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-65 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,81	114,45

“Data kajian yang digunakan pada analisis ini merupakan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tahun 2025 data kajian belum tersedia. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kegiatan kajian yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan kajian sebagaimana direncanakan”.

Dengan demikian, analisis yang disajikan dalam laporan ini masih menggunakan data hasil kajian tahun 2024. Diharapkan pada tahun berikutnya kegiatan kajian dapat kembali dilaksanakan sehingga data yang lebih mutakhir dapat tersedia untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

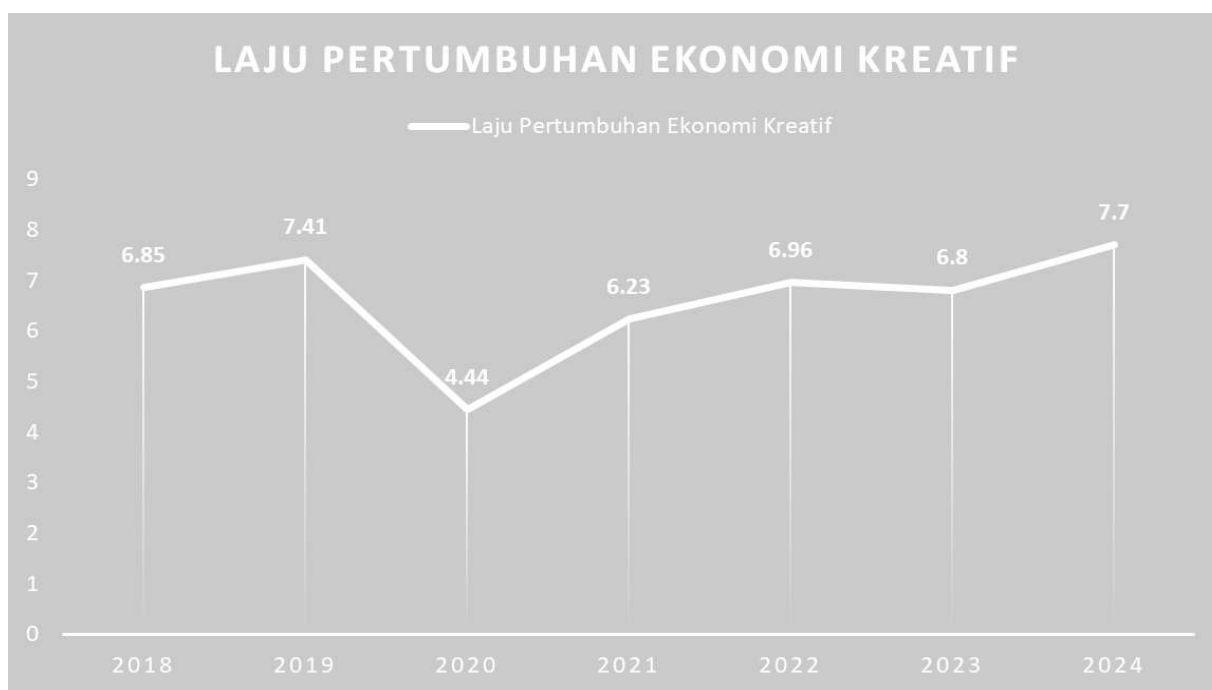
Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berbasis pada kreativitas, ide, dan inovasi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini mencakup berbagai sektor, seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, fesyen, hingga pengembangan perangkat lunak dan digital. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dimanfaatkan bukan hanya bahan mentah atau modal finansial, tetapi juga daya cipta, bakat, dan keterampilan manusia dalam menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara global. Dengan kontribusinya terhadap inovasi dan penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif adalah tingkat perubahan atau peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat sektor ekonomi kreatif berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ini dapat dihitung berdasarkan peningkatan nilai tambah bruto (NTB) dari industri kreatif, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan subsektor

ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, dan teknologi digital.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi, teknologi, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, serta keterampilan sumber daya manusia. Jika angka pertumbuhannya meningkat, berarti sektor ekonomi kreatif semakin berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk kreatif, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah atau nasional. Sebaliknya, jika laju pertumbuhan mengalami penurunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan sektor kreatif agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Grafik II-32 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2024, terlihat adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2018, sektor ekonomi kreatif tumbuh sebesar **6,85%**, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan ini semakin meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai **7,41%**, yang didorong oleh peningkatan investasi, penguatan program ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan promosi dan festival daerah yang mendukung para pelaku usaha kreatif.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan hingga **4,44%**, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, penutupan tempat usaha, serta berkurangnya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat aktivitas ekonomi kreatif selama periode tersebut. Berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, event organizer, dan industri pariwisata kreatif sangat terdampak akibat pembatasan kegiatan fisik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan laju pertumbuhan sebesar **6,23%**. Hal ini didorong oleh adaptasi para pelaku usaha kreatif terhadap digitalisasi, seperti penjualan produk secara daring, pemanfaatan media sosial, serta berbagai program dukungan yang diberikan untuk mendorong pemulihan usaha kreatif. Tren pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai **6,96%**, menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berhasil bangkit dari dampak pandemi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit mengalami penurunan menjadi **6,8%**, yang masih menunjukkan stabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi sedikit penurunan ini adalah adanya tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat, inflasi, serta perubahan tren konsumsi masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk kreatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tahan yang cukup kuat dan terus mengalami perkembangan positif seiring dengan berbagai program dan inovasi yang terus dilakukan. Namun di Tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,7.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-66 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,8	7,7	7,48	7,56

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-67 Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	17.100.000.000,00	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%
	Total	17.100.000.000,00	11.150.570.820,00	8.410.796.568,00	75,43%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar **Rp.8.410.796.568,00** dari total anggaran **Rp. 11.150.570.820,00** atau sebesar **75,43%**. Perbandingan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dihitung secara akurat. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang digunakan merupakan realisasi tahun 2025, sedangkan capaian kinerja yang tersedia masih menggunakan data tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena data capaian kinerja tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian target belum dapat dilakukan secara tepat.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini antara lain peran aktif generasi muda, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung, serta terbukanya peluang bagi mereka untuk berkreasi. Kemajuan teknologi, kemudahan akses komunikasi, serta perkembangan media sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan Ekosistem Kreatif. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebagai indikator utama perkembangan sektor tersebut.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah**” dengan indikator **Tingkat Pertumbuhan Investasi** mencapai **-1239%** dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,77	-21,93	-1239%

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Di Tahun 2025 target Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi RPJMD sebesar 1,77%, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2025 mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai

Investasi sebesar -21,93%, capaian sangat jauh dari target dan jauh lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 10,85%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah :

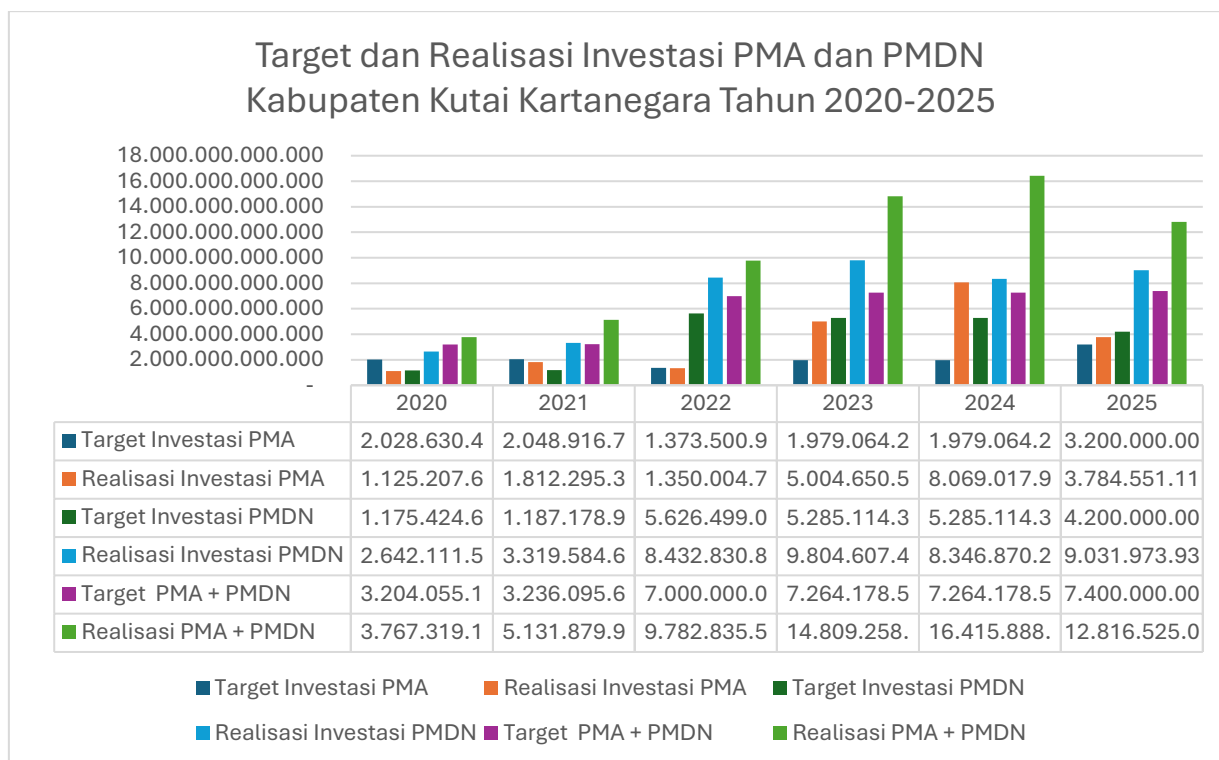
$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi } n-1) \text{ di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi } n-1 \text{ di Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = \frac{12.816.525.047.627 - 16.415.888.215.433}{16.415.888.215.433} \times 100\%$$

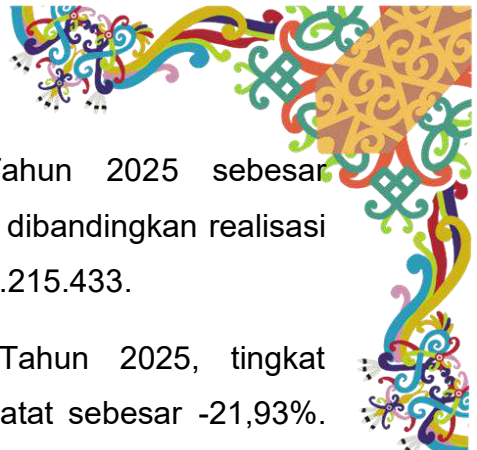
$$\text{Tingkat Pertumbuhan Investasi} = -21,93\%$$

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2025 :

Grafik II-33 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025



Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 sebesar Rp.12.816.525.047.627, lebih rendah Rp. 3.599.363.167.806, dibandingkan realisasi investasi Tahun 2023 yang mencapai nilai Rp. Rp. 16.415.888.215.433.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan investasi Tahun 2025, tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar -21,93%. Capaian ini menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan melemahnya minat investasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh struktur investasi yang bersifat siklus. Pada tahun sebelumnya terdapat realisasi investasi dalam skala besar, khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersifat proyek strategis dan tidak berulang setiap tahun. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, pada tahun berjalan tidak terdapat investasi baru dengan nilai yang setara sehingga berdampak pada kontraksi pertumbuhan investasi.

Secara fundamental, iklim investasi Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki daya tarik yang kuat, didukung oleh keberadaan kebijakan insentif penanaman modal, layanan investasi melalui Mal Pelayanan Publik, komitmen pemerintah daerah dalam percepatan investasi, serta posisi strategis wilayah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur dasar, serta meningkatnya kebutuhan kawasan mitra IKN tetap menjadi faktor yang menarik bagi investor.

Namun demikian, penurunan pertumbuhan investasi turut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Penurunan realisasi PMA akibat selesainya proyek-proyek besar pada periode sebelumnya
- 2) Siklus investasi sektor ekstraktif yang bersifat fluktuatif
- 3) Perubahan kondisi global seperti nilai tukar dan biaya logistic
- 4) Aktivitas promosi investasi yang belum optimal
- 5) Ketergantungan pada sektor investasi tradisional
- 6) Pipeline investasi baru yang belum terbentuk secara kuat

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan investasi mengalami kontraksi pada tahun pelaporan, kondisi iklim investasi daerah tetap kondusif. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diversifikasi sektor investasi, optimalisasi promosi, serta peningkatan kemudahan pelayanan perizinan guna mendorong pertumbuhan investasi yang lebih stabil.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-68 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	-21,93	1,79

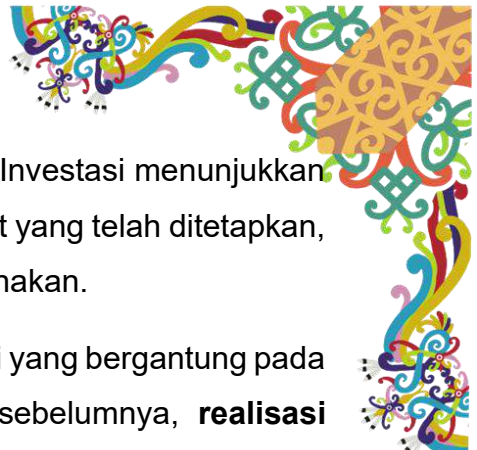
Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-69 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.600.000.000,00	1.717.281.800,00	1.679.913.709,00	97,82%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.550.000.000,00	1.098.959.200,00	940.463.107,00	85,58%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.650.000.000,00	846.643.775,00	455.605.632,00	53,81%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.200.000.000,00	619.102.773,00	592.187.535,00	95,65%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.929.882.900,00	511.315.200,00	153.482.357,00	30,02%
	Total	8.929.882.900,00	4.793.302.748,00	3.821.652.340,00	79,73%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.3.821.652.340,00** dari anggaran sebesar **Rp.4.793.302.748,00** atau **79,73%**. Realisasi keuangan sebesar 79,73% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **-21,93%**, maka penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut dinilai tidak efisien, karena target sasaran gagal mencapai 100%, namun penggunaan sumber daya cukup tinggi dari capaian kinerja.



Pada tahun pelaporan, indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Investasi menunjukkan realisasi sebesar -21,93%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian tersebut belum memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh struktur realisasi investasi yang bergantung pada masuknya proyek investasi berskala besar. Pada periode sebelumnya, **realisasi investasi didominasi oleh proyek PMA dengan nilai signifikan**. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, pada tahun berjalan tidak terdapat realisasi investasi baru dengan nilai yang sebanding sehingga memengaruhi capaian terhadap target.

Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global, perubahan keputusan investasi perusahaan, serta karakteristik sektor investasi daerah yang masih didominasi sektor ekstraktif turut memengaruhi capaian indikator ini.

Meskipun demikian, secara umum iklim investasi daerah tetap menunjukkan potensi positif yang didukung oleh kebijakan insentif investasi, layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, komitmen pemerintah daerah dalam percepatan investasi, serta posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

Dengan demikian, kesenjangan antara target dan realisasi lebih disebabkan oleh siklus investasi dan dinamika eksternal, bukan karena menurunnya daya tarik investasi daerah secara fundamental. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat promosi investasi, diversifikasi sektor, serta pengembangan pipeline proyek investasi pada periode mendatang.

Beberapa kondisi yang mendukung iklim investasi daerah antara lain:

- 1) Kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal.
- 2) Pemusatan layanan perizinan dan investasi yang meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan.
- 3) Dukungan kelembagaan melalui forum koordinasi, percepatan investasi, dan pembinaan pelaku usaha.
- 4) Potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pada sektor energi dan ekstraktif.
- 5) Kedekatan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

- 6) Ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi.
- 7) Stabilitas ekonomi nasional yang mendorong keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya pertumbuhan investasi antara lain:

- 1) Penurunan investasi asing akibat selesainya proyek-proyek besar pada tahun sebelumnya.
- 2) Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi yang menyebabkan investasi bersifat fluktuatif.
- 3) Perubahan nilai tukar, biaya logistik, serta penundaan ekspansi investor.
- 4) Keterbatasan kegiatan promosi dan forum investasi yang berdampak pada rendahnya pipeline investasi baru.
- 5) Dominasi sektor berbasis sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan harga komoditas global.
- 6) Beberapa aspek pelayanan investasi yang masih memerlukan penguatan, seperti konsultasi penanaman modal dan pengelolaan data investasi.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih**” dengan indikator **Cakupan Layanan Air Bersih dan Presentase Rumah Layak Huni** mencapai **98,76%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-70 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	93,58	75,89	81,10
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	91,16	91,16	108
Rata-rata Capaian					95

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

7) Cakupan Layanan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.

Indikator Kinerja Utama **Cakupan Layanan Air Bersih** adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, Jumlah rumah tangga (sasaran) merupakan hasil konversi dari jumlah penduduk (jiwa) dengan asumsi satu rumah tangga = 4 jiwa, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (tandon).

Berikut disajikan tabel data Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025:

Tabel II-71 Jumlah Pelanggan Terpasang Perumda Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara per bulan September 2025

Jiwa	Jumlah Rumah Kabupaten	Layanan PDAM (RT)	Perpipaan Perdesaan (RT)	Non Perpipaan (RT)	PDAM	Perdesaan	PDAM (%)	Perkotaan/Perdesaan (%)
806.964	175.181	112.346	12.270	8337	112.346	20.607	55,69	10,21

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Cakupan Layanan Air Bersih

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{132.953}{175.181} \times 100\% = \underline{\underline{75,89\%}}$$



Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU menuju Boster Kecamatan Tenggarong

Indikator Cakupan Layanan Air Bersih menunjukkan adanya penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi cakupan layanan air bersih mencapai 80,20% dari target sebesar 92,16%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 87,02%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh akses terhadap layanan air bersih, meskipun masih terdapat selisih sekitar 12% dari target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja. Realisasi cakupan layanan air bersih tercatat sebesar 75,89% dari target 93,58%, dengan capaian kinerja sebesar 81,10%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian sebesar 4,31% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan perluasan layanan air bersih kepada masyarakat.

Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan dalam pengembangan jaringan layanan, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan kendala teknis yang mempengaruhi distribusi air bersih. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dalam dalam perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya melalui optimalisasi peran PDAM, penguatan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non-perpipaan, serta peningkatan pemeliharaan sarana SPAM perdesaan.



Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi pencapaian target Renstra 2021–2026. Upaya korektif dan inovatif perlu segera dilakukan agar capaian cakupan layanan air bersih dapat kembali berada pada jalur yang diharapkan. Hal ini juga penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya



pada aspek akses terhadap air minum layak, serta sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar.

Adapun beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program peningkatan cakupan layanan air bersih antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan Infrastruktur dan Jaringan

- o Jaringan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah, terutama pada desa-desa terpencil serta daerah dengan kondisi geografis yang sulit, seperti wilayah perbukitan, rawa, maupun kawasan yang jauh dari sumber air baku.
- o Kapasitas instalasi pengolahan air bersih yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat atau calon pelanggan.

2) Kendala Pembiayaan

- o Ketersediaan anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan sarana air bersih belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
- o Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan keberlanjutan program dan layanan air bersih menjadi kurang stabil.

3) Kualitas dan Keberlanjutan Sarana

- o Sebagian sarana air bersih berbasis masyarakat, khususnya SPAM non-perpipaan, mengalami penurunan fungsi akibat keterbatasan pemeliharaan.
- o Pada beberapa lokasi, kualitas air yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih.

4) Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat

- o Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana air bersih masih relatif rendah, yang berdampak pada kerusakan fasilitas dalam waktu yang lebih cepat.

- o Kapasitas teknis kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAMS) di tingkat desa masih terbatas dalam mengoperasikan serta memelihara sistem yang ada.

5) Koordinasi Lintas Dinas dan Pemangku Kepentingan

- o Pelaksanaan program air bersih melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, pemerintah desa, serta masyarakat. Koordinasi yang belum optimal seringkali menimbulkan tumpang tindih program maupun keterlambatan pelaksanaan.
- o Integrasi data cakupan layanan air bersih antarinstansi juga belum sepenuhnya berjalan optimal.

6) Faktor Eksternal

- o Pertumbuhan penduduk serta proses urbanisasi meningkatkan kebutuhan air bersih lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas layanan yang tersedia.
- o Perubahan iklim, termasuk potensi musim kemarau yang lebih panjang, turut mempengaruhi ketersediaan sumber air baku.

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 4,31% dibandingkan tahun 2024 mencerminkan adanya kombinasi hambatan yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Keterbatasan jaringan PDAM, belum optimalnya pemeliharaan sarana berbasis masyarakat, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang masih perlu diperkuat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pencapaian target Renstra. Selain itu, dinamika eksternal seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim turut memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelayanan air bersih kepada masyarakat.





WTP 50 Ltr/Dtk SPM Sei Merdeka beserta prasarananya

2) Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama **Persentase Rumah Layak Huni** adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

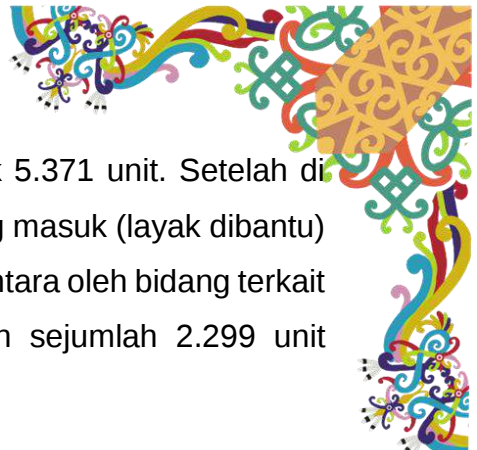
Cakupan Rumah Layak Huni

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{172.882}{175.181} \times 100\% = \underline{\underline{98,69 \%}}$$

Keterangan:

- 1) Jumlah seluruh rumah kabupaten diperoleh dari Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2024.
- 2) Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah di Kabupaten (berdasarkan data RP3KP Tahun 2024) dikurangi jumlah rumah tidak layak huni. Di tahun 2025, jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data RBPK Kutai Kartanegara sebesar 2.299 unit yang diperoleh dari perhitungan jumlah data rumah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi sebanyak 1.576 unit dan yang dianggap layak dibantu sebanyak 1.259 unit kemudian di kurangi dengan jumlah rumah yang sudah di rehab dan ditangani dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebanyak 536 unit.

- 
- 3) Sasaran Yok Baiki Rumah pada data RBPK sebanyak 5.371 unit. Setelah di verifikasi tidak semua masuk dalam kriteria RTLH. Yang masuk (layak dibantu) hanya sebesar 1.259 dan yang belum di verifikasi sementara oleh bidang terkait dimasukkan ke dalam kriteria RTLH, maka diperoleh sejumlah 2.299 unit tersebut.

$$175.181 - 2.299 = 172.882 \text{ Unit Rumah Layak Huni.}$$

$$= \frac{172.882}{175.181} \times 100$$

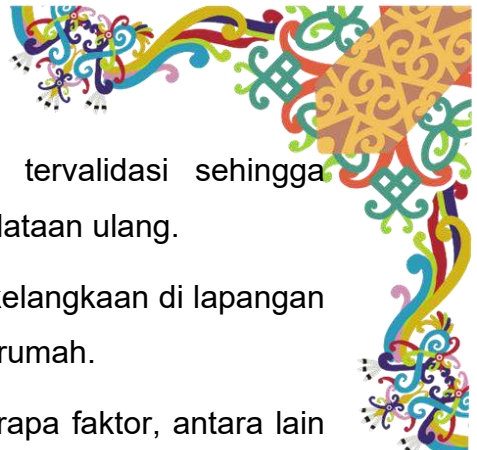
$$= 98,69 \%$$

Berdasarkan data tersebut, capaian Indikator Cakupan Rumah Layak Huni menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi indikator mencapai 98,64% dari target sebesar 90,89%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 98,69% dari target sebesar 91,16%, dengan capaian kinerja sebesar 108,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terlihat adanya peningkatan realisasi indikator sebesar 0,05%. Namun demikian, secara persentase capaian kinerja terjadi sedikit penurunan sebesar 0,27%, yang dipengaruhi oleh peningkatan target pada tahun 2025.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) merupakan program yang mengadopsi skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui pendekatan swadaya, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan kualitas rumah mereka.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:



Data calon penerima bantuan yang belum sepenuhnya tervalidasi sehingga memerlukan waktu tambahan untuk proses verifikasi dan pendataan ulang.

Ketersediaan material bangunan yang terkadang mengalami kelangkaan di lapangan sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi rumah.

Keberhasilan pelaksanaan program juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah hunian yang layak melalui skema Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH), semakin berkembangnya sistem pelaksanaan program rumah swadaya, serta adanya dukungan teknis dalam pengembangan program rumah swadaya di daerah.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) merupakan bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bertujuan untuk mendorong serta meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program tersebut berdasarkan Renstra periode 2021–2026, sekaligus dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, yaitu meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Program ini juga sejalan dengan program dedikasi KUKAR IDAMAN, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menetapkan tiga zona prioritas penanganan, yaitu Zona Tengah, Zona Hulu, dan Zona Pesisir, sebagai wilayah sasaran untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare, yang meliputi subkegiatan penyusunan, review, dan legalisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

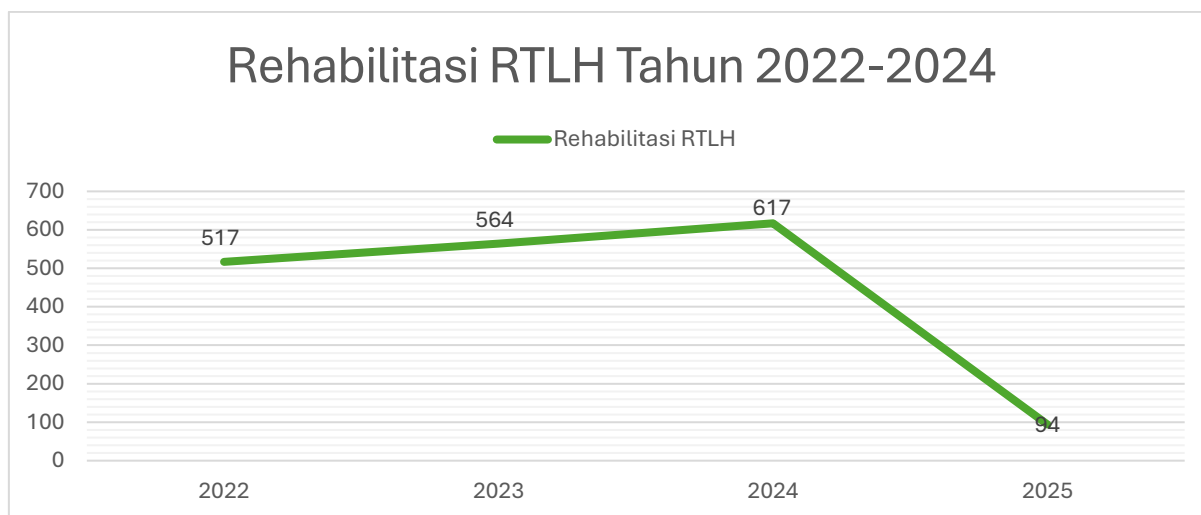
Selain itu, pelaksanaan indikator juga didukung oleh Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada tingkat

kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH , meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Grafik II-34 Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2023- 2024

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, di Tahun 2024 sebanyak 617 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah yang mendapat bantuan rehabilitasi di Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan Tahun 2023 dengan total sebanyak 562 Unit rumah yang direhabilitasi, atau meningkat 55 unit rumah.



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa
Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa
Wonotirto Kecamatan Samboia

Tabel II-72 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non RBPK Tahun 2025

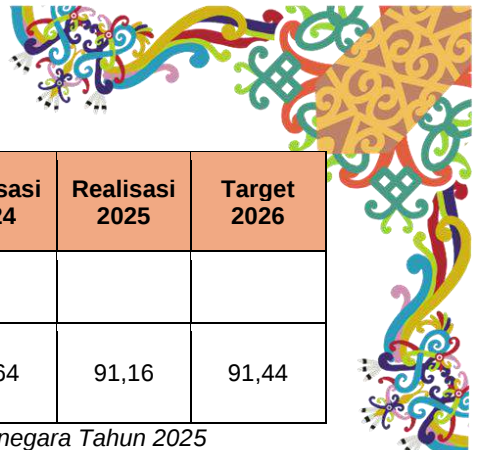
No	Zona	Jumlah Unit Rumah Per Zona	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah Per Kecamatan	Keterangan
1.	Tengah	7	Tenggarong	4	4 Kelurahan
			Loa Janan	3	2 Desa
2.	Pesisir	26	SangaSanga	4	3 Desa
			Muara Jawa	22	4 Kelurahan
3.	Hulu	33	Sebulu	33	4 Desa
TOTAL		66			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-73 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
16	Cakupan	Persen	70,85	76,67	82,54	80,20	75,89	95



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
	Layanan Air Bersih							
17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-74 Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	177.284.866.034,00	166.011.250.453,00	115.547.530.613,00	69,60%
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	274.565.943.750,00	273.345.845.731,00	193.766.882.112,00	70,89%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	148.028.165.354,00	129.048.086.605,00	94.127.204.253,00	72,94%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.939.999.993,00	17.384.981.047,00	13.616.920.210,00	78,33%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.300.000.000,00	17.932.691.948,00	5.503.089.860,00	30,69%
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.363.615.440,00	2.699.477.998,00	2.523.139.000,00	93,47%
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.490.000.000,00	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27%
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	237.245.461.196,00	237.751.944.316,00	199.940.887.753,00	84,10%
Total		896.218.051.767,00	849.605.509.598,00	629.928.274.320,00	74,14%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.629.928.274.320,00** dari anggaran sebesar **Rp.849.605.509.598,00** atau **74,14%**. Realisasi keuangan sebesar 74,14% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **95%**, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam

mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah**” dengan indikator **Indeks Aksesibilitas Wilayah** mencapai **88,68%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-75 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	87,18	77,310	88,68

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Indeks Aksesibilitas Wilayah diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{\text{Jalan Mantap} + \text{Aksesibilitas}}{2}$$

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{65,73 + 88,89}{2} = 77,310$$

Keterangan:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{\text{jumlah Kecamatan terhubung}}{\text{total Kecamatan}} \times 100 \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat. Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-76 Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

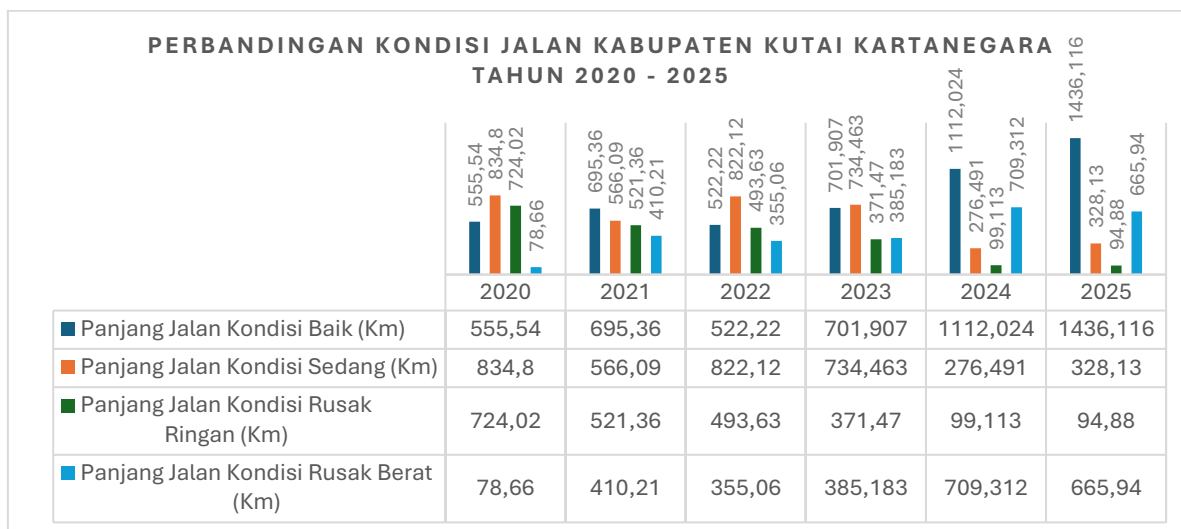
No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		237	11 Desa	7 Desa

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

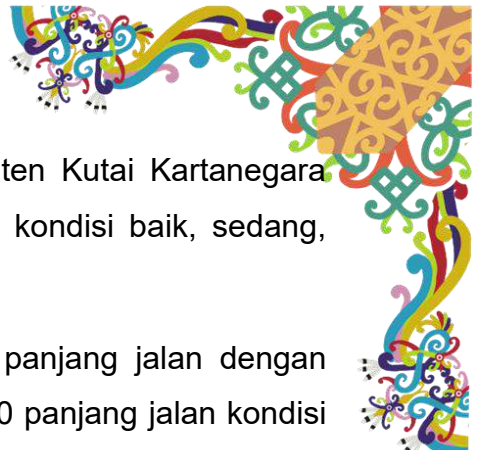
Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah gambur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2025 sebesar 77,31%, capaian ini lebih tinggi 1,27% dari capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu sebesar 76,045%, peningkatan capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan, panjang ruas jalan 2.193,02 KM, namun berdasarkan Surat Keputusan terbaru Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang ruas jalan menjadi 2.196,94 KM, atau bertambah 3,92 KM. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025:

Grafik II-35 Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025



Grafik menunjukkan perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode Tahun 2020–2025 yang terdiri dari kategori kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Secara umum terlihat adanya peningkatan signifikan pada panjang jalan dengan kondisi baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2020 panjang jalan kondisi baik tercatat sebesar 555,54 km, kemudian meningkat menjadi 695,36 km pada Tahun 2021, meskipun sempat menurun pada Tahun 2022 menjadi 522,22 km. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2023 menjadi 701,91 km, meningkat signifikan pada Tahun 2024 sebesar 1.112,02 km, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 1.436,12 km. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, panjang jalan dengan kondisi sedang cenderung berfluktuasi selama periode pengamatan. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 834,8 km, kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 566,09 km, meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 822,12 km, dan kembali menurun pada Tahun 2023 sebesar 734,46 km. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2024 menjadi 276,49 km, kemudian sedikit meningkat pada Tahun 2025 menjadi 328,13 km.

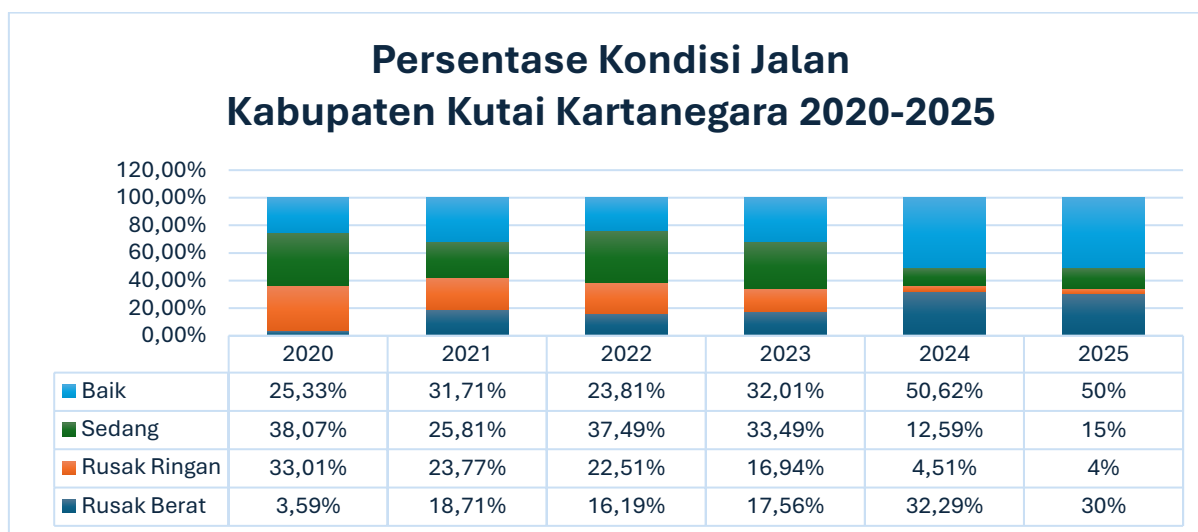
Untuk jalan dengan kondisi rusak ringan, terjadi tren penurunan yang cukup konsisten. Pada Tahun 2020 panjang jalan rusak ringan tercatat sebesar 724,02 km, kemudian menurun menjadi 521,36 km pada Tahun 2021, 493,63 km pada Tahun 2022, dan 371,47 km pada Tahun 2023. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2024 menjadi 99,11 km, dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 94,88 km.

Di sisi lain, panjang jalan dengan kondisi rusak berat menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 78,66 km, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2021 menjadi 410,21 km. Pada Tahun 2022 dan 2023 relatif stabil di kisaran 355–385 km, namun kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 709,31 km, sebelum sedikit menurun pada Tahun 2025 menjadi 665,94 km.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan panjang jalan dengan kondisi baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam penanganan jalan rusak berat yang jumlahnya masih relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kualitas

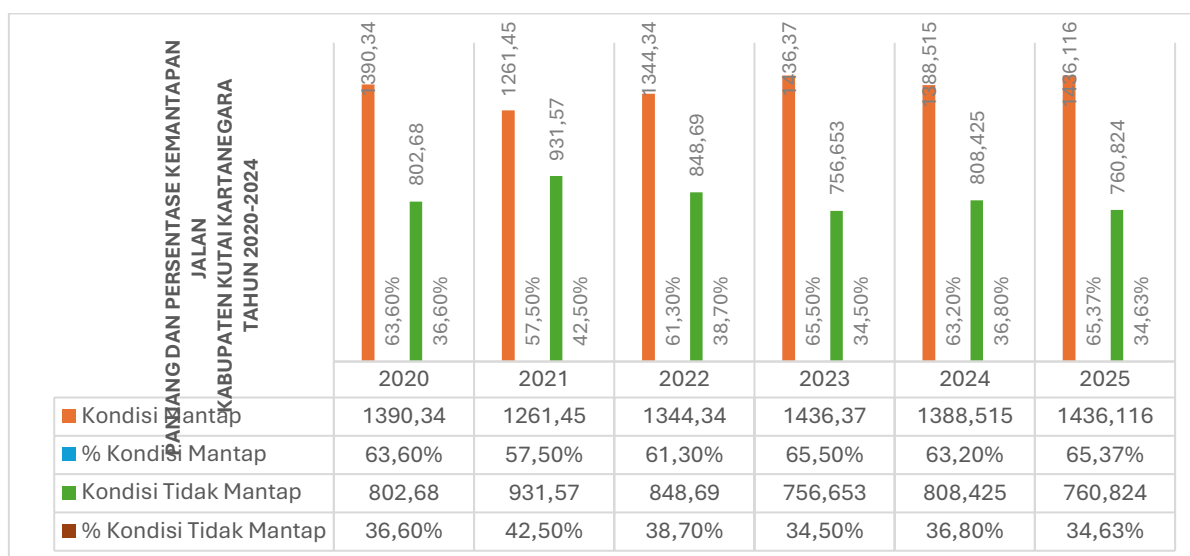
infrastruktur jalan melalui program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Grafik II-36 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Grafik II-37 Panjang dan Persentase Kemandapan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025

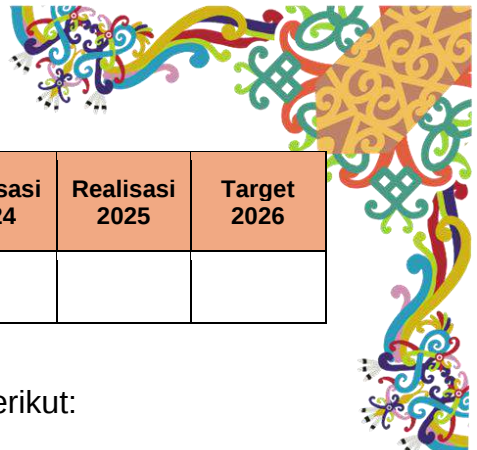


Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-77 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
18	Indeks	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	77,31	88,18



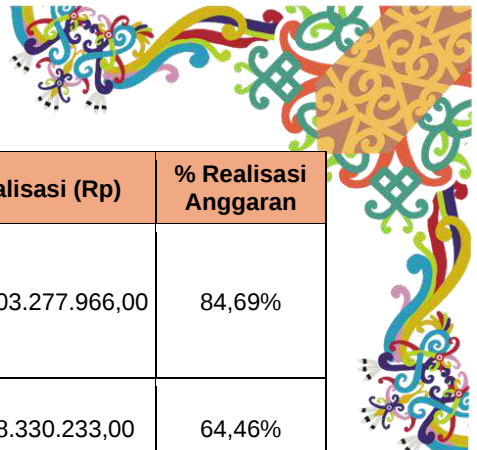
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
	Aksesibilitas Wilayah							

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-78 Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00	53.116.442.717,00	82,10%
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.949.893.337,00	11.195.459.137,00	4.680.365.003,00	41,81%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.213.778.205.278,00	948.647.787.668,00	743.166.387.387,00	78,34%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.800.000.000,00	3.699.681.084,00	560.981.747,00	15,16%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	3.015.700.060,00	2.510.502.613,00	83,25%
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	700.000.000,00	601.530.500,00	568.521.100,00	94,51%
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	23.800.000.000,00	21.549.494.120,00	15.511.538.995,55	71,98%
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	900.000.000,00	442.738.020,00	243.908.650,00	55,09%
9	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	300.000.000,00	135.082.950,00	15.146.200,00	11,21%
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	834.799.664,00	411.662.306,00	254.330.087,00	61,78%
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	850.000.000,00	685.310.206,00	656.265.225,00	95,76%
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	600.000.000,00	290.689.400,00	275.383.350,00	94,73%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	187.974.960.000,00	158.584.157.966,00	134.303.277.966,00	84,69%
14	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.800.000.000,00	3.224.137.231,00	2.078.330.233,00	64,46%
	Total	1.523.487.858.279,00	1.217.183.430.648,00	957.941.381.273,55	78,70%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.957.941.381.273,55** dari anggaran sebesar **Rp. 1.217.183.430.648,00** atau **78,70%**. Realisasi keuangan sebesar **78,70%**, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **88,68%**, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

- 1) Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
- 2) Kondisi geografis juga mempengaruhi perubahan topografi.
- 3) Beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut (ODOL = *over dimension over loding*) seperti kendaraan truck yang bermuatan lebih dari kapasitas.
- 4) Umur konstruksi yang merupakan jangka waktu di mana jalan dapat berfungsi secara optimal sebelum mengalami penurunan kualitas yang signifikan atau memerlukan rehabilitasi besar. Umur ini biasanya dihitung sejak jalan dibangun hingga kondisinya tidak lagi memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** mencapai **99,70%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-79 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah. IKLH mencerminkan tingkat kualitas lingkungan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan, yang menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah tersebut berada dalam keadaan sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Komponen Utama IKLH:**

1) Kualitas Udara

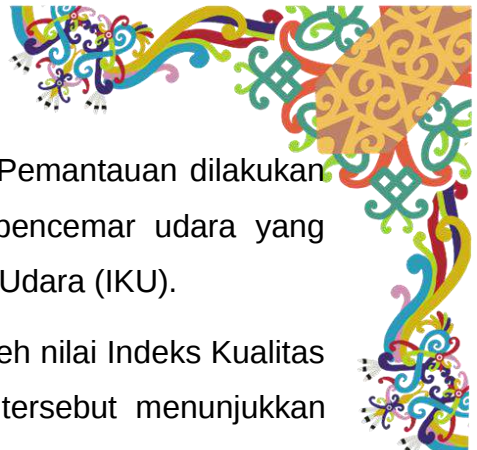
Pelaksanaan pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada sejumlah titik pantau yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan kualitas air dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter utama yaitu pH, Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat (NO₃-N), Fecal Coliform, dan Total Phospat yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada tahun terbaru, diperoleh nilai Indeks Kualitas Air sebesar **52,05**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada kategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air masih dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitar badan sungai, khususnya aktivitas domestik yang menghasilkan limbah rumah tangga sehingga beberapa parameter seperti Fecal Coliform masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan.

Upaya peningkatan kualitas air terus dilakukan melalui pengendalian pencemaran air, peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari badan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik terutama di wilayah bantaran sungai.

2) Kualitas Air

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan menggunakan metode Manual Passive Sampler, dengan memasang alat pemantauan pada



beberapa titik lokasi yang mewakili kondisi wilayah tertentu. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data konsentrasi beberapa parameter pencemar udara yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Udara (IKU).

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara terbaru, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **92,73**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara berada dalam kategori Baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara masih berada pada kondisi yang cukup baik dan belum mengalami tekanan pencemaran udara yang signifikan.

Meskipun demikian, upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan melalui pengawasan terhadap sumber emisi, pengendalian aktivitas industri dan transportasi, serta peningkatan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas udara agar tetap berada pada kondisi yang baik.

3) Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan. Beberapa kategori tutupan lahan yang menjadi komponen perhitungan IKTL antara lain tutupan hutan, belukar atau belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan terbaru, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **75,17**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan berada dalam kategori Baik serta menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai IKTL ini dipengaruhi oleh upaya pengelolaan kawasan hutan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tutupan lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil pengukuran 3 komponen utama IKLH diatas maka diperoleh Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

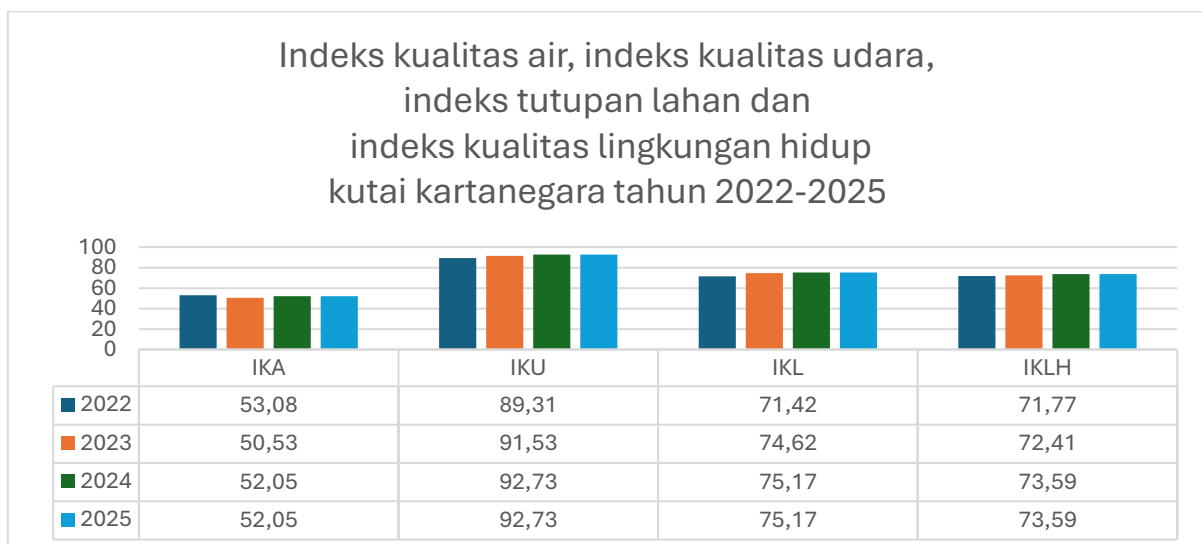
$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times 52,05) + (0,405 \times 92,73) + (0,219 \times 75,17)$$

IKLH Kab. Kutai Kartanegara = 73,59 = Kategori IKLH "BAIK"

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dari IKLH, berikut grafik IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2025:

Grafik II-38 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2025



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025



Seberang)

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index (EQI)* dan konsep *Environmental Performance*



Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan lingkungan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti:

- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
- Pengelolaan limbah dan pencemaran air yang lebih efektif.
- Penghijauan kembali lahan yang mengalami degradasi.
- Penguatan regulasi lingkungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Sungai Anggana (Kec. Anggana)

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-80 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

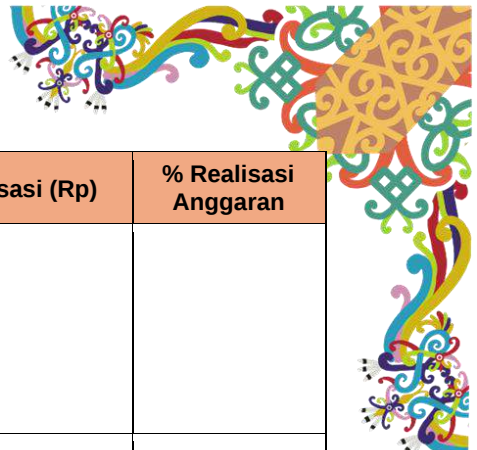
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	73,59	74,51

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-81 Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00	253.797.520,00	239.709.200,00	94,45%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.808.000.000,00	2.399.969.399,00	1.549.635.152,00	64,57%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.336.590.000,00	3.236.304.662,00	2.512.090.900,00	77,62%
4	PROGRAM	400.000.000,00	191.243.320,00	166.908.480,00	87,28%



No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600.000.000,00	288.383.800,00	232.067.733,00	80,47%
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000,00	43.548.900,00	42.245.300,00	97,01%
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	480.000.000,00	232.345.260,00	113.584.000,00	48,89%
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.451.125.000,00	560.324.000,00	176.723.116,00	31,54%
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	113.631.600,00	104.464.400,00	91,93%
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	59.750.905.990,00	50.667.595.838,00	40.346.410.724,00	79,63%
11	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.250.000.000,00	748.252.400,00	532.567.940,00	71,17%
	Total	73.901.620.990,00	58.735.396.699,00	46.016.406.945,00	78,35%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.46.016.406.945,00** dari anggaran sebesar **Rp. 58.735.396.699,00** atau **78,35%**. Realisasi keuangan sebesar 78,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **99,24%**, maka efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai



sasaran tersebut tercapai, karena target sasaran hampir mendekati 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2025 sebesar 73,59, capaian ini sama dengan capaian IKLH di Tahun 2024. Nilai capaian hanya sekitar 99,24 % dari target IKLH 74,15 Namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “**BAIK**”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

- a. Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA : Target = 57,42 Realisasi = 52,05. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 78 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 36 titik, Pusat sebanyak 24 titik, dan Provinsi sebanyak 18 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-0207/DLHK/Bid 3.1/663.1/02/2024 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024.
- b. Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.
- c. Dari 78 titik pantau perhitungan indeks pencemaran air, sebanyak 58 tercemar ringan dan 6 titik tercemar sedang.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- a. Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan *Parameter Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.
- b. Belum maksimalnya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan dan perdesaan;
- c. Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil;

d. Belum maksimalnya pelaksanaan restorasi sungai.

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu:

Tabel II-82 Sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Sungai Loa Haur Loa Duri	1000	3735,75
Sungai Perian	1000	6518
Sungai Jembayan Desa Jonggon	1000	12237
Desa Muara Aloh	1000	1498
Sungai Anggana Pelabuhan Kutai Lama	1000	360
Sungai Saka Kanan Tenggarong	1000	3548,8
Kedang Rantau Pelabuhan Situs Kerajaan Mulawarman	1000	147
Sungai Sentekan Desa Long Beleh Haloq	1000	4120,5

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Faktor Pendukung:

- Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim
- Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD
- Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati
- Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Faktor Penghambat:

- Pengelolaan Sumber Daya Alam masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis
- Pencemaran air, udara dan tanah belum tertangani secara tepat, karena pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan

- Perubahan penggunaan lahan yang cepat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yg pesat dan diikuti oleh peningkatan aktivitas yg dapat menurunkan daya dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem
- Adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan lingkungan

16. Analisis Kinerja Sasaran 16: “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah**” dengan indikator **Indeks Risiko Bencana** mencapai **96%** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-83 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	102,14	106,40	96

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:



Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability Capacity}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

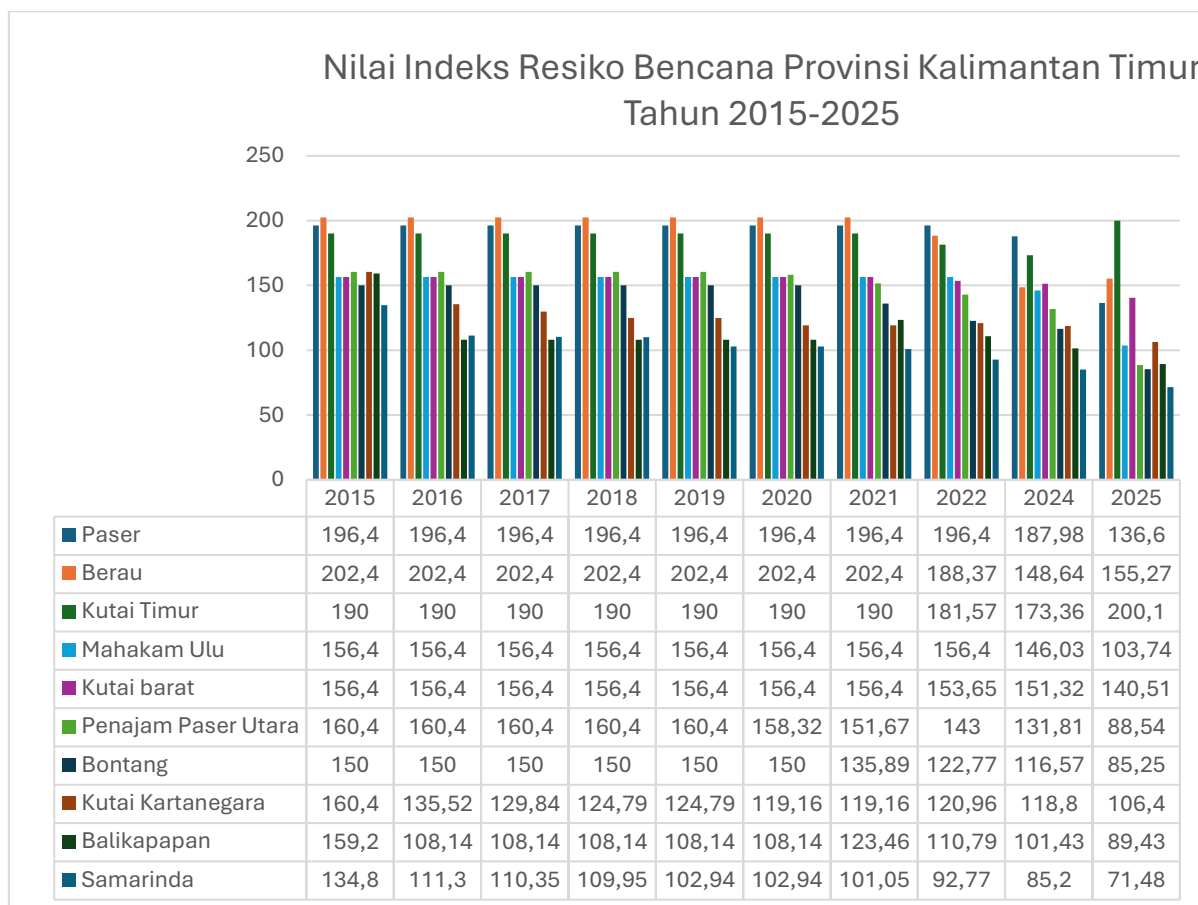
Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.

Nilai Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan skor 106.40 (sedang) adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB melalui surat nomor

B-27.23/BNPB/D- I/SS.01.03/1/2026, tanggal 28 Januari 2026, hal penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kalimantan Timur



Grafik II-39 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2025



Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-84 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	106,40	100

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

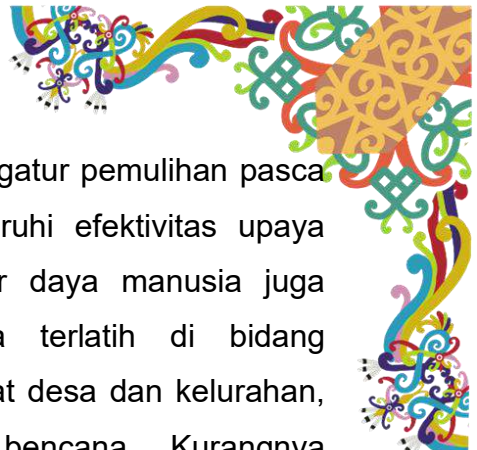
Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel II-85 Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.475.000.000,00	3.019.394.600,00	2.094.891.133,00	69,38%
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.290.039.638,00	2.640.914.980,80	1.516.875.435,00	57,44%
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.475.000.000,00	1.575.822.090,00	757.846.110,00	48,09%
	Total	12.240.039.638,00	7.236.131.670,80	4.369.612.678,00	60,39%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah **Rp.4.369.612.678,00** dari anggaran sebesar **Rp. 7.236.131.670,80** atau 60,39%. Realisasi keuangan sebesar 60,39% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **96%**, maka pencapaian kinerja dinilai efisien, karena target sasaran berhasil 100% tercapai dengan penggunaan sumber daya jauh lebih rendah dari capaian kinerja.

Capaian indikator Indeks Risiko Bencana memperoleh nilai sebesar 106,40 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 102,14. Meskipun capaian menunjukkan nilai di atas target, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana di daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain target yang ditetapkan relatif tinggi sehingga cukup sulit untuk dicapai secara maksimal. Selain itu, sistem peringatan dini di beberapa wilayah masih belum optimal sehingga informasi mengenai potensi bencana belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat secara tepat waktu. Infrastruktur mitigasi bencana seperti shelter dan jalur evakuasi di beberapa daerah juga masih terbatas dan belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terdampak bencana.



Di samping itu, belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur pemulihan pasca bencana secara lintas perangkat daerah turut mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala, khususnya masih kurangnya tenaga terlatih di bidang penanggulangan bencana seperti relawan, terutama di tingkat desa dan kelurahan, sehingga menyulitkan implementasi program mitigasi bencana. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam program mitigasi juga menyebabkan sinergi dalam upaya penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Risiko Bencana yaitu Program Penanggulangan Bencana, melalui beberapa kegiatan antara lain Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem mitigasi bencana, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi risiko bencana secara lebih efektif.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian

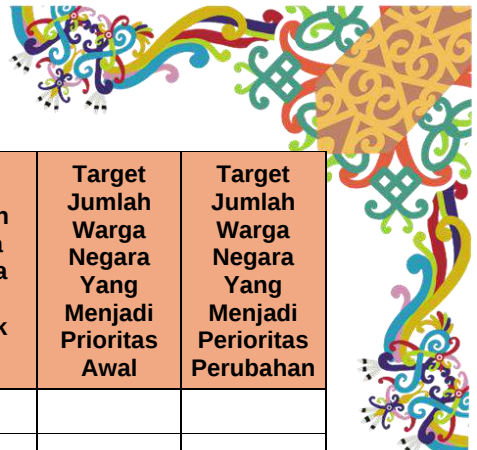
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu

Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
1	Pendidikan Dasar Usia Dini		Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	29.601	29.601	29.601
		1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	53,22	53,22	53,22
		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	78,6	78,6	78,6
2	Pendidikan Dasar		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	141.697	141.697	141.697
			SD				
		1	Kemampuan literasi	Nilai	72,98	72,98	72,98
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	65.42	65.42	65.42
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	72,15	72,15	72,15
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,59	70,59	70,59
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,09	57,09	57,09
			SMP				
		1	Kemampuan literasi	Nilai	83.45	83.45	83.45
		2	Kemampuan numerasi	Nilai	77.82	77.82	77.82
		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	72,37	72,37	72,37
		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,79	72,79	72,79
		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,32	59,32	59,32
3	Pendidikan		Jumlah Yang Harus	orang	3.329	3.329	3.329



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
	Kesetaraan		Dilayani				
		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	45,81	45,81	45,81

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

4.1.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-2 Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	81,93%	94,48%	84,44%
2	Pendidikan Dasar	100,00%	97,12%	99,42%
3	Pendidikan Kesetaraan	56,47%	55,73%	56,36%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan				80,06% (Tuntas Madya)

Berdasarkan 3 jenis pelayanan SPM pada urusan pendidikan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yaitu 80,06% dengan kategori Tuntas Madya. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025 sebesar 81,93% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 29.601 jiwa dan 24.253 peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

Tabel IV-3 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	29.601	24.253	81,93%	65,55%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025 sebesar 94,48% dari target 100%. Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel IV-4 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	53.22	49.72	93,42%	
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	78.6	75.09	95,53%	
Jumlah rata – rata				94%	18,90%

b. Pendidikan Dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 141.697 jiwa dan 141.935 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs).

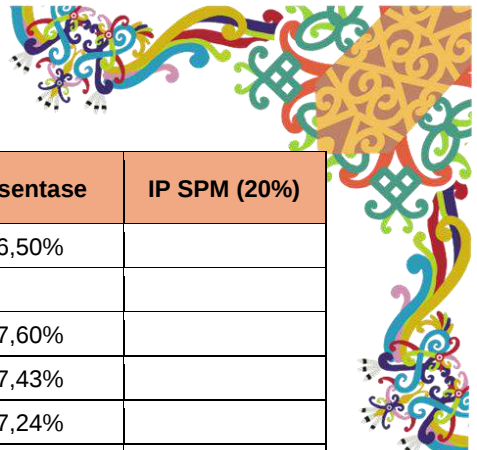
Tabel IV-5 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Dasar	141.697	141.935	100,00%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Dasar Tahun 2025 sebesar 97,12% dari target 100%. Mutu Pelayanan Dasar SD dan SMP belum mencapai target dari 100%.

Tabel IV-6 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	SD (2025)				
1	Kemampuan Literasi	72.98	70.98	97,26%	
2	Kemampuan Numerasi	65.42	63.42	96,94%	
3	Indeks Iklim Keamanan	72.15	70.15	97,23%	
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	70.59	68.59	97,17%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
5	Indeks Iklim Inklusifitas	57.09	55.09	96,50%	
	SMP (2025)				
1	Kemampuan Literasi	83.45	81.45	97,60%	
2	Kemampuan Numerasi	77.82	75.82	97,43%	
3	Indeks Iklim Keamanan	72.37	70.37	97,24%	
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	72.79	70.79	97,25%	
5	Indeks Iklim Inklusifitas	59.32	57.32	96,63%	
Jumlah Rata – rata				97,12%	19,42%

c. Pendidikan Kesetaraan

Capaian Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 8.303 jiwa dan 8.625 peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

Tabel IV-7 Capaian Penerima Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pendidikan Kesetaraan	3.329	1.880	56,47%	45,18%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025 sebesar 55,73% dari target 100%. Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai target 100%.

Tabel IV-8 Capaian Mutu Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	45.81	25.53	55,73%	11,15%

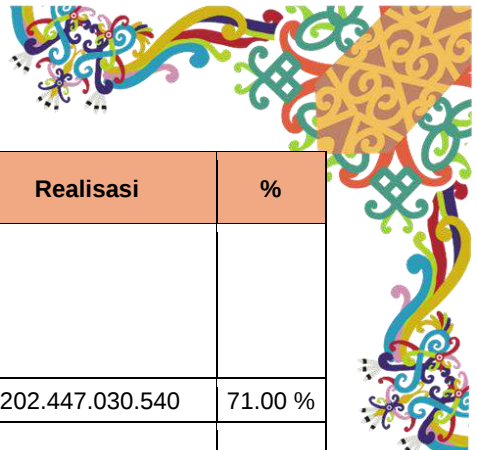
Ket: Capaian melebihi 100% dihitung maks 100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

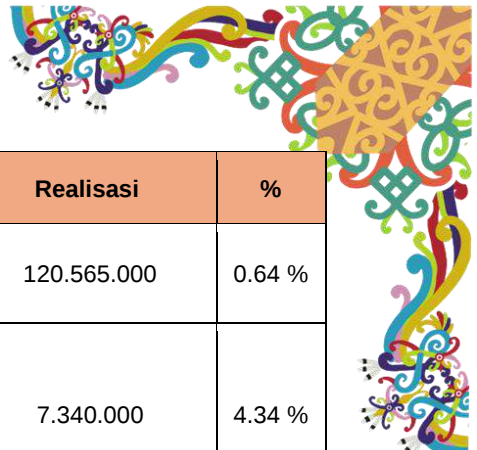
Dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan sebesar Rp. 413.604.336.640,00 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada APBD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-9 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

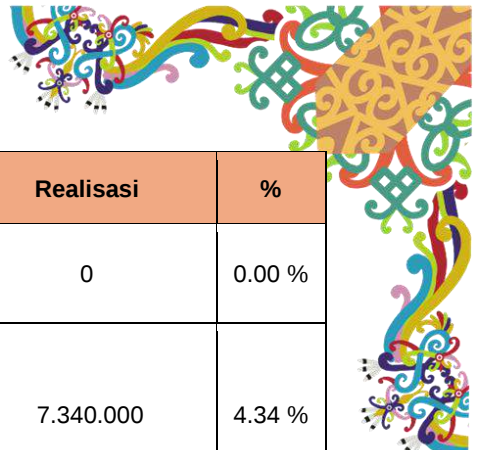
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pendidikan Usia Dini		55.071.703.000	43.876.325.967	34.238.968.704	78.04 %
	APS				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	0	0.00 %
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0	0	0	0.00 %
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0	0	0	0.00 %
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	450.000.000	233.540.000	189.544.760	81.16 %
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.362.160.000	5.306.330.000	2.743.877.000	51.71 %
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	7.580.000.000	3.100.736.460	2.186.534.800	70.52 %
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.360.000.000	4.566.885.320	4.429.406.763	96.99 %
	Kekhususan PAUD				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	696.460.000	691.480.000	589.152.000	85.20 %
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	21.798.083.000	21.725.850.600	20.363.703.396	93.73 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.975.000.000	3.543.171.200	1.933.549.000	54.57 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.750.000.000	1.195.402.583	300.153.950	25.11 %
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	450.000.000	158.866.500	130.622.000	82.22 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	600.000.000	420.096.200	216.546.150	51.55 %
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	950.000.000	170.000.000	60.390.125	35.52 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.450.000.000	921.994.872	870.245.760	94.39 %
	Bimbingan Teknis,	2.650.000.000	1.841.972.232	225.243.000	12.23 %



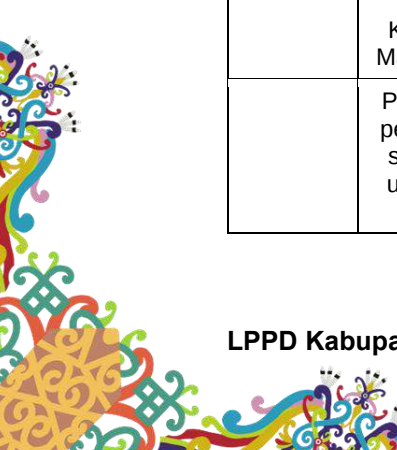
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
	Pendidikan Dasar	311.983.200.615	285.135.697.573	202.447.030.540	71.00 %
	APS				
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.500.000.000	302.897.000	0	0.00 %
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	0	4.776.709.000	4.112.608.600	86.10 %
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.241.301.600	810.921.640	718.667.800	88.62 %
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.169.750.000	215.089.400	11.903.000	5.53 %
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	36.452.080.713	35.410.234.372	18.225.962.579	51.47 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.429.844.138	30.684.452.645	18.767.344.409	61.16 %
	Literasi				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	79.682.154.082	79.550.994.633	76.498.082.046	96.16 %
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	240.000.000	86.019.320	0	0.00 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.455.000.000	2.320.013.260	1.985.551.500	85.58 %
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000.000	1.784.238.800	0	0.00 %
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000	24.019.800	0	0.00 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	600.000.000	390.547.400	303.404.700	77.69 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	350.000.000	114.945.000	20.785.900	18.08 %



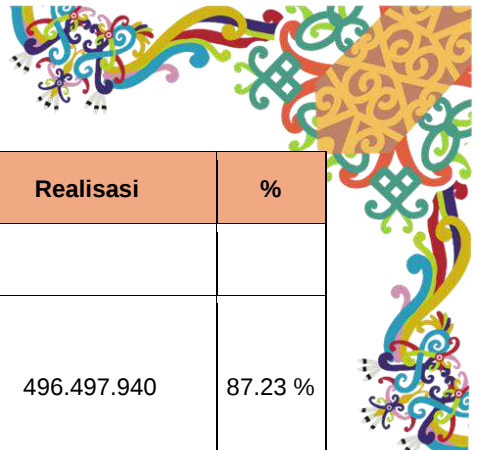
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	19.117.958.000	18.947.452.400	120.565.000	0.64 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	169.004.800	7.340.000	4.34 %
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.225.000.000	1.506.313.900	453.436.680	30.10 %
	Numerasi				
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	240.000.000	86.019.320	0	0.00 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	3.455.000.000	2.320.013.260	1.985.551.500	85.58 %
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000.000	1.784.238.800	0	0.00 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	600.000.000	390.547.400	303.404.700	77.69 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	350.000.000	114.945.000	20.785.900	18.08 %
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.225.000.000	1.506.313.900	453.436.680	30.10 %
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	19.117.958.000	18.947.452.400	120.565.000	0.64 %
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	79.682.154.082	79.550.994.633	76.498.082.046	96.16 %
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000	190.519.800	0	0.00 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	169.004.800	7.340.000	4.34 %
	Keamanan				



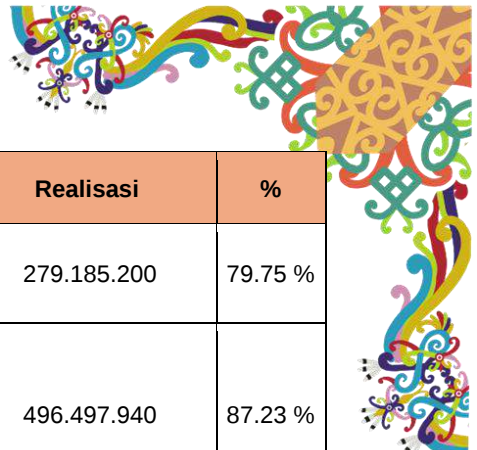
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000	190.519.800	0	0.00 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	169.004.800	7.340.000	4.34 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.450.000.000	634.407.030	603.397.500	95.11 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	0	0	0.00 %
	Kebhinekaan				
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000	190.519.800	0	0.00 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	169.004.800	7.340.000	4.34 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.450.000.000	634.407.030	603.397.500	95.11 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	0	0	0.00 %
	Inklusifitas				
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000	190.519.800	0	0.00 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	169.004.800	7.340.000	4.34 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.450.000.000	634.407.030	603.397.500	95.11 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	0	0	0	0.00 %



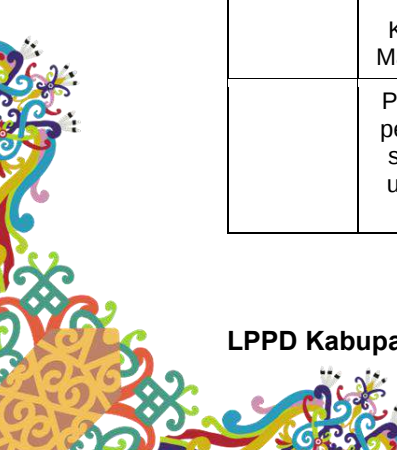
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	kekerasan, dan intoleransi				
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	151.235.037.000	80.714.300.900	66.122.515.125	81.92 %
	APS				
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0	0.00 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.705.673.000	1.307.102.000	838.802.600	64.17 %
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.960.000.000	2.563.106.000	2.201.705.000	85.90 %
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	600.000.000	381.256.100	303.979.145	79.73 %
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.754.356.000	9.744.381.000	5.773.838.680	59.25 %
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0	0.00 %
	Literasi				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	11.264.800.000	8.971.654.600	8.418.792.112	93.84 %
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0.00 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.820.000.000	3.722.350.000	3.047.749.000	81.88 %
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.200.000.000	1.588.782.300	1.048.518.246	66.00 %
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	600.000.000	350.057.400	279.185.200	79.75 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	647.704.000	307.879.000	147.223.600	47.82 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.600.000.000	881.755.000	660.736.560	74.93 %
	Penyelenggaraan	1.850.000.000	1.481.675.000	1.134.368.662	76.56 %

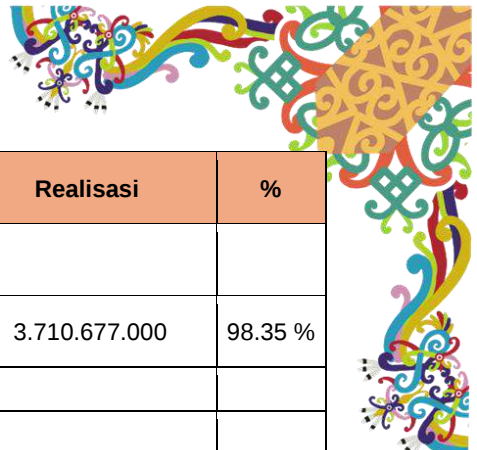


Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Proses Belajar bagi Peserta Didik				
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.400.000.000	569.160.000	496.497.940	87.23 %
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	16.875.000.000	12.669.593.200	11.125.011.850	87.81 %
	Numerasi				
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0.00 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	5.820.000.000	3.722.350.000	3.047.749.000	81.88 %
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.200.000.000	1.588.782.300	1.048.518.246	66.00 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.600.000.000	881.755.000	660.736.560	74.93 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	647.704.000	307.879.000	147.223.600	47.82 %
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.850.000.000	1.481.675.000	1.134.368.662	76.56 %
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	16.875.000.000	12.669.593.200	11.125.011.850	87.81 %
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	11.264.800.000	8.971.654.600	8.418.792.112	93.84 %
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	600.000.000	350.057.400	279.185.200	79.75 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.400.000.000	569.160.000	496.497.940	87.23 %
	Keamanan				



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	600.000.000	350.057.400	279.185.200	79.75 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.400.000.000	569.160.000	496.497.940	87.23 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.150.000.000	645.079.600	441.549.980	68.45 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	750.000.000	313.250.600	212.108.000	67.71 %
	Kebhinekaan				
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	600.000.000	350.057.400	279.185.200	79.75 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.400.000.000	569.160.000	496.497.940	87.23 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.150.000.000	645.079.600	441.549.980	68.45 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	750.000.000	313.250.600	212.108.000	67.71 %
	Inklusifitas				
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	600.000.000	350.057.400	279.185.200	79.75 %
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.400.000.000	569.160.000	496.497.940	87.23 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.150.000.000	645.079.600	441.549.980	68.45 %
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	750.000.000	313.250.600	212.108.000	67.71 %





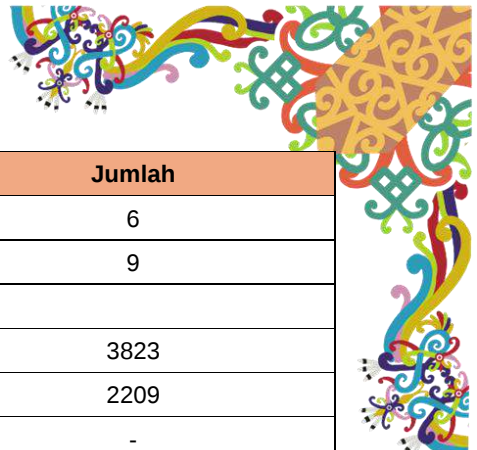
Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	kekerasan, dan intoleransi				
	Pendidikan Kesetaraan	6.640.000.000	3.772.852.400	3.710.677.000	98.35 %
	APS				
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.090.000.000	1.757.488.400	1.725.593.000	98.19 %
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.550.000.000	2.015.364.000	1.985.084.000	98.50 %
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah		105,159,800	0	0.00 %
	Literasi				
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	120.000.000	52.579.900	0	0.00 %
	Numerasi				
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	120.000.000	52.579.900	0	0.0

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-10 Jumlah Personil Pendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Esselon	
	a. II.b / Kepala Dinas	1
	b. III.a / Sekretaris	1



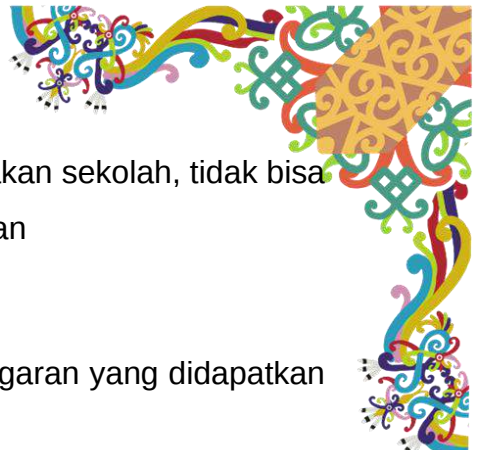
No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	c. III.b / Administrator	6
	d. IV.a / Pengawas / Fungsional	9
2	Jabatan Fungsional	
	a. Guru PNS (TK, SD dan SMP)	3823
	b. Guru PPPK (TK, SD dan SMP)	2209
	c. Pengawas (TK, SD dan SMP)	-
	d. Kepala Sekolah	546
	e. Penilik	0
	f. Pamong Pelajar	33
	g. Fungsional Umum (staf)	0
	– Dinas Kabupaten	402
	– Sekolah (TU/Penjaga)	437
	– SKB	73
3	Pangkat / Golongan Satuan Pendidikan (ASN)	
	a. IV	1327
	b. III	2907
	c. II	304
	d. I	12
	e. IX	1211
	f. V	84
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S3	1
	b. S2	196
	c. S1/DIV	6328
	d. D/III	26
	e. SMA Sederajat	344
	f. SMP Sederajat	9
	g. SD Sederajat	15

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pengumpulan Data

- Pengumpulan data terhadap jumlah siswa yang akan bersekolah sulit didapatkan data by name by address, dan
- Tingginya angka putus sekolah yang dikarenakan sistem yang ada belum mengakomodir data-data anak yang bersekolah di pesantren dan yang bersekolah diluar daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tingginya angka putus sekolah berdampak pada hasil capaian SPM Khususnya di Kesenjangan.

Perhitungan Kebutuhan

- 
- Penghitungan kebutuhan terhadap jumlah siswa yang akan sekolah, tidak bisa dihitung secara maksimal, karena keterbatasan anggaran

Perencanaan dan Penganggaran

- Masih minimnya anggaran, karena sebagian besar anggaran yang didapatkan digunakan untuk SDM

Pelaksanaan

- Pelaksanaan yang digunakan tahun ini, masih menggunakan hasil capaian dari tahun lalu.

Permasalahan Lain-Lain

- Sulitnya mendapatkan data yang akurat terhadap jumlah siswa yang belum sekolah
- Tidak ada definisi operasional di setiap indikator SPM yang dalam proses pengisian target dan capaian setiap indikator masih membingungkan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Urusan Kesehatan, bahwa SPM Urusan Kesehatan meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- 8) Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi
- 9) Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11) Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis

12) Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

4.2.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-11 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	13.684	13.684	13.684
		1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10.947	10.947	10.947
		2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2.463.120	2.463.120	2.463.120
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	13.684	13.684	13.684
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	13.684	13.684	13.684
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil :	Paket	13.684	13.684	13.684

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			Pemeriksaan Golongan Darah				
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin <i>(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)</i>	Paket	2.053	2.053	2.053
		7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	13.684	13.684	13.684
		8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.684	13.684	13.684
		9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.684	13.684	13.684
		10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG <i>(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)</i>	Botol	912	912	912
		12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	373	373	373
		13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	291	291	291
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	113	113	113
		17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) <i>(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)</i>	Orang	82.104	82.104	82.104
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	13.062	13.062	13.062
		1	Formulir partograf	Formulir	13.062	13.062	13.062
		2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.684	13.684	13.684
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) <i>(terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)</i>	Buku	13.684	13.684	13.684
		4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	373	373	373
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
		8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	291	291	291
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	113	113	113
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	12.440	12.440	12.440
		1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	12.440	12.440	12.440
		2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	12.440	12.440	12.440
		3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	12.440	12.440	12.440
		4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	12.440	12.440	12.440
		5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	37.320	37.320	37.320
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12.440	12.440	12.440
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	323	323	323
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	36	36	36
		13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		14	Kader Kesehatan	Orang	4.080	4.080	4.080
4	Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50.777	50.777	50.777
		1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	50.777	50.777	50.777
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	50.777	50.777	50.777
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	50.777	50.777	50.777
		4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	6.177	6.177	6.177
		5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	50.777	50.777	50.777
		6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	3.519	3.519	3.519
		7	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	7.012	7.012	7.012

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			Tetes				
		8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5.245	5.245	5.245
		9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	8.896	8.896	8.896
		10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	5.306	5.306	5.306
		11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	2.639	2.639	2.639
		12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1.300	1.300	1.300
		13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	219.865	219.865	219.865
		14	Peralatan Anafilaktik	Paket	32	32	32
		15	Formula terapi gizi buruk	Paket	32	32	32
		16	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		20	Guru PAUD	Orang	n/a	n/a	n/a
		21	Kader kesehatan	Orang	4.080	4.080	4.080
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	141.013	141.013	141.013
		1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	141.013	141.013	141.013
		2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	141.013	141.013	141.013
		3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	141.013	141.013	141.013
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	1	1	1

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	1
		6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/KABUPATEN)	Tablet	7.332.676	7.332.676	7.332.676
		7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	64	64	64
		8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	8.027	8.027	8.027
		9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	160	160	160
		10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	45.693	45.693	45.693
		11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	323	323	323
		12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1	1	1

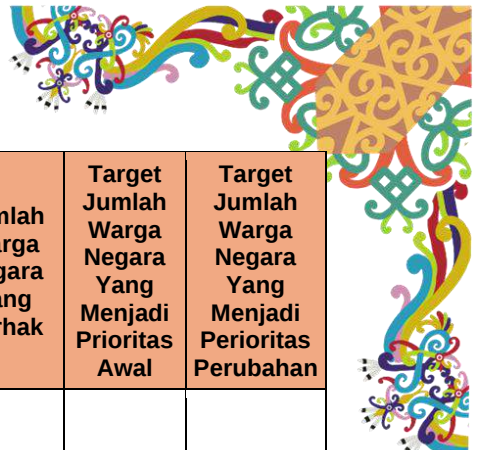
No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
		18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	4080	4080	4080
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	529.200	529.200	529.200
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	64	64	64
		3	Alat : Tensimeter	Unit	64	64	64
		4	Alat : Glukometer	Unit	64	64	64
		5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	64	64	64
		6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	64	64	64
		7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	64	64	64
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	64	64	64
		9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	64	64	64
		10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	1	1	1
		11	Alat Pelayanan KB	Unit	288	288	288
			Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	96	96	96
			Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	96	96	96
			Vasektomi set	Unit	96	96	96
		12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	1
		13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	25.215	25.215	25.215
		14	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4.080	4.080	4.080
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	59.512	59.512	59.512
		1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	64	64	64
		2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	64	64	64
		3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	64	64	64
		4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	64	64	64
		5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	59.512	59.512	59.512
		6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	59.512	59.512	59.512
		7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		8	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	4.080	4.080	4.080
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	59.695	59.695	59.695
		1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	64	64	64
		2	Obat Hipertensi	Paket	32	32	32
		3	Tensimeter	Unit	64	64	64

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			(mengukur tekanan darah)				
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	160	160	160
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	36	36	36
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	17.132	17.132	17.132
		1	Obat Diabetes Melitus	Paket	32	32	32
		2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	64	64	64
		3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	32	32	32
		4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	3	3	3
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang	Pedoman	160	160	160

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>penyakit tidak menular)</i>				
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	113	113	113
		12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	286	286	286
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	887	887	887
		1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (<i>minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik</i>)	Buku	32	32	32
		2	Penyediaan Psikofarmaka (<i>pengobatan/medikasi</i>)	Paket	32	32	32
		3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (<i>instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver</i>)	Formulir	1	1	1
		4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (<i>pencatatan dan pelaporan</i>)	Formulir	1	1	1
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	160	160	160
		6	Tenaga medis : Dokter	Orang	323	323	323
		7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (<i>contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih</i>)	Orang	32	32	32
		8	Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	1
		9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	32	32	32

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	24.272	24.272	24.272
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		2	Reagen Zn TB	Kit	24.272	24.272	24.272
		3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	169.904	169.904	169.904
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	145.632	145.632	145.632
		5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	24.272	24.272	24.272
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1	1	1
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	1
		8	Tuberkulin	Vial	2.427	2.427	2.427
		9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	323	323	323
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	291	291	291
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	36	36
		13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	286	286	286
		14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	145	145	145
		15	Kader Kesehatan	Orang	4.080	4.080	4.080
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	25.814	25.814	25.814
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	160	160	160
		2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	27.949	27.949	27.949
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang	Paket	154.884	154.884	154.884



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
		4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	25.814	25.814	25.814
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	323	323	323
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	807	807	807
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	912	912	912
		8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	286	286	286
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	36	36	36
		10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	4.080	4.080	4.080

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

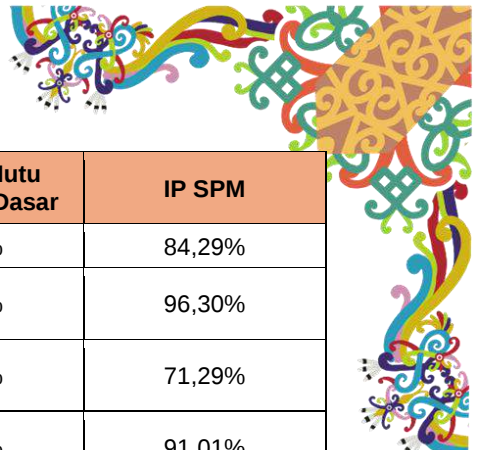
4.2.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-12 Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,68%	95,17%	96,38%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	85,16%	89,98%	86,13%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	86,75%	91,96%	87,79%



No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
4	Pelayanan Kesehatan Balita	83,34%	88,08%	84,29%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	96,08%	97,17%	96,30%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	64,93%	96,71%	71,29%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	89,68%	96,30%	91,01%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	90,55%	97,17%	91,88%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	94,08%	93,94%	94,05%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	99,07%	99,81%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100%	91,79%	98,36%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%	95,59%	99,12%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan				91,37% (Tuntas Utama)

Berdasarkan 12 jenis pelayanan SPM pada urusan kesehatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yaitu 91,37% dengan kategori Tuntas Utama. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2025 sebesar 96,68% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 11.124 Ibu Hamil dan 10.755 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

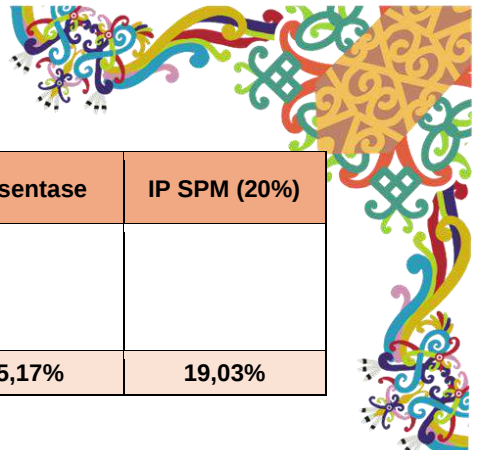
Tabel IV-13 Capaian Penerima Layanan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.124	10.755	96,68%	77,35%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2025 sebesar 95,17% dari target 100%. 4 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih 13 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel IV-14 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.947	10.584	96,68%	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2.463.120	2.381.415	96,68%	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.684	13.230	96,68%	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13.684	13.230	96,68%	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.684	13.230	96,68%	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	2.053	1.985	96,69%	
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13.684	13.230	96,68%	
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.684	13.230	96,68%	
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.684	13.230	96,68%	
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	912	882	96,71%	
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	373	305	81,77%	
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	807	1.018	100,00%	
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	912	1.650	100,00%	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	291	473	100,00%	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	113	82	72,57%	
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	82.104	79.380	96,68%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)				
Jumlah Rata – rata				95,17%	19,03%

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2025 sebesar 85,16% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 13.062 Ibu Bersalin dan 11.124 ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan.

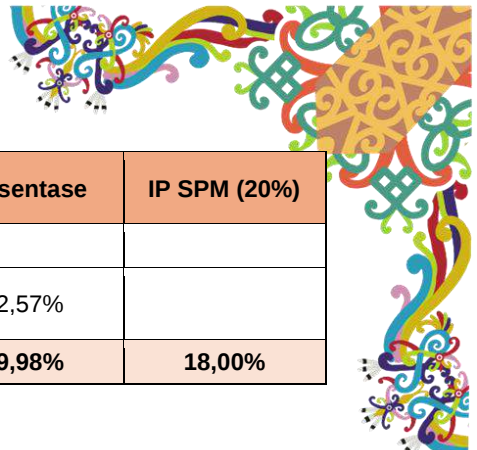
Tabel IV-15 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.062	11.124	85,16%	68,13%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2025 sebesar 89,98% dari target 100%. 4 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target dari 100% dan masih 5 jenis Mutu Pelayanan Dasar yang belum mencapai 100%.

Tabel IV-16 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Formulir partograf	13.062	11.124	85,16%	
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.684	11.654	85,17%	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	13.684	11.654	85,17%	
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	373	305	81,77%	
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	807	1.018	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	912	1.650	100,00%	
8	Tenaga kesehatan :	291	473	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Tenaga kefarmasian				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	113	82	72,57%	
Jumlah Rata – rata				89,98%	18,00%

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2025 sebesar 86,75% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 12.440 Bayi Baru Lahir dan 10.792 bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

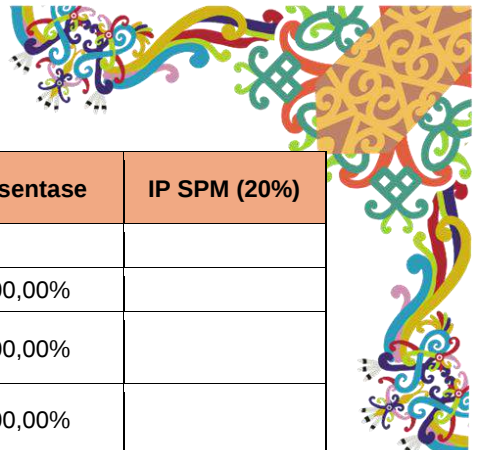
Tabel IV-17 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.440	10.792	86,75%	69,40%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2025 sebesar 91,96% dari target 100%. 6 Mutu Pelayanan Dasar mencapai 100% sedangkan 8 Mutu Layanan belum mencapai 100%.

Tabel IV-18 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.440	10.792	86,75%	
2	Vitamin K1 Injeksi	12.440	10.792	86,75%	
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	12.440	10.792	86,75%	
4	Formulir bayi baru lahir'	12.440	10.792	86,75%	
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	37.320	32.376	86,75%	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	12.440	10.792	86,75%	
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	160	160	100,00%	
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis	323	305	94,43%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Anak				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	291	473	100,00%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36	67	100,00%	
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
14	Kader Kesehatan	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				91,96%	18,39%

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2025 sebesar 83,34% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 50.777 Balita dan 42.318 Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

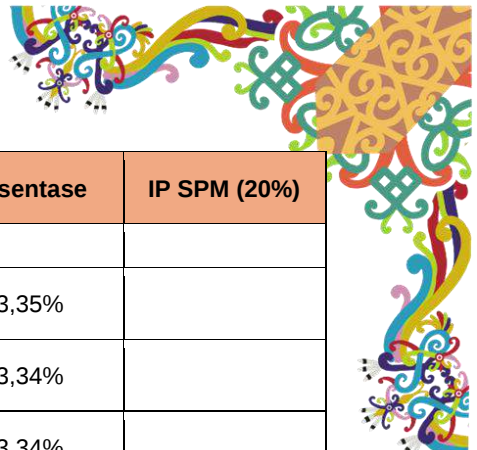
Tabel IV-19 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Balita	50.777	42.318	83,34%	66,67%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2025 sebesar 88,08% dari target 100%. 6 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, sedangkan 15 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel IV-20 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Balita

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Kuisiomer Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	50.777	42.318	83,34%	
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	50.777	42.318	83,34%	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	50.777	42.318	83,34%	
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	6.177	5.148	83,34%	
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59)	50.777	42.318	83,34%	

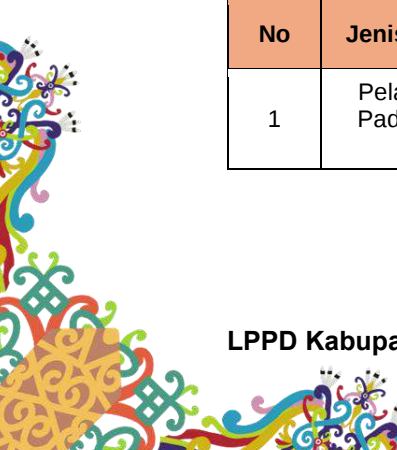


No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	bulan)				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	3.519	2.933	83,35%	
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	7.012	5.844	83,34%	
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	5.245	4.371	83,34%	
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	8.896	7.414	83,34%	
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	5.306	4.422	83,34%	
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	2.639	2.199	83,33%	
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	1.300	1.083	83,31%	
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	219.865	183.237	83,34%	
14	Peralatan Anafilaktik	32	32	100,00%	
15	Formula terapi gizi buruk	32	32	100,00%	
16	Tenaga medis : Dokter	323	303	93,81%	
17	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
18	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
20	Guru PAUD	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
21	Kader kesehatan	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				88,08%	17,62%

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Tahun 2025 sebesar 96,08% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 141.013 Jiwa dan 135.488 Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel IV-21 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan

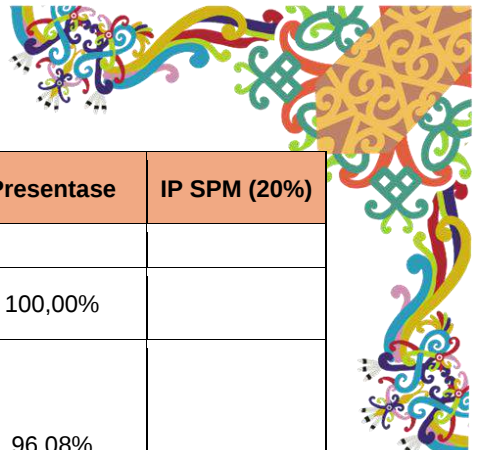


No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	141.013	135.488	96.08%	76,87%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2025 sebesar 97,17% dari target 100%. 11 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, sedangkan 7 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel IV-22 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	141.013	135.488	96,08%	
2	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	141.013	135.488	96,08%	
3	3. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	141.013	135.488	96,08%	
4	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	1	1	100,00%	
5	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	1	1	100,00%	
6	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	7.332.676	7.045.376	96,08%	
7	7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	64	64	100,00%	
8	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah)	8.027	7.712	96,08%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	SMP/ sederajat)				
9	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	160	160	100,00%	
10	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	45.693	43.903	96,08%	
11	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	323	379	100,00%	
12	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
13	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
14	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
15	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	291	473	100,00%	
16	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
17	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	1	1	100,00%	
18	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				97,17%	19,43%

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2025 sebesar 64,93% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 529.200 Jiwa dan 343.613 Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel IV-23 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	529.200	343.613	64,93%	51,94%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2025 sebesar 96,71% dari target 100%. 17 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, hanya 2 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel IV-24 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	64	64	100,00%	
3	Alat : Tensimeter	64	64	100,00%	
4	Alat : Glukometer	64	64	100,00%	
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	64	64	100,00%	
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	64	64	100,00%	
7	Alat : KIT IVA Tes	64	64	100,00%	
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	64	64	100,00%	
9	Kit Opthalmologi komunitas	64	64	100,00%	
10	Kuesioner PUMA	1	1	100,00%	
11	Alat Pelayanan KB	288	288	100,00%	
	<i>a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)</i>	96	96	100,00%	
	<i>b. Set pemasangan dan pencabutan Implan</i>	96	96	100,00%	
	<i>c. Vasektomi set</i>	96	96	100,00%	
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100,00%	
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	25.215	16.372	64,93%	
14	Tenaga medis : Dokter	323	370	100,00%	
15	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
16	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				96,71%	19,34%

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2025 sebesar 89,68% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 59.512 Jiwa dan 53.373 Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

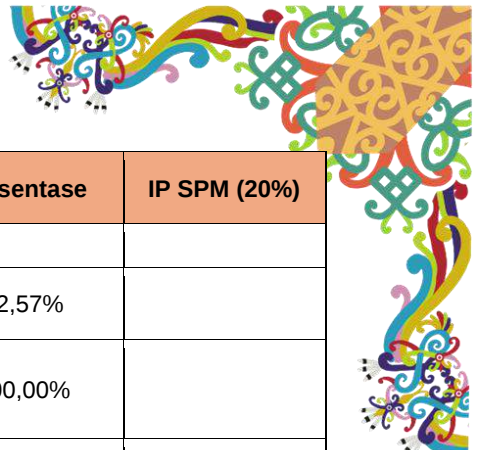
Tabel IV-25 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	59.512	53.373	89,68%	71,75%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2025 sebesar 96,30% dari target 100%. 10 Mutu Pelayanan Dasar telah mencapai target 100%, hanya 3 Mutu Pelayanan Dasar belum mencapai 100%.

Tabel IV-26 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	64	64	100,00%	
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	64	64	100,00%	
3	Alat pemeriksaan kolesterol	64	64	100,00%	
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	64	64	100,00%	
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	59.512	53.373	89,68%	
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	59.512	53.373	89,68%	
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
8	Tenaga medis : Dokter	323	323	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
10	Tenaga kesehatan :	912	1.650	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Perawat				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.080	4.080	100,00%	
				96,30%	19,26%

h. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2025 sebesar 90,55% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 59.695 Jiwa dan 54.055 Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

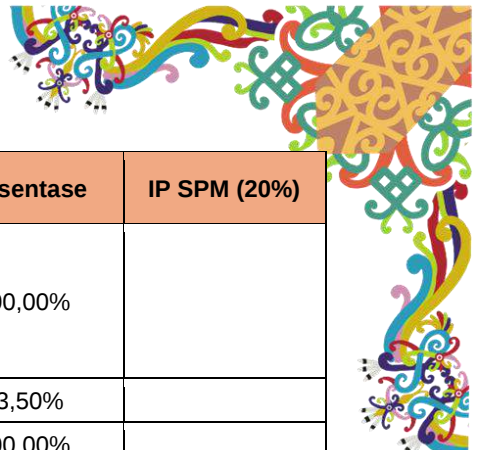
Tabel IV-27 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Penderita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	59.695	54.055	90,55%	72,44%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Tahun 2025 sebesar 97,17% dari target 100%.

Tabel IV-28 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	64	64	100,00%	
2	Obat Hipertensi	32	32	100,00%	
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	64	64	100,00%	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	1	1	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	160	160	100,00%	
6	Tenaga medis : Dokter	323	302	93,50%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	36	67	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	291	473	100,00%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
Jumlah Rata – rata				97,17%	19,43%

i. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2025 sebesar 94,08% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 17.132 Jiwa dan 16.117 Warga Negara Penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

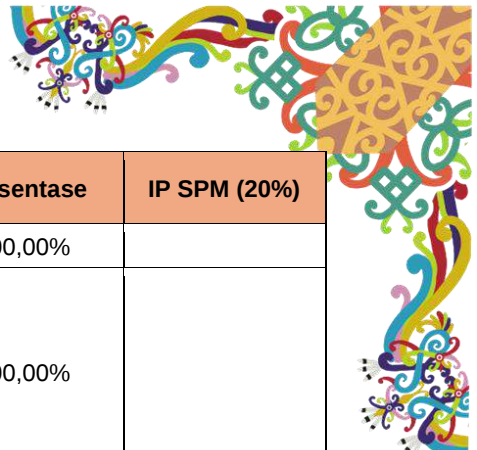
Tabel IV-29 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	17.132	16.117	94,08%	75,26%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Tahun 2025 sebesar 93,94% dari target 100%.

Tabel IV-30 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	32	32	100,00%	

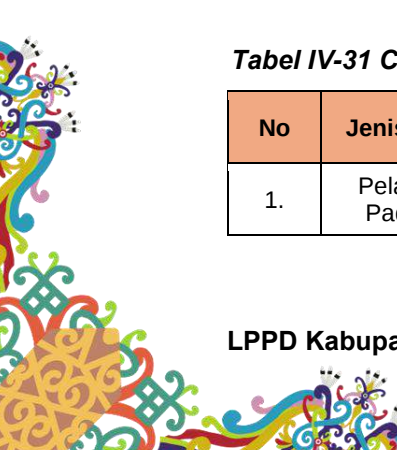


No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
2	Fotometer atau Glukometer	64	64	100,00%	
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	32	32	100,00%	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	3	3	100,00%	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
6	Tenaga medis : Dokter	323	302	93,50%	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	291	473	100,00%	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	113	82	72,57%	
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	286	175	61,19%	
Jumlah Rata – rata				93,94%	18,79%

j. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 887 Jiwa dan 887 Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel IV-31 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan	887	887	100%	80%

	Gangguan Jiwa Berat				
--	---------------------	--	--	--	--

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2025 sebesar 99,07% dari target 100%.

Tabel IV-32 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	32	32	100,00%	
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	32	32	100,00%	
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	1	1	100,00%	
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	1	1	100,00%	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
6	Tenaga medis : Dokter	323	296	91,64%	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	32	32	100,00%	
8	Tenaga profesional lainnya	1	1	100,00%	
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	32	32	100,00%	
Jumlah Rata – rata				99,07%	19,81%

k. Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 24.272 Jiwa dan 24.272 Warga Negara yang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

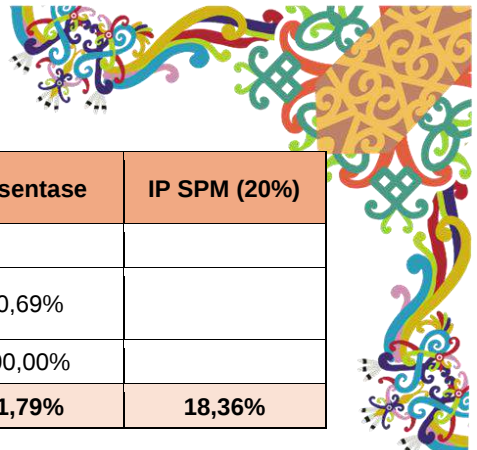
Tabel IV-33 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis	24.272	24.272	100%	80%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2025 sebesar 91,79% dari target 100%.

Tabel IV-34 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
2	Reagen Zn TB	24.272	24.272	100,00%	
3	Masker bedah dan Masker N95	169.904	169.904	100,00%	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	145.632	145.632	100,00%	
5	Katrid tes cepat molekuler	24.272	24.272	100,00%	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	100,00%	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100,00%	
8	Tuberkulin	2.427	2.427	100,00%	
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	323	307	95,05%	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	291	473	100,00%	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	36	127	100,00%	
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik	286	175	61,19%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	(ATLM)				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	145	30	20,69%	
15	Kader Kesehatan	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				91,79%	18,36%

I. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 25.814 Jiwa dan 25.814 Warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

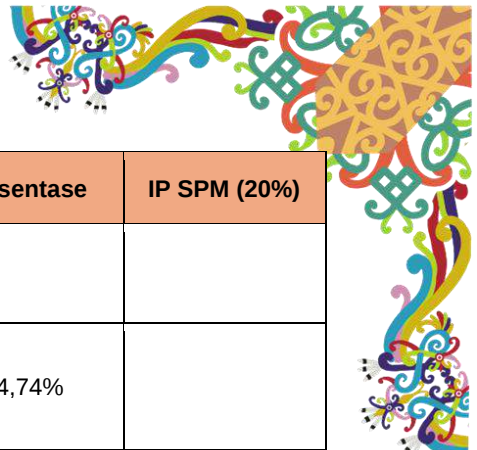
Tabel IV-35 Capaian Penerima Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	25.814	25.814	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2025 sebesar 95,59% dari target 100%.

Tabel IV-36 Capaian Mutu Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	160	160	100,00%	
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	27.949	27.949	100,00%	
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	154.884	154.884	100,00%	
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam	25.814	25.814	100,00%	



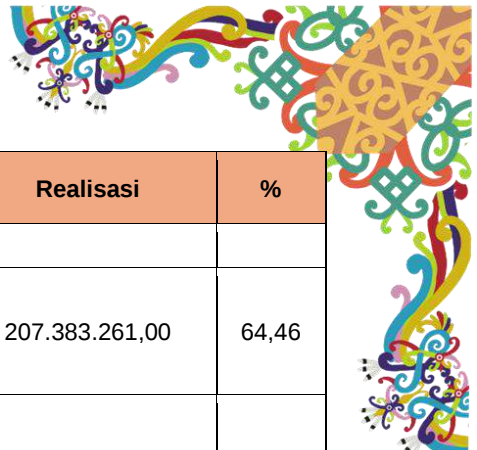
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	323	306	94,74%	
6	Tenaga kesehatan : Bidan	807	1.018	100,00%	
7	Tenaga kesehatan : Perawat	912	1.650	100,00%	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	286	175	61,19%	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	36	127	100,00%	
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	4.080	4.080	100,00%	
Jumlah Rata – rata				95,59%	19,12%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-37 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.184.493.000	4.063.476.708	3.233.680.928,00	79,58
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.624.720.580	1.383.612.953	308.627.359,00	22,31
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.044.490.000	828.592.600	631.896.178,00	76,26
Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	632.400.000	236.629.700	28.035.000,00	11,85
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	1.579.882.000	1.595.065.300	1.220.693.152,00	76,53



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
dasar	Dasar				
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.243.401.620	321.745.000	207.383.261,00	64,46
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.004.082.000	700.805.400	531.776.908,00	75,88
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.190.965.280	1.862.021.280	1.838.565.772,00	98,74
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.374.520.000	566.379.000	523.403.861,00	92,41
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.075.271.000	959.065.000	617.782.088,00	64,42
Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.670.173.020	12.217.570.720	9.304.033.380,00	75,96
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000	161.683.600	145.407.760,00	89,93

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh berbagai profesi kesehatan maupun non kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang terbagi ke dalam 12 SPM yang ada, yaitu :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan											
		Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Kesmas	Penata Rontgen	ATLM	Ahli Gizi	Kader Kesehatan	Guru Paud	Nakes Lainnya	Nonkes Terlatih
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Kesehatan	71	32	32	89	0	0	0	46	0	0	0	0



No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan											
		Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Kesmas	Penata Rontgen	ATLM	Ahli Gizi	Kader Kesehatan	Guru Paud	Nakes Lainnya	Nonkes Terlatih
	Ibu Bersalin												
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	71	32	32	89	32	0	0	46	0	0	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Balita	71	32	32	0	0	32	0	46	4125	32	0	0
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	71	32	32	0	32	32	0	46	4125	0	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	71	32	32	0	32	0	0	46	0	0	0	0
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	71	32	32	0	32	0	0	46	4125	0	0	0
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	71	32	32	89	32	0	0	46	0	0	0	0
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	71	32	32	89	32	0	32	46	0	0	0	0
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	71	32	0	89	32	32	32	0	0	0	0	0
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	71	32	32	0	32	0	32	0	0	0	0	0





4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Belum adanya bank data, data tersebar di 32 Puskesmas
- Perhitungan data sasaran target belum ada yang baku

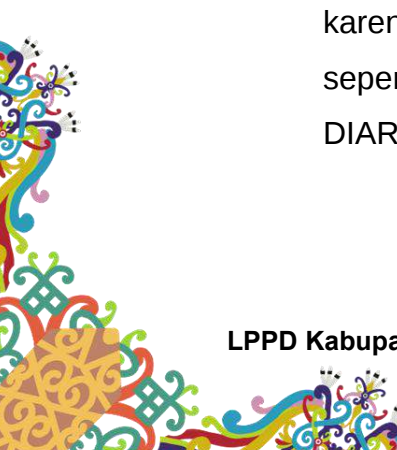
Perhitungan Kebutuhan

- Sarana, prasarana, alat kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Masih belum tersedianya data kependudukan Disdukcapil terupdate pada saat penentuan jumlah sasaran yang dilakukan masih didasarkan pada jumlah sasaran dan proyeksi, sehingga kebutuhan anggaran sangat besar

Perencanaan dan Penganggaran

- Integrasi data yang ada belum menggambarkan hasil riil di lapangan, sehingga anggaran yang ada masih kecil
- kurangnya kemampuan dalam menganalisis dan merencanakan Penganggaran Pelaksanaan
- masih kurangnya Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan
- Masih Kurangnya kemampuan/kapasitas tenaga kesehatan

Permasalahan Lain-Lain

- masih kurangnya kapasitas / kemampuan dalam menyampaikan data laporan SPM
 - Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis terkendala karena pengelola program di Puskesmas masih ada pengelola yang belum input karena terkendala aplikasi eror dan sinyal. Selain itu juga keterbatasan SDM seperti pengelola program juga merangkap program lain (ISPA, SURVEILANS, DIARE, MALARIA & DBD).
- 

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian

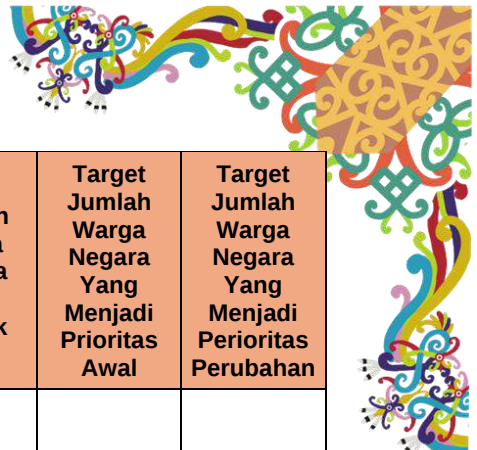
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-38 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	4.080	4.080	4.080
			<i>Jaringan Perpipaaan</i>				
			<i>Kuantitas SPAM</i>				
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	595	595	595
			<i>Kualitas SPAM</i>				
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	595	595	595
			<i>Bukan Jaringan Perpipaan</i>				
			<i>Kuantitas SPAM</i>				
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	425	425	425
			<i>Kualitas SPAM</i>				
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	425	425	425
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	1.208	1.208	1.124

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		1	SPALD Kabupaten/KABUPATEN				
			KUANTITAS SPALD				
			Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	281	281	281
			KUALITAS SPALD				
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
			Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	24	24	24
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perKABUPATENan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/KABUPATEN	Rumah Tangga	50	50	50
			Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan	Rumah Tangga	257	257	257



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar</i>				

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

4.3.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-39 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100,00%	100,00%	80,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100,00%	100,00%	80,00%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum				100,00% (Tuntas Paripurna)

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 4.080 Rumah Tangga dan 4.080 Rumah Tangga yang telah memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Tabel IV-40 Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	4.080	4.080	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-41 Capaian Mutu Layanan Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM				
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	595	595	100,00%	
	Kuantitas SPAM				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	595	595	100,00%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	Kuantitas SPAM				
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	425	425	100,00%	
	Kuantitas SPAM				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	425	425	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 1.124 Rumah Tangga dan 1.124 Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel IV-42 Capaian Penerima Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.124	1.124	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-43 Capaian Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	KUANTITAS SPALD				
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	281	281	100,00%	
	KUALITAS SPALD				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
1	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	24	24	100,00%	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)				
1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic	50	50	100,00%	

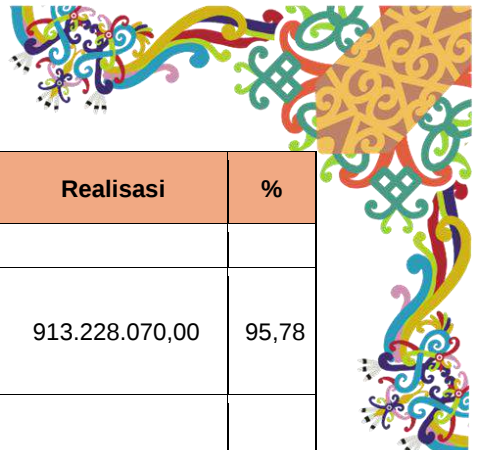
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota				
2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	27	27	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-44 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	147.678.165.354,00	129.048.086.605,00	94.127.204.253,00	72,94
	Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.054.120.000,00	5.085.800.000,00	3.093.795.719,00	60,83
	Penyusunan Rencana ,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM)	2.200.000.000,00	412.491.200,00	405.175.800,00	98,23
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	67.623.233.044,00	57.418.559.001,00	35.507.084.520,00	61,84
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	15.070.652.310,00	12.684.980.480,00	7.194.069.036,00	56,71
	Perluasan sistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	57.230.160.000,00	52.492.781.924,00	47.013.851.108,00	89,56

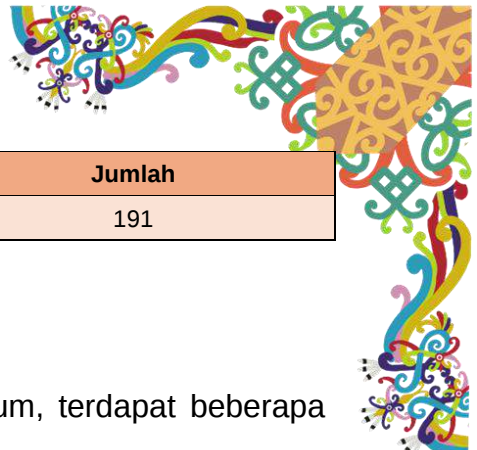


Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Jaringan Perpipaan				
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	500.000.000,00	953.474.000,00	913.228.070,00	95,78
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	19.439.999.993,00	17.384.981.047,00	13.616.920.210,00	78,33
	Pentediaan Pentedotan Lumpur Tinja	200.000.000,00	46.664.000,00	18.820.000,00	40,33
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	800.000.000,00	712.244.250,00	37.651.000,00	5,29
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	17.368.697.493,00	15.964.763.147,00	13.125.018.130,00	82,21
	Pembinaan dan Pernerdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sistem/Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	421.302.500,00	135.954.250,00	26.310.000,00	19,35
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	650.000.000,00	525.355.400,00	409.121.080,00	77,88
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum		167.118.165.347,00	146.433.067.652,00	107.744.124.463,00	73,58

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut:

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Kepala Dinas	1 (Plt.)
	- Sekretaris	1
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	2
	- Fungsional Umum	142
2	PPPK	42



No	Personil	Jumlah
	Jumlah	191

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Belum adanya database by name by address (BNBA) seluruh rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga susah diperoleh perhitungan Riil terkait perhitungan kebutuhan layanan. Hal ini dikarenakan penyusunan database tersebut membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang cukup besar jika dilihat dari Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Medan Geografisnya.
- Data penerima manfaat perlu diverifikasi ulang Perhitungan Kebutuhan

Perhitungan Kebutuhan

- Menyesuaikan anggaran dan pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran

- Perlunya penyesuaian sumber daya manusia di Desa atau wilayah kegiatan dan teknologi
- Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.

Pelaksanaan

- Sebaran Pelaksanaan yang berjauhan.
- Penerapan SPM perlu didukung oleh seluruh Perangkat Daerah terkait baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2 Target Pencapaian

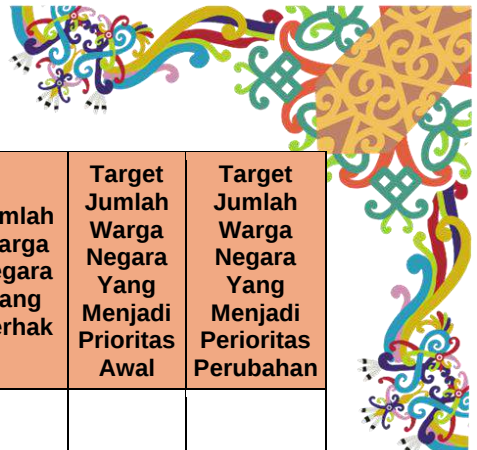
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-45 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	n/a	n/a	n/a

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Perioritas Perubahan
	Kabupaten/KABUPATEN						
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat				
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
		4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)				
		1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	n/a	n/a	n/a
		2	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen	n/a	n/a	n/a
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/KABUPATEN		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	48	48	57
			Ada Relokasi Program Pemerintah				
		1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan				
			a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	n/a	n/a	n/a



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	<i>Unit Rumah</i>	12	12	12
			c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
		2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	<i>Unit Rumah</i>	n/a	n/a	n/a
			Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah				
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>form tahapan</i>	n/a	n/a	n/a

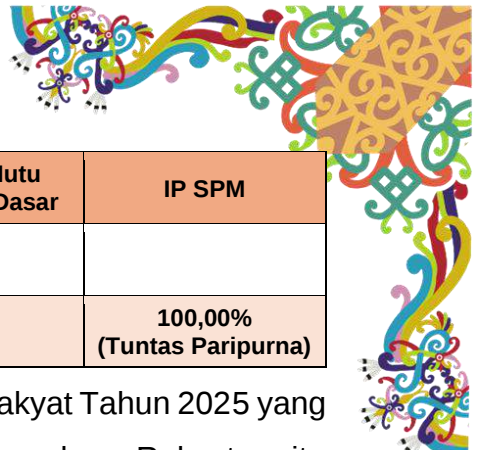
Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

4.4.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%. Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-46 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang	100,00%	100,00%	100,00%



No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
	Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat				100,00% (Tuntas Paripurna)

Berdasarkan 2 jenis pelayanan SPM pada urusan perumahan rakyat Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yaitu 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2025 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel IV-47 Capaian Penerima Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	100,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Fasilitas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%. Dikarenakan pada Tahun 2025 tidak terjadi bencana daerah yang harus ditetapkan status bencana oleh Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tahapan SPM yang meliputi Pendataan, Perhitungan Kebutuhan, dan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan.

Tabel IV-48 Capaian Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	1	1	100,00%	
PENDATAAN					
Form 4.a.4	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100,00%	
Form 4.a.5	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100,00%	
Form 4.a.6	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100,00%	
Form 4.a.10	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah			100,00%	
Form 4.a.11	Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota			100,00%	
Form 4.a.12	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)			100,00%	
Form 4.a.13	Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100,00%	
PERHITUNGAN					
Form 4.b.3	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			100,00%	
Form 4.b.4	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100,00%	
Form 4.b.7	Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100,00%	
Form 4.b.8	Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			100,00%	
PERENCANAAN					
Form 4.c.2	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota			100,00%	
Form 4.c.4	Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			100,00%	

b. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 244/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Relokasi Warga Terdampak Abrasi Di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut ditetapkan 74 Rumah Warga Terdampak.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 108/SK-BUP/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2025, Telah ditetapkan 12 Rumah Tangga yang menerima bantuan rumah khusus.

Bahwa telah terjadi abrasi sejak tahun 2014 yang berdampak pada kerusakan permukiman warga di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut yang mengancam keselamatan dan kerusakan tempat tinggal masyarakat yang berakibat langsung terganggunya pemukiman penduduk, sosial, budaya dan ekonomi setempat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan relokasi ke wilayah yang lebih layak.

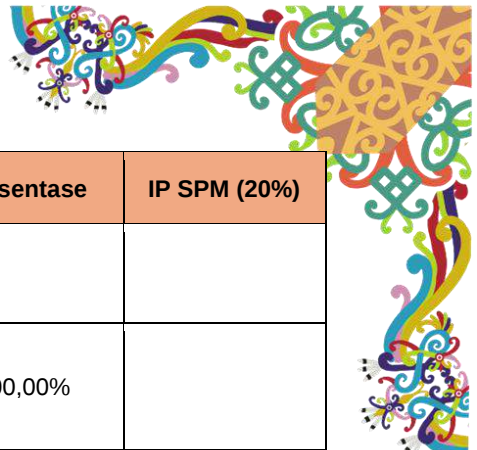
Tabel IV-49 Capaian Penerima Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57	57	100,00%	20,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan Rumah Layak Huni bagi 12 Rumah Tangga, sehingga total 12 rumah yang akan direlokasi telah selesai sebanyak 12 rumah.

Tabel IV-50 Capaian Mutu Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan				
	a. Penilaian oleh tim	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	



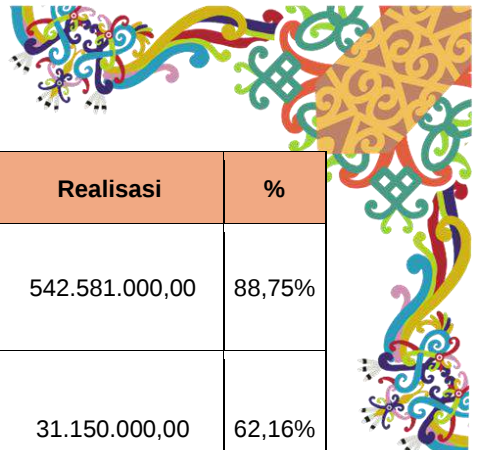
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;				
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	12,00	12,00	100,00%	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Tutup Mutu	Tutup Mutu	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-51 Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.700.000.000,00	1.335.799.000	728.294.000	54,52%
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	100.000.000,00	97.905.000,00	90.923.000,00	92,87%
	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	250.000.000,00	100.000.000,00	19.730.000,00	19,73%
	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	300.000.000,00	-	-	-
	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	100.000.000,00	94.387.500,00	14.320.000	15,17%



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	750.000.000,00	611.327.500,00	542.581.000,00	88,75%
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	50.110.000,00	31.150.000,00	62,16%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,00	382.069.000,00	29.590.000,00	7,74%
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		16.650.000.000,00	15.306.895.000,00	4.218.328.400,00	27,56%
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	200.000.000,00	-	-	-
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	16.150.000.000,00	15.032.745.000,00	4.206.288.400,00	27,98%
	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	300.000.000,00	274.150.000,00	12.040.000,00	4,39%
Sub Kegiatan Lainnya		500.000.000,00	279.502.000,00	116.130.000,00	41,55%
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	200.000.000,00	51.422.000,00	29.070.000,00	56,53%
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	100.000.000,00	64.560.000,00	56.960.000,00	88,23%
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	100.000.000,00	75.195.000,00	19.280.000,00	25,64%
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100.000.000,00	88.325.000,00	10.820.000,00	12,25%
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan		18.650.000.000,00	16.922.196.000,00	5.062.752.400,00	29,92%

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara didukung personil secara rinci dalam tabel berikut

Tabel IV-52 Dukungan Personil Penunjang Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Kepala Dinas	1 (Plt.)
	- Sekretaris	1
	- Kepala Bidang	4
	- Kepala Sub Bagian	2
	- Fungsional Umum	142
2	PPPK	42
	Jumlah	191

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

- Sulitnya melakukan pendataan terhadap peta rawan bencana di Kutai Kartanegara, karena anggaran yang tersedia minim. dan
- Belum ada SK penetapan korban bencana oleh Kepala Daerah.
- Data baseline rumah terdampak bencana tidak statis akan tetapi menjadi dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi kapan dan di mana, serta perbedaan tingkat urgensi dalam penanganannya pada waktu kejadian.

Perhitungan Kebutuhan

- Sulit menentukan lokus tempat kejadian yang akan terjadi, karena kejadiannya susah dideteksi

Perencanaan dan Penganggaran

- Internalisasi program dan kegiatan serta sub kegiatan terhadap bencana sulit dilakukan, karena anggarannya serba tidak pasti.
- Anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk pendataan.



Pelaksanaan

- Pelaksanaan terhadap bidang urusan perumahan sedikit sulit dilaksanakan, karena tidak tahu kejadian sesungguhnya dimana akan terjadi.
- Adanya perbedaan persepsi definisi bencana yang masuk dalam kriteria SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Adanya perbedaan lokasi wilayah yang terkena bencana alam, mengingat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian masih menempati daerah pesisir sehingga anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam yang berada di daerah pesisir sangat kurang dalam pelaksanaannya karena berbeda spesifikasi dengan rumah yang berada di darat. Hal ini karena daerah pesisir, rumah yang digunakan pada umumnya masih menggunakan tiang tongkat (kayu bulat).
- Masih banyaknya kejadian kebakaran hunian/rumah yang dianggap bencana alam dan diusulkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kabupaten Kutai Kartanegara tidak masuk dalam jalur bencana seperti pada Pulau Jawa, Bali dan Sumatera, sehingga perlunya koordinasi yang melibatkan semua sektor dalam penetapan daerah yang berpotensi terjadi bencana alam (yang masuk dalam kriteria SPM).

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibagi 3 Sub Urusan yaitu: Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Bencana Daerah, Urusan Kebakaran Daerah.

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab. / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



Sub Urusan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bencana Daerah meliputi:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 2) Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Urusan Kebakaran Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran meliputi Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

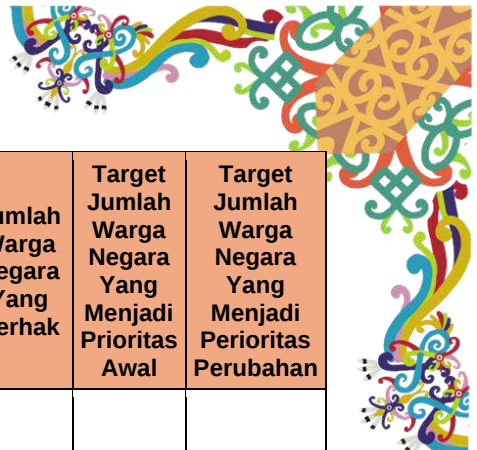
Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-53 Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA (TRANTIBUM)						
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	58	58	58
		1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	unit	184	184	458
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	7	7	9
		3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan	orang	100	100	100

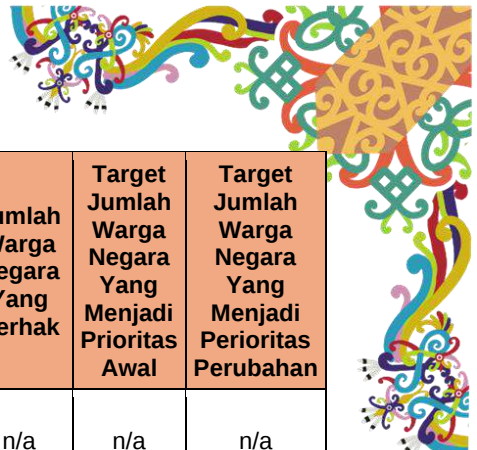
No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/ SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
		4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	1
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	5	5	5
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	2	2	2
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah) (KEBENCANAAN)						
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	100.283	100.283	100.283
		1	Penyusunan Kajian				

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)				
			Tidak ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
			a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	-	-
			b.Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	-	-	-
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025				
			a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1
			b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen	2	2	2
			c.Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	3	3	3
			d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3
			e.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	13	13	13
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
			1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
			a.Tersedianya bahan paparan dan/ atau Alat Sosialisasi untuk	eksemplar	4	4	4

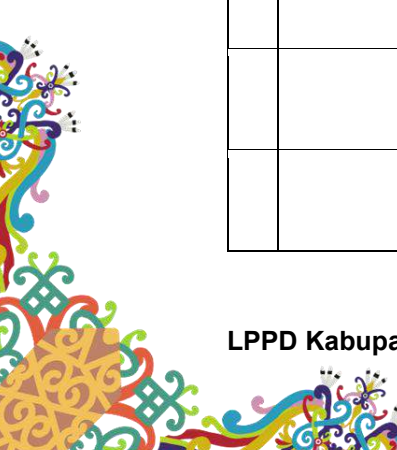


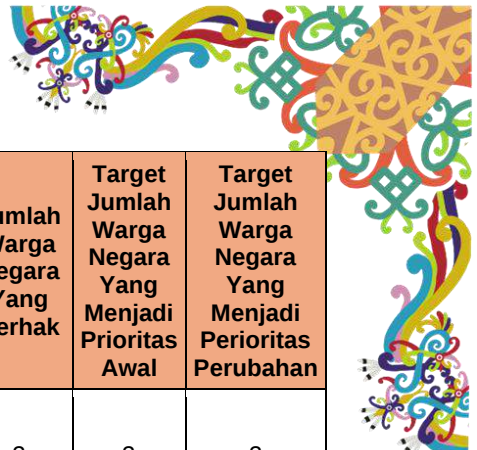
No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		<i>pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)</i>				
		<i>b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka</i>	<i>desa</i>	4	4	4
		<i>c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	4	4	4
		<i>d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	3	3	3
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
		<i>a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>media</i>	2	2	2
		<i>b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	4	4	4
		<i>c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	2	2	2
		<i>d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	1	1	1
		<i>e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	4	4	4
		3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
		<i>a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	n/a	n/a	n/a
		<i>b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	1	1	1
		<i>c. Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	2	2	2
		<i>d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			kebutuhan)				
			e.Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	2
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	600	600	600
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
			Tidak Ada				
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)				
			a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	n/a	n/a	n/a
			b.Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	n/a	n/a	n/a
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025				
			a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	n/a	n/a	n/a
			b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			c.Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
			e.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
		2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)				
			a.Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	n/a	n/a	n/a



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>c.Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>d.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
		3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi				
			1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
			<i>a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	4	4	4
			<i>b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	4	4	4
			<i>c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>d.Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>e.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	3	3	3
			<i>f.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	3	3	3
			2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
			<i>a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	4	4	4
			<i>b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	4	4	4
			<i>c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>buah</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
			<i>d.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	3	3	3



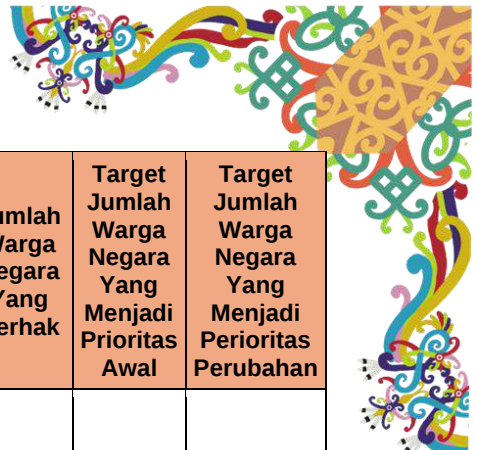


No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>e.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	3	3	3
		4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)				
			<i>a.Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b.Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>c.Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
			2) Gladi Lapang				
			<i>a.Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	1	1	1
			<i>b.Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1	1
			<i>c.Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	13	13	13
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a.Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/ 7 (minimal jumlah hari dalam setahun)</i>	<i>hari</i>	12	12	12

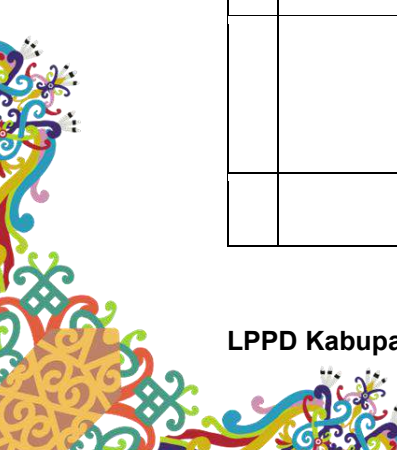
No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		<i>b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>pertemuan</i>	4	4	4
		<i>c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a
		<i>d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	1	1	1
		<i>e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	2	2	2
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
		<i>a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
		<i>b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
		<i>c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
		<i>d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	n/a	n/a	n/a
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
		<i>a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1	1
		<i>b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	1	1	1
		4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini				

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			Kebencanaan berbasis Masyarakat				
			<i>a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	2	2	2
			<i>b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	2	2	2
		6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
			<i>a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	25	25	25
			<i>b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	200	200	200
			<i>c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>paket</i>	200	200	200
			<i>d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>unit</i>	200	200	200
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	4.500	4.500	4.500
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
			Kejadian Bencana				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana				
			<i>a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>dokumen</i>	n/a	n/a	n/a
			<i>b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	<i>orang</i>	n/a	n/a	n/a

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
			a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	n/a	n/a	n/a
			b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	n/a	n/a	n/a
			c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	n/a	n/a	n/a
			d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	n/a	n/a	n/a
			f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
			g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
			h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	n/a	n/a	n/a
			Status Tanggap Darurat				
		1	Respon Cepat Darurat Bencana				
			a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	1
			b. Tersusunnya SK	dokumen	n/a	n/a	1



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>				
			<i>c.Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	orang	26	26	26
		2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
			<i>a.Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/ PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	n/a	n/a	2
			<i>b.Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	n/a	n/a	1
			<i>c.Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	n/a	n/a	1
			<i>d.Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	n/a	n/a	1
			<i>e.Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen	n/a	n/a	1
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
			<i>a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket	2	2	2
			<i>b.Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	193	193	193
			<i>c.Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit	62	62	62
			<i>d.Tersedianya Data operasi pencarian,</i>	dokumen	12	12	12



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>				
			<i>e.Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>dokumen</i>	60	60	60
			<i>f.Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	6	6	6
			<i>g.Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>	15	15	15
			<i>h.Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>Orang</i>	35	35	35
			Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM				
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR)						
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	480	480	480
		1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/ atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i>)	<i>layanan</i>	60	60	60

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	4
			Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)	unit			
		3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	442	442	442
		4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	70	70	70
		5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	480	480	480
		6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	480	480	480

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

4.5.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-54 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	99,13%	99,83%
	Sub Urusan Bencana Daerah			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	57,83%	50,00%	56,26%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	41,67%	95,56%	52,44%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	93,38%	75,00%	89,70%
	Sub Urusan Kebakaran Daerah			
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84,79%	94,93%	86,82%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				84,26% (Tuntas Madya)

Berdasarkan 3 Sub Urusan dan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu 99,83% dengan kategori Tuntas Madya. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

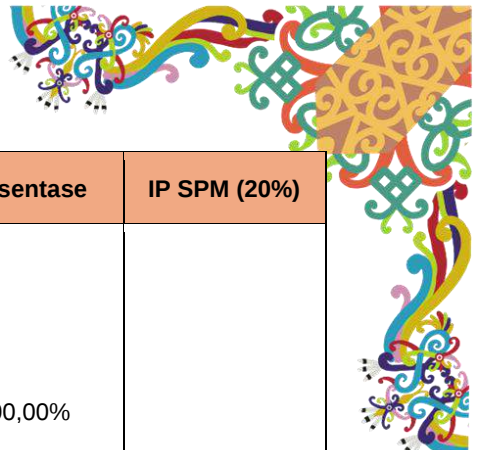
Tabel IV-55 Capaian Penerima Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	58	58	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 sebesar 99,13% dari target 100%. Tahun 2025 tidak ada warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan anggaran dalam pencapaian SPM pada Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel IV-56 Capaian Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	458	434	94,76%	
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	9	9	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	100	100	100,00%	
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1	1	100,00%	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	5	5	100,00%	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	2	2	100,00%	
Jumlah Rata – rata				99,13%	19,83%

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Capaian Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2025 sebesar 57,83% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 100.283 warga negara dan 57.992 Warga Negara yang telah memperoleh informasi rawan bencana.

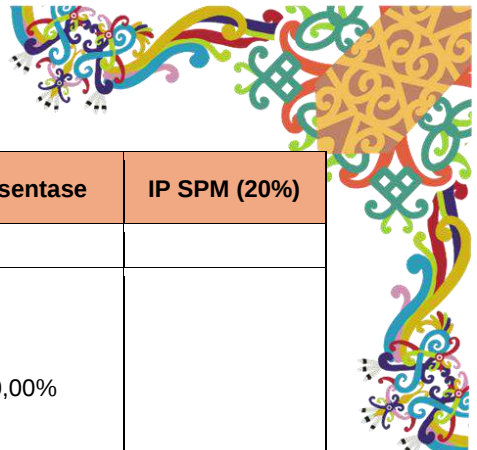
Tabel IV-57 Capaian Penerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100.283	57.992	57,83%	46,26%

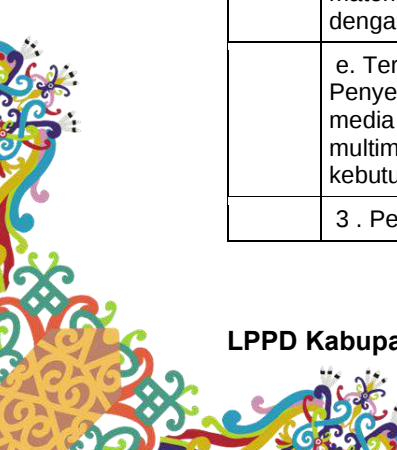
Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2025 sebesar 50,00% dari target 100%.

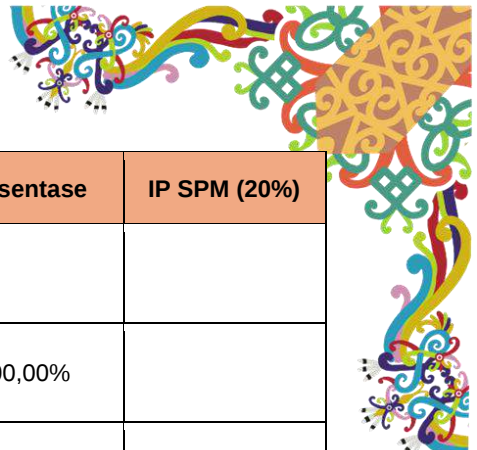
Tabel IV-58 Capaian Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana				
	Ada : Sudah Lama Dibuat				



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	(Masih Berlaku s.d saat ini)				
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	0	0	0,00%	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	0	0	0,00%	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
	1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	Buka Mutu			
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	4	4	100,00%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	4	4	100,00%	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100,00%	
	2 . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100,00%	
	3 . Penyediaan dan	Buka Mutu			





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
Jumlah Rata – rata				50%	10,00%

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2025 sebesar 41,67% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 600 warga negara dan 250 Warga Negara yang telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Tabel IV-59 Capaian Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	600	250	41,67%	33,33%

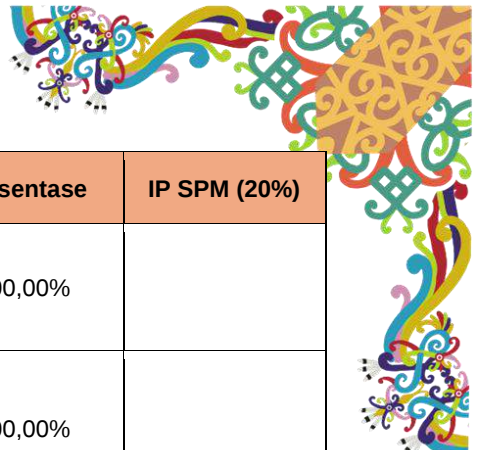
Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2025 sebesar 95,56% dari target 100%.

Tabel IV-60 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

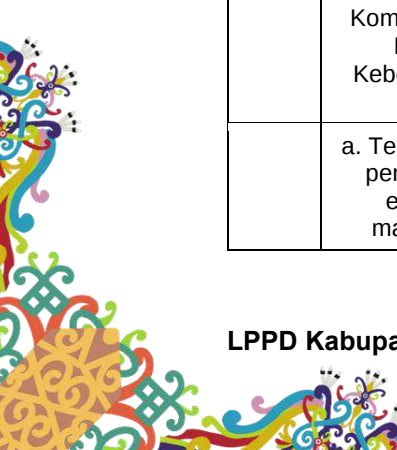
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
	Ada : Baru Dibuat Tahun 2025				
	a. Tersedianya Dokumen legalitas RPB (perkada)	1	1	100,00%	
	b. Tersedianya Dokumen RPB (lampiran perkada)			0,00%	
	c. Tersedianya Berita	1	1	100,00%	

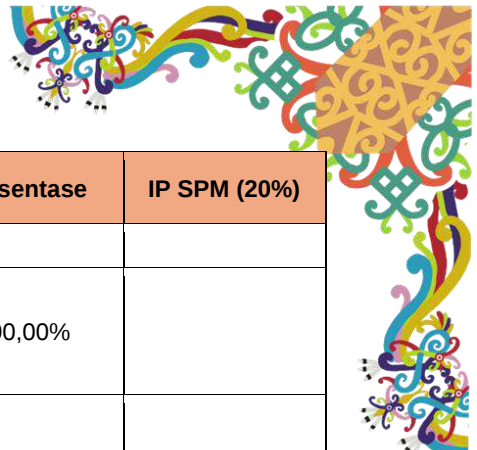
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Acara Diskusi Publik (minimal 2)				
	d. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	1	1	100,00%	
	e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	Tutup Mutu			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2	2	100,00%	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	Buka Mutu			
	1 . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0,00%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00%	
	2 . Pelatihan	Buka Mutu			

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100	100	100,00%	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00%	
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Buka Mutu			
	1) . Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	n/a	n/a	0,00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	n/a	n/a	0,00%	
	c. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	n/a	n/a	0,00%	
	2) . Gladi Lapang	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	3	0	0,00%	
	b. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	0	0,00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	25	0	0,00%	
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Buka Mutu			
	1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Buka Mutu			



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	12	12	100,00%	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00%	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100,00%	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00%	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai	2	2	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	dengan kebutuhan)				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Buka Mutu			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	25	25	100,00%	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	200	200	100,00%	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	200	200	100,00%	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	200	200	100,00%	
Jumlah Rata – rata				95,56%	19,11%

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

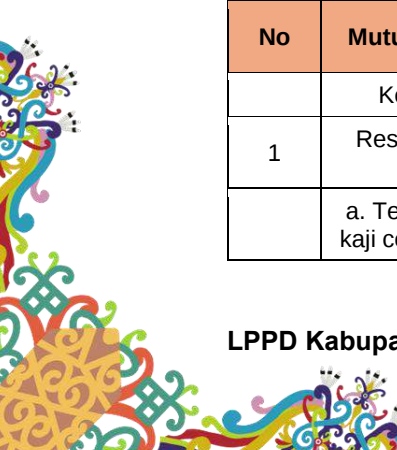
Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025 sebesar 93,38% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 4.500 warga negara dan 4.202 Warga Negara yang terdampak dari bencana yang terjadi di Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel IV-61 Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

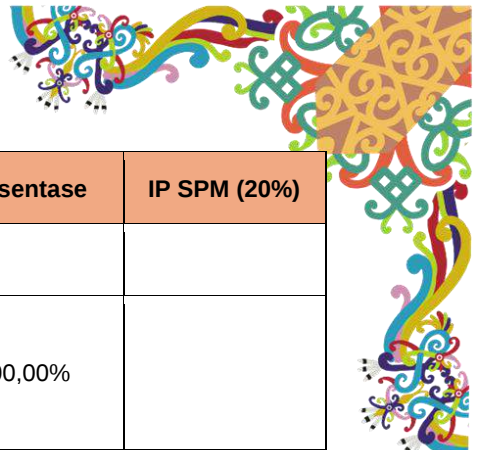
No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.500	4.202	93,38%	74,70%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025 sebesar 75% dari target 100%.

Tabel IV-62 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	Kejadian Bencana				
1	Respon Cepat Darurat Bencana				
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan	1	0	0,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	kebutuhan kejadian bencana)				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	26	26	100,00%	
2	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana			100,00%	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00%	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	193	293	100,00%	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	62	62	100,00%	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100,00%	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	60	66	100,00%	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100,00%	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	100,00%	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	35	35	100,00%	
Jumlah Rata – rata				75,00%	15,00%

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2025 sebesar 84,79% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 480 warga negara dan 407 Warga Negara yang dilayani dalam waktu respons time tidak melebihi 15 menit.

Tabel IV-63 Capaian Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	480	407	84,79%	67,83%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2025 sebesar 94,93% dari target 100%.

Tabel IV-64 Capaian Mutu Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	60	77	100,00%	
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	4	4	100,00%	
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	442	450	100,00%	
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	70	172	100,00%	
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	480	407	85,00%	
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	480	407	85,00%	
Jumlah Rata – rata				94,93%	18,99%

4.5.4 Alokasi Anggaran

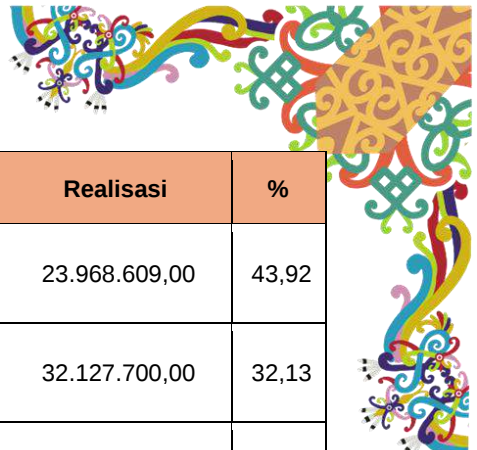
Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengampu SPM sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah selaku pengampu SPM sub urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku OPD pengampu SPM sub urusan kebakaran daerah pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

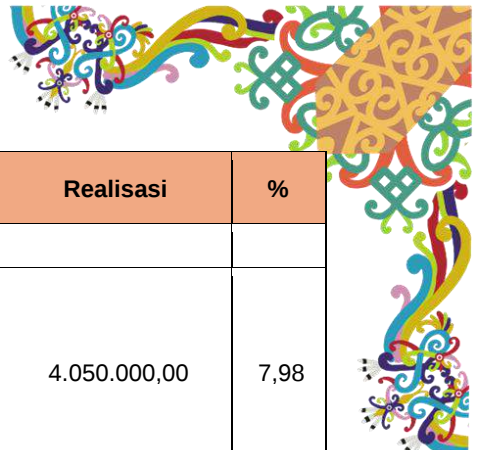
Tabel IV-65 Alokasi Anggaran Penunjang Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.725.438.700	4.308.013.650	3.889.836.494	90,29
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	46.202.500	40.316.550	40.316.550	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.330.421.800	2.323.976.800	2.286.304.030	98,38
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.447.363.400	1.344.606.400	1.072.394.260	79,76
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	52.991.500	45.843.450	45.843.450	100,00
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	848.459.500	553.207.450	444.978.204	80,44
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	768.833.850	728.922.425	555.934.040	76,27
	Penanganan atas	768.833.850	728.922.425	555.934.040	76,27

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	149.895.000	172.270.000	145.353.016	84,38
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	149.895.000	172.270.000	145.353.016	84,38
Total sub urusan trantibum		5.644.167.550	5.209.206.075	4.591.123.550	88,13
Pelayanan Informasi rawan Bencana	Pelayanan Informasi rawan Bencana	450.000.000,00	361.212.400,00	252.716.180,00	69,96
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	200.000.000,00	126.541.800,00	91.929.000,00	72,65
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,00	234.670.600,00	160.787.180,00	68,52
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.125.000.000,00	757.846.400,00	522.862.751,00	68,99
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	375.000.000,00	265.541.200,00	255.696.120,00	96,29
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	150.000.000,00	126.130.800,00	7.260.000,00	5,76
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,00	132.560.200,00	52.359.000,00	39,50
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000,00	233.614.200,00	207.547.631,00	88,84
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900.000.000,00	517.355.400,00	367.299.687,00	71,00
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	150.000.000,00	22.692.000,00	20.568.218,00	90,64



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	54.571.600,00	23.968.609,00	43,92
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	32.127.700,00	32,13
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	450.000.000,00	340.091.800,00	290.635.160,00	85,46
Total sub urusan Bencana		2.475.000.000,00	1.636.414.200,00	1.142.878.618,00	69,84
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.490.039.638,00	2.202.876.209,90	1.239.386.535,00	56,26
	"Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota"	100.000.000,00	-	-	-
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	260.173.850,00	237.431.050,00	91,26
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	200.000.000,00	115.136.613,90	108.979.000,00	94,65
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	-	-
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	700.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.890.039.638,00	1.827.565.746,00	892.976.485,00	48,86
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	250.000.000,00	103.461.274,20	87.601.500,00	84,67
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	150.000.000,00	65.696.172,70	55.737.750,00	84,84
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100.000.000,00	37.765.101,50	31.863.750,00	84,37
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	250.000.000,00	147.425.333,70	61.916.200,00	42,00



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
	Kebakaran				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,00	50.756.893,00	4.050.000,00	7,98
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	66.926.113,00	36.150.200,00	54,02
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	50.000.000,00	29.742.327,70	21.716.000,00	73,01
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	300.000.000,00	187.152.163,00	127.971.200,00	68,38
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	150.000.000,00	98.968.765,00	96.971.200,00	97,98
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	50.000.000,00	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100.000.000,00	88.183.398,00	31.000.000,00	35,15
Total sub urusan kebakaran		4.290.039.638,00	2.640.914.980,80	1.516.875.435,00	57,44
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum		12.409.207.188	9.486.535.255,8	7.250.877.603	76,43

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara diampu 3 OPD yaitu Satuan Polisi

Pamong Praja pengampu SPM Sub Urusan Trantibum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.

Tabel IV-66 Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Personil	Jumlah
1	ASN	360
2	BANPOL PP	-
	Jumlah	

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel IV-67 Personil Pendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV/ C	1	
2	Pembina Tingkat I	IV / B	0	
3	Pembina	IV / A	5	
4	Penata Tingkat I	III / D	12	
5	Penata	III / C	1	
6	Penata Muda Tingkat I	III / B	5	
7	Penata Muda	III / A	11	
8	Pengatur Tingkat I	II / D	14	
9	Pengatur	II / C	2	
10	PPPK	V	33	
11	PPPK	IX	20	
Jumlah			104	

Tabel IV-68 Jumlah Petugas Operasional telah Mengikuti Diklat Kebencanaan

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB)	23	
2	Pelatihan Fasilitator Rencana Kontingensi Bencana	3	
3	Bimtek Tim Reaksi Cepat Logistik Dan Peralatan	1	
4	Drone Mapping	5	
5	Bimbingan Teknis Pertolongan Di Ketinggian	10	

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penunjang pencapaian SPM Urusan Kebakaran Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel IV-69 Dukungan Personil Penunjang SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Esselon	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3
	d. III.c	-
	e. IV.a	11
2	Jabatan Fungsional	
	a. Analis Kebakaran Ahli Madya	-
	b. Analis Kebakaran Ahli Muda	1
	c. Analis Kebakaran Ahli Pertama	1
	d. Pemadam Kebakaran Mahir	8
	e. Pemadam Kebakaran Terampil	16
	f. Pemadam Kebakaran Pemula (PPPK)	147
	g. Fungsional Pelaksana	-
3	PPPK (Administrasi)	51
4	Diklat Keterampilan Pemadam I	115
5	Diklat Keterampilan Pemadam II	16
6	Diklat K3 KEMENAKER	14

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai;
- Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini masih sangat minim; dan
- Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Sosial meliputi:

- 
- 1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;
 - 2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
 - 3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
 - 4) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
 - 5) Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota.

4.6.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara rinci Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% target penerima layanan warga negara dan target mutu layanan minimal sesuai standar teknis SPM, melalui Surat Edaran Nomor: 600.4/2851/ST tentang Penetapan target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Dalam Negeri RI meminta Kepala Daerah untuk menetapkan target capaian SPM.

Memperhatikan hal – hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 242/SK-BUP/HK/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025. namun karna terdapat perangkat daerah pengampu yang tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan kembali Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025 tentang Perubahan Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, pada tabel berikut :

Tabel IV-70 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	185	185	185
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	185	185	185
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	20	20	20
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	185	185	185
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	100	100	n/a
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	25	25	25
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	30	30	n/a

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
		7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	185	185	185
		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	185	185	185
		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	185	185	185
		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	185	185	185
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	185	185	185
		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	n/a	n/a	n/a

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</i>				
		1 3	Layanan rujukan <i>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</i>	Orang	n/a	n/a	n/a
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	50	50	50
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	50	50	50
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	10	10	10
		3	Penyediaan permakanan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>	Orang	50	50	50
		4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang	15	15	n/a

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	n/a
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	50	50	50
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	50	50	50
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	50	50	50
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	50	50	50
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	50	50	n/a
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan	Orang	n/a	n/a	n/a

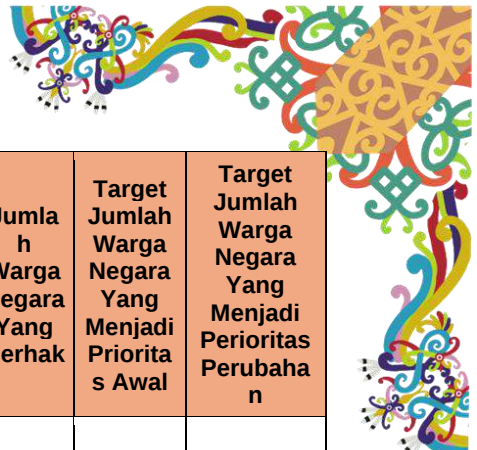
No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
		1 2	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	n/a	n/a	n/a
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	300	300	300
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	300	300	300
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	20	20	20
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	300	300	300
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50	50	n/a
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata,	Orang	25	25	25

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</i>				
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	50
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) <i>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym</i> <i>bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,</i> <i>bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>	Orang	300	300	300
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	300	300	300
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	300	300	300
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	300	300	300
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan	Orang	300	300	300

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)				
		1 2	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	n/a	n/a	n/a
		1 3	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	n/a	n/a	n/a
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	30	30	30
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	20	30
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	30	30	30
		3	Penyediaan permukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	Orang	30	30	30
		4	Penyediaan sandang	Orang	30	30	30

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>				
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30	30	30
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	30	30	30
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	30	30
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	30	30	30
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan	Orang	30	30	30

No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</i>				
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	30	30	30
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	30	30	30
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	30	30	30
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/KABUPATEN		Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	1.500	1.500	1.500
			<i>Ya Terjadi Bencana</i>				
		1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1.500	1.500	1.500
		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1.500	1.500	1.500
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung,	Orang	100	100	100



No	Jenis Layanan SPM		Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Awal	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas Perubahan
			<i>tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)</i>				
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	50	50	50
		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	50	50	50
			Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)				
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				
			<i>Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)</i>	form			

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 292/SK-BUP/HK/2025

4.6.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perhitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80% dan Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar

dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel IV-71 Realisasi Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Capaian Penerima Pelayanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan Dasar	IP SPM
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
5	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	100,00%	100,00%	100,00%
Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial				100,00% (Tuntas Paripurna)

Berdasarkan 5 jenis pelayanan SPM pada urusan sosial Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, Indeks Pencapaian SPM Urusan sosial Tahun 2025 yaitu 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Adapun penjabaran Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 185 Warga Negara 226 Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.

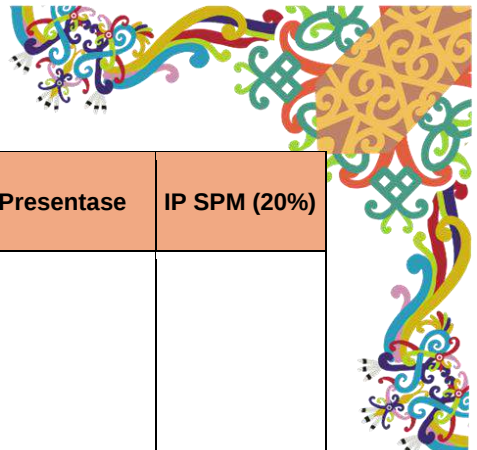
Tabel IV-72 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	185	226	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-73 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	185,00	185,00	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	20,00	20,00	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	185,00	226,00	100,00%	
4	Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	100,00	100,00	100,00%	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	25,00	34,00	100,00%	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	30,00	30,00	100,00%	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik	185,00	226,00	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	185,00	226,00	100,00%	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	185,00	226,00	100,00%	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	185,00	226,00	100,00%	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	185,00	226,00	100,00%	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	n/a	n/a	100,00%	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	n/a	n/a	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang

harus dilayani sebanyak 50 Warga Negara dan 75 Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

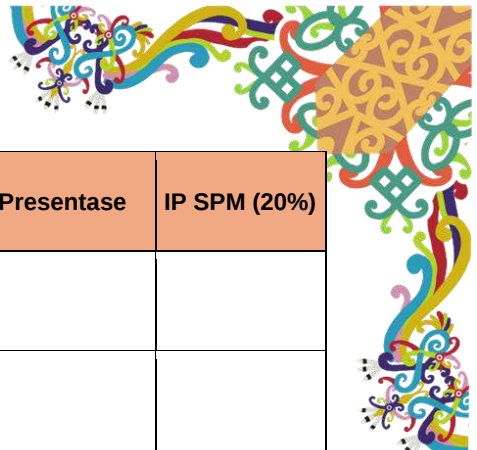
Tabel IV-74 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	50	75	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-75 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	50,00	50,00	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	10,00	20,00	100,00%	
3	Penyediaan permakanan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	50,00	75,00	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	15,00	15,00	100,00%	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	15,00	15,00	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	50,00	75,00	100,00%	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	50,00	75,00	100,00%	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	50,00	75,00	100,00%	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	50,00	75,00	100,00%	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	50,00	75,00	100,00%	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	n/a	n/a	100,00%	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	n/a	n/a	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 300 Warga Negara dan 518 Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

Tabel IV-76 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

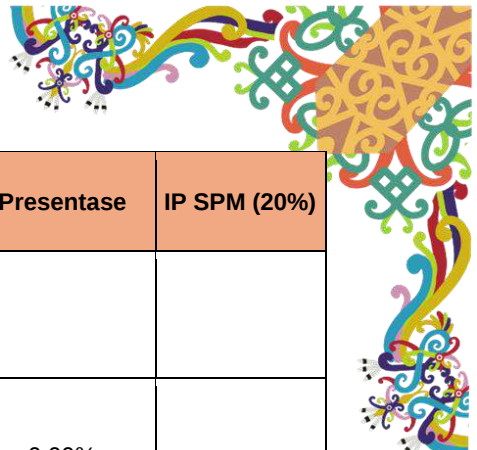
No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	300	518	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-77 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	300,00	300,00	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	20,00	20,00	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	300,00	518,00	100,00%	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	50,00	50,00	100,00%	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan	25,00	25,00	100,00%	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	50,00	50,00	100,00%	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	300,00	300,00	100,00%	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	300,00	300,00	100,00%	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	300,00	300,00	100,00%	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	300,00	300,00	100,00%	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	300,00	300,00	100,00%	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga	n/a	n/a	0,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	n/a	n/a	0,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Capaian Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%, dengan Jumlah sasaran yang harus dilayani sebanyak 30 Warga Negara dan 30 Warga Negara Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.

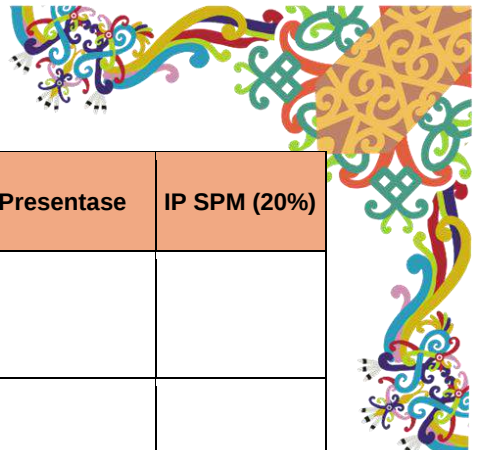
Tabel IV-78 Capaian Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	30	30	100,00%	80,00%

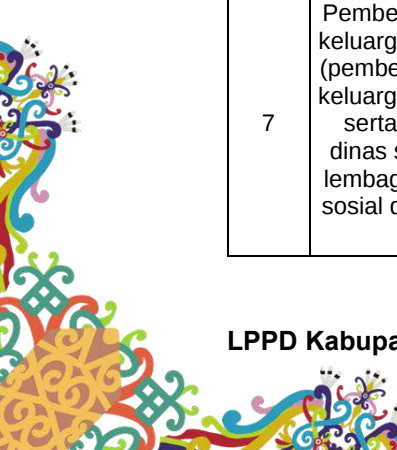
Capaian Mutu Pelayanan Dasar pada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%

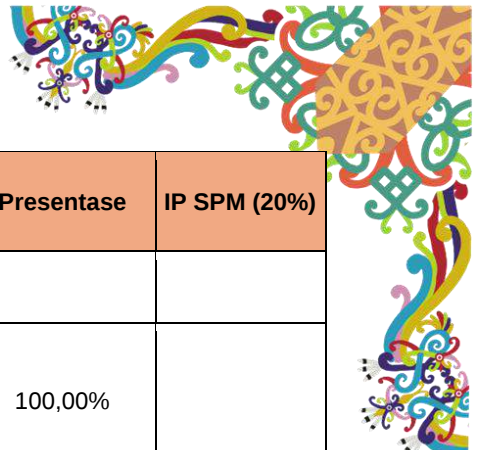
Tabel IV-79 Capaian Mutu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa	30,00	30,00	100,00%	



No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	30,00	30,00	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	30,00	30,00	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	30,00	30,00	100,00%	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	30,00	30,00	100,00%	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	30,00	30,00	100,00%	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	30,00	30,00	100,00%	





No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	30,00	30,00	100,00%	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	30,00	30,00	100,00%	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	30,00	30,00	100,00%	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	30,00	30,00	100,00%	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	30,00	30,00	100,00%	
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota

Capaian Pelayanan Dasar pada Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

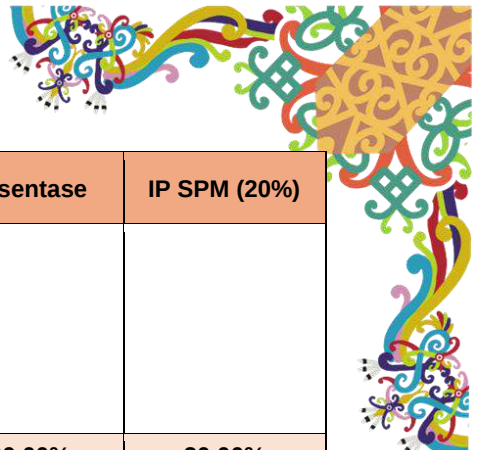
Tabel IV-80 Capaian Penerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (80%)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	1.500	6.954	100,00%	80,00%

Capaian Mutu Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100%.

Tabel IV-81 Capaian Mutu Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	1.500,00	7.034,00	100,00%	
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1.000,00	1.269,00	100,00%	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	100,00	132,00	100,00%	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	650,00	697,00	100,00%	
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan	25,00	69,00	100,00%	



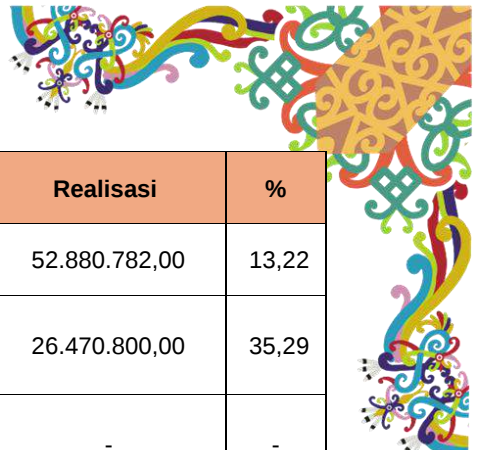
No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Presentase	IP SPM (20%)
	membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)				
Jumlah Rata – rata				100,00%	20,00%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-82 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Sosial

Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.818.500.000,00	4.004.515.580,00	3.412.331.680,00	85,21
	Penyediaan Permakanan	3.508.500.000,00	3.113.579.020,00	3.042.240.975,00	97,71
	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	28.006.400,00	23.730.000,00	84,73
	Penyediaan Alat Bantu	525.000.000,00	443.848.400,00	21.851.402,00	4,92
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000,00	153.457.160,00	135.432.003,00	88,25
	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	310.000.000,00	176.216.200,00	125.595.000,00	71,27
	Pemberian Layanan Kedaruratan	75.000.000,00	43.087.000,00	24.941.000,00	57,89
	Pemberian Layanan Rujukan	100.000.000,00	46.321.400,00	38.541.300,00	83,20
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.275.822.090,00	577.964.910,00	45,30
	Penyediaan makanan	600.000.000,00	725.822.090,00	470.905.046,00	64,88



Jenis Layanan	Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan sandang	400.000.000,00	400.000.000,00	52.880.782,00	13,22
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	150.000.000,00	75.000.000,00	26.470.800,00	35,29
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	-	-	-	-
	Pelayanan dukungan Psikososial	150.000.000,00	75.000.000,00	27.708.282,00	36,94
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial		6.118.500.000,00	5.280.337.670,00	3.990.296.590,00	75,57

4.6.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; yaitu seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- 2) Pekerja Sosial; yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
- 3) Penyuluh Sosial; yaitu seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 4) Relawan Sosial; yaitu Relawan Sosial; yaitu seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Selanjutnya pada Pasal 40 Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa setiap personil penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut harus tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai jenis SDM nya. Gambaran umum SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel IV-83 Dukungan Personil Penunjang SPM Urusan Sosial

No	Jenis SDM	Status SDM	Jumlah	Keterangan
1	Pekerja Sosial	PNS	3	2 orang Pejabat Struktural dan 1 orang Fungsional Ahli Muda
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial	Non PNS	82	Pendamping Sosial dari Kemensos
3	Penyuluh Sosial	PNS	3	Fungsional Ahli Muda
4	Penyuluh Sosial	Non PNS	30	Penyuluh Sosial Masyarakat
5	Relawan Sosial	Non PNS	48	Anggota TAGANA dan PSM

Data tersebut menunjukkan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara belum tersedia SDM Pekerja Sosial yang seharusnya memegang peran sentral dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial. Idealnya untuk setiap jenis pelayanan dasar diampu oleh 1 orang Pekerja Sosial, Mengacu pada ketentuan tersebut maka ketersediaan personal penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah kekurangan. Sebagai contoh bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 237 Desa/Kelurahan, sehingga setidaknya dibutuhkan minimal 237 relawan sosial. Setiap Puskesmas Desa/Kelurahan minimal memiliki 1 orang Relawan Sosial.

Penyuluh Sosial Fungsional yang ada di Dinas Sosial jumlahnya juga kurang jika dibandingkan dengan jumlah Kecamatan apalagi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika setiap kecamatan didampingi oleh 1 orang Penyuluh Sosial maka dibutuhkan setidaknya 20 orang Penyuluh Sosial Fungsional Ahli Muda. Keberadaan Penyuluh Sosial yang direkrut dan dibina oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur saat ini juga banyak yang sudah mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan ditempat lain yang lebih menjanjikan dari sisi ekonomi.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Pengumpulan Data

- Belum sepenuhnya memiliki database atau database belum sempurna.

Perhitungan Kebutuhan

- Terkait perencanaan dalam penerapan SPM belum tersedianya basis data untuk kelompok PPKS sedangkan penganggaran penerapan SPM untuk masing-masing sub kegiatan jumlahnya belum memadai di beberapa sub kegiatan.

Perencanaan dan Penganggaran

- 
- Dalam pelaksanaan penerapan SPM untuk penganggaran belum dilakukan pembagian/ pengelompokan bagi kelompok Dasar

Pelaksanaan

- Dalam pelaksanaan penerapan SPM untuk penganggaran belum dilakukan pembagian/ pengelompokan bagi kelompok Dasa

Permasalahan Lain-Lain

- Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat ditangani.
- Letak geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara di beberapa daerah desa pedalaman yang jauh dari pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh Dinas Sosial yang datang dan yang mengajukan permohonan serta yang diantar oleh pihak lain ke dinas sosial mengalami kesulitan atau hambatan.
- Data yang tidak memenuhi target dikarenakan masyarakat atau PPKS yang datang dan mengajukan permohonan layanan sesuai realita yang ada, secara target tidak memenuhi tetapi secara persentase telah memenuhi 100%.
- Kurangnya kerja sama lintas sektoral baik dari pihak swasta maupun pemerintah.
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimana Sumber Daya Manusia terbatas dan sarana prasarana belum memadai sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

4.7 Program Kegiatan dan Kegiatan

program dalam rangka pelaksanaan SPM dituangkan dalam program pada masing-masing perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah daerah sebagaimana nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Kekhususan PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
			Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
Kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten



Urusan SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
Trantibum Sub Urusan Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Trantibum Sub Urusan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Trantibum Sub Urusan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota



BAB V

PENUTUP

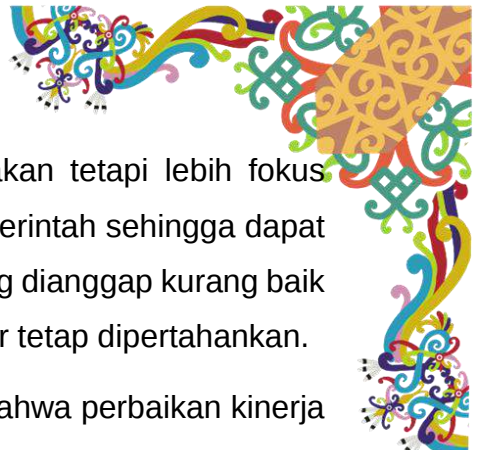
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun, disusun guna memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 memuat Capaian Kinerja pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Selain hal tersebut juga dilaporkan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tema arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi Dan Transformasi Pembangunan”

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 pada indikator kinerja makro telah mencapai kinerja yang ditargetkan dicapai pada akhir tahun RPJMD Tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia, penekanan angka Pengangguran, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan sesuai dengan target RPJMD. Sedangkan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih relatif tinggi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan upaya untuk menurunkannya pada tahun 2026.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah mencapai kinerja baik, hampir seluruh Indikator Kinerja Utama mencapai capaian kinerja di atas target yang ditetapkan. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2025 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yaitu jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.



Penetapan arah kebijakan bukan lagi mengejar peringkat akan tetapi lebih fokus kepada proses, pelaksanaan dan hasil dari setiap urusan pemerintah sehingga dapat diambil langkah menetapkan kebijakan urusan pemerintah yang dianggap kurang baik dapat ditingkatkan serta yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi fondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa akan datang dalam mewujudkan Kutai Kartanegara IDAMAN TERBAIK 2025-2029.

Demikian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan referensi utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.



KUKAR
DIJAMAN
TERBAIK



Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara